



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN



Pj. Bupati Seruyan
Drs. Djainuddin Noor, M.A.P



Pj. Sekretaris Daerah
dr. Bahrin Abbas, M.P.H

LKPD 2023 AUDITED

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga Kabupaten Seruyan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD TA 2023."

Pj. Bupati Seruyan
Drs. Djainuddin Noor, M.A.P

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 (per 31 Desember 2023) telah selesai disusun. Laporan Keuangan ini disusun dalam rangka memenuhi peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan Negara/Daerah yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, Kepala Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Demikian kami sampaikan, semoga dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban dalam usaha mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, Mei 2024


Pj. BUPATI SERUYAN,
DIAINUDDIN NOOR



BUPATI SERUYAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kuala Pembuang, Mei 2024



Pj. **BUPATI SERUYAN,**

ELAINUDDIN NOOR



BUPATI SERUYAN

Kuala Pembuang, 22 Mei 2024

Nomor : 900.1/420 /BKAD-III/V/2024
Lampiran : -
Hal : Surat Representasi Manajemen

Kepada
Yth. Kepala Perwakilan BPK-RI
Provinsi Kalimantan Tengah
di -
Palangka Raya

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023, Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023, Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Arus Kas yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK-RI selama pemeriksaan :

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyajikan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Pemerintah Kabupaten Seruyan memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau pinjaman atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kabupaten Seruyan telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2023 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undangan tentang Keuangan Negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini di buat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan.


Pj. BUPATI SERUYAN,
DJAINUDDIN NOOR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	ii
SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (<i>Audited</i>)	1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (<i>Audited</i>)	3
NERACA (<i>Audited</i>)	4
LAPORAN OPERASIONAL (<i>Audited</i>)	6
LAPORAN ARUS KAS (<i>Audited</i>)	9
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (<i>Audited</i>)	11
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	13
1.3 Informasi Umum Tentang Pemerintah Kabupaten Seruyan	15
1.4 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi	21
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	23
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	25
2.1 Ekonomi Makro	25
2.2 Kebijakan Keuangan	34
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	41
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	51
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	51
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan ...	55
3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD	68
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	69
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	69
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	69
4.3 Basis Pengakuan dan Pengukuran Unsur Penyusunan Laporan Keuangan	75
BAB V PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN	77
5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	77
5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	162

5.3	Penjelasan Pos-Pos Neraca	163
5.4	Penjelasa atas Pos-pos Laporan Operasional (LO)	233
5.5	Penjelasan Akun Laporan Arus Kas	265
5.6	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	270
BAB VI	PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (<i>SUBSEQUENT EVENT</i>)	273
BAB VII	PENUTUP	275
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Statistik Geografi dan Iklim Kabupaten Seruyan, Tahun 2022	19
Tabel 2.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Seruyan	26
Tabel 2.2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Seruyan	26
Tabel 2.3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Seruyan	27
Tabel 2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seruyan	27
Tabel 2.5	Gini Ratio Kabupaten Seruyan	29
Tabel 2.6	Indeks Pembangunan Manusia	29
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seruyan	30
Tabel 2.8	Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Wilayah Kabupaten Seruyan (miliar rupiah)	31
Tabel 2.9	PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	33
Tabel 2.10	Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah Per SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023	41
Tabel 2.11	Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Per SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023	45
Tabel 2.12	Rincian Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023	46
Tabel 2.13	Rincian Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023	47
Tabel 2.14	Rincian Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023	49
Tabel 3.1	Realisasi APBD TA 2023	51
Tabel 3.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022	53
Tabel 3.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023 dan TA 2022	54
Tabel 3.4	Rincian Realisasi Belanja Mandatory Spending Bidang Kesehatan	56
Tabel 3.5	Rincian Realisasi Belanja Mandatory Spending Bidang Pendidikan	57
Tabel 3.6	Rincian Realisasi Belanja Mandatory Spending Bidang Infrastruktur	58
Tabel 3.7	Realisasi Belanja SKPD sesuai Tugas dan Fungsi TA 2023	59
Tabel 3.8	Rincian Anggaran DAU TA 2023 dan 2022	65
Tabel 3.9	Rincian Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Kabupaten Seruyan	67
Tabel 5.1	Pendapatan – LRA	77
Tabel 5.2	Pendapatan Asli Daerah	79
Tabel 5.3	Pendapatan Pajak Daerah	81
Tabel 5.4	Rincian Pendapatan Pajak Daerah	83
Tabel 5.5	Rincian Pendapatan Pajak Daerah Pada SKPD	85

Tabel 5.6	Pendapatan Retribusi Daerah	86
Tabel 5.7	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah pada SKPD	87
Tabel 5.8	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	89
Tabel 5.9	Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah	90
Tabel 5.10	Rincian Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah	90
Tabel 5.11	Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada SKPD	92
Tabel 5.12	Rincian Pendapatan Transfer	93
Tabel 5.13	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	94
Tabel 5.14	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	94
Tabel 5.15	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	95
Tabel 5.16	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah	98
Tabel 5.17	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Desa	98
Tabel 5.18	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Desa pada masing-masing Desa di Kab.Seruyan	99
Tabel 5.19	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104
Tabel 5.20	Rincian Pendapatan Transfer Bagi Hasil	104
Tabel 5.21	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	105
Tabel 5.22	Rincian Belanja	106
Tabel 5.23	Belanja Operasi	107
Tabel 5.24	Belanja Pegawai	108
Tabel 5.25	Rincian Belanja Pegawai	109
Tabel 5.26	Rincian Belanja Pegawai pada SKPD	117
Tabel 5.27	Belanja Barang dan Jasa	119
Tabel 5.28	Rincian Belanja Barang dan Jasa	120
Tabel 5.29	Rincian Belanja Barang dan Jasa pada SKPD	129
Tabel 5.30	Belanja Subsidi	132
Tabel 5.31	Belanja Hibah	132
Tabel 5.32	Rincian Belanja Hibah	133
Tabel 5.33	Rincian Belanja Hibah pada SKPD	134
Tabel 5.34	Belanja Bantuan Sosial	135
Tabel 5.35	Rincian Belanja Bantuan Sosial	136
Tabel 5.36	Rincian Belanja Bantuan Sosial pada SKPD	136
Tabel 5.37	Belanja Modal	137
Tabel 5.38	Rincian Belanja Modal	138
Tabel 5.39	Belanja Modal SKPD	145
Tabel 5.40	Belanja Tak Terduga.....	148
Tabel 5.41	Rincian Belanja Tak Terduga	148
Tabel 5.42	Belanja Transfer	148

Tabel 5.43	Belanja Bagi Hasil	149
Tabel 5.44	Rincian Alokasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023	149
Tabel 5.45	Rincian Alokasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023	152
Tabel 5.46	Belanja Bantuan Keuangan	155
Tabel 5.47	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi	156
Tabel 5.48	Rincian Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	156
Tabel 5.49	Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	156
Tabel 5.50	Pembiayaan Netto	157
Tabel 5.51	Penerimaan Pembiayaan	157
Tabel 5.52	Rincian Penerimaan Pembiayaan yang dibatasi penggunaannya	158
Tabel 5.53	Pengeluaran Pembiayaan	159
Tabel 5.54	Rincian Pengeluaran Pembiayaan	159
Tabel 5.55	SiLPA Pemerintah Kabupaten Seruyan T.A. 2023 dan 2022	160
Tabel 5.56	Rincian SiLPA Pemerintah Kabupaten Seruyan T.A. 2023 dan 2022	160
Tabel 5.57	Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	161
Tabel 5.58	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	162
Tabel 5.59	Neraca	163
Tabel 5.60	Aset	164
Tabel 5.61	Rincian Aset Lancar	164
Tabel 5.62	Kas dan Setara Kas	165
Tabel 5.63	Kas di Kas Daerah	166
Tabel 5.64	Rincian Kas di Kas Daerah rincian kas yang dibatasi penggunaannya	167
Tabel 5.65	Kas di BLUD	168
Tabel 5.66	Kas Dana BOS	170
Tabel 5.67	Rincian Kas Dana BOS SD dan SMP di Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023	170
Tabel 5.68	Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP	178
Tabel 5.69	Piutang Pendapatan Daerah	179
Tabel 5.70	Piutang Pajak Daerah	179
Tabel 5.71	Piutang Pajak Reklame	180
Tabel 5.72	Rincian Piutang Pajak Reklame	180
Tabel 5.73	Mutasi Piutang Pajak Reklame	180
Tabel 5.74	Piutang Pajak Penerangan Jalan	181
Tabel 5.75	Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan	181
Tabel 5.76	Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan	181
Tabel 5.77	Piutang Pajak Air Tanah	181
Tabel 5.78	Rincian Piutang Pajak Air Tanah	182

Tabel 5.79	Mutasi Piutang Pajak Air Tanah	182
Tabel 5.80	Piutang PBB-P2	182
Tabel 5.81	Rincian Piutang Pajak PBBP2	183
Tabel 5.82	Mutasi Piutang PBB-P2	183
Tabel 5.83	Piutang BPHTB	184
Tabel 5.84	Mutasi Piutang BPHTB	184
Tabel 5.85	Piutang Retribusi Daerah	184
Tabel 5.86	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	185
Tabel 5.87	Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	185
Tabel 5.88	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	185
Tabel 5.89	Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	186
Tabel 5.90	Piutang Retrisbusi Pemakaian Kekayaan Daerah	186
Tabel 5.91	Mutasi Piutang Retrisbusi Pemakaian Kekayaan Daerah	186
Tabel 5.92	Rincian Piutang Retrisbusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2022 per SKPD ...	187
Tabel 5.93	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	187
Tabel 5.94	Piutang Hasil Sewa BMD	188
Tabel 5.95	Mutasi Piutang Hasil Sewa BMD	188
Tabel 5.96	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain	189
Tabel 5.97	Mutasi Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain	189
Tabel 5.98	Rincian Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain	189
Tabel 5.99	Mutasi Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain	190
Tabel 5.100	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	190
Tabel 5.101	Mutasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	190
Tabel 5.102	Piutang Pendapatan BLUD	191
Tabel 5.103	Mutasi Piutang Pendapatan BLUD	191
Tabel 5.104	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	192
Tabel 5.105	Mutasi Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	192
Tabel 5.106	Rincian Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	193
Tabel 5.107	Daftar Rincian Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	193
Tabel 5.108	Mutasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	193
Tabel 5.109	Daftar Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	194
Tabel 5.110	Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	194
Tabel 5.111	Daftar Rincian Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	195

Tabel 5.112	Mutasi Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) Transfer	195
Tabel 5.113	Daftar Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.....	196
Tabel 5.114	Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.....	196
Tabel 5.115	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang	197
Tabel 5.116	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada SKPD	198
Tabel 5.117	Persediaan	199
Tabel 5.118	Persediaan pada SKPD.....	199
Tabel 5.119	Investasi Jangka Panjang	202
Tabel 5.120	Investasi Jangka Panjang Permanen	202
Tabel 5.121	Rincian Aset Tetap	204
Tabel 5.122	Nilai Buku Aset Tetap	204
Tabel 5.123	Rincian Mutasi Tanah	205
Tabel 5.124	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin	207
Tabel 5.125	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	209
Tabel 5.126	Rincian Mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan	211
Tabel 5.127	Rincian Aset Tetap lainnya	213
Tabel 5.128	Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan	215
Tabel 5.129	Rincian Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Tahun Pengadaan	216
Tabel 5.130	Rincian Akumulasi Penyusutan.....	217
Tabel 5.131	Rincian Aset Lainnya	217
Tabel 5.132	Rincian Tagihan Jangka Panjang	218
Tabel 5.133	Rincian Aset Tidak Berwujud	219
Tabel 5.134	Rincian Aset Tidak Berwujud Pada SKPD	221
Tabel 5.135	Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pada SKPD	222
Tabel 5.136	Rincian Aset Lain-lain	223
Tabel 5.137	Rincian Aset Lain-lain pada SKPD	224
Tabel 5.138	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada SKPD	226
Tabel 5.139	Rincian Kewajiban	228
Tabel 5.140	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	229
Tabel 5.141	Rincian Pendapatan Diterima di Muka	229
Tabel 5.142	Rincian Utang Belanja	230
Tabel 5.143	Rincian Utang Belanja pada SKPD	230
Tabel 5.144	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	232
Tabel 5.145	Ekuitas	232
Tabel 5.146	Pendapatan - LO	233
Tabel 5.147	Pendapatan Asli Daerah - LO	234
Tabel 5.148	Pendapatan Pajak Daerah - LO	234

Tabel 5.149	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	235
Tabel 5.150	Pendapatan Retribusi Daerah - LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	236
Tabel 5.151	Lain-lain PAD yang Sah - LO	237
Tabel 5.152	Pendapatan Transfer - LO	238
Tabel 5.153	Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan LO	238
Tabel 5.154	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	239
Tabel 5.155	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	240
Tabel 5.156	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	241
Tabel 5.157	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	241
Tabel 5.158	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak - LO	242
Tabel 5.159	Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak / Sumber Daya Alam - LO	242
Tabel 5.160	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	243
Tabel 5.161	Pendapatan Bagi Hasil - LO	244
Tabel 5.162	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	244
Tabel 5.163	Pendapatan Hibah - LO	245
Tabel 5.164	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO.....	245
Tabel 5.165	Beban	246
Tabel 5.166	Beban Pegawai	247
Tabel 5.167	Beban Persediaan	247
Tabel 5.168	Beban Jasa	249
Tabel 5.169	Beban Pemeliharaan	253
Tabel 5.170	Beban Perjalanan Dinas	255
Tabel 5.171	Beban Hibah	260
Tabel 5.172	Beban Bantuan Sosial	261
Tabel 5.173	Beban Penyisihan Piutang	261
Tabel 5.174	Beban Lain-lain	262
Tabel 5.175	Beban Penyusutan dan Amortisasi	263
Tabel 5.176	Beban Transfer	263
Tabel 5.177	Rincian Beban Tak Terduga	265
Tabel 5.178	Arus Kas Bersih dan Aktivitas Operasi	266
Tabel 5.179	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	266
Tabel 5.180	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	267
Tabel 5.181	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	267
Tabel 5.182	Arus Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	268
Tabel 5.183	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	268
Tabel 5.184	Perhitungan Akhir Kas per 31 Desember 2023	269

Tabel 5.185	Koreksi Ekuitas Lainnya	270
Tabel 5.186	Koreksi Ekuitas per Rekening Objek	271

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Posisi Kabupaten Seruyan	20
------------	--------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Realisasi APBD T.A. 2023 dan T.A. 2022.....	52
Grafik 3.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023	53
Grafik 3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022	55
Grafik 5.1	Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan TA 2023	78
Grafik 5.2	Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan TA 2023	79
Grafik 5.3	Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan T.A. 2023	80
Grafik 5.4	Komposisi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan TA 2023	106
Grafik 5.5	Capaian Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan TA 2023	107



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.	1.261.538.366.239,00	1.195.613.198.853,29	94,77	1.112.241.971.242,55
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.	58.327.260.338,00	16.639.747.885,19	28,53	14.379.211.257,19
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.b.	5.613.581.556,00	3.660.960.661,86	65,22	3.126.459.134,68
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.c.	11.279.891.099,00	81.147.428,96	0,72	10.802.806.489,00
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.d.	46.006.077.413,00	51.576.423.834,28	112,11	54.124.554.822,92
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		121.226.810.406,00	71.958.279.810,29	59,36	82.433.031.703,79
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.e.	1.065.078.530.482,00	1.055.560.893.209,00	99,11	967.508.351.279,00
10	Dana Perimbangan	5.1.1.e.1.	970.590.874.482,00	961.073.237.209,00	99,02	869.303.514.879,00
11	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.e.2.	0,00	0,00	0,00	9.687.181.000,00
12	Dana Desa	5.1.1.e.3.	94.487.656.000,00	94.487.656.000,00	100,00	88.517.655.400,00
13	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.065.078.530.482,00	1.055.560.893.209,00	99,11	967.508.351.279,00
14	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.f.	75.213.025.351,00	68.074.025.834,00	90,51	51.808.471.884,76
15	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		75.213.025.351,00	68.074.025.834,00	90,51	51.808.471.884,76
16	Pendapatan Bantuan Keuangan		0,00	0,00	-	0,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		75.213.025.351,00	68.074.025.834,00	90,51	51.808.471.884,76
18	Total Pendapatan Transfer		1.140.291.555.833,00	1.123.634.919.043,00	98,54	1.019.316.823.163,76
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.g.	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	10.492.116.375,00
20	Pendapatan Hibah		20.000.000,00	20.000.000,00	-	5.596.704.000,00
21	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	4.895.412.375,00
22	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	10.492.116.375,00
23	JUMLAH PENDAPATAN		1.261.538.366.239,00	1.195.613.198.853,29	94,77	1.112.241.971.242,55
24	BELANJA	5.1.2.	1.426.324.481.054,00	1.246.264.293.643,77	87,38	1.071.565.463.005,51
25	BELANJA OPERASI					
26	Belanja Pegawai	5.1.2.a.	409.877.204.917,00	365.545.404.005,97	89,18	366.213.212.937,00
27	Belanja Barang Jasa	5.1.2.b.	454.402.384.851,00	368.195.904.183,30	81,03	329.372.640.412,31
28	Bunga	5.1.2.c.	0,00	0,00	-	0,00
29	Subsidi	5.1.2.d.	2.000.000.000,00	1.999.999.670,00	100,00	1.999.996.003,00
30	Hibah	5.1.2.e.	88.150.376.130,00	86.720.990.864,76	98,38	29.943.448.031,00
31	Bantuan Sosial	5.1.2.f.	10.435.431.500,00	9.986.539.800,00	95,70	19.478.374.200,00
32	Jumlah Belanja Operasi		964.865.397.398,00	832.448.838.524,03	86,28	747.007.671.583,31
33	BELANJA MODAL	5.1.2.g.	274.444.563.558,00	235.059.146.858,74	85,65	159.703.735.084,20
34	Belanja Tanah		0,00	0,00	-	0,00
35	Belanja Peralatan dan Mesin		49.155.244.890,00	45.974.881.069,00	93,53	48.875.920.215,00
36	Belanja Gedung dan Bangunan		66.400.088.146,00	57.398.957.903,04	86,44	31.520.633.822,00
37	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		155.985.636.774,00	130.384.672.314,70	83,59	77.887.865.307,20

NO.	URAIAN	REF	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
38	Belanja Aset Tetap Lainnya		2.464.093.748,00	870.194.072,00	35,31	1.419.315.740,00
39	Belanja Aset Lainnya		439.500.000,00	430.441.500,00	97,94	0,00
40	Jumlah Belanja Modal		274.444.563.558,00	235.059.146.858,74	85,65	159.703.735.084,20
41	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.h.	2.210.551.210,00	732.657.783,00	33,14	1.357.580.146,00
42	Belanja Tak Terduga		2.210.551.210,00	732.657.783,00	33,14	1.357.580.146,00
43	Jumlah Belanja Tak Terduga		2.210.551.210,00	732.657.783,00	33,14	1.357.580.146,00
44	BELANJA TRANSFER	5.1.2.i.	184.803.968.888,00	178.023.650.478,00	96,33	163.496.476.192,00
45	Belanja Bagi Hasil		6.394.084.188,00	1.727.173.530,00	27,01	1.479.323.792,00
46	Belanja Bantuan Keuangan		178.409.884.700,00	176.296.476.948,00	98,82	162.017.152.400,00
47	Jumlah Belanja Transfer		184.803.968.888,00	178.023.650.478,00	96,33	163.496.476.192,00
48	JUMLAH BELANJA DAERAH		1.426.324.481.054,00	1.246.264.293.643,77	87,38	1.074.565.462.005,54
49	SURPLUS/DEFISIT		(164.786.114.815,00)	(50.651.094.790,48)	30,74	40.676.508.237,04
50	PEMBIAYAAN	5.1.3.				
51	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.a.	177.748.614.815,00	181.903.486.780,35	102,34	154.189.478.543,31
52	Penggunaan SILPA		177.748.614.815,00	181.903.486.780,35	102,34	154.189.478.543,31
53	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	-	0,00
54	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	-	0,00
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	-	0,00
56	Jumlah Penerimaan		177.748.614.815,00	181.903.486.780,35	102,34	154.189.478.543,31
57	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.b.	12.962.500.000,00	12.962.500.000,00	100,00	12.962.500.000,00
58	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	-	0,00
59	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		12.962.500.000,00	12.962.500.000,00	100,00	12.962.500.000,00
60	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	-	0,00
61	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	-	0,00
62	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	-	0,00
63	Jumlah Pengeluaran		12.962.500.000,00	12.962.500.000,00	100,00	12.962.500.000,00
64	PEMBIAYAAN NETO	5.1.4.	164.786.114.815,00	168.940.986.780,35	102,52	141.226.978.543,31
65	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.5.	-	118.289.891.989,87	-	181.903.486.780,35

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Audited)
PER 31 DESEMBER 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	181.903.486.780,35	154.189.478.543,31
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	181.903.486.780,35	154.189.478.543,31
	Sub Total		0,00	0,00
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	118.289.891.989,87	181.903.486.780,35
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
5	Lain-lain		0,00	0,00
6	Saldo Anggaran Lebih Akhir (3 + 4 + 5)	5.2.4	118.289.891.989,87	181.903.486.780,35

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Pj. BUPATI SERUYAN,

DJAINUDDIN NOOR



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
NERACA (Audited)
PER 31 DESEMBER 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	2023	2022
1	ASET	5.3.1.	3.385.603.095.486,51	3.149.918.226.452,09
2	ASET LANCAR	5.3.1.a.	231.478.051.220,28	286.947.066.987,98
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.a.1.	107.133.712.573,19	170.205.279.326,08
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.a.2.	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.a.3.	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.a.4.	7.170.935.805,11	10.869.794.528,89
7	Kas Dana BOS	5.3.1.a.5.	189.367.300,57	338.448.675,66
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.a.6.	0,00	489.964.249,72
9	Kas Lainnya	5.3.1.a.7.	0,00	0,00
10	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.a.8.	3.795.876.311,00	0,00
11	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.a.9.	6.550.671.864,08	6.323.708.469,58
12	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.a.10.	171.469.031,70	159.041.400,00
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.a.11.	833.963.371,98	1.197.053.698,02
14	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.a.12.	9.301.461.105,00	12.649.584.665,88
15	Piutang Lainnya	5.3.1.a.13.	0,00	44.910.000,00
16	Penyisihan Piutang	5.3.1.a.14.	(3.586.781.709,77)	(2.905.935.607,91)
17	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.a.15.	51.296.345,00	267.838.607,52
18	Persediaan	5.3.1.a.16.	99.866.079.222,42	87.307.378.974,54
19	Jumlah Aset Lancar		231.478.051.220,28	286.947.066.987,98
20	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.b.	92.793.071.037,00	80.443.980.424,00
21	Investasi Permanen	5.3.1.b.1.	92.793.071.037,00	80.443.980.424,00
22	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		92.793.071.037,00	80.443.980.424,00
23	Jumlah Investasi Permanen		92.793.071.037,00	80.443.980.424,00
24	Jumlah Investasi Jangka Panjang		92.793.071.037,00	80.443.980.424,00
25	ASET TETAP	5.3.1.c.	2.791.763.533.446,07	2.664.992.574.990,09
26	Tanah	5.3.1.c.1.	223.764.846.076,26	201.272.227.716,26
27	Peralatan dan Mesin	5.3.1.c.2.	542.510.733.426,91	507.663.213.180,63
28	Gedung dan Bangunan	5.3.1.c.3.	1.013.131.619.242,40	957.633.320.268,76
29	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.c.4.	3.176.719.117.740,25	3.117.629.265.576,59
30	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.c.5.	119.955.527.396,49	42.001.641.793,00
31	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.c.6.	127.499.305.847,68	122.011.558.945,68
32	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.c.7.	(2.411.817.616.283,92)	(2.283.218.652.490,83)
33	Jumlah Aset Tetap		2.791.763.533.446,07	2.664.992.574.990,09
34	ASET LAINNYA	5.3.1.d.	269.568.439.783,16	117.534.604.050,02
35	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.d.1.	51.515.664.699,16	51.606.097.170,02
36	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.d.2.	11.777.418.990,00	11.228.026.090,00
37	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.d.3.	(5.739.845.906,00)	(4.981.747.797,00)
38	Aset Lain-Lain	5.3.1.d.4.	76.983.218.334,30	70.115.571.016,00
39	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.d.5.	(47.866.251.334,30)	(41.148.159.037,00)
40	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.d.6.	182.898.235.000,00	30.714.816.608,00
41	Jumlah Aset Lainnya		269.568.439.783,16	117.534.604.050,02

No.	Uraian	Ref	2023	2022
42	JUMLAH ASET		3.385.603.095.486,51	3.149.918.226.452,09
43	KEWAJIBAN	5.3.2.	3.715.758.098,80	5.774.095.442,60
44	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.	3.715.758.098,80	5.774.095.442,60
45	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.a.	0,00	0,00
46	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.b.	14.539.727,00	53.099.087,97
47	Utang Belanja	5.3.2.1.c.	3.007.828.206,85	5.681.385.631,63
48	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.d.	693.390.164,95	39.610.723,00
49	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.715.758.098,80	5.774.095.442,60
50	EKUITAS			
51	EKUITAS			
52	EKUITAS/EKUITAS DANA	5.3.3.	3.381.887.337.387,71	3.144.144.131.009,49
53	JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA		3.381.887.337.387,71	3.144.144.131.009,49
54	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.385.603.095.486,51	3.149.918.226.452,09

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.



 P. BUPATI SERUYAN,

 BJAINUDDIN NOOR



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
LAPORAN OPERASIONAL (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	Ref	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.				
2	PENDAPATAN - LO	5.4.1.	1.253.608.819.872,50	1.039.155.860.530,50	214.452.959.342,00	20,64
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.a.	71.950.576.288,56	64.704.868.576,72	7.245.707.711,84	11,20
4	Pajak Daerah-LO	5.4.1.a.1.	16.898.975.464,99	13.406.996.712,97	3.491.978.752,02	26,05
5	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.a.2.	3.737.384.913,56	3.221.541.931,01	515.842.982,55	16,01
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.a.3.	81.147.428,96	10.802.806.489,00	(10.721.659.060,04)	(99,25)
7	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.a.4.	51.233.068.481,05	37.273.523.443,74	13.959.545.037,31	37,45
8	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		71.950.576.288,56	64.704.868.576,72	7.245.707.711,84	11,20
9	PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.b.	1.177.982.557.874,12	958.934.320.315,78	219.048.237.558,34	22,84
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.4.1.b.1.	1.113.256.655.601,00	900.018.331.487,00	213.238.324.114,00	23,69
11	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	5.4.1.b.1.1.	55.546.371.251,00	69.566.378.292,00	(14.020.007.041,00)	(20,15)
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	5.4.1.b.1.2.	83.910.770.923,00	66.732.157.617,00	17.178.613.306,00	25,74
13	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	5.4.1.b.1.3.	580.006.640.427,00	559.137.113.257,00	20.869.527.170,00	3,73
14	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	5.4.1.b.1.4.	393.792.873.000,00	204.582.682.321,00	189.210.190.679,00	92,49
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.113.256.655.601,00	900.018.331.487,00	213.238.324.114,00	23,69
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.4.1.b.2.	0,00	9.687.181.000,00	(9.687.181.000,00)	(100,00)
17	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	5.4.1.b.2.1.	0,00	9.687.181.000,00	(9.687.181.000,00)	(100,00)
18	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan		0,00	0,00	0,00	-
19	Dana Keistimewaan-LO		0,00	0,00	0,00	-
20	Dana Desa-LO	5.4.1.b.2.2.	0,00	0,00	-	-
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya		-	9.687.181.000,00	(9.687.181.000,00)	(100,00)
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.4.1.b.3.	64.725.902.273,12	49.228.807.828,78	15.497.094.444,34	31,48
23	Pendapatan Bagi Hasil-LO	5.4.1.b.3.1.	64.725.902.273,12	49.228.807.828,78	15.497.094.444,34	31,48
24	Bantuan Keuangan	5.4.1.b.3.2.	0,00	0,00	0,00	-
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah		64.725.902.273,12	49.228.807.828,78	15.497.094.444,34	31,48
26	Jumlah Pendapatan Transfer		1.177.982.557.874,12	958.934.320.315,78	219.048.237.558,34	22,84
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.1.c.	3.675.685.709,82	15.516.671.638,00	(11.840.985.928,18)	(76,31)
28	Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.c.1.	3.675.685.709,82	10.621.259.263,00	(6.945.573.553,18)	(65,39)
29	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.c.2.	-	4.895.412.375,00	(4.895.412.375,00)	(100,00)
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah		3.675.685.709,82	15.516.671.638,00	(11.840.985.928,18)	(76,31)
31	JUMLAH PENDAPATAN - LO		1.253.608.819.872,50	1.039.155.860.530,50	214.452.959.342,00	20,64

No	URAIAN	Ref	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
32	BEBAN	5.4.2.	1.118.259.586.403,79	1.033.960.754.457,00	84.298.831.946,79	8,15
33	BEBAN OPERASI					
34	Beban Pegawai	5.4.2.a.	363.531.609.007,87	359.371.179.349,68	4.160.429.658,19	1,16
35	Beban Persediaan	5.4.2.b.	51.543.248.627,13	55.268.733.963,75	(3.725.485.336,62)	(6,74)
36	Beban Jasa	5.4.2.c.	191.639.234.597,33	139.845.549.437,17	51.793.685.160,16	37,04
37	Beban Pemeliharaan	5.4.2.d.	14.282.326.427,67	11.170.231.934,00	3.112.094.493,67	27,86
38	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.e.	84.794.436.356,70	62.942.748.932,87	21.851.687.423,83	34,72
39	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.2.f.	0,00	9.822.401.560,00	- 9.822.401.560,00	100,00
40	Beban Barang dan Jasa BOS	5.4.2.g.	0,00	15.305.036.556,19	- 15.305.036.556,19	100,00
41	Beban Barang dan Jasa BLUD	5.4.2.h.	0,00	17.523.288.715,11	- 17.523.288.715,11	100,00
42	Beban Bunga	5.4.2.i.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beban Subsidi	5.4.2.j.	1.999.999.670,00	1.999.996.003,00	3.667,00	0,00
44	Beban Hibah	5.4.2.k.	93.819.002.582,19	38.218.507.606,00	55.600.494.976,19	145,48
45	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.l.	9.986.539.800,00	18.173.910.800,00	(8.187.371.000,00)	(45,05)
46	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.m.	698.784.792,08	(602.488.405,60)	1.301.273.197,68	(215,98)
47	Beban Lain-lain	5.4.2.n.	2.989.603.045,86	3.401.826.528,89	(412.223.483,03)	(12,12)
48	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.o.	219.438.807.018,96	226.541.010.683,94	(7.102.203.664,98)	(3,14)
49	Beban Transfer	5.4.2.p.	83.535.994.478,00	74.978.820.792,00	8.557.173.686,00	11,41
50	Jumlah Beban Operasi		1.118.259.586.403,79	1.033.960.754.457,00	84.298.831.946,79	8,15
51	JUMLAH BEBAN		1.118.259.586.403,79	1.033.960.754.457,00	84.298.831.946,79	8,15
52	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		135.349.233.468,71	5.195.106.073,50	130.154.127.395,21	2.505,32
53	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>	5.4.3.	(613.409.387,00)	(1.391.820.203,00)	778.410.816,00	(55,93)
54	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	5.4.3.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		0,00	0,00	0,00	-
56	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	0,00	0,00	-
57	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	-
58	Jumlah Surplus Non Operasional - LO		0,00	0,00	0,00	-
59	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.3.b.				
60	Defisit Penjualan Aset Non lancar					
61	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang					
62	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		613.409.387,00	1.391.820.203,00	(778.410.816,00)	(55,93)
63	Jumlah Defisit Non Operasional - LO		613.409.387,00	1.391.820.203,00	(778.410.816,00)	(55,93)
64	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON		(613.409.387,00)	(1.391.820.203,00)	778.410.816,00	(55,93)
65	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		134.735.824.081,71	3.803.285.870,50	130.932.538.211,21	3.442,62
66	<u>POS TAK TERDUGA</u>	5.4.4.	(732.657.783,00)	(1.357.580.146,00)	624.922.363,00	(46,03)
67	PENDAPATAN Tak Terduga	5.4.4.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pendapatan Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	-

No	URAIAN	Ref	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
69	Jumlah Pendapatan Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	-
70	BEBAN TAK TERDUGA	5.4.4.b.	732.657.783,00	1.357.580.146,00	(624.922.363,00)	(46,03)
71	Beban Tak Terduga		732.657.783,00	1.357.580.146,00	(624.922.363,00)	(46,03)
72	Jumlah Beban Tak Terduga		732.657.783,00	1.357.580.146,00	(624.922.363,00)	(46,03)
73	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	5.4.4.c.	(732.657.783,00)	(1.357.580.146,00)	624.922.363,00	(46,03)
74	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.5.	134.003.166.298,71	2.445.705.724,50	131.557.460.574,21	5.379,12

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.



Pj. BUPATI SERUYAN,

DJAINUDDIN NOOR



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
LAPORAN ARUS KAS (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.		
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		16.639.747.885,19	14.379.211.257,19
4	Penerimaan Retribusi Daerah		3.660.960.661,86	3.126.459.134,68
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		81.147.428,96	10.802.806.489,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		51.576.423.834,28	54.124.554.822,92
7	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat		1.055.560.893.209,00	967.508.351.279,00
8	Penerimaan Transfer Antar Daerah		68.074.025.834,00	51.808.471.884,76
9	Penerimaan Hibah		20.000.000,00	5.596.704.000,00
10	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	4.895.412.375,00
11	Jumlah Arus Masuk Kas		1.195.613.198.853,29	1.112.241.971.242,55
12	Arus Keluar Kas			
13	Pembayaran Pegawai		365.545.404.005,97	366.213.212.937,00
14	Pembayaran Barang dan Jasa		368.195.904.183,30	329.372.640.412,31
15	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
16	Pembayaran Subsidi		1.999.999.670,00	1.999.996.003,00
17	Pembayaran Hibah		86.720.990.864,76	29.943.448.031,00
18	Pembayaran Bantuan Sosial		9.986.539.800,00	19.478.374.200,00
19	Pembayaran Tak Terduga		732.657.783,00	1.357.580.146,00
20	Pembayaran Bagi Hasil		1.727.173.530,00	1.479.323.792,00
21	Pembayaran Bantuan Keuangan		176.296.476.948,00	162.017.152.400,00
22	Jumlah Arus Keluar Kas		1.011.205.146.785,03	911.861.727.921,31
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		184.408.052.068,26	200.380.243.321,24
24	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.	(248.021.646.858,74)	(172.666.235.084,20)
25	Arus Masuk Kas			
26	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
27	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
28	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
29	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	-
30	Arus Keluar Kas			
31	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
32	Perolehan Tanah		0,00	0,00
33	Perolehan Peralatan dan Mesin		45.974.881.069,00	48.875.920.215,00
34	Perolehan Gedung dan Bangunan		57.398.957.903,04	31.520.633.822,00
35	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		130.384.672.314,70	77.887.865.307,20
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya		870.194.072,00	1.419.315.740,00
37	Perolehan Aset Lainnya		430.441.500,00	0,00
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		12.962.500.000,00	12.962.500.000,00
39	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00

No.	Uraian	Ref	2023	2022
40	Jumlah Arus Keluar Kas		248.021.646.858,74	172.666.235.084,20
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan		(248.021.646.858,74)	(172.666.235.084,20)
42	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3.	0,00	0,00
43	Arus Masuk Kas			
44	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
45	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
46	Arus Keluar Kas			
47	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
48	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		-	-
50	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4.		
51	Arus Masuk Kas			
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		70.645.282.805,00	60.687.507.078,00
53	Jumlah Arus Masuk Kas		70.645.282.805,00	60.687.507.078,00
54	Arus Keluar Kas			
55	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		70.645.282.805,00	60.687.507.078,00
56	Jumlah Arus Keluar Kas		70.645.282.805,00	60.687.507.078,00
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		0,00	0,00
58	Kenaikan / (Penurunan) Kas		(63.613.594.790,48)	27.714.008.237,04
59	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		181.903.486.780,35	154.189.478.543,31
60	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		118.289.891.989,87	181.903.486.780,35
61	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		107.133.712.573,19	170.205.279.326,08
62	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
63	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
64	Saldo Akhir Kas Dana BOS		189.367.300,57	338.448.675,66
65	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP		-	489.964.249,72
65	Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas		3.795.876.311,00	-
66	Saldo Akhir Kas di BLUD		7.170.935.805,11	10.869.794.528,89
67	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	-
68	Kas Lainnya		-	-
69	Saldo Akhir Kas	5.5.5.	118.289.891.989,87	181.903.486.780,35

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

PJ. BUPATI SERUYAN,



DJAINUDDIN NOOR



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	5.6.1.	3.144.144.131.009,49	3.326.674.125.691,42
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2.	134.003.166.298,71	2.445.705.724,50
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3.	103.740.040.079,51	(184.975.700.406,43)
	KOREKSI EKUITAS PIUTANG TRANSFER		0,00	-
	KOREKSI EKUITAS ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN		0,00	-
	KOREKSI EKUITAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP		0,00	-
	KOREKSI EKUITAS TUNTUTAN GANTI RUGI		0,00	-
	KOREKSI EKUITAS ASET LAINNYA		-	-
	KOREKSI EKUITAS AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN		0,00	-
	KOREKSI EKUITAS LAINNYA		103.740.040.079,51	(184.975.700.406,43)
4	EKUITAS AKHIR	5.6.4.	3.381.887.337.387,71	3.144.144.131.009,49

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Bj. BUPATI SERUYAN,

DJAINUDDIN NOOR



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan tahun 2023 ini disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 391 dan 392 bahwa “*Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah, dan memuat paling sedikit informasi anggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan*”. Pemerintah Kabupaten Seruyan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran (TA) 2023 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2023.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan yang disusun ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



LKPD Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (antara lain masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan selama Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 yaitu antara lain untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumberdaya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);



- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor Tahun 2020 Nomor 34, Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 27);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 63);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
- t. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56);
- u. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 33 Tahun 2023).

1.3. Informasi Umum tentang Pemerintah Kabupaten Seruyan

Kabupaten Seruyan mempunyai Motto **“Gawi Hatantiring”** atau **“Bekerja Bersama-sama”**, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Juli 2002 di Jakarta.

Kuala Pembuang adalah Ibukota, Pusat Pemerintahan dan Pusat Perekonomian dari Kabupaten Seruyan, yang pada awalnya merupakan Kelurahan sebelum dimekarkan menjadi dua Kelurahan, yaitu Kelurahan Kuala Pembuang Satu dan Kelurahan Kuala Pembuang Dua, Pemerintahan di Kuala Pembuang sangat unik karena tidak diatur oleh satu pemerintahan tunggal melainkan setiap lurah mengatur kelurahannya masing-masing. Kuala pembuang, selain menjadi ibukota kabupaten, juga menjadi ibukota dari Kecamatan Seruyan Hilir.



1.3.1 Sejarah Singkat Kabupaten Seruyan

a. Pemerintahan “*Onderdistrictshoofd*”

1) SEBELUM TAHUN 1880

Wilayah Seruyan terdiri atas 13 kampung yang waktu itu disebut “*Shoofd*” di mana Pejabat Pemerintahannya disebut “Asisten Kiai” sedangkan kedudukan pemerintahannya berada di Sampit. Kampung-kampung tersebut adalah Kampung Beratih (sekarang Kuala Pembuang), Kampung Telaga Pulang, Kampung Sembuluh, Kampung Pembuang Hulu, Kampung Asam, Kampung Durian Kait, Kampung Sandul, Kampung Sukamandang, Kampung Rantau Pulut, Kampung Tumbang Kale, Kampung Tumbang Manjul, Kampung Sepundu Hantu, dan Kampung Tumbang Darap.

2) TAHUN 1880

Karena pesatnya perkembangan dan pertumbuhan kampung-kampung tersebut, maka ditempatkan Pemerintahan “*Onderdistrictshoofd*” dengan Ibu Kota Telaga Pulang.

3) TAHUN 1902

Pemerintahan “*Onderdistrictshoofd*” yang kala itu dengan Ibukota di Telaga Pulang pindah ke Pembuang Hulu.

4) TAHUN 1905

Pemerintahan “*Onderdistrictshoofd*” dengan Ibukota dipindahkan ke Kuala Pembuang, karena letaknya di pesisir selatan maka dianggap strategis terutama dari segi perhubungan dan perekonomian serta pemerintahan saat itu.

b. Pemerintahan Kecamatan Seruyan

1) TAHUN 1946

Pemerintahan “*Onderdistrictshoofd*” diubah menjadi Kecamatan dengan nama Kecamatan Seruyan dengan Ibu Kota Pemerintahannya di Kuala Pembuang.

2) TAHUN 1947

Pada tahun ini Wilayah Kecamatan Seruyan dibagi menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu terdiri dari :

- a. Kecamatan Seruyan Hilir dengan Ibukota Kuala Pembuang dan menjadi Wilayah Hukum Kewedanaan Sampit Barat.
- b. Kecamatan Seruyan Hulu dengan Ibu Kota Rantau Pulut dan menjadi Wilayah Hukum Kewedanaan Sampit Utara.

Wilayah Seruyan kala itu termasuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (sebelum terbentuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1957) dan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin (sebelum terbagi



menjadi dua Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat).

3) TAHUN 1958

Wilayah Kecamatan Seruyan Hulu dibagi menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Seruyan Tengah dengan Ibukota Rantau Pulut.
- b. Kecamatan Seruyan Hulu dengan Ibukota Pembuang Hulu.

4) TAHUN 1961

Wilayah Kecamatan Seruyan Hilir dibagi menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Seruyan Hilir dengan Ibukota Kuala Pembuang.
- b. Kecamatan Hanau dengan Ibukota Pembuang Hulu.

5) TAHUN 1963

Wilayah Kecamatan Seruyan Hilir dibagi menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Seruyan Hilir dengan Ibukota Kuala Pembuang.
- b. Kecamatan Danau Sembuluh dengan Ibukota Telaga Pulang.

c. Pemerintahan Kewedanaan Seruyan

Dengan semakin pesatnya perkembangan pemekaran kecamatan, maka dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 06/Pem.330-c-2-3/1963, tanggal 1 Juni 1963 tentang Penetapan Kewedanaan Seruyan. Kewedanaan Seruyan membawahi 5 (lima) wilayah kecamatan dengan Ibukota Kuala Pembuang. Di antara 5 (lima) kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Seruyan Hilir dengan Ibukota Kuala Pembuang.
- 2) Kecamatan Danau Sembuluh dengan Ibukota Telaga Pulang.
- 3) Kecamatan Hanau dengan Ibukota Pembuang Hulu.
- 4) Kecamatan Seruyan Tengah dengan Ibukota Rantau Pulut.
- 5) Kecamatan Seruyan Hulu dengan Ibukota Tumbang Manjul.

d. Pemerintahan Pembantu Bupati Kotawaringin Timur Wilayah Seruyan

Pemerintahan Pembantu Bupati Kotawaringin Timur Wilayah Seruyan terbentuk berdasarkan :

- 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1979, tanggal 28 April 1979 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kapuas untuk Wilayah Gunung Mas, Pembantu Bupati Kotawaringin Timur untuk Wilayah Katingan, Pembantu Bupati Kotawaringin Timur untuk Wilayah Seruyan, Pembantu Bupati Barito Utara untuk Wilayah Murung Raya, Pembantu Bupati Barito Selatan untuk Wilayah Barito Timur.



- 2) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 148/KPTS/1979, tanggal 18 Juni 1979 tentang Penghapusan Status Wilayah dan Kantor Daerah Tingkat II Administratif Gunung Mas, Katingan, Murung Raya dan Barito Timur serta Status Wilayah dan Kantor Persiapan Daerah Tingkat II Seruyan.
- 3) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 247/KPTS/1980, tanggal 02 Juli 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati Kotawaringin Timur untuk Wilayah Seruyan.
Pemerintahan Pembantu Bupati (Tubup) Kotawaringin Timur Wilayah Seruyan dengan Ibu Kota Kuala Pembuang.

e. Pemerintahan Kabupaten Seruyan

Pemerintahan Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180), yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Juli 2002 di Jakarta. Ibukota Kabupaten Seruyan berada di Kuala Pembuang yang termasuk dalam Kecamatan Seruyan Hilir.

1.3.2 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Nama-nama Bupati yang menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|-------------------|
| a) Drs. H. Loper H. Anggus (Pj. Bupati) | : | Periode 2002-2003 |
| b) DR. (HC). H. Darwan Ali | : | Periode 2003-2008 |
| c) DR. (HC). H. Darwan Ali | : | Periode 2008-2013 |
| d) Sudarsono, S.H. | : | Periode 2013-2018 |
| e) Yulhaidir | : | Periode 2018-2023 |

Nama-nama Wakil Bupati yang menjabat sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut.

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| a) H. Rasyidi Harun | : | Periode 2003-2008 |
| b) Ir. H. Tarwidi Tamasaputra | : | Periode 2008-2013 |
| c) Yulhaidir | : | Periode 2013-2018 |
| d) Hj. Iswanti S.E., M.M. | : | Periode 2018-2023 |



Dalam Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Seruyan menyelenggarakan urusan pemerintahan baik Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintah maupun Urusan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan urusan tersebut dimaksud dilaksanakan oleh SPKD dan Kecamatan yang terdiri atas 19 (Sembilan belas) Dinas, 6 (enam) Badan, 1 (satu) Satuan, 2 (dua) Sekretariat, 1 (satu) Inspektorat, 10 (sepuluh) Kecamatan, dan 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (Dimana 1 rumah sakit daerah pada bulan April Tahun 2023 resmi berpindah status menjadi rumah sakit daerah Provinsi Kalimantan Tengah).

1.3.3 Letak Geografis

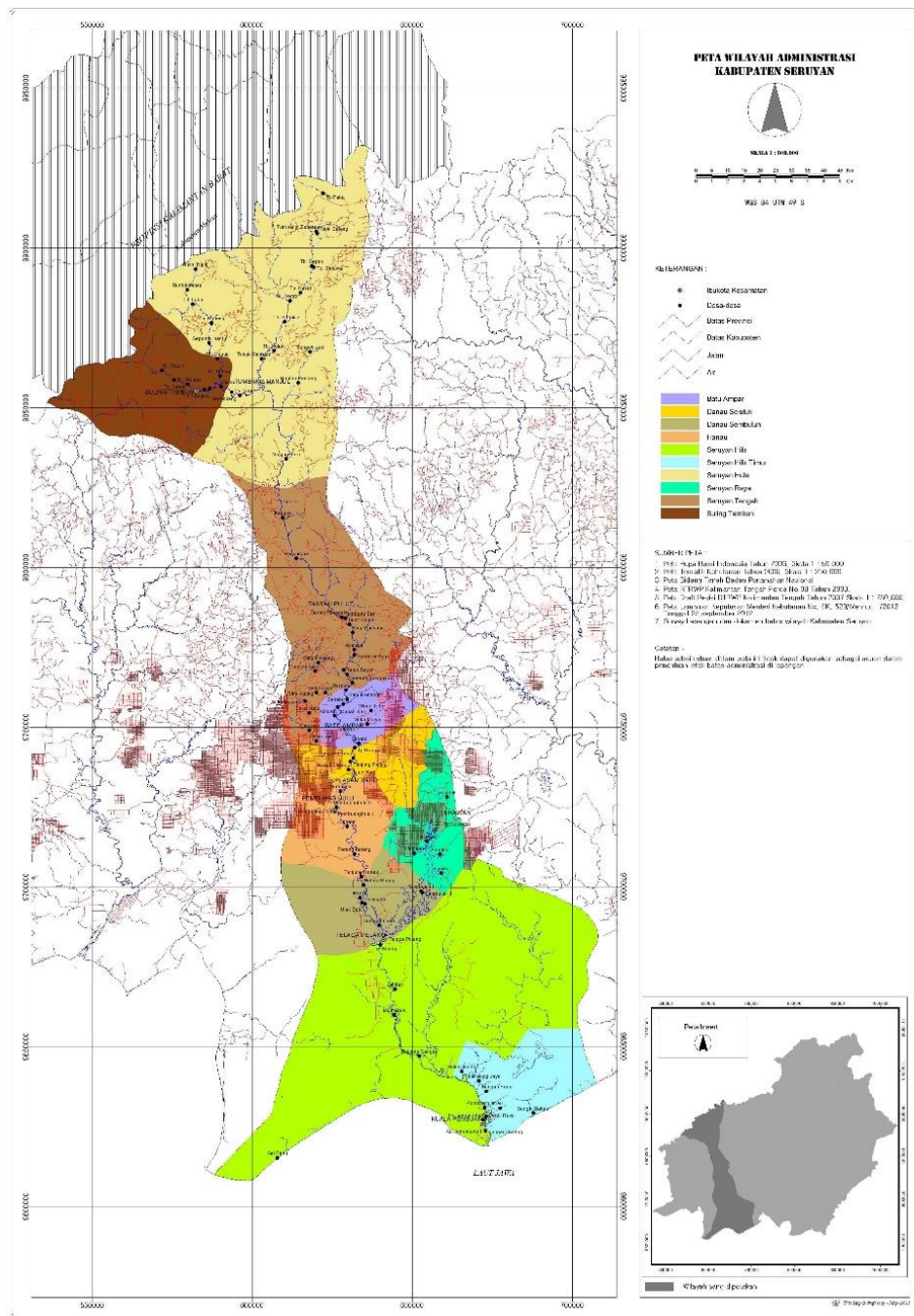
Kabupaten Seruyan memiliki bentuk wilayah yang memanjang, mengikuti aliran Sungai Seruyan yang panjangnya mencapai 350 km, dengan Kecamatan Seruyan Hilir yang merupakan ibukota kabupaten terletak dibagian hilir Sungai Seruyan. Hal ini menyebabkan rata-rata jarak dari ibukota kecamatan menuju ibukota Kabupaten Seruyan cukup jauh, yakni sekitar 281,4 km. Kabupaten ini terletak pada posisi astronomi antara 00 77' Lintang Selatan dan 30 56' Lintang Selatan dan antara 1110 49' Bujur Timur dan 1120 84' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut: Kabupaten Melawi di sebelah Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah selatan, serta Kabupaten Lamandau dan Kotawaringin Barat di sebelah barat. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa, menyebabkan Kabupaten Seruyan memiliki iklim tropis yang diisi oleh musim hujan dan musim kemarau secara bergantian. Meski demikian, indikator cuaca seperti curah hujan dan hari hujan memiliki nilai yang cukup bervariasi antar kecamatan. Seruyan Hilir memiliki curah hujan dan hari hujan yang relatif lebih rendah dan pendek dibandingkan wilayah lain yang terletak jauh dari pesisir laut, misalnya daerah Danau Seluluk dan sekitarnya.

Tabel 1.1
Statistik Geografi dan Iklim Kabupaten Seruyan, Tahun 2022

Uraian	Satuan	Nilai
(1)	(2)	(3)
Luas	Km ²	16404
Panjang Sungai	Km ²	350
Jarak dari kecamatan terjauh ke ibukota Kabupaten	Km ²	514
Curah Hujan Tertinggi	mm	753

Sumber : Publikasi Seruyan Dalam Angka 2023

Gambar 1.1
Posisi Kabupaten Seruyan



Dilihat dari topografinya, lahan di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki kemiringan lereng datar hingga berbukit. yaitu dengan kemiringan lereng berkisar antara 0%-60%. Lahan dengan topografi datar (kelas lereng 2%), berombak (kelas lereng 2%-8%), hingga bergelombang (kelas lereng 9%-15%) umumnya terdapat di bagian selatan wilayah Kabupaten Seruyan dan wilayah yang dekat pinggir sungai. Lahan dengan topografi berbukit kecil (kelas lereng 16%-25%) umumnya dijumpai di bagian tengah Kabupaten Seruyan, sedangkan lahan dengan topografi berbukit (kelas



lereng >40%) pada umumnya dijumpai di bagian Utara wilayah Kabupaten Seruyan, yaitu merupakan daerah limitasi untuk pengembangan.

1.3.4 Demografi

Penduduk merupakan aset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara optimal. Kendati begitu, mereka juga bisa menjadi beban pembangunan jika tidak dibarengi dengan kualitas penduduk (SDM) yang memadai pada wilayah/daerah bersangkutan. Berdasarkan angka proyeksi penduduk tahun 2022 Secara umum, Kabupaten Seruyan didominasi oleh penduduk usia produktif atau penduduk usia 15-64 tahun, dengan komposisi terbesar berada pada usia 30 – 34 tahun. Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa baik mayoritas penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, didominasi oleh kelompok umur 30 – 34 tahun. Tingginya proporsi penduduk usia produktif akan membantu menekan angka dependency ratio, yaitu indikator makro yang menunjukkan tingkat kebergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Dependency Rasio Kabupaten Seruyan pada tahun 2021 mencapai 42 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif (berada di rentang usia 15-64 tahun) memiliki tanggungan ekonomi terhadap 42 penduduk non produktif. Profil penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari nilai sex ratio/rasio jenis kelamin (RJK). RJK di Kabupaten Seruyan sebesar 112 persen, yang berarti bahwa jumlah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dibanding jumlah penduduk perempuan kurang lebih dapat digambarkan melalui rasio sebesar 112 : 100. Kemudian untuk profil sebaran penduduk, sebagian besar berkumpul di Kecamatan Seruyan Hilir yang merupakan ibukota Kabupaten Seruyan. Sedangkan Kecamatan Suling Tambun yang merupakan kecamatan terjauh dari ibukota, ditempati hanya sekitar 1,64 persen penduduk.

1.4. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Dengan letak geografi dan struktur demografi yang demikian Pemerintah Kabupaten Seruyan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan pada SKPD meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;



- 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 6) Sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- 1) Tenaga kerja;
- 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan hidup;
- 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan informatika;
- 11) Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 12) Penanaman modal;
- 13) Kepemudaan dan olahraga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan;
- 18) Kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Kehutanan;
- 5) Energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian;
- 8) Transmigrasi.



Unsur Kewilayahan meliputi:

- 1) Kecamatan Seruyan Hilir;
- 2) Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- 3) Kecamatan Danau Sembuluh;
- 4) Kecamatan Seruyan Raya;
- 5) Kecamatan Danau Seluluk;
- 6) Kecamatan Hanau;
- 7) Kecamatan Batu Ampar;
- 8) Kecamatan Seruyan Tengah;
- 9) Kecamatan Seruyan Hulu;
- 10) Kecamatan Suling Tambun.

Unsur Pemerintahan Umum meliputi:

- 1) Kesatuan Bangsa dan Politik

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Tugas pokok dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Adapun Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
- 1.3 Informasi umum tentang Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- 1.4 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 1.5 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan;



Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi makro;
- 2.2 Kebijakan Keuangan;
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD;

Bab III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi /entitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis Pengakuan dan pengukuran unsur yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan SAL
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (*Subsequent Event*)

Bab VII. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemerintah Daerah) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan, yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,12 %
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,61 %.
- c. Gini Ratio sebesar 0,26 %
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,68
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,55%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,56 (Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit)
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp.11.450,06 Milyar.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di



daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Persentase naik atau turunnya penduduk miskin di Kabupaten Seruyan tahun 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Seruyan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Seruyan (%)	7,12	7,43	-4,17
2	Kabupaten Seruyan (Ribu Orang)	8.95	15.96	-42,27
3	Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5,11	5,28	-3,22
4	Nasional (%)	9,36	9,57	-2,19
5	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	1	1	-
6	Peringkat Nasional	493	387	27,39

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Seruyan pada Tahun 2023 sebesar 7,12% mengalami penurunan sebesar (4,17%), dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin sebesar 7,43% dan diharapkan pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga dibawah angka 5%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Seruyan masih di atas provinsi dan di bawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus menjadi prioritas program kegiatan yang dapat memberikan dampak untuk menekan angka kemiskinan.

Naik atau turunnya tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Seruyan tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Seruyan

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Seruyan	0,60	1,25	-52,00
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah	0,71	0,91	-21,98
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	-	-	-
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	7	2	2,5
5	Peringkat Nasional	482	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan



Sedangkan naik atau turunnya tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Seruyan tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tingkat Keparahen Kemiskinan Kabupaten Seruyan

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahen Kemiskinan Kabupaten Seruyan	0,10	0,36	-72,22
2	Tingkat Keparahen Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah	0,14	0,27	-48,15
3	Tingkat Keparahen Kemiskinan Nasional	-	-	-
4.	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	9	2	3,50
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari :

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan data yang ada pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seruyan Tahun 2023 adalah sebesar 3,61%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seruyan

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Seruyan (%)	3,61	3,96	-8,84
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Kalimantan Tengah (%)	4,1	4,26	-3,76
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	-	-	-



No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	10	7	42,86
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Seruyan Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,61%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 3,96% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. Demikian pula jika dibandingkan dengan nilai TPT Provinsi Kalimantan Tengah maka TPT Kabupaten Seruyan lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 4,1% pada Tahun 2023 dan sebesar 4,26% pada Tahun 2022. Berdasarkan data tersebut yang menyajikan nilai TPT Kabupaten Seruyan yang lebih rendah dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa program kegiatan yang berhubungan dengan lapangan kerja di wilayah Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 telah mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Seruyan.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan yang pada Tahun 2023 hanya merilis data *Gini Ratio* tingkat Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 0,317 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini:



Tabel 2.5
Gini Ratio Kabupaten Seruyan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Seruyan	0,261	0,292	-10,62
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	0,317	0,319	-0,63
3	Tingkat Nasional	-	-	-
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	13	10	30,00
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup / umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Seruyan Tahun 2023 adalah sebesar 68,68 poin dengan kategori sedang, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Seruyan	68,68	68,24	0,64
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	72,20	71,63	0,80
3	Tingkat Nasional	74,39	73,77	0,84
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	15	14	7,14
5	Peringkat Nasional	392	387	1,29

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Seruyan



Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Seruyan Tahun 2023 adalah sebesar 68,68 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 68,24 poin mengalami kenaikan sebesar 0,64 poin. Peningkatan IPM tersebut antara lain disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat meningkatkan umur harapan hidup saat lahir (AHH) atau harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Rincian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seruyan, Provinsi dan Nasional disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seruyan

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (miliar rupiah)	6.033,56	6.275,37	6.560,81	113.611,50	12,301,393.60
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,12	4,01	4,55	4,14	5,05
3	Peringkat Provinsi Kalimantan Tengah	12	-	-	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan

Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seruyan periode Tahun 2018 – Tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Seruyan sebesar 5,36% dan pada Tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Seruyan baru tercapai sebesar 4,55% telah meningkat dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 4,01% namun



masih belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5,36%. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) di wilayah Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Wilayah Kabupaten Seruyan (miliar rupiah)

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		2022	2023	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.122,77	4.355,37	2.337,98	2.446,04
2	Pertambangan dan Penggalian*	60,16	64,77	37,95	39,23
3	Industri Pengolahan	3.448,25	3.615,92	1.991,14	2.086,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas*	1,69	1,84	1,07	1,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,53	1,59	0,91	0,91
6	Konstruksi	888,95	940,12	520,71	545,54
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	636,88	684,12	385,89	401,98
8	Transportasi dan Pergudangan	232,24	260,69	135,72	140,42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	115,63	123,96	69,82	73,23
10	Informasi dan Komunikasi	73,89	78,47	53,71	55,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	104,44	110,39	69,06	71,69
12	Real Estat	160,46	170,74	105,39	108,24
13	Jasa Perusahaan*	1,00	1,09	0,61	0,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib*	367,38	400,27	236,18	245,68
15	Jasa Pendidikan	359,80	387,96	195,53	203,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155,18	168,94	87,51	91,77
17	Jasa lainnya	78,44	83,83	46,21	48,43
	PDRB	10.808,71	11.450,06	6.275,37	6.560,81

Sumber : BPS Kabupaten Seruyan



Upaya pemulihan di sektor ekonomi pada wilayah Kabupaten Seruyan berdasarkan data PDRB menurut lapangan usaha dari BPS Kabupaten Seruyan sebanyak 17 (tujuh belas) lapangan usaha menurut PDRB telah mengalami peningkatan yang positif dan berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Kabupaten Seruyan. Kondisi tenaga kerja di pada sektor ini menjadi informasi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi program dan kegiatan yang efektif untuk upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja terhadap ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Seruyan.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Seruyan dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Gallop ing Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Data inflasi Tahun 2023 melalui sumber data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan pada 90 Kota se Indonesia, untuk Provinsi Kalimantan Tengah diwakili oleh Kotamadya Palangka Raya dengan nilai inflasi sebesar 2,68 dan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan nilai inflasi sebesar 2,56. Berdasarkan kondisi wilayah geografis Kabupaten Seruyan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga dapat digunakan sebagai data acuan untuk inflasi Kabupaten Seruyan menggunakan data dari inflasi Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 2,56. Nilai tersebut termasuk kategori inflasi rendah dengan nilai persentase inflasi kurang dari 10%, sehingga kenaikan harga barang dan jasa masih dapat dikendalikan melalui instrument kebijakan harga dan distribusi barang dan jasa di wilayah Kabupaten Seruyan.

Keberhasilan dalam menjaga nilai inflasi tetap rendah dan terkendali tidak lepas dari peran dan kolaborasi yang baik Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Seruyan yang terdiri



unsur Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, Koramil Seruyan, Polres Seruyan, Kejaksaan Negeri Seruyan, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan dan secara rutin melaksanakan kegiatan rapat koordinasi setiap minggu secara hybrid bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pengendalian inflasi di wilayah Kabupaten Seruyan.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Seruyan

Struktur perekonomian Kabupaten Seruyan dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel.2.9
PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha PDRB	Dalam Jutaan Rupiah		
	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.697,60	4.121,20	4.355,37
Pertambangan dan Penggalian	56,60	60,30	64,77
Industri Pengolahan	3 184,5	3 449,8	3.615,92
Pengadaan Listrik dan Gas	1,60	1,70	1,84
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,60	1,50	1,59
Konstruksi	835,50	889,00	940,12
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	578,30	636,90	684,12
Transportasi dan Pergudangan	216,50	232,20	260,69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	108,30	115,60	123,96
Informasi dan Komunikasi	71,70	73,90	78,47
Jasa Keuangan dan Asuransi	95,60	104,40	110,39
Real Estate	148,70	160,50	170,74
Jasa Perusahaan	0,90	1,00	1,09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	336,60	367,40	400,27
Jasa Pendidikan	336,80	359,80	387,96
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	146,90	155,20	168,94
Jasa Lainnya	72,50	78,40	83,83
PDRB	9.890,20	10.808,80	11.450,06

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Seruyan



2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan belanja daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada Tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat..

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Pajak Rokok,dll;



- b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan dan Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Penerimaan atas TGR, Pendapatan Usaha BLUD, dll.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah;
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari Pendapatan Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, antara lain :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :
 - a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :
 - 1) Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan yang dijadikan dasar hukum pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya;
 - 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pegawai melalui pelatihan fungsional dan bimbingan teknis (bimtek);
 - 4) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/Lembaga terkait di tingkat Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; dan
 - 5) Menerapkan norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja dengan memberikan penekanan pada aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektivitas
 - c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - 1) Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan dijadikan potensi pendapatan;
 - 2) Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
 - 3) Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan;
 - 4) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD;
 - 5) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan dan perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan sumber-sumber pendapatan daerah.
 - d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi



intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka struktur APBD Kabupaten Seruyan dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Selain itu pengelolaan belanja diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah pemerintah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat;
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan;
3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik;



4. Menjamin dipertahankannya kesinambungan anggaran dan memberikan prioritas yang lebih tinggi bagi program kegiatan yang menunjang upaya pencapaian visi misi daerah;
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah bersangkutan, berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Oleh karena itu, Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 6) Sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- 1) Tenaga kerja;
- 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan hidup;
- 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan informatika;



- 11) Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 12) Penanaman modal;
- 13) Kepemudaan dan olahraga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan;
- 18) Kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Kehutanan;
- 5) Energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian;
- 8) Transmigrasi.

Unsur Kewilayahan meliputi:

- 1) Kecamatan Seruyan Hilir;
- 2) Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- 3) Kecamatan Danau Sembuluh;
- 4) Kecamatan Seruyan Raya;
- 5) Kecamatan Danau Seluluk;
- 6) Kecamatan Hanau;
- 7) Kecamatan Batu Ampar;
- 8) Kecamatan Seruyan Tengah;
- 9) Kecamatan Seruyan Hulu;
- 10) Kecamatan Suling Tambun.

Unsur Pemerintahan Umum meliputi:

- 1) Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang diperoleh dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi



penggunaan anggaran. Selisih Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana (defisit) baik untuk keperluan belanja langsung maupun belanja tidak langsung, sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran.

Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
2. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah;
3. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan;
4. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya;
5. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Penggunaan SiLPA dalam bentuk pemberian Anggaran Belanja Tambahan diutamakan kepada SKPD yang mengajukan rencana tambahan anggaran untuk prioritas pelaksanaan kegiatan pelayanan umum yang terukur.

Dimana kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja yang



dalam APBD Tahun Anggaran telah ditutup. Pada Tahun Anggaran 2023 SiLPA Tahun Anggaran 2022 dianggarkan berdasarkan estimasi yaitu sebesar Rp181.903.486.780,35 yakni perkiraan sisa anggaran yang tidak terealisasi dari belanja Program/kegiatan yang dikelola oleh Perangkat Daerah. Sedangkan jumlah pasti realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 baru dapat dianggarkan pada Perubahan APBD 2023 berdasarkan SiLPA Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dan hasil audit oleh BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2023 adalah untuk membiayai pemberian penyertaan modal pada Bank Kalteng sebesar Rp12.962.500.000,00.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah

Penyajian ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan, ikhtisar dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada uraian pendapatan dimana:

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.261.538.366.239,00 yang terdiri dari PAD sebesar Rp121.226.810.406,00. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.140.291.555.833,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp20.000.000,00.

Pencapaian Kinerja Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 secara umum dapat di gambarkan sebagaimana berikut:

Tabel 2.10
Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah Per SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023

SKPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
Dinas Pendidikan	87.042.000,00	98.838.000,00	11.796.000,00	113,55
Dinas Kesehatan	8.124.018.332,00	8.461.042.829,00	337.024.497,00	104,15
RSUD Kuala Pembuang	25.756.586.517,00	30.191.186.596,00	4.434.600.079,00	117,22
RSUD Hanau	0,00	3.431.937.245,00	3.431.937.245,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	730.500.000,00	280.266.721,92	(450.233.278,08)	38,37



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

SKPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			0,00	0
Dinas Lingkungan Hidup	5.425.000,00	14.460.000,00	9.035.000,00	266,54
Dinas Perhubungan	640.997.117,00	443.190.500,00	(197.806.617,00)	69,14
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	382.813.720,00	549.226.316,00	166.412.596,00	143,47
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	257.520.000,00	267.920.250,00	10.400.250,00	104,04
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	197.713.850,00	190.835.000,00	(6.878.850,00)	96,52
Dinas Perikanan	35.464.928,00	67.820.000,00	32.355.072,00	191,23
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	206.000.000,00	212.491.000,00	6.491.000,00	103,15
Sekretariat Daerah	228.219.125,00	238.005.500,00	9.786.375,00	104,29
Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.163.405.588.481,00	1.133.057.603.241,42	(30.347.985.239,58)	97,39
Badan Pendapatan Daerah	58.358.141.353,00	16.778.872.139,78	(41.579.269.213,22)	28,75
Kecamatan Seruyan Hilir	312.520.585,00	5.164.228,31	(307.356.356,69)	1,65
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	62.504.117,00	5.317.129,76	(57.186.987,24)	8,51
Kecamatan Danau Sembuluh	270.017.785,00	258.673.311,59	(11.344.473,41)	95,80
Kecamatan Seruyan Raya	1.000.000.000,00	919.484.337,07	(80.515.662,93)	91,95
Kecamatan Danau Seluluk	343.772.643,00	19.795.840,47	(323.976.802,53)	5,76
Kecamatan Hanau	433.481.575,00	38.114.252,00	(395.367.323,00)	8,79
Kecamatan Batu Ampar	125.008.234,00	7.321.037,53	(117.687.196,47)	5,86
Kecamatan Seruyan Tengah	474.530.877,00	35.301.851,44	(439.229.025,56)	7,44
Kecamatan Seruyan Hulu	90.500.000,00	37.934.557,00	(52.565.443,00)	41,92
Kecamatan Suling Tambun	10.000.000,00	2.397.092,00	(7.602.908,00)	23,97
JUMLAH	1.261.538.366.239,00	1.195.613.198.976,29	(65.925.167.262,71)	94,77

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa target pendapatan per SKPD dengan target total sebesar Rp1.261.538.366.239,00 terealisasi sebesar Rp1.195.613.198.976,29 atau 94,77%, walaupun realisasi total pendapatan menurun dari tahun sebelumnya, tetapi ada beberapa SKPD yang berhasil melampaui target pendapatan yang di tetapkan.



Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Seruyan melakukan intensifikasi pemungutan pendapatan, penggalian potensi sumber pendapatan, melakukan pengawasan untuk memperkecil adanya kebocoran dan meningkatkan koordinasi baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan tingkat pusat agar kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan sesuai target yang ingin dicapai.

Faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Tahun Anggaran 2023 antara lain :

- 1) Kurang transparannya wajib pajak maupun pemilik usaha dalam menyampaikan data real pendapatan yang diperoleh karena masih belum efektifnya pemberlakuan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak;
- 2) Masih minimnya kesadaran wajib pajak/wajib retribusi maupun pemilik usaha dalam melaporkan kewajiban pajak dan retribusinya;
- 3) Masih belum diberlakukannya tarif pajak oleh pelaku usaha dalam pengelolaan pendapatannya karena masih adanya regulasi terkait pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum relevan sehingga pemungutan terhadap tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum sesuai dengan kondisi real di lapangan;
- 4) Masa peralihan atau transisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang sebagian sudah diberlakukan;
- 5) *Standart Operating Procedure* (SOP) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum memadai;
- 6) Penggalian potensi Pajak Daerah yang belum optimal serta belum maksimalnya koordinasi dan kerjasama dengan seluruh Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 7) Belum adanya sanksi tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak taat pajak, serta pengenaan sanksi terhadap denda pajak belum diterapkan secara menyeluruh karena tingkat pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal;
- 8) Masih minimnya potensi pajak dan retribusi di Kabupaten Seruyan seperti hotel, rumah penginapan, rumah makan/ warung makan, objek pajak hiburan yang belum bersifat permanen, serta pajak hiburan masih bersifat insidentil;
- 9) Masih belum optimalnya capaian realisasi yang bersumber dari potensi yang sudah ada serta masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk operasional di lapangan;



- 10) Belum dimilikinya database atau data dasar mengenai sumber penerimaan serta data subjek dan objek Pajak/Retribusi masih banyak yang belum dilakukan pemutakhiran sehingga data potensi belum sepenuhnya akurat;
- 11) Belum ditunjang oleh pelayanan menggunakan aplikasi dan sistem teknologi berbasis online sebagai sarana dalam optimalisasi penerimaan pendapatan daerah di seluruh perangkat daerah;
- 12) Belum primanya layanan karena terbatasnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan petugas pelaksana operasional dilapangan dan masih minimnya pengetahuan terkait perpajakan dan retribusi;
- 13) Penagihan serta pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum maksimal sehingga memiliki potensi keterlambatan pembayaran dan tidak taat nya wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya;
- 14) Sosialisasi peraturan dan ketentuan pungutan pendapatan daerah belum optimal dan belum dilakukan secara menyeluruh ke wajib pajak, wajib retribusi, perangkat daerah, perangkat desa serta petugas pungut maupun aparat pajak di masing-masing wilayah sehingga informasi terkait perpajakan belum dapat diterima secara merata baik kepada masyarakat maupun oleh aparat di masing-masing kecamatan;
- 15) Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan data potensi yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan;
- 16) SKPD yang memiliki target pendapatan masih belum sepenuhnya melakukan pemungutan secara optimal terhadap jenis penerimaan pajak maupun retribusi.

2.3.2 Kinerja Belanja Daerah

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.426.324.481.054,00 yang terdiri Belanja Operasi sebesar Rp964.865.397.398,00, Belanja Modal sebesar Rp274.444.563.558,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.210.551.210,00 dan untuk Belanja Transfer Kabupaten Seruyan menganggarkan sebesar Rp184.803.968.888,00 yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp6.394.084.188,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp178.409.884.700,00.

Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan secara umum dilihat dari anggaraan dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:



Tabel 2.11
Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Per SKPD
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023

SKPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
Dinas Pendidikan	292.279.283.596,00	256.696.268.846,00	(35.583.014.750,00)	87,83
Dinas Kesehatan	120.275.182.801,00	112.766.090.937,62	(7.509.091.863,38)	93,76
RSUD Kuala Pembuang	58.901.666.800,00	55.364.118.820,00	(3.537.547.980,00)	93,99
RSUD Hanau	0,00	4.050.962.408,50	4.050.962.408,50	0
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	240.154.563.967,00	209.940.032.059,96	(30.214.531.907,04)	87,42
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	12.381.463.453,00	11.729.381.388,00	(652.082.065,00)	94,73
Satuan Polisi Pamong Praja	9.409.643.110,00	9.246.841.243,00	(162.801.867,00)	98,27
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.105.233.001,00	6.605.034.928,50	(500.198.072,50)	92,96
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38.706.485.241,00	25.580.922.805,00	(13.125.562.436,00)	66,09
Dinas Sosial	9.276.170.724,00	8.976.436.679,00	(299.734.045,00)	96,77
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.242.223.678,00	8.112.548.409,00	(129.675.269,00)	98,43
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.416.526.757,00	11.648.867.935,74	(1.767.658.821,26)	86,82
Dinas Lingkungan Hidup	56.103.994.776,00	20.435.126.755,00	(35.668.868.021,00)	36,42
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6.882.602.922,00	6.502.505.832,00	(380.097.090,00)	94,48
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.334.062.065,00	9.968.220.238,00	(365.841.827,00)	96,46
Dinas Perhubungan	8.444.897.594,00	8.340.499.570,00	(104.398.024,00)	98,76
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7.219.129.474,00	6.751.212.895,00	(467.916.579,00)	93,52
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	15.470.739.058,00	14.458.593.079,00	(1.012.145.979,00)	93,46
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.082.095.613,00	6.010.976.835,00	(71.118.778,00)	98,83
Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	16.697.542.985,00	15.053.978.029,00	(1.643.564.956,00)	90,16
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.610.845.993,00	4.422.596.974,00	(188.249.019,00)	95,92
Dinas Perikanan	11.535.039.138,00	10.831.634.274,00	(703.404.864,00)	93,9



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

SKPD	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.918.147.796,00	16.774.045.649,00	(3.144.102.147,00)	84,21
Sekretariat Daerah	58.131.191.962,00	52.045.698.953,00	(6.085.493.009,00)	89,53
Inspektorat	10.045.000.000,00	9.272.855.172,30	(772.144.827,70)	92,31
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.274.766.267,00	8.842.692.849,00	(2.432.073.418,00)	78,43
Badan Keuangan dan Aset Daerah	226.736.815.355,00	203.062.157.180,65	(23.674.658.174,35)	89,36
Badan Pendapatan Daerah	14.590.668.221,00	11.700.826.890,10	(2.889.841.330,90)	80,19
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.513.016.942,00	8.776.199.055,00	(1.736.817.887,00)	83,48
Sekretariat DPRD	53.538.568.648,00	46.371.681.485,40	(7.166.887.162,60)	86,61
Kecamatan Seruyan Hilir	8.261.201.076,00	7.913.055.189,00	(348.145.887,00)	95,79
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	3.944.306.057,00	3.765.348.673,00	(178.957.384,00)	95,46
Kecamatan Danau Sembuluh	3.288.232.415,00	3.208.360.318,00	(79.872.097,00)	97,57
Kecamatan Seruyan Raya	3.235.767.643,00	3.163.765.304,00	(72.002.339,00)	97,77
Kecamatan Danau Seluluk	2.994.235.791,00	2.911.117.027,00	(83.118.764,00)	97,22
Kecamatan Hanau	4.439.294.853,00	4.380.493.403,00	(58.801.450,00)	98,68
Kecamatan Batu Ampar	3.084.245.022,00	3.017.663.913,00	(66.581.109,00)	97,84
Kecamatan Seruyan Tengah	6.066.800.204,00	5.765.979.080,00	(300.821.124,00)	95,04
Kecamatan Seruyan Hulu	3.884.854.568,00	3.809.556.631,00	(75.297.937,00)	98,06
Kecamatan Suling Tambun	3.547.935.960,00	3.413.465.517,00	(134.470.443,00)	96,21
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	25.300.039.528,00	24.576.480.413,00	(723.559.115,00)	97,14
JUMLAH	1.426.324.481.054,00	1.246.264.293.643,77	(180.060.187.410,23)	87,38

Realisasi Belanja Operasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Urusan Organisasi sebagai berikut:

Tabel 2.12
Rincian Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	%
		Belanja Operasi	Belanja Operasi	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	788.489.692.693,00	700.956.090.115,58	88,90
1	Pendidikan	292.279.283.596,00	256.696.268.846,00	87,83
	Dinas Pendidikan	292.279.283.596,00	256.696.268.846,00	87,83



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	%
		Belanja Operasi	Belanja Operasi	
2	Kesehatan	179.176.849.601,00	172.181.172.166,12	96,10
	Dinas Kesehatan	120.275.182.801,00	112.766.090.937,62	93,76
	Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang	58.901.666.800,00	55.364.118.820,00	93,99
	Rumah Sakit Umum Hanau	0,00	4.050.962.408,50	0,00
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	240.154.563.967,00	209.940.032.059,96	87,42
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	240.154.563.967,00	209.940.032.059,96	87,42
4	Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	12.381.463.453,00	11.729.381.388,00	94,73
	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	12.381.463.453,00	11.729.381.388,00	94,73
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	55.221.361.352,00	41.432.798.976,50	75,03
	Satuan Polisi Pamong Praja	9.409.643.110,00	9.246.841.243,00	98,27
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.105.233.001,00	6.605.034.928,50	92,96
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38.706.485.241,00	25.580.922.805,00	66,09
6	Sosial	9.276.170.724,00	8.976.436.679,00	96,77
	Dinas Sosial	9.276.170.724,00	8.976.436.679,00	96,77

Berikut ini adalah ringkasan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 untuk urusan wajib non pelayanan dasar, sebagai berikut:

Tabel 2.13
Rincian Realisasi Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	%
		Belanja Operasi	Belanja Operasi	
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	173.422.808.711,00	128.479.172.200,74	74,08
1	Tenaga Kerja	8.242.223.678,00	8.112.548.409,00	98,43
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	8.242.223.678,00	8.112.548.409,00	98,43
2	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	13.416.526.757,00	11.648.867.935,74	86,82



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	%
		Belanja Operasi	Belanja Operasi	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	13.416.526.757,00	11.648.867.935,74	86,82
3	Pangan	19.918.147.796,00	16.774.045.649,00	84,21
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.918.147.796,00	16.774.045.649,00	84,21
3	Lingkungan Hidup	56.103.994.776,00	20.435.126.755,00	36,42
	Dinas Lingkungan Hidup	56.103.994.776,00	20.435.126.755,00	36,42
4	Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	6.882.602.922,00	6.502.505.832,00	94,48
	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.882.602.922,00	6.502.505.832,00	94,48
5	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10.334.062.065,00	9.968.220.238,00	96,46
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10.334.062.065,00	9.968.220.238,00	96,46
6	Perhubungan	8.444.897.594,00	8.340.499.570,00	98,76
	Dinas Perhubungan	8.444.897.594,00	8.340.499.570,00	98,76
7	Komunikasi Dan Informatika	7.219.129.474,00	6.751.212.895,00	93,52
	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	7.219.129.474,00	6.751.212.895,00	93,52
8	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	15.470.739.058,00	14.458.593.079,00	93,46
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	15.470.739.058,00	14.458.593.079,00	93,46
9	Penanaman Modal	6.082.095.613,00	6.010.976.835,00	98,83
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.082.095.613,00	6.010.976.835,00	98,83
10	Kepemudaan Dan Olah Raga	16.697.542.985,00	15.053.978.029,00	90,16
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	16.697.542.985,00	15.053.978.029,00	90,16
11	Perpustakaan	4.610.845.993,00	4.422.596.974,00	95,92
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.610.845.993,00	4.422.596.974,00	95,92

Berikut ini adalah ringkasan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 untuk urusan pemerintahan fungsi penunjang, sebagai berikut:



Tabel 2.14
Rincian Realisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	%
		Belanja Operasi	Belanja Operasi	
	Urusan Pemerintahan Pilihan	11.535.039.138,00	10.831.634.274,00	93,90
1	Kelautan dan Perikanan	11.535.039.138,00	10.831.634.274,00	93,90
	Dinas Perikanan	11.535.039.138,00	10.831.634.274,00	93,90
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	111.669.760.610,00	98.417.380.438,40	88,13
2	Administrasi Pemerintahan	111.669.760.610,00	98.417.380.438,40	88,13
	Sekretariat Daerah	58.131.191.962,00	52.045.698.953,00	89,53
	Sekretariat DPRD	53.538.568.648,00	46.371.681.485,40	86,61
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	263.115.266.785,00	232.381.875.974,75	88,32
3	Perencanaan	11.274.766.267,00	8.842.692.849,00	78,43
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.274.766.267,00	8.842.692.849,00	78,43
4	Keuangan	241.327.483.576,00	214.762.984.070,75	88,99
	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	226.736.815.355,00	203.062.157.180,65	89,56
	Badan Pendapatan Daerah	14.590.668.221,00	11.700.826.890,10	80,19
5	Kepegawaian	10.513.016.942,00	8.776.199.055,00	83,48
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.513.016.942,00	8.776.199.055,00	83,48
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	10.045.000.000,00	9.272.855.172,30	92,31
6	INSPEKTORAT	10.045.000.000,00	9.272.855.172,30	92,31
	Inspektorat	10.045.000.000,00	9.272.855.172,30	92,31
	Unsur Kewilayahan	42.746.873.589,00	41.348.805.055,00	96,73
7	KECAMATAN	42.746.873.589,00	41.348.805.055,00	96,73
	Kecamatan Seruyan Hilir	8.261.201.076,00	7.913.055.189,00	95,79
	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	3.944.306.057,00	3.765.348.673,00	95,46
	Kecamatan Danau Sembuluh	3.288.232.415,00	3.208.360.318,00	97,57
	Kecamatan Seruyan Raya	3.235.767.643,00	3.163.765.304,00	97,77
	Kecamatan Danau Seluluk	2.994.235.791,00	2.911.117.027,00	97,22
	Kecamatan Hanau	4.439.294.853,00	4.380.493.403,00	98,68
	Kecamatan Batu Ampar	3.084.245.022,00	3.017.663.913,00	97,84
	Kecamatan Seruyan Tengah	6.066.800.204,00	5.765.979.080,00	95,04



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Urusan, Organisasi	Anggaran	Realisasi	%
		Belanja Operasi	Belanja Operasi	
	Kecamatan Seruyan Hulu	3.884.854.568,00	3.809.556.631,00	98,06
	Kecamatan Suling Tambun	3.547.935.960,00	3.413.465.517,00	96,21
	Unsur Pemertahan Umum	25.300.039.528,00	24.576.480.413,00	97,14
8	Kesatuan Bangsa dan Politik	25.300.039.528,00	24.576.480.413,00	97,14
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.300.039.528,00	24.576.480.413,00	97,14



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kabupaten Seruyan T.A. 2023, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2023 dan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.

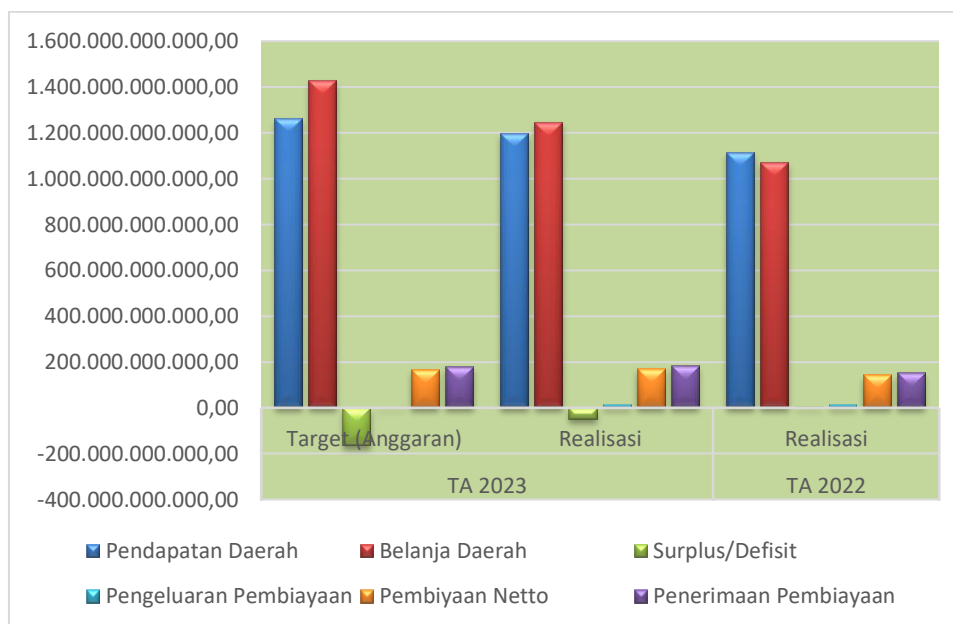
Analisa capaian kinerja keuangan digambarkan dalam ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Seruyan secara keseluruhan sebagai akuntabilitas keuangan terhadap capaian indikator dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Gambaran realisasi APBD T.A. 2023 Pemerintah Kabupaten Seruyan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Realisasi APBD T.A. 2023

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Target (Anggaran)	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Daerah	1.261.538.366.239,00	1.195.613.198.853,29	94,78	1.112.241.971.242,55
2	Belanja Daerah	1.426.324.481.054,00	1.246.264.293.643,77	87,38	1.071.565.463.005,51
3	Surplus/Defisit	(164.786.114.815,00)	(50.651.094.790,48)	30,73	40.676.508.237,04
4	Penerimaan Pembiayaan	177.748.614.815,00	181.903.486.780,35	102,34	154.189.478.543,31
5	Pengeluaran Pembiayaan	12.962.500.000,00	12.962.500.000,00	100,00	12.962.500.000,00
6	Pembiayaan Netto	164.786.114.815,00	168.940.986.780,35	102,52	141.226.978.543,31
SILPA		0,00	118.289.891.989,87	65,03	181.903.486.780,35



Grafik 3.1
Realisasi APBD T.A. 2023 dan T.A. 2022



Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Seruyan merencanakan penerimaan pendapatan sebesar Rp1.261.538.366.239,00, terjadi peningkatan target dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp97.114.018.346,00 diikuti dengan peningkatan realisasi sebesar Rp83.387.979.186,23 atau meningkat sebesar 7,5%. Dari sisi belanja dan transfer, seiring dengan meningkatnya target pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 maka diikuti dengan meningkatnya target belanja dan transfer sebesar Rp129.444.800.736,00 begitupun dengan realisasi belanja dan transfer mengalami peningkatan sebesar Rp174.698.830.637,94 atau meningkat sebesar 16,30 % dari belanja dan transfer tahun anggaran 2022. Akibat dari meningkatnya target belanja dan transfer serta menurunnya pendapatan pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Seruyan mengalami defisit anggaran sebesar Rp50.634.343.214,67 dari defisit yang direncanakan sebesar Rp164.786.114.815,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 surplus sebesar Rp40.676.508.237,04 atau menurun sebesar 80,33 %. Kekurangan anggaran untuk menutupi defisit anggaran selama tahun anggaran 2023 didanai dari SiLPA tahun anggaran 2022. Realisasi Pembiayaan netto sebesar Rp12.962.500.000,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun Anggaran 2022, tidak tercapainya anggaran pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp118.306.643.565,68. Saldo SiLPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

3.1.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah

Dari hasil pelaksanaan kegiatan, realisasi pendapatan tahun 2023 diperoleh realisasi sebesar Rp1.195.629.950.428,78 atau sebesar 94,78%. dari target pendapatan sebesar Rp1.261.538.366.239,00. Dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar



Rp121.226.810.406,00 hanya dapat tercapai sebesar Rp71.975.031.508,78 atau sebesar 58,37% begitupun dengan target Pendapatan Transfer dimana hanya mencapai Rp1.123.634.919.043,00 atau 98,54% dari target yang diinginkan yaitu sebesar Rp1.140.291.555.833,00, akan tetapi pada lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 dari target yang diinginkan atau tercapai 100%. Gambaran ikhtisar pencapaian kinerja pendapatan daerah dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah:

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan T.A. 2023 dan T.A. 2022

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Target (Anggaran)	Realisasi	%	Realisasi
	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>	1.261.538.366.239,00	1.195.613.198.853,29	94,78	1.112.241.971.242,55
1	Pendapatan Asli Daerah	121.226.810.406,00	71.958.279.810,29	59,36	82.433.031.703,79
2	Pendapatan Transfer	1.140.291.555.833,00	1.123.634.919.043,00	98,54	1.019.316.823.163,76
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	10.492.116.375,00

Grafik 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023



Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Seruyan T.A. 2023 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dibandingkan tahun anggaran 2022. Hal ini disebabkan meningkatnya Pendapatan Transfer yang di dorong oleh adanya dana pemerintah daerah yang tersimpan pada Bank Indonesia (BI) atas kebijakan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility (TDF)*, serta terealisasi 100% nya pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

**3.1.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Belanja Daerah**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

Anggaran Belanja Daerah, pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.426.324.481.054,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.246.264.293.643,45 atau 87,38%, dimana masing-masing target dan realisasi belanja sesuai kelompoknya sebagaimana rincian tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah T.A. 2023 dan T.A. 2022

No	Jenis Belanja Daerah	Tahun Anggaran 2023			Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	BELANJA OPERASI	964.865.397.398,00	832.448.838.524,03	86,28	747.007.671.583,31
	Belanja Pegawai	409.877.204.917,00	365.545.404.005,97	89,18	366.213.212.937,00
	Belanja Barang dan Jasa	454.402.384.851,00	368.195.904.183,30	81,02	329.372.640.412,31
	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.999.999.670,00	100,00	1.999.996.003,00
	Belanja Hibah	88.150.376.130,00	86.720.990.864,76	98,37	29.943.448.031,00
	Belanja Bantuan Sosial	10.435.431.500,00	9.986.539.800,00	95,70	19.478.374.200,00
2	BELANJA MODAL	274.444.563.558,00	235.059.146.858,74	85,65	159.703.735.084,20
	Belanja Peralatan dan Mesin	49.155.244.890,00	45.974.881.069,00	93,53	48.875.920.215,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	66.400.088.146,00	57.398.957.903,04	86,44	31.520.633.822,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	155.985.636.774,00	130.384.672.314,70	83,59	77.887.865.307,20
	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.464.093.748,00	870.194.072,00	35,31	1.419.315.740,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	439.500.000,00	430.441.500,00	97,94	0,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.210.551.210,00	732.657.783,00	33,14	1.357.580.146,00
4	BELANJA TRANSFER	184.803.968.888,00	178.023.650.478,00	96,33	163.496.476.192,00
	Belanja Bagi Hasil	6.394.084.188,00	1.727.173.530,00	27,01	1.479.323.792,00
	Belanja Bantuan Keuangan	178.409.884.700,00	176.296.476.948,00	98,82	162.017.152.400,00
JUMLAH		1.426.324.481.054,00	1.246.264.293.643,77	87,38	1.071.565.463.005,51



Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 digambarkan dalam grafik batang sebagai berikut:

Grafik 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023



Dari realisasi belanja daerah dan transfer sebagaimana grafik di atas, terlihat bahwa capaian kinerja belanja Tahun Anggaran 2023 hanya tercapai 87,38% dari target yang dianggarkan, dimana Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp964.865.397.398,00 tercapai realisasi sebesar Rp832.448.838.523,71 atau sebesar 86,28%. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp274.444.563.558,00 dengan realisasi sebesar Rp235.059.146.858,74 atau sebesar 85,65%. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp2.210.551.210,00 dengan realisasi sebesar Rp732.657.783,00 atau sebesar 33,14% serta Belanja Transfer yang dianggarkan sebesar Rp184.803.968.888,00 dengan realisasi sebesar Rp178.023.650.478,00 atau sebesar 96,33%.

Bila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp174.698.830.638,26 atau sebesar 16,30%.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah



Kabupaten Seruyan memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja **mandatory spending** dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Untuk itu, dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) T.A. 2023 Pemerintah Kabupaten Seruyan mencantumkan:

- ✓ sinergitas dan penyalarsan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Seruyan terhadap prioritas pembangunan nasional;
- ✓ sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan prioritas pembangunan provinsi kalimantan tengah; dan
- ✓ prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD T.A. 2023.

Berikut anggaran dan realisasi belanja mandatory spending tahun anggaran 2023 per fungsi/urusan :

1. Belanja Mandatory Bidang Kesehatan

Rincian realisasi belanja mandatory spending bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Rincian Realisasi Belanja Mandatory Spending Bidang Kesehatan

NO	Komponen Perhitungan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	REALISASI	%
1	2	3	4	5	
1.	Belanja pada Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan:	106.510.457.597,00	120.275.182.801,00	112.766.090.937,62	93,76%
	Belanja Operasi	95.589.341.508,00	108.431.792.882,00	101.234.392.343,62	
	Belanja Modal	10.921.116.089,00	11.843.389.919,00	11.531.698.594,00	
	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	
	Belanja pada RSUD Kuala Pembuang:	44.137.687.885,00	58.901.666.800,00	55.364.118.820,00	93,99
	Belanja Operasi	39.586.317.885,00	53.043.046.800,00	49.708.430.687,00	
	Belanja Modal	4.551.370.000,00	5.858.620.000,00	5.655.688.133,00	
	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	
	Belanja pada RSUD Hanau:	34.088.769.984,00	0,00	4.050.962.408,50	100,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

	Belanja Operasi	33.288.769.984,00	0,00	3.676.274.808,50	
	Belanja Modal	800.000.000,00	0,00	374.687.600,00	
	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	
2.	Alokasi Anggaran Kesehatan	184.736.915.466,00	179.176.849.601,00	172.181.172.166,12	96,10
3.	Total Belanja Daerah	1.322.995.296.817,00	1.426.324.481.054,00	1.246.264.293.643,77	87,38
4.	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN	218.440.890.276,00	224.937.960.478,00	224.937.960.478,00	100,00
5.	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN	1.104.554.406.541,00	1.201.386.520.576,00	1.201.386.520.576,00	85,01
6.	Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah diluar Gaji ASN	16,73%	14,91%	16,86%	

Jika dilihat dari tabel diatas, tidak ada kendala yang berarti dalam merealisasikan belanja mandatory bidang kesehatan, terbukti dengan terealisasinya belanja Mandatory Spending Bidang Kesehatan sebesar Rp172.181.172.166,12 atau sebesar 96,10% dari target anggaran sebesar Rp179.176.849.601,00. Dan ini menunjukkan hasil yang memuaskan dan telah merencanakan belanja bidang kesehatan sesuai prioritas daerah.

2. Belanja Mandatory Bidang Pendidikan

Rincian realisasi belanja mandatory spending bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Rincian Realisasi Belanja Mandatory Spending Bidang Pendidikan

Nomor	Komponen Perhitungan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%
1.	Belanja Dinas Pendidikan				
	Belanja Operasi :	236.056.519.429,00	245.271.838.991,00	214.086.782.331,00	87,29
	Belanja Pegawai	167.779.562.449,00	169.092.804.022,00	140.127.285.657,00	82,87
	Belanja Barang dan Jasa	62.431.985.980,00	59.140.143.969,00	57.072.037.884,00	96,50
	Belanja Hibah	5.844.971.000,00	17.038.891.000,00	16.887.458.790,00	98,11
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0
	Belanja Modal	45.034.885.000,00	47.007.444.605,00	47.007.444.605,00	100,00
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	281.091.404.429,00	292.279.283.596,00	261.094.226.936,00	89,33
3.	Total Belanja Daerah	1.322.995.296.817,00	1.426.324.481.054,00	1.246.264.293.643,77	87,38



Nomor	Komponen Perhitungan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%
4.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan terhadap Belanja	21%	20%	21%	

Anggaran belanja mandatory pendidikan direncanakan sebesar Rp292.279.283.596,00 dan tercapai realisasi belanja sebesar Rp261.094.226.936,00 atau sebesar 89,33%.

3. Belanja Mandatory Bidang Infrastruktur

Rincian realisasi belanja mandatory spending bidang infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Rincian Realisasi Belanja Mandatory Spending Bidang Infrastruktur

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%
1.	Total Belanja Daerah	1.322.995.296.817,00	1.426.324.481.054,00	1.246.264.293.643,77	87,38
2.	Belanja Transfer:				
	Belanja Bagi Hasil	6.180.421.550,00	6.394.084.188,00	1.727.173.530,00	27,01
	Belanja Bantuan Keuangan	168.589.853.400,00	178.409.884.700,00	176.296.476.948,00	98,82
	Jml Belanja Transfer	174.770.274.950,00	184.803.968.888,00	178.023.650.478,00	96,33
3.	Belanja Daerah yang diperhitungkan (1-2)	1.148.225.021.867,00	1.241.520.512.166,00	1.068.240.643.165,77	86,04
	Belanja Infrastruktur Pelay. Publik :				
	Belanja peralatan dan Mesin	30.887.207.462,00	49.155.244.890,00	45.974.881.069,00	93,53
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.887.787.793,00	66.400.088.146,00	57.398.957.903,04	86,44
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	124.864.824.398,00	155.985.636.774,00	130.384.672.314,70	83,59
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.463.306.000,00	2.464.093.748,00	870.194.072,00	35,31
	Belanja Hibah	64.177.448.333,00	88.150.376.130,00	86.680.100.864,76	98,33
	Belanja Pemeliharaan	15.709.815.794,00	16.934.415.252,00	15.616.188.635,00	92,22
	Jml Belanja Infrastruktur Pelay. Publik	302.990.389.780,00	379.089.854.940,00	336.924.994.858,50	88,88
5.	Rasio Belanja Pelay. Publik terhadap Belanja Daerah yg diperhitungkan	26,39%	30,53%	31,54%	



Anggaran belanja mandatory bidang infrastruktur direncanakan sebesar Rp379.089.854.940,00 dan tercapai realisasi belanja sebesar Rp336.924.994.858,50 atau sebesar 88,88%.

Realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perintah Kabupaten Seruyan sesuai dengan bidang, fungsi yang terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Belanja SKPD sesuai Tugas dan Fungsi T.A. 2023

Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	(%)
FUNGSI PENDIDIKAN	292.279.283.596,00	256.696.268.846,00	87,83
DINAS PENDIDIKAN	292.279.283.596,00	256.696.268.846,00	87,83
FUNGSI KESEHATAN	179.176.849.601,00	172.181.172.166,12	96,1
DINAS KESEHATAN	179.176.849.601,00	172.181.172.166,12	96,1
FUNGSI PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	240.154.563.967,00	209.940.032.059,96	87,42
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	240.154.563.967,00	209.940.032.059,96	87,42
FUNGSI PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12.381.463.453,00	11.729.381.388,00	94,73
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	12.381.463.453,00	11.729.381.388,00	94,73
FUNGSI KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	55.221.361.352,00	41.432.798.976,50	75,03
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.409.643.110,00	9.246.841.243,00	98,27
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	7.105.233.001,00	6.605.034.928,50	92,96
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	38.706.485.241,00	25.580.922.805,00	66,09
FUNGSI SOSIAL	9.276.170.724,00	8.976.436.679,00	96,77
DINAS SOSIAL	9.276.170.724,00	8.976.436.679,00	96,77



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	(%)
FUNGSI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.242.223.678,00	8.112.548.409,00	98,43
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8.242.223.678,00	8.112.548.409,00	98,43
FUNGSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.416.526.757,00	11.648.867.935,74	86,82
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.416.526.757,00	11.648.867.935,74	86,82
FUNGSI PANGAN dan PERTANIAN	19.918.147.796,00	16.774.045.649,00	84,21
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	19.918.147.796,00	16.774.045.649,00	84,21
FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	56.103.994.776,00	20.435.126.755,00	36,42
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	56.103.994.776,00	20.435.126.755,00	36,42
FUNGSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.882.602.922,00	6.502.505.832,00	94,48
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	6.882.602.922,00	6.502.505.832,00	94,48
FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.334.062.065,00	9.968.220.238,00	96,46
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.334.062.065,00	9.968.220.238,00	96,46
FUNGSI PERHUBUNGAN	8.444.897.594,00	8.340.499.570,00	98,76
DINAS PERHUBUNGAN	8.444.897.594,00	8.340.499.570,00	98,76
FUNGSI KOMUNIKASI & INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	7.219.129.474,00	6.751.212.895,00	93,52
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	7.219.129.474,00	6.751.212.895,00	93,52
FUNGSI KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.470.739.058,00	14.458.593.079,00	93,46



Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	(%)
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.470.739.058,00	14.458.593.079,00	93,46
FUNGSI PENANAMAN MODAL	6.082.095.613,00	6.010.976.835,00	98,83
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.082.095.613,00	6.010.976.835,00	98,83
FUNGSI KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	16.697.542.985,00	15.053.978.029,00	90,16
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	16.697.542.985,00	15.053.978.029,00	90,16
FUNGSI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.610.845.993,00	4.422.596.974,00	95,92
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.610.845.993,00	4.422.596.974,00	95,92
FUNGSI KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.535.039.138,00	10.831.634.274,00	93,9
DINAS PERIKANAN	11.535.039.138,00	10.831.634.274,00	93,9
SEKRETARIAT DAERAH	58.131.191.962,00	52.045.698.953,00	89,53
SEKRETARIAT DAERAH	58.131.191.962,00	52.045.698.953,00	89,53
SEKRETARIAT DPRD	53.538.568.648,00	46.371.681.485,40	86,61
SEKRETARIAT DPRD	53.538.568.648,00	46.371.681.485,40	86,61
FUNGSI PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11.274.766.267,00	8.842.692.849,00	78,43
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11.274.766.267,00	8.842.692.849,00	78,43
FUNGSI KEUANGAN	241.327.483.576,00	214.762.984.070,75	88,99
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	226.736.815.355,00	203.062.157.180,65	89,56



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	(%)
BADAN PENDAPATAN DAERAH	14.590.668.221,00	11.700.826.890,10	80,19
FUNGSI KEPEGAWAIAN	10.513.016.942,00	8.776.199.055,00	83,48
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.513.016.942,00	8.776.199.055,00	83,48
FUNGSI PENGAWASAN	10.045.000.000,00	9.272.855.172,30	92,31
INSPEKTORAT	10.045.000.000,00	9.272.855.172,30	92,31
FUNGSI KEWILAYAHAN	42.746.873.589,00	41.348.805.055,00	96,73
KECAMATAN SERUYAN HILIR	8.261.201.076,00	7.913.055.189,00	95,79
KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	3.944.306.057,00	3.765.348.673,00	95,46
KECAMATAN DANAU SEMBULUH	3.288.232.415,00	3.208.360.318,00	97,57
KECAMATAN SERUYAN RAYA	3.235.767.643,00	3.163.765.304,00	97,77
KECAMATAN DANAU SELULUK	2.994.235.791,00	2.911.117.027,00	97,22
KECAMATAN HANAU	4.439.294.853,00	4.380.493.403,00	98,68
KECAMATAN BATU AMPAR	3.084.245.022,00	3.017.663.913,00	97,84
KECAMATAN SERUYAN TENGAH	6.066.800.204,00	5.765.979.080,00	95,04
KECAMATAN SERUYAN HULU	3.884.854.568,00	3.809.556.631,00	98,06
KECAMATAN SULING TAMBUN	3.547.935.960,00	3.413.465.517,00	96,21
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25.300.039.528,00	24.576.480.413,00	97,14



Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	(%)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25.300.039.528,00	24.576.480.413,00	97,14
JUMLAH	1.426.324.481.054,00	1.246.264.293.643,77	87,376

Melihat tabel di atas secara keseluruhan capaian kinerja belanja SKPD per fungsi Pada tahun anggaran 2023 rata-rata tercapai sebesar 80–98%. dan ada 2 (dua) SKPD yang capaian realisasi belanja masih di bawah 75%, masing-masing SKPD dimaksud adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencapai realisasi sebesar Rp25.580.922.805,00 atau 66,09% dari target anggaran sebesar Rp38.706.485.241,00 serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dari target anggaran sebesar Rp56.103.994.776,00 tercapai realisasi belanja sebesar Rp20.435.126.755,00 atau sebesar 36,42%. Hal ini disebabkan karena kedua SKPD tersebut sebagian besar sumber dana yang direncanakan merupakan dana Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBHDR) dimana dana ini merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan Dana Reboisasi yang penggunaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga apabila kedua SKPD tersebut tidak dapat memenuhi syarat tertentu dalam penggunaannya, maka dana tersebut tidak dapat direalisasikan.

3.2.1. Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2023.

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun 2023 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tantangan pemerintah kabupaten seruyan dalam mencapai kinerja keuangan tahun anggaran 2023 adalah dalam pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant. Akibat dari terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) terdapat beberapa perubahan terkait desain transfer ke daerah. Salah satunya adalah kebijakan tentang penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU). Mulai tahun 2023, DAU dibagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*). Salah satu bentuk redesign DAU Specific grant bertujuan untuk pemerataan keuangan antar-daerah, meningkatkan pola belanja, dan mempercepat layanan publik di daerah. Di satu sisi, pemberian DAU berbentuk block grant memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menggunakannya sesuai dengan prinsip otonomi daerah.



Pelaksanaan kebijakan DAU yang baru ini berdampak pada postur APBD di Pemerintah Kabupaten Seruyan, dan menjadi salah satu daerah yang mengalami kendala dalam pelaksanaan perubahan kebijakan DAU tersebut, dimana ada beberapa masalah dalam pemberian kebijakan block grant tersebut, salah satu masalah yang dihadapi yaitu formulasi DAU yang belum ideal untuk mengatasi ketimpangan fiskal dan mendorong pemerataan dan peningkatan layanan publik, serta kinerja daerah dalam menjalankan tanggung jawab belanja secara efisien dan disiplin, sehingga pencapaian kinerja keuangan tahun anggaran 2023 cenderung menurun. terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan DAU ini.

Beberapa tantangan yang dapat diidentifikasi diantaranya sebagai berikut:

Pertama, terjadinya penurunan **block grant** Kabupaten Seruyan di Tahun 2023. Kabupaten Seruyan pada Tahun 2023 menerima alokasi DAU mencapai Rp580.016.319.000,00 dengan alokasi DAU berupa **block grant** sebesar Rp392.811.949.000,00, serta DAU yang ditentukan penggunaannya atau **specific grant** sebesar Rp187.204.370.000,00, dengan komposisi bidang Pendidikan Rp75.570.524.000,00; bidang kesehatan Rp42.723.186.000,00; bidang pekerjaan umum Rp57.575.184.000,00; dana kelurahan Rp600.000.000,00; dan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Rp10.735.476.000,00.

Jumlah total DAU tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan DAU yang diterima di tahun 2022 sebesar Rp560.402.241.000,00. Namun pada Tahun 2022 seluruh DAU diberikan dalam bentuk block grant sedangkan di Tahun 2023 terdapat penggunaan DAU yang diarahkan sehingga meskipun secara total DAU Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan, namun jumlah block grant menurun di Tahun 2023.

Penurunan porsi DAU **block grant** yang diterima Kabupaten Seruyan tersebut di satu sisi tentunya akan mempersempit diskresi pemerintah daerah dalam mengelola APBD. Hal tersebut karena secara rata-rata, lebih dari 40% komposisi pendapatan daerah di seluruh pemerintah daerah di Indonesia (kecuali DKI Jakarta), termasuk Kabupaten Seruyan, didapatkan dari DAU.



Rincian anggaran DAU T.A. 2023 dan T.A. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Rincian Anggaran DAU T.A. 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022
Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU)	580.016.319.000,00	560.402.241.000,00
DAU Umum (<i>Block Grant</i>)	392.811.949.000,00	560.402.241.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya (<i>Specific Grant</i>)	187.204.370.000,00	0,00
Penggajian PPPK	10.735.476.000,00	0,00
Dana Kelurahan	600.000.000,00	0,00
Bid Pendidikan	75.570.524.000,00	0,00
Bid Kesehatan	42.723.186.000,00	0,00
Bid Pekerjaan Umum	57.575.184.000,00	0,00

Kedua, permasalahan akibat sistem reimburse pada alokasi gaji PPPK. Pada Bulan Desember Tahun 2022, Menteri Keuangan Mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 bahwa penggunaan DAU untuk gaji dan tunjangan PPPK hanya diperuntukkan untuk PPPK formasi Tahun 2022-2023, alokasi DAU untuk gaji PPPK diberikan dalam sistem reimburse sehingga jika penggunaannya tidak sesuai dengan tagging maka tidak dapat dicairkan. Hal tersebut menyebabkan Pemerintah Kabupaten Seruyan kesulitan mendapatkan anggaran untuk menggaji PPPK di luar formasi 2022 dan 2023. Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh sistem reimbursement adalah terjadinya keterlambatan dalam pencairan anggaran. Sisa DAU penggajian formasi PPPK 2023 yang belum digunakan seluruhnya tersebut, menjadi SiLPA terikat pada APBD 2024 yang hanya dapat digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan melekat PPPK.

Selanjutnya salah satu faktor penghambat menurunnya kinerja pendapatan daerah adalah dikarenakan Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 hanya bersumber dari deviden Jamkrida. Penurunan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan T.A. 2023, dikarenakan tidak disalurkan deviden Bank Kalteng kepada Pemda disebabkan karena adanya Peraturan OJK Nomor 12/PJOK.03/2022 tentang Konsolidasi Bank Umum, terkait modal inti minimum (MIM) Rp3.000.000.000.000,00 dimana ada 37 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan Bank Milik Pemerintah Daerah yang memiliki modal inti kurang dari Rp3.000.000.000,00, sejumlah Bank telah melakukan tambahan setoran modal pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB), penggabungan, pengambilalihan, maupun mengundang mitra strategis.



Dari hasil rapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemegang saham Bank Kalteng diambil keputusan untuk melakukan beberapa hal antara lain, mempercepat realisasi komitmen modal dasar sebesar Rp3,5 Triliun sesuai dengan RUPS dan modal disetor sesuai dengan masing-masing peraturan daerah serta meningkatkan porsi cadangan modal atau mengurangi porsi deviden atas laba Bank Kalteng guna mendukung pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp3 Triliun sebelum 31 Desember 2024.

3.2.2. Faktor Penunjang dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2023.

Selain tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan DAU ini. Namun di sisi lain, penerapan *specific grant* diharapkan dapat mempercepat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyediaan layanan publik yang lebih berkualitas pada pemerintah kabupaten seruyan. Adanya peningkatan pelayanan publik dan indikator kinerja di daerah, maka kedepannya pemerintah daerah akan kembali mendapatkan porsi *block grant* yang lebih besar dalam alokasi transfer ke daerah. Begitu pula dengan capaian kinerja pendapatan daerah, meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait ketentuan Peraturan dalam PMK Nomor 212/pmk.07/2022 Tahun 2022 dan PMK Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/Pmk.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus mengenai DAU *specific grant*. Beberapa permasalahan yang dialami pemerintah daerah seperti pemerintah daerah Kabupaten Seruyan perlu menjadi perhatian. Melalui DPRD Kabupaten Seruyan perlu mendorong Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan dan asistensi kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemenuhan DAU yang ditentukan penggunaannya. Kementerian Dalam Negeri perlu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami di pemerintah daerah terkait ketentuan yang masih baru pada DAU *Specific Grant* yang berdampak pada APBD serta melakukan sinkronisasi aturan pelaksanaan dengan Kementerian Keuangan. Tentunya aturan pelaksanaan ini juga perlu dilakukan *assessment* dengan menerima masukan dari pada berbagai pihak terkhusus Kemendagri dan Pemerintah daerah agar pelaksanaan kebijakan redesign DAU kedepan lebih tepat dan lebih baik lagi.

Pada Tahun 2023, entitas pelaporan keuangan daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) d.h.i. Bidang Akuntansi, Pelaporan, dan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mencakup 40 Perangkat Daerah (PD) sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:



Tabel 3.9
Rincian Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Kabupaten Seruyan

No.	Kode PD	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
1	1.01.01	Dinas Pendidikan
2	1.02.01	Dinas Kesehatan
3	1.02.02	Rsud Kuala Pembuang
4	1.02.03	Rsud Hanau
5	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
7	1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran
8	1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	1.06.01	Dinas Sosial
10	2.01.01	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
11	2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
12	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup
13	2.06.01	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
14	2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
15	2.09.01	Dinas Perhubungan
16	2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
17	2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
18	2.12.01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	2.13.01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata Dan Kebudayaan
20	2.17.01	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
21	3.01.01	Dinas Perikanan
22	3.03.01	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
23	4.01.01	Sekretariat Daerah
24	4.02.01	Inspektorat
25	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26	4.04.01	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
27	4.04.02	Badan Pendapatan Daerah
28	4.05.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29	4.08.01	Sekretariat Dprd
30	4.11.01	Kecamatan Seruyan Hilir
31	4.11.02	Kecamatan Seruyan Hilir Timur
32	4.11.03	Kecamatan Danau Sembuluh
33	4.11.04	Kecamatan Seruyan Raya
34	4.11.05	Kecamatan Danau Seluluk
35	4.11.06	Kecamatan Hanau
36	4.11.07	Kecamatan Batu Ampar
37	4.11.08	Kecamatan Seruyan Tengah
38	4.11.09	Kecamatan Seruyan Hulu
39	4.11.10	Kecamatan Suling Tambun
40	4.12.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi SKPD (SA SKPD) yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan). Laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan laporan keuangan telah dilakukan rekonsiliasi antara SKPD dengan PPKD setiap bulannya, dan rekonsiliasi antara PPKD dengan Kasda atas rekening koran Kas Umum Daerah.

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi adalah LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi adalah LRA, Neraca, Laporan Operasional, LAK, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK SKPKD. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan LKPD adalah LRA, LPSAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah pedoman atau ketentuan yang dipilih berdasarkan prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas, dan tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan anggaran dan antar periode.

Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD dan tidak termasuk perusahaan daerah. Dimana entitas pelaporan dalam LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2023 adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dan entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Seruyan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Seruyan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan lampiran yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.



Pemerintah Kabupaten Seruyan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO dan Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah Kabupaten Seruyan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari Pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA (basis kas) adalah penerimaan Bendahara Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Seruyan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan;



- b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Seruyan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan.

4.2.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.



4.2.3.1 Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Seruyan, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kriteria aset lancar tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang sebagaimana disebut diatas merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan, jaringan dan irigasi Aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

4.2.3.2 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban, umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari



masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten Seruyan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Seruyan atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.2.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Seruyan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Seruyan pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.2.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos-pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.



4.2.5 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Seruyan selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seruyan;
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seruyan.

4.2.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;



- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

4.3 Basis Pengakuan dan Pengukuran Unsur Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Basis Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruhi oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4.3.2 Basis Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat



sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**BAB V****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Secara lebih rinci Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Seruyan pada T.A. 2023 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah- LRA

31 Desember 2023
1.195.613.198.853,29

31 Desember 2022
1.112.241.971.242,55

Realisasi Pendapatan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.195.613.198.853,29 atau 94,77% dari pagu anggaran Rp1.261.538.366.239,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan T.A. 2022 sebesar Rp1.112.241.971.242,55, maka realisasi T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp83.371.227.610,274 Atau 7,50%, Pendapatan Kabupaten Seruyan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Perimbangan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pendapatan – LRA

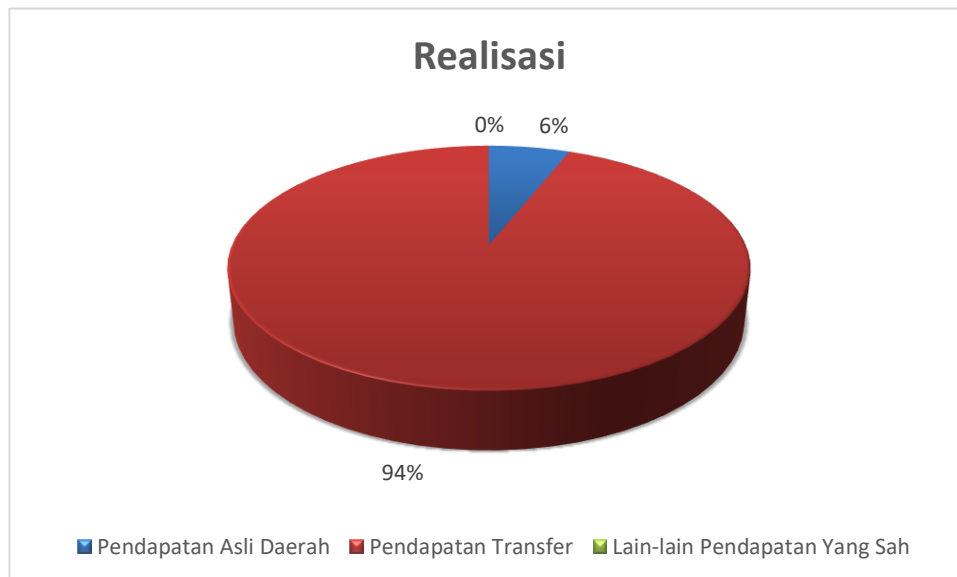
Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	121.226.810.406,00	71.958.279.810,29	59,36	82.433.031.703,79	(10.474.751.893,50)
Pendapatan Transfer	1.140.291.555.833,00	1.123.634.919.043,00	98,54	1.019.316.823.163,76	104.318.095.879,24
Lain-lain Pendapatan yang Sah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	10.492.116.375,00	(10.472.116.375,00)
Jumlah	1.261.538.366.239,00	1.195.613.198.853,29	94,77	1.112.241.971.242,55	83.371.227.610,74

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan, diakibatkan meningkatnya target dan realisasi pendapatan transfer, serta terealisasinya Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 100%, walaupun secara keseluruhan mengalami kenaikan tetapi pada Pendapatan Asli Daerah



mengalami penurunan, penurunan Pendapatan Asli Daerah terjadi diakibatkan Pendapatan Pajak tidak terealisasi secara maksimal, dimana Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.637.458.885,19 atau 28,52% dari anggaran Rp58.327.260.338,00, walaupun terdapat beberapa objek pajak lain terealisasi hampir mencapai 100% dari yang ditargetkan.

Grafik 5.1
Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan TA 2023



Uraian masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	71.958.279.810,29	82.433.031.703,79

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp71.958.279.810,29 atau 59,36% dari anggaran Rp121.226.810.406,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah T.A. 2022 sebesar Rp82.433.031.703,79, maka realisasi T.A. 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp10.474.751.893,50 atau 12,71%. Rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

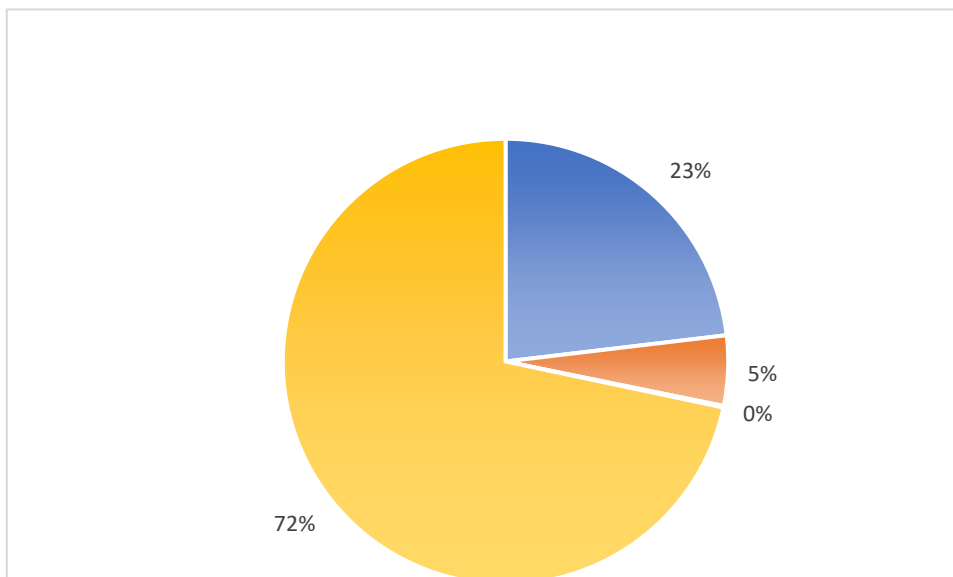


Tabel 5.2
Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	58.327.260.338,00	16.639.747.885,19	28,53	14.379.211.257,19	2.260.536.628,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.613.581.556,00	3.660.960.661,86	65,22	3.126.459.134,68	534.501.527,18
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.279.891.099,00	81.147.428,96	0,72	10.802.806.489,00	(10.721.659.060,04)
Lain-lain PAD yang Sah	46.006.077.413,00	51.576.423.834,28	112,11	54.124.554.822,92	(2.548.130.988,64)
Jumlah	121.226.810.406,00	71.958.279.810,29	59,36	82.433.031.703,79	(10.474.751.893,50)

Komposisi anggaran Pendapatan Asli Daerah T.A. 2023 dan capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah T.A. 2023 terhadap realisasi pendapatan T.A. 2022 adalah sebagai berikut:

Grafik 5.2
Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan TA 2023





Grafik 5.3
Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan TA 2023



Menurunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp71.958.279.810,29 atau 59,36% dari anggaran Rp121.226.810.406,00. disebabkan oleh besarnya anggaran yang ditargetkan dan tidak terealisasinya pendapatan secara maksimal, terutama pada objek pendapatan pajak daerah dimana Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp58.327.260.338,00 dan terealisasi hanya sebesar Rp16.637.458.885,19 atau sebesar 28,52%, rincian objek Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan masing-masing di bawah ini.

5.1.1.a	Pendapatan Pajak Daerah	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		16.637.458.885,19	14.379.211.257,19

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.637.458.885,19 atau 28,52% dari anggaran Rp58.327.260.338,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah T.A. 2022 sebesar Rp14.379.211.257,19, maka realisasi T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.258.247.628,00 atau 15,70%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:



Tabel 5.3
Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pajak Hotel	100.500.000,00	54.867.400,00	54,59	54.443.600,00	423.800,00
Pajak Restoran	1.251.582.315,00	1.334.304.031,00	106,61	894.860.094,00	439.443.937,00
Pajak Hiburan	12.500.000,00	0,00	0,00	10.587.800,00	(10.587.800,00)
Pajak Reklame	206.500.000,00	115.327.927,00	55,85	194.760.800,52	(79.432.873,52)
Pajak Penerangan Jalan	10.666.154.146,00	9.709.246.205,19	91,03	8.837.667.691,32	871.578.513,87
Pajak Air Tanah	135.004.491,00	125.889.720,00	93,25	183.192.585,84	(57.302.865,84)
Pajak Sarang Burung Walet	125.000.000,00	0,00	0,00	10.806.250,00	(10.806.250,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.569.077.359,00	964.066.862,00	61,44	952.291.732,51	11.775.129,49
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.109.319.774,00	3.409.793.348,00	42,05	2.775.018.295,00	634.775.053,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	36.151.622.253,00	926.252.392,00	2,56	465.582.408,00	460.669.984,00
Jumlah	58.327.260.338,00	16.639.747.885,19	28,53	14.379.211.257,19	2.260.536.628,00

Tidak terealisasinya secara maksimal Pendapatan Pajak Daerah, walaupun secara total mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2022. Berdasarkan data penerimaan Bapenda Kabupaten Seruyan T.A. 2023 hanya terealisasi sebesar Rp16.639.747.885,19 atau 28,53% dari target penerimaan Rp58.327.260.338,00 dapat disampaikan bahwa kendala-kendala capaian realisasi pajak daerah yang signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Pajak Reklame dari target penerimaan Rp.206.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.115.327.927,00 atau 55,85% dikarenakan berkurangnya objek reklame tahun 2023 yang bersifat insidentil. Badan Pendapatan Daerah berupaya akan memperbanyak pembangunan media reklame di luar Kecamatan Seruya Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur, bekerjasama dengan pihak kecamatan untuk melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah apabila terdapat pemasangan reklame yang bersifat komersil namun belum melakukan pembayaran pajak;



2. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Dihasilkan Sendiri dari target penerimaan Rp10.666.154.146,00 terealisasi sebesar Rp9.709.246.205,19 atau 91,03% disebabkan masih banyak perusahaan yang menyampaikan data KWH tidak secara rinci, hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam melakukan identifikasi terhadap komponen perhitungan KWH yang akan berpengaruh terhadap ketetapan Pajak Penerangan Jalan. Ada beberapa perusahaan yang menggunakan listrik yang bersumber dari PT. PLN sehingga mengurangi capaian target. Upaya yang akan dilakukan yaitu akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan apabila diperlukan terkait dengan kepatuhan dalam melaporkan dan membayarkan PPJ ke Kabupaten Seruyan;
3. Pajak Sarang Burung Walet dari target penerimaan Rp.125.000.000,00 dengan realisasi nihil disebabkan menurunnya tingkat kesadaran masyarakat, serta kurangnya sosialisasi ke petani walet dan tidak optimalnya penagihan secara jemput bola/ penagihan langsung ke petani walet. Serta akan melakukan sosialisasi serta penagihan langsung ke petani walet sebagai upaya pemungutan pajak sarang burung walet;
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari target penerimaan Rp.1.569.077.359,00 terealisasi sebesar Rp964.066.862,00 atau 61,44%, tidak tercapainya target MBLB dipengaruhi karena minimnya tambang yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan dan belum beroperasinya tambang pasir silika/kwarsa yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan. Menindaklanjuti hal tersebut Bapenda akan melakukan pendataan potensi tambang yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan;
5. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari target penerimaan Rp.8.109.319.774,00 terealisasi sebesar Rp.3.409.793.348,00 atau 42,05% dipengaruhi oleh target piutang PBB-P2 tahun 2018-2022 ditetapkan sebagai target penerimaan tahun 2023. Badan Pendapatan Daerah telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik sebagai upaya optimalisasi penerimaan pendapatan;
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target penerimaan Rp.36.151.622.253,00 terealisasi sebesar Rp.926.252.392,00 atau 2,56% karena berdasarkan hasil konfirmasi dari pihak perusahaan, bahwa proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) masih terus berproses. Hal tersebut disebabkan karena



banyak lahan perusahaan yang masuk dalam kawasan hutan, sehingga memerlukan proses yang lebih panjang dalam pengurusan HGU, hal ini berakibat tertundanya pembayaran BPHTB di wilayah Kabupaten Seruyan. Bapenda berupaya untuk selalu melakukan pendekatan dan mendorong kepada pihak perusahaan untuk melakukan pengurusan HGU.

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sesuai objek sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rincian Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	58.327.260.338,00	16.639.747.885,19	28,53	14.379.211.257,19	2.260.536.628,00
Pajak Hotel	100.500.000,00	54.867.400,00	54,59	54.443.600,00	423.800,00
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	100.500.000,00	54.867.400,00	54,59	54.443.600,00	423.800,00
Pajak Restoran	1.251.582.315,00	1.334.304.031,00	106,61	894.860.094,00	439.443.937,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	50.946.500,00	17.523.900,00	34,40	12.400.300,00	5.123.600,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan	1.200.635.815,00	1.316.780.131,00	109,67	882.459.794,00	434.320.337,00
Pajak Hiburan	12.500.000,00	0,00	0,00	10.587.800,00	(10.587.800,00)
Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	12.500.000,00	0,00	0,00	10.587.800,00	(10.587.800,00)
Pajak Reklame	206.500.000,00	115.327.927,00	55,85	194.760.800,52	(79.432.873,52)
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	153.500.000,00	80.816.536,00	52,65	151.595.903,52	(70.779.367,52)
Pajak Reklame Kain	50.500.000,00	34.511.391,00	68,34	43.164.897,00	(8.653.506,00)
Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan	10.666.154.146,00	9.709.246.205,19	91,03	8.837.667.691,32	871.578.513,87
Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri	4.496.058.095,00	3.253.812.904,19	72,37	3.276.122.152,32	(22.309.248,13)
Pajak Penerangan Jalan sumber lain	6.170.096.051,00	6.455.433.301,00	104,62	5.561.545.539,00	893.887.762,00
Pajak Air Tanah	135.004.491,00	125.889.720,00	93,25	183.192.585,84	(57.302.865,84)
Pajak Air Tanah	135.004.491,00	125.889.720,00	93,25	183.192.585,84	(57.302.865,84)
Pajak Sarang Burung Walet	125.000.000,00	0,00	0,00	10.806.250,00	(10.806.250,00)
Pajak Sarang Burung Walet	125.000.000,00	0,00	0,00	10.806.250,00	(10.806.250,00)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.569.077.359,00	964.066.862,00	61,44	952.291.732,51	11.775.129,49
Pajak Pasir dan Kerikil	442.715.900,00	857.934.203,00	193,79	0,00	857.934.203,00
Pajak Pasir Kuarsa	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00
Pajak Mineral bukan logam dan Batuan Lainnya	1.126.361.459,00	104.907.659,00	9,31	952.291.732,51	(847.384.073,51)
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.109.319.774,00	3.409.793.348,00	42,05	2.775.018.295,00	634.775.053,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	8.109.319.774,00	3.409.793.348,00	42,05	2.775.018.295,00	634.775.053,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	36.151.622.253,00	926.252.392,00	2,56	465.582.408,00	460.669.984,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak	34.953.222.253,00	417.967.300,00	1,20	465.582.408,00	(47.615.108,00)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemberian Hak Baru	1.198.400.000,00	508.285.092,00	42,41	0,00	508.285.092,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	58.327.260.338,00	16.639.747.885,19	28,53	14.379.211.257,19	2.260.536.628,00

Pada T.A. 2023 Pendapatan Pajak Daerah seluruh SKPD termasuk Kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan tidak terealisasi dikarenakan tidak lagi diberikannya pelimpahan kewenangan untuk menarik pajak daerah, dimana penarikan pajak daerah dipusatkan semua kepada Badan Pendapatan dan Daerah Kabupaten Seruyan. Rincian Pendapatan Pajak Daerah pada masing-masing SKPD di Kabupaten Seruyan TA 2023 dan 2022 sebagai berikut:



Tabel 5.5
Rincian Pendapatan Pajak Daerah pada SKPD

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	58.327.260.338,00	16.639.747.885,19	28,53	14.017.120.068,19	2.622.627.817,00
Kecamatan Seruyan Hilir	0,00	0,00	0,00	3.125.681,00	(3.125.681,00)
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	0,00	0,00	0,00	6.868.975,00	(6.868.975,00)
Kecamatan Danau Sembuluh	0,00	0,00	0,00	22.576.775,00	(22.576.775,00)
Kecamatan Seruyan Raya	0,00	0,00	0,00	71.114.155,00	(71.114.155,00)
Kecamatan Danau Seluluk	0,00	0,00	0,00	42.817.372,00	(42.817.372,00)
Kecamatan Hanau	0,00	0,00	0,00	135.184.845,00	(135.184.845,00)
Kecamatan Batu Ampar	0,00	0,00	0,00	12.458.150,00	(12.458.150,00)
Kecamatan Seruyan Tengah	0,00	0,00	0,00	60.148.836,00	(60.148.836,00)
Kecamatan Seruyan Hulu	0,00	0,00	0,00	5.223.900,00	(5.223.900,00)
Kecamatan Suling Tambun	0,00	0,00	0,00	2.572.500,00	(2.572.500,00)
Jumlah	58.327.260.338,00	16.639.747.885,19	28,53	14.379.211.257,19	2.260.536.628,00

5.1.1.b. Pendapatan Retribusi Daerah

31 Desember 2023
3.660.960.661,86

31 Desember 2022
3.126.459.134,68

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.660.960.661,86 atau 65,22% dari anggaran Rp5.613.581.556,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah T.A. 2022 sebesar Rp3.126.459.134,68, maka realisasi T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp534.501.527,18 atau 17,10%.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:



Tabel 5.6
Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Retribusi Jasa Umum	1.815.641.840,00	1.633.869.566,00	89,99	1.827.400.743,00	(193.531.177,00)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	750.000.000,00	509.063.000,00	67,88	990.530.700,00	(481.467.700,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.475.000,00	17.805.000,00	155,16	10.455.000,00	7.350.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	250.000.000,00	253.390.000,00	101,36	285.187.000,00	(31.797.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar	101.353.120,00	98.220.250,00	96,91	95.898.250,00	2.322.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	230.000.000,00	125.410.000,00	54,53	172.560.000,00	(47.150.000,00)
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	25.000.000,00	11.000.000,00	44,00	0,00	11.000.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	65.000.000,00	69.755.000,00	107,32	79.995.000,00	(10.240.000,00)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	382.813.720,00	549.226.316,00	143,47	192.774.793,00	356.451.523,00
Retribusi Jasa Usaha	738.558.715,00	766.255.000,00	103,75	804.068.767,70	(37.813.767,70)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	479.560.248,00	551.424.500,00	114,99	563.731.767,70	(12.307.267,70)
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	3.001.350,00	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	75.997.117,00	35.390.500,00	46,57	47.802.000,00	(12.411.500,00)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	180.000.000,00	179.440.000,00	99,69	192.035.000,00	(12.595.000,00)
Retribusi Perizinan Tertentu	3.059.381.001,00	1.260.836.095,86	41,21	494.989.623,98	765.846.471,88
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.059.381.001,00	1.260.836.095,86	41,21	494.989.623,98	765.846.471,88
Jumlah	5.613.581.556,00	3.660.960.661,86	65,22	3.126.459.134,68	534.501.527,18

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan T.A. 2023 sebesar Rp3.660.960.661,86 atau 65,22% dari anggaran Rp5.613.581.556,00, realisasi pendapatan retribusi mengalami kenaikan pada Tahun Anggaran 2023 disebabkan oleh beberapa hal berikut antara lain:

1. Penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengawasan dan pengendalian serta retribusi izin mendirikan bangunan. Kenaikan realisasi retribusi disebabkan semakin



optimalnya penagihan dan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan/menggunakan sarana prasarana;

2. Sedangkan beberapa penurunan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi retribusi parkir, pengujian kendaraan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga. Ini disebabkan rusaknya sarana dan prasarana, serta tidak ada peningkatan penyediaan sarana prasarana rekreasi dan olahraga dan lesunya kegiatan perekonomian masyarakat *pasca pandemic Covid-19*.

Pajak retribusi daerah merupakan akumulasi penerimaan seluruh SKPD yang mempunyai target dan pendapatan retribusi daerah. Masing-masing Rincian Pendapatan Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD di Kabupaten Seruyan T.A. 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.7
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah pada SKPD

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dinas Pendidikan	87.042.000,00	98.838.000,00	113,55	107.286.000,00	(8.448.000,00)
Dinas Kesehatan	750.000.000,00	509.063.000,00	67,88	1.078.483.700,00	(569.420.700,00)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	25.000.000,00	11.000.000,00	44,00	311.470.523,57	(300.470.523,57)
Dinas Lingkungan Hidup	5.425.000,00	14.460.000,00	266,54	7.660.000,00	6.800.000,00
Dinas Perhubungan	555.997.117,00	414.190.500,00	74,50	506.299.000,00	(92.108.500,00)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	382.813.720,00	549.226.316,00	143,47	192.774.793,00	356.451.523,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	257.520.000,00	267.920.250,00	104,04	262.830.417,70	5.089.832,30
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	197.713.850,00	190.835.000,00	96,52	207.085.000,00	(16.250.000,00)
Dinas Perikanan	35.464.928,00	67.820.000,00	191,23	70.934.600,00	(3.114.600,00)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	6.000.000,00	3.756.000,00	62,60	5.232.000,00	(1.476.000,00)
Sekretariat Daerah	213.719.125,00	223.505.500,00	104,58	156.699.000,00	66.806.500,00
Badan Pendapatan Daerah	4.550.000,00	12.000.000,00	263,74	0,00	12.000.000,00
Kecamatan Seruyan Hilir	312.520.585,00	5.164.226,69	1,65	9.329.500,00	(4.165.273,31)
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	62.504.117,00	5.317.128,35	8,51	0,00	5.317.128,35
Kecamatan Danau Sembuluh	270.017.785,00	258.673.309,15	95,80	3.465.876,33	255.207.432,82



Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kecamatan Seruyan Raya	1.000.000.000,00	918.337.950,06	91,83	106.688.641,20	811.649.308,86
Kecamatan Danau Seluluk	343.772.643,00	19.795.840,47	5,76	12.137.609,00	7.658.231,47
Kecamatan Hanau	433.481.575,00	38.103.488,46	8,79	44.672.380,80	(6.568.892,34)
Kecamatan Batu Ampar	125.008.234,00	7.321.037,50	5,86	2.499.003,00	4.822.034,50
Kecamatan Seruyan Tengah	474.530.877,00	35.301.851,44	7,44	33.272.990,08	2.028.861,36
Kecamatan Seruyan Hulu	60.500.000,00	7.934.172,60	13,11	7.638.100,00	296.072,60
Kecamatan Suling Tambun	10.000.000,00	2.397.091,14	23,97	0,00	2.397.091,14
Jumlah	5.613.581.556,00	3.660.960.661,86	65,22	3.126.459.134,68	534.501.527,18

Kenaikan realisasi penerimaan retribusi daerah pada SKPD pengelola retribusi tahun 2023 dibanding tahun 2022 yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan beberapa kecamatan berasal dari Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Persetujuan Bangun Gedung, Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan disebabkan adanya perubahan tarif retribusi, peningkatan pelayanan administrasi, petugas pungut aktif menjemput bola dalam pelayanan. Sedangkan penurunan juga terjadi di beberapa SKPD dikarenakan adanya pengalihan target khususnya Retribusi Persetujuan Bangun Gedung, Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang sebelumnya di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dipindahkan targetnya di kecamatan serta belum optimalnya pemerintah daerah memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

5.1.1.c.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		81.147.428,96	10.802.806.489,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Seruyan T.A. 2023 sebesar Rp81.147.428,96 atau 0,72% dari anggaran Rp11.279.891.099,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp10.802.806.489,00 maka realisasi T.A. 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.721.659.060,04 atau 99,25%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Seruyan T.A. 2023 dan 2022 sebagai berikut:



Tabel 5.8
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-JAMKRIDA	0,00	81.147.428,96	0,72	0,00	81.147.428,96
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – Bank Kalteng	11.279.891.099,00	0,00	0,00	10.802.806.489,00	(10.802.806.489,00)
Jumlah	11.279.891.099,00	81.147.428,96	0,72	10.802.806.489,00	(10.721.659.060,04)

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan T.A. 2023 hanya bersumber dari deviden pada Jamkrida. Penurunan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan T.A. 2023, dikarenakan tidak disalurkan deviden Bank Kalteng kepada Pemda disebabkan karena adanya hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Kalteng dimana mempercepat realisasi komitmen modal dasar sebesar Rp3,5 Triliun sesuai dengan RUPS dan modal disetor sesuai dengan masing-masing peraturan daerah serta meningkatkan porsi cadangan modal atau mengurangi porsi deviden atas laba Bank Kalteng guna mendukung pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp3 Triliun sebelum 31 Desember 2024, pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/PJOK.03/2022 tentang Konsolidasi Bank Umum.

5.1.1.d.	Lain-lain PAD Yang Sah	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		51.576.423.834,28	54.124.554.822,92

Target Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, dimana tercapai sebesar Rp51.576.423.834,28 atau 112,11% dari anggaran sebesar Rp46.006.077.413,00. Walaupun realisasi pada TA 2023 melebihi target, tetapi jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah T.A. 2022 sebesar Rp54.124.554.822,92 maka realisasi T.A. 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp2.548.130.988,64 atau 4,71%.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Seruyan T.A. 2023 dan 2022 sebagai berikut:



Tabel 5.9
Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	1.659.728.815,00	(1.659.728.815,00)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.035.000.000,00	551.501.721,92	53,29	473.320.274,57	78.181.447,35
Jasa Giro	3.000.000.000,00	4.905.014.263,00	163,50	4.325.980.973,60	579.033.289,40
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000,00	90.142.140,04	180,28	191.116.520,04	(100.974.380,00)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	7.764.660.305,00	3.317.030.138,01	42,72	2.584.690.192,19	732.339.945,82
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	167.529.929,15	0,00	253.504.193,45	(85.974.264,30)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	25.812.259,00	129.330.399,49	501,04	81.481.046,41	47.849.353,08
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	1.146.386,00	0,00	155.478,66	990.907,34
Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	839.625.186,67	83,96	716.856.932,00	122.768.254,67
Pendapatan BLUD	33.130.604.849,00	41.575.103.670,00	125,49	43.837.720.397,00	(2.262.616.727,00)
Jumlah	46.006.077.413,00	51.576.423.834,28	112,11	54.124.554.822,92	(2.548.130.988,64)

Rincian Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.10
Rincian Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Lain-Lain PAD yang Sah	46.006.077.413,00	51.576.423.834,28	112,11	54.124.554.822,92	(2.548.130.988,64)
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	1.659.728.815,00	(1.659.728.815,00)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	1.659.728.815,00	(1.659.728.815,00)
Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	1.659.728.815,00	(1.659.728.815,00)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.035.000.000,00	551.501.721,92	53,29	473.320.274,57	78.181.447,35
Hasil Sewa BMD	1.035.000.000,00	551.501.721,92	53,29	473.320.274,57	78.181.447,35
Jasa Giro	3.000.000.000,00	4.905.014.263,00	163,50	4.325.980.973,60	579.033.289,40
Jasa Giro pada Kas Daerah	3.000.000.000,00	4.905.014.263,00	163,50	4.325.915.643,60	579.098.619,40



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	65.330,00	(65.330,00)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000,00	90.142.140,04	180,28	191.116.520,04	(100.974.380,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	50.000.000,00	90.142.140,04	180,28	191.116.520,04	(100.974.380,00)
Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	7.764.660.305,00	3.317.030.138,01	42,72	2.584.690.192,19	732.339.945,82
Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	7.764.660.305,00	3.317.030.138,01	42,72	2.584.690.192,19	732.339.945,82
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	167.529.929,15	0,00	253.504.193,45	(85.974.264,30)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	167.529.929,15	0,00	253.504.193,45	(85.974.264,30)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	25.812.259,00	129.330.399,49	501,04	81.481.046,41	47.849.353,08
Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
Pendapatan Denda Pajak Restoran	119.494,00	119.494,00	100,00	77.000,00	42.494,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.375.891,00	3.089.058,95	224,51	1.727.193,99	1.361.864,96
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	4.160.565,00	31.740.672,54	762,89	58.071.191,92	(26.330.519,38)
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.336.539,00	4.351.244,00	325,56	531.491,50	3.819.752,50
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.260.972,00	2.382.901,00	188,97	0,00	2.382.901,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	17.558.798,00	87.647.029,00	499,16	21.068.169,00	66.578.860,00
Pendapatan Denda Retribusi	0,00	1.146.386,00	0,00	155.478,66	990.907,34
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	1.146.386,00	0,00	0,00	1.146.386,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	155.478,66	(155.478,66)
Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	839.625.186,67	83,96	716.856.932,00	122.768.254,67
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	0,00	193.842.687,00	0,00	99.015.886,00	94.826.801,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pembayaran Gaji dan Tunjangan					
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.000.000.000,00	645.782.499,67	64,58	617.841.046,00	27.941.453,67
Pendapatan BLUD	33.130.604.849,00	41.575.103.670,00	125,49	43.837.720.397,00	(2.262.616.727,00)
Jumlah Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah	46.006.077.413,00	51.576.423.834,28	112,11	54.124.554.822,92	(2.548.130.988,64)

Berikut rincian Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada masing-masing SKPD di Kabupaten Seruyan T.A. 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.11
Rincian Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah pada SKPD

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dinas Kesehatan	7.374.018.332,00	7.951.979.829,00	107,84	0,00	7.951.979.829,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang	25.756.586.517,00	30.191.186.596,00	117,22	20.733.598.084,00	9.457.588.512,00
Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	0,00	3.431.937.245,00	0,00	23.104.122.313,00	(19.672.185.068,00)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	705.500.000,00	269.266.721,92	38,17	168.164.274,57	101.102.447,35
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	200.000.000,00	208.735.000,00	104,37	286.156.000,00	(77.421.000,00)
Dinas Perhubungan	85.000.000,00	29.000.000,00	34,12	4.000.000,00	25.000.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	155.478,66	(155.478,66)
Sekretariat Daerah	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	0,00	14.500.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	11.814.141.549,00	9.319.247.646,46	78,88	9.729.579.180,63	(410.331.534,17)
Badan Pendapatan Daerah	26.331.015,00	129.413.254,59	491,49	83.779.492,06	45.633.762,53
Kecamatan Seruyan Hilir	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	0,00	1,41	0,00	0,00	1,41
Kecamatan Danau Sembuluh	0,00	2,44	0,00	0,00	2,44
Kecamatan Seruyan Raya	0,00	1.146.387,01	0,00	0,00	1.146.387,01
Kecamatan Hanau	0,00	10.763,54	0,00	0,00	10.763,54



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kecamatan Batu Ampar	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
Kecamatan Seruyan Hulu	30.000.000,00	30.000.384,40	100,00	15.000.000,00	15.000.384,40
Kecamatan Suling Tambun	0,00	0,86	0,00	0,00	0,86
Jumlah	46.006.077.413,00	51.576.423.834,28	112,11	54.124.554.822,92	(2.548.130.988,64)

Pendapatan Transfer

31 Desember 2023

31 Desember 2022

1.123.634.919.043,00

1.019.316.823.163,76

Realisasi Pendapatan Transfer pada Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.123.634.919.043,00 atau 98,54% dari anggaran Rp1.140.291.555.833,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer T.A. 2022 sebesar Rp1.019.316.823.163,76 maka realisasi T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp104.318.095.879,24 atau 10,23%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.12
Rincian Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.065.078.530.482,00	1.055.560.893.209,00	99,11	967.508.351.279,00	88.052.541.930,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	75.213.025.351,00	68.074.025.834,00	90,51	51.808.471.884,76	16.265.553.949,24
Jumlah	1.140.291.555.833,00	1.123.634.919.043,00	98,54	1.019.316.823.163,76	104.318.095.879,24

5.1.1.e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2023

31 Desember 2022

1.055.560.893.209,00

967.508.351.279,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.055.560.893.209,00 atau 99,11% dari anggaran Rp1.065.078.530.482,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat T.A. 2022 sebesar Rp967.508.351.279,00 maka realisasi T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp88.052.541.930,00, atau 9,10%. Rincian anggaran dan realisasi Dana Perimbangan-



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.13
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dana Perimbangan	970.590.874.482,00	961.073.237.209,00	99,02	869.303.514.879,00	91.769.722.330,00
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	9.687.181.000,00	(9.687.181.000,00)
Dana Desa	94.487.656.000,00	94.487.656.000,00	100,00	88.517.655.400,00	5.970.000.600,00
Jumlah	1.065.078.530.482,00	1.055.560.893.209,00	99,11	967.508.351.279,00	88.052.541.930,00

5.1.1.e.1 Dana Perimbangan

31 Desember 2023

961.073.237.209,00

31 Desember 2022

869.303.514.879,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp961.073.237.209,00 atau 99,02% dari anggaran Rp970.590.874.482,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan T.A. 2022 sebesar Rp869.303.514.879,00 maka realisasi T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp91.769.722.330,00 atau 10,56%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.14
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	243.721.890.482,00	241.609.454.608,00	99,13	173.867.865.713,00	67.741.588.895,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	580.016.319.000,00	580.006.640.427,00	100,00	559.137.113.257,00	20.869.527.170,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.774.840.000,00	55.546.371.251,00	97,84	69.566.378.292,00	(14.020.007.041,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	90.077.825.000,00	83.910.770.923,00	93,15	66.732.157.617,00	17.178.613.306,00
Jumlah	970.590.874.482,00	961.073.237.209,00	99,02	869.303.514.879,00	91.769.722.330,00



Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.15
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
DANA PERIMBANGAN	970.590.874.482,00	961.073.237.209,00	99,02	869.303.514.879,00	91.769.722.330,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	243.721.890.482,00	241.609.454.608,00	99,13	173.867.865.713,00	67.741.588.895,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	48.114.724.000,00	54.401.409.923,00	113,07	67.925.886.884,00	(13.524.476.961,00)
DBH PPh Pasal 21	0,00	6.177.684.047,00	0,00	4.556.697.000,00	1.620.987.047,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	5.642.797.000,00	35.931.792,00	0,64	57.848.000,00	(21.916.208,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	27.193.000,00	49.254.869,00	181,13	19.496.000,00	29.758.869,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	184.534.000,00	(184.534.000,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	109.427.622.000,00	230.382.726,00	0,21	301.701.000,00	(71.318.274,00)
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	32.891.415.482,00	131.102.562.303,00	398,59	82.973.581.829,00	48.128.980.474,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	20.491.300.000,00	47.186.151.737,00	230,27	15.889.810.000,00	31.296.341.737,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	25.000.000.000,00	87.485.000,00	0,35	0,00	87.485.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.126.839.000,00	2.338.592.211,00	109,96	1.958.311.000,00	380.281.211,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	580.016.319.000,00	580.006.640.427,00	100,00	559.137.113.257,00	20.869.527.170,00
DAU	580.016.319.000,00	580.006.640.427,00	100,00	559.137.113.257,00	20.869.527.170,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.774.840.000,00	55.546.371.251,00	97,84	69.566.378.292,00	(14.020.007.041,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	734.860.000,00	733.664.510,00	99,84	1.309.653.600,00	(575.989.090,00)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10.098.486.000,00	9.797.862.400,00	97,02	10.020.634.800,00	(222.772.400,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	17.150.167.000,00	16.754.942.046,00	97,70	6.638.925.800,00	10.116.016.246,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	361.565.333,00	(361.565.333,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	2.106.259.092,00	(2.106.259.092,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.256.549.000,00	2.083.901.100,00	92,35	11.243.090.200,00	(9.159.189.100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	132.359.000,00	126.319.245,00	95,44	733.244.672,00	(606.925.427,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	798.372.450,00	(798.372.450,00)
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	1.047.800.000,00	(1.047.800.000,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	18.551.713.000,00	18.268.780.000,00	98,47	12.384.280.000,00	5.884.500.000,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	5.734.034.500,00	(5.734.034.500,00)
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.600.821.000,00	(4.600.821.000,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	12.587.696.845,00	(12.587.696.845,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	7.850.706.000,00	7.780.901.950,00	99,11	0,00	7.780.901.950,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	90.077.825.000,00	83.910.770.923,00	93,15	66.732.157.617,00	17.178.613.306,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	28.157.100.000,00	27.974.951.775,00	99,35	26.336.140.507,00	1.638.811.268,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.672.500.000,00	1.592.500.000,00	95,22	60.000.000,00	1.532.500.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	29.451.061.000,00	29.451.060.000,00	100,00	26.477.428.555,00	2.973.631.445,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.240.500.000,00	1.455.937.000,00	117,37	1.087.287.500,00	368.649.500,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	6.769.588.000,00	3.162.332.449,00	46,71	5.663.974.445,00	(2.501.641.996,00)
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.247.200.000,00	3.186.045.000,00	98,12	3.058.467.000,00	127.578.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	936.170.000,00	890.631.350,00	95,14	607.800.000,00	282.831.350,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.448.109.000,00	12.988.133.657,00	89,90	0,00	12.988.133.657,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	331.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.078.952.000,00	2.402.718.160,00	78,04	2.633.627.000,00	(230.908.840,00)
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	480.000.000,00	453.704.732,00	94,52	391.242.610,00	62.462.122,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	265.575.000,00	247.756.800,00	93,29	416.190.000,00	(168.433.200,00)
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Jumlah Dana Perimbangan	970.590.874.482,00	961.073.237.209,00	99,02	869.303.514.879,00	91.769.722.330,00

5.1.1.e.2 Dana Insentif Daerah

31 Desember 2023

0,00

31 Desember 2022

9.687.181.000,00

Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Seruyan tidak menganggarkan dan menargetkan pendapatan Dana Intensif Daerah (DID), hal ini disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) yang berbasis Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan. Hal itu bertujuan untuk memacu



Pemerintah daerah agar terus melakukan perbaikan kinerja daerah dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sehingga anggaran dan realisasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Insentif Daerah T.A. 2022 sebesar Rp9.687.181.000,00. Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Insentif Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.16
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Insentif Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	9.687.181.000,00	(9.687.181.000,00)
Jumlah	0,00	0,00	0,00	9.687.181.000,00	(9.687.181.000,00)

5.1.1.e.3 Dana Desa

31 Desember 2023
94.487.656.000,00

31 Desember 2022
88.517.655.400,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp94.487.656.000,00 atau 100% dari anggaran Rp94.487.656.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– Dana Desa T.A. 2022 sebesar Rp88.517.655.400,00 maka realisasi T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.970.000.600,00 atau 6,74%. Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Desa Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.17
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Desa

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dana Desa	94.487.656.000,00	94.487.656.000,00	100	88.517.655.400,00	5.970.000.600,00
Jumlah	94.487.656.000,00	94.487.656.000,00	100	88.517.655.400,00	5.970.000.600,00

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terkait Dana Desa pada masing-masing desa di Kabupaten Seruyan T.A. 2023 sebagai berikut:



Tabel 5.18
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Desa pada masing-masing Desa
di Kab. Seruyan

No.	Nama Desa	Kecamatan	Pagu Desa (Rp)	Dana Desa Tambahan (Rp)	DD Tahap I	DD Tahap II	DD Tahap III	Realisasi Dana Desa Perdesa (Rp)
					Nilai Penyaluran (Rp)	Nilai Penyaluran (Rp)	Nilai Penyaluran (Rp)	
1	RANGKANG MUNDUK	SULING TAMBUN	1.070.062.000	0,00	321.018.600	321.018.600	287.624.800	1.070.062.000
2	RANTAU BETUNG	SULING TAMBUN	809.390.000	0,00	242.817.000	242.817.000	125.756.000	809.390.000
3	TANJUNG TUKAL	SULING TAMBUN	991.054.000	0,00	297.316.200	297.316.200	259.621.600	991.054.000
4	TUMBANG GUGUP	SULING TAMBUN	963.446.000	0,00	289.033.800	289.033.800	147.778.400	963.446.000
5	TUMBANG HENTAS	SULING TAMBUN	1.162.208.000	0,00	348.662.400	348.662.400	346.083.200	1.162.208.000
6	TUMBANG LANGKAI	SULING TAMBUN	1.318.087.000	0,00	395.426.100	395.426.100	199.634.800	1.318.087.000
7	TUMBANG MAGIN	SULING TAMBUN	1.166.748.000	139.642.000	350.024.400	350.024.400	327.517.200	1.306.390.000
8	TUMBANG SALAU	SULING TAMBUN	697.960.000	0,00	209.388.000	209.388.000	153.184.000	697.960.000
9	TUMBANG SETOLI	SULING TAMBUN	1.342.664.000	0,00	402.799.200	402.799.200	205.865.600	1.342.664.000
10	AYAWAN	SERUYAN TENGAH	1.002.703.000	0,00	300.810.900	300.810.900	152.681.200	1.002.703.000
11	BATU AGUNG	SERUYAN TENGAH	948.082.000	0,00	426.636.900	420.645.100	0,00	948.082.000
12	BUKIT BULUH	SERUYAN TENGAH	813.696.000	0,00	244.108.800	244.108.800	239.078.400	813.696.000
13	BUMI JAYA	SERUYAN TENGAH	762.713.000	0,00	228.813.900	228.813.900	179.085.200	762.713.000
14	DURIAN TUNGGAL	SERUYAN TENGAH	871.561.000	0,00	261.468.300	261.468.300	165.024.400	871.561.000
15	GANTUNG PANGAYUH	SERUYAN TENGAH	860.283.000	0,00	258.084.900	258.084.900	218.113.200	860.283.000
16	MUGI PANYUHU	SERUYAN TENGAH	759.444.000	0,00	227.833.200	227.833.200	233.955.200	759.444.000
17	PANCA JAYA	SERUYAN TENGAH	724.133.000	0,00	217.239.900	217.239.900	210.453.200	724.133.000
18	PANGKE	SERUYAN TENGAH	1.370.490.000	0,00	411.147.000	411.147.000	389.796.000	1.370.490.000
19	PANYUMPA	SERUYAN TENGAH	717.957.000	0,00	215.387.100	215.387.100	215.182.800	717.957.000
20	RINGIN AGUNG	SERUYAN TENGAH	708.127.000	0,00	212.438.100	212.438.100	124.850.800	708.127.000
21	SUKA JAYA	SERUYAN TENGAH	899.585.000	0,00	269.875.500	269.875.500	251.834.000	899.585.000



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No.	Nama Desa	Kecamatan	Pagu Desa (Rp)	Dana Desa Tambahan (Rp)	DD Tahap I	DD Tahap II	DD Tahap III	Realisasi Dana Desa Perdesa (Rp)
					Nilai Penyaluran (Rp)	Nilai Penyaluran (Rp)	Nilai Penyaluran (Rp)	
22	SUKA MAJU	SERUYAN TENGAH	915.668.000	0,00	274.700.400	274.700.400	272.667.200	915.668.000
23	SUKA MAKMUR	SERUYAN TENGAH	687.253.000	139.642.000	206.175.900	206.175.900	202.901.200	826.895.000
24	SUKA MANDANG	SERUYAN TENGAH	1.011.246.000	0,00	303.373.800	303.373.800	152.498.400	1.011.246.000
25	SUKOREJO	SERUYAN TENGAH	992.324.000	0,00	446.545.800	441.378.200	0,00	992.324.000
26	TANGGA BATU	SERUYAN TENGAH	671.088.000	0,00	201.326.400	201.326.400	102.835.200	671.088.000
27	TELUK BAYUR	SERUYAN TENGAH	688.937.000	0,00	206.681.100	206.681.100	113.574.800	688.937.000
28	TUMBANG BAI	SERUYAN TENGAH	974.285.000	0,00	292.285.500	292.285.500	148.514.000	974.285.000
29	BANGKAL	SERUYAN RAYA	940.040.000	139.642.000	282.012.000	282.012.000	257.216.000	1.079.682.000
30	LANPASA	SERUYAN RAYA	847.160.000	139.642.000	254.148.000	254.148.000	230.864.000	986.802.000
31	SELUNUK	SERUYAN RAYA	1.070.730.000	0,00	321.219.000	321.219.000	320.292.000	1.070.730.000
32	TABIKU	SERUYAN RAYA	745.531.000	139.642.000	223.659.300	223.659.300	193.812.400	885.173.000
33	TERAWAN	SERUYAN RAYA	905.834.000	0,00	407.625.300	401.008.700	0,00	905.834.000
34	BUNTUT SAPAU	SERUYAN HULU	824.029.000	0,00	247.208.700	247.208.700	214.411.600	824.029.000
35	MARANDANG	SERUYAN HULU	1.031.365.000	0,00	309.409.500	309.409.500	207.346.000	1.031.365.000
36	MOJANG BARU	SERUYAN HULU	863.888.000	0,00	259.166.400	259.166.400	116.577.600	863.888.000
37	MONGOH JUOI	SERUYAN HULU	859.994.000	139.642.000	257.998.200	257.998.200	232.397.600	999.636.000
38	RANTAU PANJANG	SERUYAN HULU	1.344.601.000	0,00	403.380.300	403.380.300	383.040.400	1.344.601.000
39	RIAM BATANG	SERUYAN HULU	772.069.000	0,00	231.620.700	231.620.700	211.627.600	772.069.000
40	SEPUNDU HANTU	SERUYAN HULU	903.650.000	0,00	271.095.000	271.095.000	170.660.000	903.650.000
41	TANJUNG PAKU	SERUYAN HULU	935.575.000	0,00	280.672.500	280.672.500	215.830.000	935.575.000
42	TUMBANG BAHAN	SERUYAN HULU	1.023.593.000	139.642.000	307.077.900	307.077.900	386.884.000	1.163.235.000
43	TUMBANG DARAP	SERUYAN HULU	1.057.843.000	139.642.000	317.352.900	317.352.900	257.537.200	1.197.485.000



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No.	Nama Desa	Kecamatan	Pagu Desa (Rp)	Dana Desa Tambahan (Rp)	DD Tahap I	DD Tahap II	DD Tahap III	Realisasi Dana Desa Perdesa (Rp)
					Nilai Penyaluran (Rp)	Nilai Penyaluran (Rp)	Nilai Penyaluran (Rp)	
44	TUMBANG KALAM	SERUYAN HULU	1.063.171.000	0,00	318.951.300	318.951.300	317.268.400	1.063.171.000
45	TUMBANG KASAI	SERUYAN HULU	754.628.000	0,00	226.388.400	226.388.400	204.651.200	754.628.000
46	TUMBANG KUBANG	SERUYAN HULU	761.939.000	0,00	228.581.700	228.581.700	189.575.600	761.939.000
47	TUMBANG LAKU	SERUYAN HULU	839.997.000	0,00	251.999.100	251.999.100	249.598.800	839.997.000
48	TUMBANG MANJUL	SERUYAN HULU	2.049.506.000	139.642.000	614.851.800	614.851.800	308.602.400	2.189.148.000
49	TUMBANG SEPAN	SERUYAN HULU	879.413.000	0,00	263.823.900	263.823.900	258.165.200	879.413.000
50	TUMBANG SETAWAI	SERUYAN HULU	752.934.000	0,00	225.880.200	225.880.200	225.573.600	752.934.000
51	TUMBANG SUEI	SERUYAN HULU	1.043.092.000	0,00	312.927.600	312.927.600	298.436.800	1.043.092.000
52	TUMBANG TABERAU	SERUYAN HULU	773.085.000	0,00	231.925.500	231.925.500	230.034.000	773.085.000
53	TUSUK BELAWAN	SERUYAN HULU	1.013.988.000	139.642.000	304.196.400	304.196.400	301.195.200	1.153.630.000
54	BANGUN HARJA	SERUYAN HILIR TIMUR	790.577.000	0,00	237.173.100	237.173.100	229.830.800	790.577.000
55	HALIMAUNG JAYA	SERUYAN HILIR TIMUR	681.802.000	139.642.000	204.540.600	204.540.600	200.720.800	821.444.000
56	KARTIKA BHAKTI	SERUYAN HILIR TIMUR	842.138.000	139.642.000	252.641.400	252.641.400	167.655.200	981.780.000
57	MEKAR INDAH	SERUYAN HILIR TIMUR	821.560.000	139.642.000	246.468.000	246.468.000	242.224.000	961.202.000
58	PEMATANG PANJANG	SERUYAN HILIR TIMUR	869.057.000	0,00	260.717.100	260.717.100	196.422.800	869.057.000
59	SUNGAI BAKAU	SERUYAN HILIR TIMUR	870.212.000	139.642.000	261.063.600	261.063.600	265.135.600	1.009.854.000
60	BAUNG	SERUYAN HILIR	1.898.793.000	0,00	569.637.900	569.637.900	117.289.600	1.898.793.000
61	JAHTAN	SERUYAN HILIR	837.429.000	0,00	251.228.700	251.228.700	248.571.600	837.429.000
62	MUARA DUA	SERUYAN HILIR	1.850.281.000	0,00	555.084.300	555.084.300	552.912.400	1.850.281.000
63	PEMATANG LIMA	SERUYAN HILIR	1.049.839.000	139.642.000	314.951.700	314.951.700	218.484.800	1.189.481.000



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No.	Nama Desa	Kecamatan	Pagu Desa (Rp)	Dana Desa Tambahan (Rp)	DD Tahap I	DD Tahap II	DD Tahap III	Realisasi Dana Desa Perdesa (Rp)
					Nilai Penyaluran (Rp)	Nilai Penyaluran (Rp)	Nilai Penyaluran (Rp)	
64	PERSIL RAYA	SERUYAN HILIR	950.128.000	139.642.000	285.038.400	285.038.400	236.051.200	1.089.770.000
65	SUNGAI PERLU	SERUYAN HILIR	735.229.000	139.642.000	220.568.700	220.568.700	121.291.600	874.871.000
66	SUNGAI UNDANG	SERUYAN HILIR	1.098.530.000	0,00	329.559.000	329.559.000	219.812.000	1.098.530.000
67	TANJUNG RANGAS	SERUYAN HILIR	2.072.897.000	0,00	621.869.100	621.869.100	620.358.800	2.072.897.000
68	BAHAUR	HANAU	771.005.000	0,00	231.301.500	231.301.500	121.202.000	771.005.000
69	DERANGGA	HANAU	892.753.000	0,00	267.825.900	267.825.900	144.701.200	892.753.000
70	PARANG BATANG	HANAU	794.753.000	0,00	238.425.900	238.425.900	184.701.200	794.753.000
71	PARING RAYA	HANAU	950.934.000	0,00	285.280.200	285.280.200	279.573.600	950.934.000
72	PEMBUANG HULU I	HANAU	1.189.154.000	0,00	535.119.300	531.634.700	0,00	1.189.154.000
73	PEMBUANG HULU II	HANAU	1.413.654.000	0,00	636.144.300	561.509.700	0,00	1.413.654.000
74	TANJUNG HANAU	HANAU	774.253.000	0,00	232.275.900	232.275.900	230.501.200	774.253.000
75	BANUA USANG	DANAU SEMBULUH	1.004.263.000	0,00	301.278.900	301.278.900	300.905.200	1.004.263.000
76	CEMPAKA BARU	DANAU SEMBULUH	1.249.800.000	0,00	374.940.000	374.940.000	373.920.000	1.249.800.000
77	PALINGKAU	DANAU SEMBULUH	877.687.000	0,00	263.306.100	263.306.100	196.274.800	877.687.000
78	PAREN	DANAU SEMBULUH	635.154.000	139.642.000	190.546.200	190.546.200	189.261.600	774.796.000
79	SEMBULUH I	DANAU SEMBULUH	1.300.210.000	139.642.000	390.063.000	390.063.000	301.437.200	1.439.852.000
80	SEMBULUH II	DANAU SEMBULUH	917.366.000	0,00	275.209.800	275.209.800	140.146.400	917.366.000
81	TELAGA PULANG	DANAU SEMBULUH	796.372.000	139.642.000	238.911.600	238.911.600	235.748.800	936.014.000
82	ULAK BATU	DANAU SEMBULUH	655.582.000	139.642.000	196.674.600	196.674.600	193.832.800	795.224.000
83	PANIMBA RAYA	DANAU SELULUK	678.220.000	0,00	203.466.000	203.466.000	145.288.000	678.220.000
84	RUNGAU RAYA	DANAU SELULUK	1.315.824.000	0,00	592.120.800	543.703.200	0,00	1.315.824.000
85	ASAM BARU	DANAU SELULUK	1.010.137.000	0,00	454.561.650	451.175.350	0,00	1.010.137.000
86	TANJUNG HARA	DANAU SELULUK	1.032.862.000	0,00	309.858.600	309.858.600	305.144.800	1.032.862.000



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No.	Nama Desa	Kecamatan	Pagu Desa (Rp)	Dana Desa Tambahan (Rp)	DD Tahap I	DD Tahap II	DD Tahap III	Realisasi Dana Desa Perdesa (Rp)
					Nilai Penyaluran (Rp)	Nilai Penyaluran (Rp)	Nilai Penyaluran (Rp)	
87	TANJUNG PARING	DANAU SELULUK	705.084.000	0,00	211.525.200	211.525.200	145.233.600	705.084.000
88	TANJUNG RANGAS II	DANAU SELULUK	653.224.000	0,00	195.967.200	195.967.200	322.699.200	653.224.000
89	BATU MENANGIS	BATU AMPAR	730.889.000	0,00	219.266.700	219.266.700	216.755.600	730.889.000
90	DERAWA	BATU AMPAR	607.576.000	0,00	182.272.800	182.272.800	91.830.400	607.576.000
91	DURIAN KAIT	BATU AMPAR	866.428.000	0,00	259.928.400	259.928.400	155.771.200	866.428.000
92	KALANG	BATU AMPAR	774.597.000	0,00	232.379.100	232.379.100	119.038.800	774.597.000
93	SAHABU	BATU AMPAR	652.416.000	0,00	195.724.800	195.724.800	113.366.400	652.416.000
94	SANDUL	BATU AMPAR	964.288.000	0,00	289.286.400	289.286.400	151.715.200	964.288.000
95	SEBABI	BATU AMPAR	679.905.000	0,00	203.971.500	203.971.500	102.762.000	679.905.000
96	SUKA MULYA	BATU AMPAR	667.123.000	0,00	200.136.900	200.136.900	101.249.200	667.123.000
97	WANA TIRTA	BATU AMPAR	666.340.000	0,00	199.902.000	199.902.000	100.936.000	666.340.000
JUMLAH PAGU DAN TAMBAHAN			91.555.174.000	2.932.482.000	28.632.803.550	28.485.104.450	20.008.466.000	94.487.656.000
JUMLAH PENYALURAN			94.487.656.000					

5.1.1.f. Pendapatan Transfer Antar Daerah

31 Desember 2023
68.074.025.834,00

31 Desember 2022
51.808.471.884,76

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp68.074.025.834,00 atau 90,51% dari anggaran Rp75.213.025.351,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 sebesar Rp51.808.471.884,76 maka realisasi T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp16.265.553.949,24 atau 31,40%. Pendapatan ini merupakan pendapatan bagi hasil daerah pemerintah provinsi. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:



Tabel 5.19
Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil	75.213.025.351,00	68.074.025.834,00	90,51	51.808.471.884,76	16.265.553.949,24
Jumlah	75.213.025.351,00	68.074.025.834,00	90,51	51.808.471.884,76	16.265.553.949,24

Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.20
Rincian Pendapatan Transfer Bagi Hasil

No	Kode Rekening	Uraian	Kredit (Rp)
1	4.2.2.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.518.925.732,59
2	4.2.2.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.266.852.587,24
3	4.2.2.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.187.771.920,11
4	4.2.2.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	493.078.871,06
5	4.2.2.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.607.396.723,00
Jumlah			68.074.025.834,00

5.1.1.g.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		20.000.000,00	10.492.116.375,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000,00 atau 100% dari anggaran Rp20.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah T.A. 2022 sebesar Rp10.492.116.375,00 maka realisasi T.A. 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.472.116.375,00 atau 99,81%. Rincian anggaran dan pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:



Tabel 5.21
Lain-lain Pendapatan yang Sah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat terdiri dari:	20.000.000,00	20.000.000,00	100	5.596.704.000,00	(5.576.704.000,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	5.596.704.000,00	(5.596.704.000,00)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100	0,00	20.000.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS terdiri dari:	0,00	0,00	0,00	4.895.412.375,00	(4.895.412.375,00)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	4.895.412.375,00	(4.895.412.375,00)
Jumlah	20.000.000,00	20.000.000,00	100	10.492.116.375,00	(10.472.116.375,00)

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang diatur dalam peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/91/2023 tentang Belanja Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembinaan Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Tepat Unggulan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah serta SK Gubernur Nomor 188.44/264/2022 tentang Pemenang Seleksi Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Tepat Guna Unggulan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

5.1.2.	Belanja	<u>31 Desember 2023</u> 1.246.264.293.643,77	<u>31 Desember 2022</u> 1.071.565.463.005,51
---------------	----------------	---	---

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.246.264.293.643,77 atau 87,38% dari pagu anggaran sebesar Rp1.426.324.481.054,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja T.A. 2022 sebesar Rp1.071.565.463.005,51 maka realisasi T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp174.698.830.638,26 atau 16,30%. Rincian anggaran dan realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

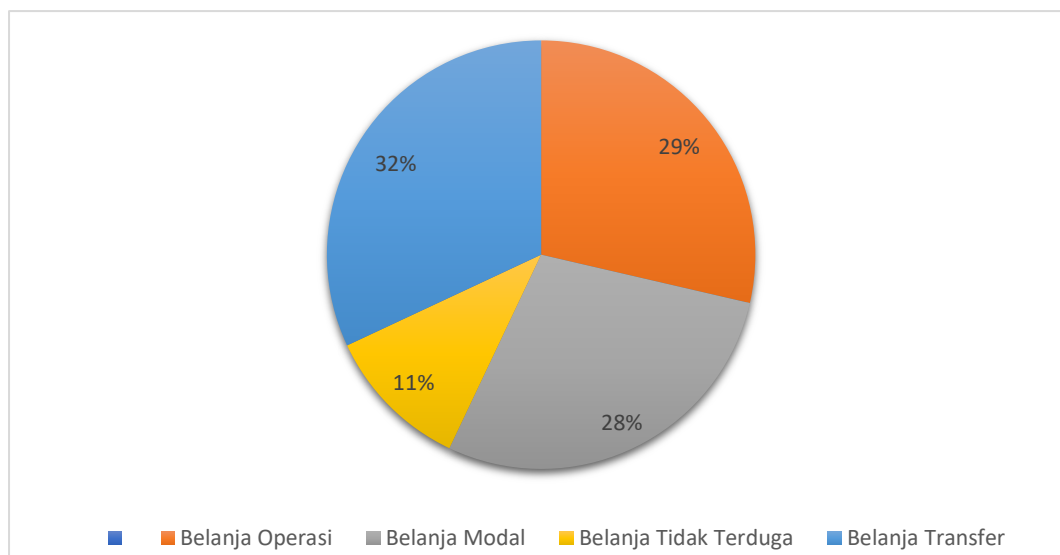


Tabel 5.22
Rincian Belanja

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Operasi	964.865.397.398,00	832.448.838.524,03	86,28	747.007.671.583,31	85.441.166.940,72
Belanja Modal	274.444.563.558,00	235.059.146.858,74	85,65	159.703.735.084,20	75.355.411.774,54
Belanja Tidak Terduga	2.210.551.210,00	732.657.783,00	33,14	1.357.580.146,00	(624.922.363,00)
Belanja Transfer	184.803.968.888,00	178.023.650.478,00	96,33	163.496.476.192,00	14.527.174.286,00
Jumlah	1.426.324.481.054,00	1.246.264.293.643,77	87,38	1.071.565.463.005,51	174.698.830.638,26

Komposisi realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 digambarkan sebagai berikut:

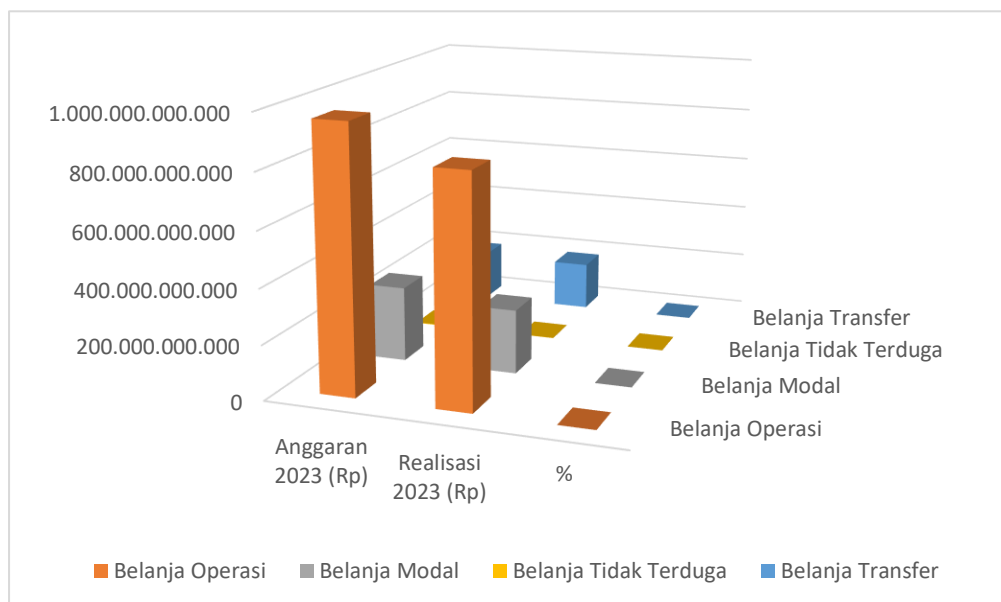
Grafik 5.4
Komposisi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan TA 2023



Capaian realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 digambarkan dalam diagram batang sebagai berikut:



Grafik 5.5
Capaian Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan T.A. 2023

**Belanja Operasi**

31 Desember 2023
832.448.838.524,03

31 Desember 2022
747.007.671.583,31

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp832.448.838.524,03 atau 86,28% dari anggaran Rp964.865.397.398,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi T.A. 2022 sebesar Rp747.007.671.583,31 maka realisasi T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp85.441.166.940,72 atau 11,44%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.23
Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Pegawai	409.877.204.917,00	365.545.404.005,97	89,18	366.213.212.937,00	(667.808.931,03)
Belanja Barang dan Jasa	454.402.384.851,00	368.195.904.183,30	81,03	329.372.640.412,31	38.823.263.770,99
Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.999.999.670,00	100,00	1.999.996.003,00	3.667,00
Belanja Hibah	88.150.376.130,00	86.720.990.864,76	98,38	29.943.448.031,00	56.777.542.833,76



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Bantuan Sosial	10.435.431.500,00	9.986.539.800,00	95,70	19.478.374.200,00	(9.491.834.400,00)
Jumlah	964.865.397.398,00	832.448.838.524,03	86,28	747.007.671.583,31	85.441.166.940,72

5.1.2.a. Belanja Pegawai

31 Desember 2023
365.545.404.005,97

31 Desember 2022
366.213.212.937,00

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp365.545.404.005,97 atau 89,18% dari anggaran Rp409.877.204.917,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai T.A. 2022 sebesar Rp366.213.212.937,00 maka realisasi T.A. 2023 mengalami penurunan sebesar Rp667.808.931,03 atau 0,18%. Anggaran dan realisasi belanja pegawai Kabupaten Seruyan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24
Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	224.849.989.278,00	200.981.959.826,00	89,38	197.971.357.637,00	3.010.602.189,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	141.969.970.881,00	122.286.033.023,98	86,14	128.352.096.295,00	(6.066.063.271,02)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.903.679.946,00	11.718.379.073,10	90,81	7.887.810.923,00	3.830.568.150,10
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.323.207.361,00	12.228.551.058,00	99,23	12.273.808.158,00	(45.257.100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	293.942.750,00	256.653.287,00	87,31	247.959.756,00	8.693.531,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	697.600.000,00	601.505.092,00	86,22	601.600.000,00	(94.908,00)
Belanja Pegawai BLUD	16.838.814.701,00	17.472.322.645,89	103,76	18.878.580.168,00	(1.406.257.522,11)
	409.877.204.917,00	365.545.404.005,97	89,18	366.213.212.937,00	(667.808.931,03)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.25
Rincian Belanja Pegawai

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.1	Belanja Pegawai	409.877.204.917,00	365.545.404.005,97	89,18
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	224.849.989.278,00	200.981.959.826,00	89,38
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	153.836.948.399,00	144.651.035.792,00	94,03
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	143.322.346.188,00	138.560.241.720,00	96,68
5.1.1.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	10.514.602.211,00	6.090.794.072,00	57,93
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.133.808.980,00	13.749.300.365,00	75,82
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	16.676.883.578,00	13.196.701.845,00	79,13
5.1.1.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.456.925.402,00	552.598.520,00	37,93
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.939.945.459,00	4.972.220.506,00	83,71
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.939.945.459,00	4.972.220.506,00	83,71
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.508.130.388,00	11.093.009.290,00	88,69
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.334.010.188,00	10.432.264.290,00	92,04
5.1.1.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.174.120.200,00	660.745.000,00	56,28
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.950.295.181,00	1.884.732.000,00	63,88
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.386.949.895,00	1.878.112.000,00	78,68
5.1.1.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	563.345.286,00	6.620.000,00	1,18
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.714.226.560,00	9.026.416.371,00	77,06
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.697.685.654,00	8.617.243.371,00	80,55
5.1.1.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.016.540.906,00	409.173.000,00	40,25
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	601.168.501,00	376.100.774,00	62,56
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	594.005.672,00	376.081.966,00	63,31
5.1.1.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7.162.829,00	18.808,00	0,26
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	133.376.997,00	2.223.205,00	1,67
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	133.038.751,00	2.161.537,00	1,62
5.1.1.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	338.246,00	61.668,00	18,23



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.1.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	17.130.850.967,00	14.031.625.965,00	81,91
5.1.1.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	16.383.931.543,00	13.647.191.284,00	83,30
5.1.1.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	746.919.424,00	384.434.681,00	51,47
5.1.1.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	684.152.878,00	300.073.494,00	43,86
5.1.1.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	653.994.047,00	287.504.225,00	43,96
5.1.1.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	30.158.831,00	12.569.269,00	41,68
5.1.1.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.210.904.968,00	895.222.064,00	73,93
5.1.1.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.120.397.167,00	856.682.788,00	76,46
5.1.1.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	90.507.801,00	38.539.276,00	42,58
5.1.1.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	6.180.000,00	0,00	0,00
5.1.1.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	5.748.000,00	0,00	0,00
5.1.1.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	432.000,00	0,00	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	141.969.970.881,00	122.286.033.023,98	86,14
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	44.781.827.195,00	38.380.942.595,00	85,71
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	42.086.189.700,00	36.335.697.363,00	86,34
5.1.1.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.695.637.495,00	2.045.245.232,00	75,87
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	6.096.039.795,00	3.949.681.420,98	64,79
5.1.1.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	5.127.431.880,00	3.487.761.588,98	68,02
5.1.1.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	968.607.915,00	461.919.832,00	47,69
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.340.789.855,00	2.588.736.396,00	77,49
5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.228.210.629,00	2.547.996.932,00	78,93
5.1.1.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	112.579.226,00	40.739.464,00	36,19



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	159.612.587,00	153.121.320,00	95,93
5.1.1.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	159.612.587,00	153.121.320,00	95,93
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	87.591.701.449,00	77.213.551.292,00	88,15
5.1.1.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	87.287.101.073,00	76.993.845.215,00	88,21
5.1.1.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	304.600.376,00	219.706.077,00	72,13
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.903.679.946,00	11.718.379.073,10	90,81
5.1.1.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	726.795.395,00	643.682.126,15	88,56
5.1.1.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.932.026,00	2.492.776,55	63,40
5.1.1.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	39.812.107,00	39.812.107,00	100,00
5.1.1.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	531.250,00	0,00	0,00
5.1.1.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	6.945.236,00	3.602.166,00	51,87
5.1.1.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	464.043.377,00	401.958.325,25	86,62
5.1.1.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.737.690,00	4.321.396,00	75,32
5.1.1.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	796.875,00	0,00	0,00
5.1.1.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	44.074.691,00	32.065.719,35	72,75
5.1.1.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	137.858.436,00	137.858.436,00	100,00
5.1.1.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	23.063.707,00	21.571.200,00	93,53
5.1.1.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	189.765.133,00	140.947.403,95	74,27
5.1.1.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	34.107.358,00	23.622.107,55	69,26
5.1.1.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	390.096,00	390.096,00	100,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.1.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.094.715,00	12.657.214,80	83,85
5.1.1.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	4.350.150,00	3.291.298,60	75,66
5.1.1.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	8.287.500,00	4.140.000,00	49,95
5.1.1.03.02.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	850.000,00	168.750,00	19,85
5.1.1.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	4.143.750,00	2.856.250,00	68,93
5.1.1.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	17.698.561,00	16.726.617,00	94,51
5.1.1.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	27.790.692,00	27.790.692,00	100,00
5.1.1.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	19.135,00	0,00	0,00
5.1.1.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	3.229.877,00	1.339.449,00	41,47
5.1.1.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.650.000,00	5.737.500,00	75,00
5.1.1.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	66.153.299,00	42.227.429,00	63,83
5.1.1.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	794.919.168,00	785.200.843,00	98,78
5.1.1.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	794.919.168,00	785.200.843,00	98,78
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	8.927.962.250,00	8.034.542.250,00	89,99
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.927.962.250,00	8.034.542.250,00	89,99
5.1.1.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	2.264.238.000,00	2.114.006.450,00	93,37
5.1.1.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.257.488.000,00	2.107.256.450,00	93,35
5.1.1.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.323.207.361,00	12.228.551.058,00	99,23
5.1.1.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	562.393.500,00	559.965.000,00	99,57
5.1.1.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	562.393.500,00	559.965.000,00	99,57
5.1.1.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	104.188.361,00	70.898.100,00	68,05
5.1.1.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	104.188.361,00	70.898.100,00	68,05
5.1.1.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.904.000,00	77.344.560,00	89,00
5.1.1.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.904.000,00	77.344.560,00	89,00
5.1.1.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	100,00
5.1.1.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	100,00
5.1.1.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	811.949.250,00	99,72
5.1.1.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	811.949.250,00	99,72
5.1.1.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	99.571.500,00	99.571.500,00	100,00
5.1.1.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	99.571.500,00	99.571.500,00	100,00
5.1.1.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	100,00
5.1.1.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	100,00
5.1.1.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	756.000.000,00	96,00
5.1.1.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	756.000.000,00	96,00
5.1.1.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	585.000,00	462.264,00	79,02
5.1.1.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	585.000,00	462.264,00	79,02
5.1.1.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.709.700.000,00	2.694.228.384,00	99,43
5.1.1.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	65.000.000,00	49.607.712,00	76,32
5.1.1.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.200.000,00	1.155.168,00	96,26
5.1.1.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.500.000,00	3.465.504,00	99,01
5.1.1.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.640.000.000,00	2.640.000.000,00	100,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.1.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.960.000.000,00	3.960.000.000,00	100,00
5.1.1.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.960.000.000,00	3.960.000.000,00	100,00
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	293.942.750,00	256.653.287,00	87,31
5.1.1.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	42.900.000,00	42.900.000,00	100,00
5.1.1.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	42.900.000,00	42.900.000,00	100,00
5.1.1.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.772.000,00	2.772.000,00	100,00
5.1.1.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.772.000,00	2.772.000,00	100,00
5.1.1.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	77.220.000,00	100,00
5.1.1.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	77.220.000,00	100,00
5.1.1.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.186.480,00	3.186.480,00	100,00
5.1.1.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.186.480,00	3.186.480,00	100,00
5.1.1.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.719.494,00	1.719.494,00	100,00
5.1.1.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.719.494,00	1.719.494,00	100,00
5.1.1.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.760,00	1.140,00	64,77
5.1.1.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.760,00	1.140,00	64,77
5.1.1.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.037.040,00	4.021.920,00	99,63
5.1.1.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.037.040,00	4.021.920,00	99,63
5.1.1.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	90.000,00	84.240,00	93,60
5.1.1.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	90.000,00	84.240,00	93,60
5.1.1.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	270.000,00	252.720,00	93,60
5.1.1.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	270.000,00	252.720,00	93,60
5.1.1.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	128.258.012,00	103.819.735,00	80,95
5.1.1.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	693.887,00	374.312,00	53,94
5.1.1.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	7.025.666,00	5.554.965,00	79,07



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.1.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	93.750,00	0,00	0,00
5.1.1.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.225.630,00	576.100,00	47,00
5.1.1.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	81.890.008,00	65.293.884,00	79,73
5.1.1.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.012.534,00	741.272,00	73,21
5.1.1.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	140.625,00	0,00	0,00
5.1.1.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.777.887,00	4.681.885,00	60,19
5.1.1.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	24.327.959,00	24.200.517,00	99,48
5.1.1.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.070.066,00	2.396.800,00	58,89
5.1.1.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	33.487.964,00	20.675.558,00	61,74
5.1.1.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	6.018.945,00	3.379.100,00	56,14
5.1.1.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	68.841,00	57.894,00	84,10
5.1.1.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.663.773,00	1.976.200,00	74,19
5.1.1.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	767.673,00	580.609,00	75,63
5.1.1.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	1.462.500,00	460.000,00	31,45
5.1.1.05.11.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta	150.000,00	18.750,00	12,50
5.1.1.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan	731.250,00	393.750,00	53,85



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
	Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang			
5.1.1.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.123.275,00	2.414.069,00	77,29
5.1.1.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.904.240,00	4.728.955,00	96,43
5.1.1.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	3.377,00	0,00	0,00
5.1.1.05.11.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	569.978,00	180.493,00	31,67
5.1.1.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.350.000,00	1.012.500,00	75,00
5.1.1.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	11.674.112,00	5.473.238,00	46,88
5.1.1.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	697.600.000,00	601.505.092,00	86,22
5.1.1.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	297.600.000,00	201.600.000,00	67,74
5.1.1.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	297.600.000,00	201.600.000,00	67,74
5.1.1.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.905.092,00	99,98
5.1.1.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.905.092,00	99,98
5.1.1.99	Belanja Pegawai BLUD	16.838.814.701,00	17.472.322.645,89	103,76
5.1.1.99.99	Belanja Pegawai BLUD	16.838.814.701,00	17.472.322.645,89	103,76
5.1.1.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	16.838.814.701,00	17.472.322.645,89	103,76
Jumlah		409.877.204.917,00	365.545.404.005,97	89,18

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:



Tabel 5.26
Rincian Belanja Pegawai pada SKPD

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dinas Pendidikan	169.092.804.022,00	140.127.285.657,00	82,87	140.970.771.789,00	(843.486.132,00)
Dinas Kesehatan	55.137.117.680,00	53.994.798.699,87	97,93	43.845.200.109,00	10.149.598.590,87
Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang	25.534.735.678,00	24.580.722.637,00	96,26	23.217.871.630,00	1.362.851.007,00
Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	0,00	1.100.960.318,00	0,00	14.374.157.228,00	(13.273.196.910,00)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	8.639.246.129,00	8.265.477.945,00	95,67	8.015.631.822,00	249.846.123,00
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	4.019.271.053,00	3.986.555.845,00	99,19	4.014.717.213,00	(28.161.368,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	2.917.114.348,00	2.875.072.386,00	98,56	2.857.075.527,00	17.996.859,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2.188.658.338,00	2.002.621.971,00	91,50	1.815.714.668,00	186.907.303,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.747.430.259,00	2.471.972.352,00	89,97	2.757.071.173,00	(285.098.821,00)
Dinas Sosial	3.387.673.122,00	3.362.507.204,00	99,26	3.296.132.083,00	66.375.121,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.781.804.776,00	3.757.525.270,00	99,36	3.660.234.691,00	97.290.579,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.200.747.849,00	3.978.325.904,00	94,71	3.913.175.359,00	65.150.545,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.034.547.229,00	3.212.719.960,00	79,63	2.875.145.825,00	337.574.135,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.840.064.880,00	3.505.672.465,00	91,29	3.339.015.179,00	166.657.286,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.032.929.065,00	2.890.642.225,00	95,31	2.513.150.756,00	377.491.469,00
Dinas Perhubungan	4.048.950.007,00	4.010.135.597,00	99,04	4.057.350.082,00	(47.214.485,00)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	2.886.086.302,00	2.653.188.195,00	91,93	2.681.006.055,00	(27.817.860,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah,	3.480.671.018,00	2.906.423.740,00	83,50	2.702.013.249,00	204.410.491,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Perindustrian Dan Perdagangan					
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.433.036.247,00	3.421.540.571,00	99,67	3.071.654.567,00	349.886.004,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	3.305.386.252,00	2.863.341.585,00	86,63	2.939.846.062,00	(76.504.477,00)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.539.581.590,00	2.478.416.367,00	97,59	2.392.674.316,00	85.742.051,00
Dinas Perikanan	4.272.780.291,00	3.797.971.158,00	88,89	3.725.417.027,00	72.554.131,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	8.796.474.307,00	7.569.294.273,00	86,05	7.413.336.917,00	155.957.356,00
Sekretariat Daerah	14.381.577.889,00	13.258.681.507,00	92,19	14.126.792.953,00	(868.111.446,00)
Inspektorat Daerah	4.152.415.204,00	3.968.463.639,00	95,57	4.265.626.607,00	(297.162.968,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	4.439.210.705,00	3.902.041.431,00	87,90	3.891.937.747,00	10.103.684,00
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	8.252.337.883,00	6.164.618.329,00	74,70	5.901.377.781,00	263.240.548,00
Badan Pendapatan Daerah	7.728.164.998,00	5.234.586.731,10	67,73	4.789.124.342,00	445.462.389,10
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.667.402.524,00	3.134.910.647,00	85,48	3.071.704.325,00	63.206.322,00
Sekretariat DPRD	17.021.836.818,00	16.082.769.373,00	94,48	16.051.018.971,00	31.750.402,00
Kecamatan Seruyan Hilir	3.718.218.236,00	3.435.802.526,00	92,40	3.459.517.606,00	(23.715.080,00)
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	1.786.699.255,00	1.636.633.329,00	91,60	1.513.322.944,00	123.310.385,00
Kecamatan Danau Sembuluh	1.969.898.063,00	1.898.235.873,00	96,36	1.965.584.100,00	(67.348.227,00)
Kecamatan Seruyan Raya	2.001.566.497,00	1.949.201.833,00	97,38	2.033.294.407,00	(84.092.574,00)
Kecamatan Danau Seluluk	1.587.006.471,00	1.540.681.707,00	97,08	1.508.401.890,00	32.279.817,00
Kecamatan Hanau	2.924.158.719,00	2.904.384.573,00	99,32	2.649.095.362,00	255.289.211,00
Kecamatan Batu Ampar	1.311.830.882,00	1.286.372.435,00	98,06	1.247.295.119,00	39.077.316,00
Kecamatan Seruyan Tengah	2.541.473.273,00	2.447.489.831,00	96,30	2.506.457.154,00	(58.967.323,00)
Kecamatan Seruyan Hulu	2.292.394.520,00	2.264.357.226,00	98,78	2.331.841.548,00	(67.484.322,00)



Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kecamatan Suling Tambun	1.802.539.160,00	1.737.470.266,00	96,39	1.738.630.017,00	(1.159.751,00)
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.981.363.378,00	2.885.530.425,00	96,79	2.713.826.737,00	171.703.688,00
Jumlah	409.877.204.917,00	365.545.404.005,97	89,18	366.213.212.937,00	(667.808.931,03)

5.1.2.b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Seruyan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
368.195.904.183,30 **329.372.640.412,31**
 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp368.195.904.183,30 atau 81,03% dari anggaran Rp454.402.384.851,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa T.A. 2022 sebesar Rp329.372.640.412,31 maka realisasi T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp38.823.263.770,99 atau 11,79%. Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 5.27
Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Barang	104.193.430.476,00	62.367.082.229,27	59,86	54.392.166.115,00	7.974.916.114,27
Belanja Jasa	183.222.007.973,00	166.089.192.526,83	90,65	148.068.240.787,42	18.020.951.739,41
Belanja Pemeliharaan	16.930.902.292,00	15.616.188.635,00	92,23	12.352.040.944,00	3.264.147.691,00
Belanja Perjalanan Dinas	106.920.241.898,00	83.834.635.552,70	78,41	62.942.748.932,87	20.891.886.619,83
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.947.141.800,00	2.812.620.894,00	28,28	9.822.401.560,00	(7.009.780.666,00)
Belanja Barang dan Jasa BOS	13.260.166.600,00	16.478.546.911,00	124,27	22.765.418.496,19	(6.286.871.585,19)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.928.493.812,00	20.997.637.434,50	105,36	19.029.623.576,83	1.968.013.857,67
Jumlah	454.402.384.851,00	368.195.904.183,30	81,03	329.372.640.412,31	38.823.263.770,99



Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.28
Rincian Belanja Barang dan Jasa

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	454.402.384.851,00	368.195.904.183,30	81,03
5.1.2.01	Belanja Barang	104.193.430.476,00	62.367.082.229,27	59,86
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	104.193.430.476,00	62.367.082.229,27	59,86
5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.394.132.688,00	347.349.035,00	4,14
5.1.2.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.770.425.203,00	865.554.524,00	22,96
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.597.091.600,00	7.710.172.020,00	80,34
5.1.2.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	224.410.000,00	171.792.500,00	76,55
5.1.2.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	22.910.820.420,00	812.763.500,00	3,55
5.1.2.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	51.301.425,00	49.657.749,00	96,80
5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	71.178.000,00	66.655.000,00	93,65
5.1.2.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	924.204.228,00	831.809.370,00	90,00
5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	362.676.100,00	340.625.560,00	93,92
5.1.2.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	205.698.062,00	205.113.000,00	99,72
5.1.2.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	175.084.800,00	133.015.310,00	75,97
5.1.2.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	9.600.000,00	3.200.000,00	33,33
5.1.2.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	300.000,00	300.000,00	100,00
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.529.313.750,00	1.352.937.975,00	88,47
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.024.165.000,00	1.889.626.331,00	93,35
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.313.016.250,00	6.164.473.262,62	84,29
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	743.930.000,00	682.472.800,00	91,74
5.1.2.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	9.500.000,00	8.150.000,00	85,79
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.056.431.000,00	923.687.789,00	87,43
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.610.457.570,00	1.490.470.383,00	92,55



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.357.707.500,00	1.151.735.716,40	84,83
5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.1.2.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	46.080.000,00	0,00	-
5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	587.331.000,00	571.745.600,00	97,35
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.404.594.500,00	1.327.622.452,00	94,52
5.1.2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.352.345.611,00	1.351.021.666,75	99,90
5.1.2.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.211.557.155,00	1.190.571.733,00	98,27
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.449.969.478,00	2.137.037.600,00	87,23
5.1.2.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.206.883.000,00	1.204.080.814,00	99,77
5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.773.793.600,00	4.434.839.886,50	92,90
5.1.2.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	75.930.000,00	75.783.000,00	99,81
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.331.518.200,00	5.759.301.347,00	78,56
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.009.629.500,00	2.798.633.340,00	92,99
5.1.2.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.692.313.000,00	1.750.627.000,00	65,02
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.495.302.000,00	4.584.961.505,00	83,43
5.1.2.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	75.350.000,00	74.703.000,00	99,14
5.1.2.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	131.250.000,00	128.149.500,00	97,64
5.1.2.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	44.000.000,00	43.956.000,00	99,90
5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.168.071.000,00	1.128.881.345,00	96,64
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	802.945.000,00	790.029.033,00	98,39
5.1.2.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	15.857.500,00	15.722.000,00	99,15
5.1.2.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	2.237.500.000,00	2.205.328.125,00	98,56
5.1.2.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	48.300.000,00	46.549.972,00	96,38
5.1.2.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	120.879.000,00	120.546.000,00	99,72
5.1.2.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	300.842.000,00	287.024.027,00	95,41
5.1.2.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	203.296.000,00	198.153.725,00	97,47



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.243.615.000,00	1.224.670.614,00	98,48
5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	3.571.725.000,00	3.465.305.607,00	97,02
5.1.2.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	241.609.336,00	240.775.512,00	99,65
5.1.2.02	Belanja Jasa	183.222.007.973,00	166.089.192.526,83	90,65
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	130.563.503.272,00	118.055.551.509,00	90,42
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.289.200.300,00	4.058.175.000,00	76,73
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.669.190.000,00	1.951.910.000,00	73,13
5.1.2.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	15.800.000,00	6.000.000,00	37,97
5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.301.880.000,00	4.062.290.000,00	94,43
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.448.900.000,00	1.402.700.000,00	96,81
5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	159.840.000,00	68.260.000,00	42,71
5.1.2.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	250.800.000,00	240.500.000,00	95,89
5.1.2.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	17.108.800.000,00	15.335.950.000,00	89,64
5.1.2.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	20.976.913.000,00	18.624.021.199,00	88,78
5.1.2.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	201.423.000,00	181.143.300,00	89,93
5.1.2.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	667.150.000,00	583.770.000,00	87,50
5.1.2.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	891.700.000,00	891.100.000,00	99,93
5.1.2.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.348.400.000,00	2.190.375.000,00	93,27
5.1.2.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.764.375.000,00	1.552.875.000,00	88,01
5.1.2.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	183.600.000,00	183.000.000,00	99,67
5.1.2.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	622.530.000,00	541.393.000,00	86,97
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.238.150.000,00	23.741.300.000,00	97,95
5.1.2.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	260.900.000,00	248.784.000,00	95,36
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.042.900.000,00	860.650.000,00	82,52
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.010.375.000,00	9.671.617.500,00	96,62
5.1.2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.922.754.000,00	8.699.387.500,00	97,50
5.1.2.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.770.350.000,00	3.377.612.500,00	89,58



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.2.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	352.300.000,00	349.300.000,00	99,15
5.1.2.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	500.200.000,00	477.200.000,00	95,40
5.1.2.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	153.000.000,00	135.900.000,00	88,82
5.1.2.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	117.800.000,00	115.994.000,00	98,47
5.1.2.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	154.000.000,00	154.000.000,00	100,00
5.1.2.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	50.563.500,00	50.379.500,00	99,64
5.1.2.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.720.000,00	360.000,00	9,68
5.1.2.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	110.000.000,00	80.000.000,00	72,73
5.1.2.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	136.200.000,00	136.190.050,00	99,99
5.1.2.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	275.230.000,00	246.218.110,00	89,46
5.1.2.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00
5.1.2.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	50.000.000,00	22.362.220,00	44,72
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	60.500.000,00	24.850.000,00	41,07
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	31.200.000,00	5.857.133,00	18,77
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	718.778.961,00	431.396.790,00	60,02
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.984.212.183,00	4.052.376.919,00	81,30
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.854.706.000,00	8.787.132.156,00	99,24
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.227.746.408,00	2.665.715.415,00	82,59
5.1.2.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	110.955.000,00	36.720.100,00	33,09
5.1.2.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	30.000.000,00	10.000.000,00	33,33
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.550.020.920,00	492.651.117,00	31,78
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	1.685.040.000,00	1.088.834.000,00	64,62
5.1.2.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	250.000.000,00	207.900.000,00	83,16
5.1.2.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	18.615.745.812,00	18.118.362.637,33	97,33
5.1.2.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.037.670.676,00	1.033.950.688,00	99,64
5.1.2.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	15.076.320.000,00	15.022.665.000,00	99,64
5.1.2.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.361.001.600,00	1.283.800.000,00	94,33



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	340.670.092,00	294.409.459,00	86,42
5.1.2.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	706.083.444,00	391.786.550,00	55,49
5.1.2.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	94.000.000,00	91.750.940,33	97,61
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.067.798.500,00	1.927.283.111,00	93,20
5.1.2.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	496.567.500,00	494.617.500,00	99,61
5.1.2.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	641.500.000,00	615.677.000,00	95,97
5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
5.1.2.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	366.000.000,00	366.000.000,00	100,00
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	102.500.000,00	64.650.000,00	63,07
5.1.2.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.193.000,00	2.193.000,00	100,00
5.1.2.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	187.800.000,00	151.753.750,00	80,81
5.1.2.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.1.2.02.04.0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	63.750.000,00	60.023.250,00	94,15
5.1.2.02.04.0344	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	7.500.000,00	0	-
5.1.2.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	117.788.000,00	90.909.611,00	77,18
5.1.2.02.04.0494	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	75.000.000,00	74.259.000,00	99,01
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.795.418.000,00	1.386.586.600,00	77,23
5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33
5.1.2.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	257.598.000,00	153.308.600,00	59,51
5.1.2.02.05.0014	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
5.1.2.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	74.000.000,00	69.100.000,00	93,38
5.1.2.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	132.100.000,00	123.900.000,00	93,79
5.1.2.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	885.000.000,00	644.658.000,00	72,84
5.1.2.02.05.0045	Belanja Sewa Flat/Rumah Susun	44.720.000,00	44.720.000,00	100,00
5.1.2.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	56.000.000,00	42.500.000,00	75,89
5.1.2.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	300.000.000,00	264.400.000,00	88,13



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.512.960,00	3.500.000,00	99,63
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	3.512.960,00	3.500.000,00	99,63
5.1.2.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	39.582.000,00	87,96
5.1.2.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	45.000.000,00	39.582.000,00	87,96
5.1.2.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.634.454.429,00	18.417.793.043,50	89,26
5.1.2.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	92.085.000,00	90.917.455,00	98,73
5.1.2.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	25.000.000,00	24.897.300,00	99,59
5.1.2.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	5.205.670.679,00	5.170.916.912,00	99,33
5.1.2.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.204.989.300,00	2.198.864.790,00	99,72
5.1.2.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.287.200.250,00	1.283.884.175,00	99,74
5.1.2.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	20.575.000,00	20.542.770,00	99,84
5.1.2.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	3.950.000.000,00	2.504.797.972,50	63,41
5.1.2.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	13.375.000,00	13.237.860,00	98,97
5.1.2.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.383.519.200,00	2.334.328.444,00	97,94
5.1.2.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	3.390.400.000,00	2.830.983.835,00	83,50
5.1.2.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	454.440.000,00	453.081.030,00	99,70
5.1.2.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	400.000.000,00	395.826.000,00	98,96
5.1.2.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	7.200.000,00	0,00	-



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.2.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan	1.200.000.000,00	1.095.514.500,00	91,29
5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.140.285.000,00	2.604.710.980,00	82,95
5.1.2.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100.000.000,00	99.345.000,00	99,35
5.1.2.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	315.187.000,00	305.899.200,00	97,05
5.1.2.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.725.098.000,00	2.199.466.780,00	80,71
5.1.2.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	110.100.000,00	68.430.000,00	62,15
5.1.2.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	18.860.000,00	0,00	-
5.1.2.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	91.240.000,00	68.430.000,00	75,00
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.237.190.000,00	5.467.392.646,00	87,66
5.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.720.565.000,00	2.232.913.346,00	82,08
5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.671.200.000,00	2.424.734.300,00	90,77
5.1.2.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	845.425.000,00	809.745.000,00	95,78
5.1.2.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	9.000.000,00	0,00	-
5.1.2.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Franchise	9.000.000,00	0,00	-
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	16.930.902.292,00	15.616.188.635,00	92,23
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.969.431.640,00	7.892.333.182,00	87,99
5.1.2.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu-Electric Generating Set	72.260.000,00	63.042.600,00	87,24
5.1.2.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu- Pompa	40.000.000,00	39.795.000,00	99,49
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.780.830.000,00	1.670.769.244,00	93,82
5.1.2.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.766.701.000,00	3.319.443.853,00	88,13
5.1.2.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	52.580.640,00	52.572.750,00	99,98
5.1.2.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.093.650.000,00	865.344.420,00	79,12



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.2.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	123.000.000,00	95.770.000,00	77,86
5.1.2.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	101.200.000,00	70.140.000,00	69,31
5.1.2.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	55.200.000,00	54.845.000,00	99,36
5.1.2.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	125.000.000,00	80.961.750,00	64,77
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	111.300.000,00	83.395.700,00	74,93
5.1.2.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	14.150.000,00	13.200.000,00	93,29
5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	19.800.000,00	15.054.000,00	76,03
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	559.390.000,00	507.826.627,00	90,78
5.1.2.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	71.330.000,00	67.945.000,00	95,25
5.1.2.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	25.000.000,00	24.999.000,00	100,00
5.1.2.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	5.000.000,00	4.980.000,00	99,60
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	555.530.000,00	495.941.273,00	89,27
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	310.510.000,00	279.856.965,00	90,13
5.1.2.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	87.000.000,00	86.450.000,00	99,37
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.274.233.250,00	4.051.092.006,00	94,78
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.121.206.750,00	2.916.951.213,00	93,46
5.1.2.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	38.750.000,00	38.736.000,00	99,96
5.1.2.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	198.000.000,00	197.500.000,00	99,75



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.2.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	348.000.000,00	331.742.793,00	95,33
5.1.2.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	108.500.000,00	107.900.000,00	99,45
5.1.2.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	320.540.000,00	320.000.000,00	99,83
5.1.2.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	60.450.000,00	59.800.000,00	98,92
5.1.2.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	65.720.000,00	65.400.000,00	99,51
5.1.2.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	13.066.500,00	13.062.000,00	99,97
5.1.2.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.687.237.402,00	3.672.763.447,00	99,61
5.1.2.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	198.550.000,00	197.750.000,00	99,60
5.1.2.03.04.0009	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	199.997.616,00	199.400.000,00	99,70
5.1.2.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	175.450.000,00	175.400.000,00	99,97
5.1.2.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	2.097.564.786,00	2.093.086.000,00	99,79
5.1.2.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.015.675.000,00	1.007.127.447,00	99,16
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	106.920.241.898,00	83.834.635.552,70	78,41
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	106.915.693.898,00	83.834.635.552,70	78,41
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.701.519.481,00	55.174.866.602,70	82,72
5.1.2.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	3.990.555.000,00	2.606.195.000,00	65,31
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.365.813.417,00	25.268.607.950,00	71,45
5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	77.775.000,00	24.225.000,00	31,15
5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	780.031.000,00	760.741.000,00	97,53
5.1.2.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	4.548.000,00	0,00	-
5.1.2.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	4.548.000,00	0,00	-



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.947.141.800,00	2.812.620.894,00	28,28
5.1.2.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	490.100.000,00	432.150.000,00	88,18
5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	490.100.000,00	432.150.000,00	88,18
5.1.2.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.457.041.800,00	2.380.470.894,00	25,17
5.1.2.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	9.231.941.800,00	2.155.970.894,00	23,35
5.1.2.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	225.100.000,00	224.500.000,00	99,73
5.1.2.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.260.166.600,00	16.478.546.911,00	124,27
5.1.2.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.260.166.600,00	16.478.546.911,00	124,27
5.1.2.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.260.166.600,00	16.478.546.911,00	124,27
5.1.2.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.928.493.812,00	20.997.637.434,50	105,36
5.1.2.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.928.493.812,00	20.997.637.434,50	105,36
5.1.2.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.928.493.812,00	20.997.637.434,50	105,36
Jumlah		454.402.384.851,00	368.195.904.183,30	81,03

Rincian dan perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.29
Rincian Belanja Barang dan Jasa pada SKPD

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dinas Pendidikan	59.140.143.969,00	57.072.037.884,00	96,50	59.271.890.947,19	(2.199.853.063,19)
Dinas Kesehatan	52.994.675.202,00	46.939.593.643,75	88,57	45.073.665.083,57	1.865.928.560,18
Rumah Sakit Umum Daerah	27.508.311.122,00	25.127.708.050,00	91,35	16.723.357.098,00	8.404.350.952,00
Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	0,00	2.575.314.490,18	0,00	17.656.929.795,83	(15.081.615.305,33)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	35.233.791.114,00	31.501.683.991,00	89,41	20.141.866.726,67	11.359.817.264,33
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	3.857.210.400,00	3.343.373.543,00	86,68	3.614.198.796,00	(270.825.253,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	6.282.621.762,00	6.163.706.757,00	98,11	4.842.642.430,00	1.321.064.327,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dinas Pemadam kebakaran Dan Penyelamatan	4.571.269.663,00	4.261.293.157,50	93,22	3.251.377.073,00	1.009.916.084,50
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.808.292.982,00	13.619.973.043,00	72,41	12.602.440.451,00	1.017.532.592,00
Dinas Sosial	3.707.092.602,00	3.434.429.475,00	92,64	2.249.124.817,00	1.185.304.658,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.433.568.902,00	3.334.180.297,00	97,11	1.930.642.626,00	1.403.537.671,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.398.579.908,00	6.341.057.480,00	85,71	4.608.724.948,00	1.732.332.532,00
Dinas Lingkungan Hidup	49.666.473.547,00	15.169.305.540,00	30,54	18.793.123.880,20	(3.623.818.340,20)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.749.568.042,00	2.705.685.367,00	98,40	2.631.340.686,00	74.344.681,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.759.374.000,00	5.623.053.013,00	97,63	4.239.360.278,00	1.383.692.735,00
Dinas Perhubungan	3.427.596.491,00	3.385.818.473,00	98,78	2.105.571.663,00	1.280.246.810,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	3.829.023.672,00	3.629.967.300,00	94,80	3.150.984.144,00	478.983.156,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	10.714.285.540,00	10.276.953.339,00	95,92	8.464.622.731,00	1.812.330.608,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.481.474.366,00	2.425.846.264,00	97,76	2.142.877.841,00	282.968.423,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	7.217.409.733,00	6.037.415.444,00	83,65	3.704.996.748,00	2.332.418.696,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.817.918.403,00	1.701.178.707,00	93,58	1.178.666.572,00	522.512.135,00
Dinas Perikanan	3.739.579.847,00	3.540.545.951,00	94,68	2.172.952.429,00	1.367.593.522,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	10.168.881.489,00	8.311.963.526,00	81,74	4.806.476.649,00	3.505.486.877,00
Sekretariat Daerah	28.353.646.523,00	24.426.092.248,00	86,15	20.711.623.569,00	3.714.468.679,00
Inspektorat Daerah	5.467.484.796,00	4.901.919.883,00	89,66	3.975.666.740,00	926.253.143,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	6.192.213.712,00	4.353.921.418,00	70,31	3.380.293.581,00	973.627.837,00
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	25.013.602.149,00	11.391.350.038,15	45,54	8.802.032.581,85	2.589.317.456,30



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	5.069.875.170,00	4.714.579.209,00	92,99	4.092.266.106,00	622.313.103,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.999.849.418,00	4.826.771.408,00	80,45	4.144.469.350,00	682.302.058,00
Sekretariat DPRD	31.893.063.138,00	26.000.892.205,40	81,53	22.466.423.091,00	3.534.469.114,40
Kecamatan Seruyan Hilir	4.099.847.994,00	4.038.242.865,00	98,50	4.090.004.278,00	(51.761.413,00)
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	1.940.406.802,00	1.911.987.344,00	98,54	1.264.549.369,00	647.437.975,00
Kecamatan Danau Sembuluh	1.226.538.352,00	1.218.328.445,00	99,33	823.971.520,00	394.356.925,00
Kecamatan Seruyan Raya	1.137.460.146,00	1.119.322.471,00	98,41	880.343.782,00	238.978.689,00
Kecamatan Danau Seluluk	1.326.020.320,00	1.291.191.320,00	97,37	894.139.288,00	397.052.032,00
Kecamatan Hanau	1.491.138.134,00	1.452.132.830,00	97,38	1.343.967.658,00	108.165.172,00
Kecamatan Batu Ampar	1.679.106.140,00	1.638.196.478,00	97,56	1.218.603.368,00	419.593.110,00
Kecamatan Seruyan Tengah	3.195.037.931,00	2.994.923.249,00	93,74	2.147.821.309,00	847.101.940,00
Kecamatan Seruyan Hulu	1.550.733.000,00	1.503.518.905,00	96,96	993.920.289,00	509.598.616,00
Kecamatan Suling Tambun	1.549.617.400,00	1.480.771.251,00	95,56	1.120.738.051,00	360.033.200,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.709.600.970,00	2.409.677.880,00	88,93	1.663.972.068,00	745.705.812,00
JUMLAH	454.402.384.851,00	368.195.904.183,30	81,03	329.372.640.412,31	38.823.263.770,99

5.1.2.c. Belanja Bunga

31 Desember 2023

0,00

31 Desember 2022

0,00

Realisasi Belanja Bunga Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00.

5.1.2.d. Belanja Subsidi

31 Desember 2023

1.999.999.670,00

31 Desember 2022

1.999.996.003,00

Realisasi Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.999.999.670,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi T.A. 2022 sebesar Rp1.999.996.003,00 maka realisasi T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.667,00 atau 0,00018%. Rincian



anggaran dan perbandingan realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.30
Belanja Subsidi

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.999.999.670,00	100,00	1.999.996.003,00	3.667,00
Jumlah	2.000.000.000,00	1.999.999.670,00	100,00	1.999.996.003,00	3.667,00

Realisasi Belanja Subsidi diberikan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

5.1.2.e. Belanja Hibah	<u>31 Desember 2023</u> 86.720.990.864,76	<u>31 Desember 2022</u> 29.943.448.031,00
-------------------------------	--	--

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp86.720.990.864,76 atau 98,38% dari pagu anggaran sebesar Rp88.150.376.130,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah T.A. 2022 sebesar Rp29.943.448.031,00 maka realisasi T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp56.777.542.833,76 atau 189,62%. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah T.A. 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.31
Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	32.184.997.780,00	32.176.932.414,57	99,97	9.805.285.210,00	22.371.647.204,57
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	446.718.632,50	0,00	0,00	446.718.632,50
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	44.261.241.350,00	42.429.237.305,69	95,86	19.507.945.821,00	22.921.291.484,69
Belanja Hibah Dana BOS	11.073.920.000,00	11.037.885.512,00	99,67	0,00	11.037.885.512,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	630.217.000,00	630.217.000,00	100,00	630.217.000,00	0,00
Jumlah	88.150.376.130,00	86.720.990.864,76	98,38	29.943.448.031,00	56.777.542.833,76

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.32
Rincian Belanja Hibah

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.5	Belanja Hibah	88.150.376.130,00	86.720.990.864,76	98,38
5.1.5.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	32.184.997.780,00	32.176.932.414,57	99,97
5.1.5.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	17.709.295.180,00	17.709.295.180,00	100,00
5.1.5.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	17.709.295.180,00	17.709.295.180,00	100,00
5.1.5.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	14.475.702.600,00	14.467.637.234,57	99,94
5.1.5.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	14.475.702.600,00	14.467.637.234,57	99,94
5.1.5.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	446.718.632,50	0,00
5.1.5.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	446.718.632,50	0,00
5.1.5.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	446.718.632,50	0,00
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	44.261.241.350,00	42.429.237.305,69	95,86
5.1.5.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	35.963.847.350,00	34.597.798.212,69	96,20
5.1.5.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.886.361.000,00	14.755.184.378,00	92,88
5.1.5.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.077.486.350,00	19.842.613.834,69	98,83
5.1.5.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.647.187.000,00	4.291.332.093,00	92,34



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.5.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.285.000.000,00	958.696.928,00	74,61
5.1.5.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.362.187.000,00	3.332.635.165,00	99,12
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.650.207.000,00	3.540.107.000,00	96,98
5.1.5.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.620.207.000,00	3.510.207.000,00	96,96
5.1.5.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	30.000.000,00	29.900.000,00	99,67
5.1.5.06	Belanja Hibah Dana BOS	11.073.920.000,00	11.037.885.512,00	99,67
5.1.5.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	11.073.920.000,00	11.037.885.512,00	99,67
5.1.5.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	11.073.920.000,00	11.037.885.512,00	99,67
5.1.5.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	630.217.000,00	630.217.000,00	100,00
5.1.5.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	630.217.000,00	630.217.000,00	100,00
5.1.5.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	630.217.000,00	630.217.000,00	100,00
Jumlah		88.150.376.130,00	86.720.990.864,76	98,38

Rincian dan perbandingan Realisasi Belanja Hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.33
Rincian Belanja Hibah pada SKPD

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dinas Pendidikan	17.038.891.000,00	16.887.458.790,00	99,11	1.910.370.200,00	14.977.088.590,00
Dinas Kesehatan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	249.750.000,00	50.250.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	32.733.079.950,00	32.492.946.141,26	99,27	17.396.027.665,00	15.096.918.476,26
Dinas Sosial	216.991.000,00	216.991.000,00	100,00	174.029.500,00	42.961.500,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	1.250.000.000,00	772.000.000,00	61,76	399.893.228,00	372.106.772,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana					
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.005.207.000,00	930.207.000,00	92,54	1.079.709.350,00	(149.502.350,00)
Dinas Perhubungan	186.480.000,00	186.380.000,00	99,95	0,00	186.380.000,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata Dan Kebudayaan	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	100,00	3.070.000.000,00	2.630.000.000,00
Dinas Perikanan	3.362.187.000,00	3.332.635.165,00	99,12	493.079.760,00	2.839.555.405,00
Sekretariat Daerah	6.150.000.000,00	5.603.917.028,00	91,12	3.499.282.928,00	2.104.634.100,00
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	446.718.632,50	-	0,00	446.718.632,50
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	750.000.000,00	720.500.000,00	96,07	0,00	720.500.000,00
Kecamatan Seruyan Hilir	0,00	0,00	0,00	214.700.000,00	(214.700.000,00)
Kecamatan Seruyan Tengah	0,00	0,00	0,00	90.680.000,00	(90.680.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	19.457.540.180,00	19.131.237.108,00	98,32	1.365.925.400,00	17.765.311.708,00
Jumlah	88.150.376.130,00	86.720.990.864,76	98,38	29.943.448.031,00	56.777.542.833,76

5.1.2.f. Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2023
9.986.539.800,00

31 Desember 2022
19.478.374.200,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.986.539.800,00 atau 95,70% dari anggaran sebesar Rp10.435.431.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial T.A. 2022 sebesar Rp19.478.374.200,00, maka realisasi T.A. 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.491.834.400,00 atau 48,73%. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sosial T.A. 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.34
Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7.920.431.500,00	7.471.539.800,00	94,33	5.165.063.050,00	2.306.476.750,00
Belanja Bantuan Sosial	2.515.000.000,00	2.515.000.000,00	100,00	14.313.311.150,00	(11.798.311.150,00)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
kepada Keluarga					
Jumlah	10.435.431.500,00	9.986.539.800,00	95,70	19.478.374.200,00	(9.491.834.400,00)

Rincian Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.35
Rincian Belanja Bantuan Sosial

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.435.431.500,00	9.986.539.800,00	95,70
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7.920.431.500,00	7.471.539.800,00	94,33
5.1.6.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	7.635.189.000,00	7.227.988.000,00	94,67
5.1.6.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	7.635.189.000,00	7.227.988.000,00	94,67
5.1.6.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	285.242.500,00	243.551.800,00	85,38
5.1.6.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	285.242.500,00	243.551.800,00	85,38
5.1.6.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.515.000.000,00	2.515.000.000,00	100,00
5.1.6.02.01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.515.000.000,00	2.515.000.000,00	100,00
5.1.6.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.515.000.000,00	2.515.000.000,00	100,00
Jumlah		10.435.431.500,00	9.986.539.800,00	95,70

Rincian dan perbandingan Realisasi Belanja Sosial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.36
Rincian Belanja Bantuan Sosial pada SKPD

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	13.994.602.900,00	(13.994.602.900,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	167.775.000,00	126.489.300,00	75,39	0,00	126.489.300,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	3.255.000.000,00	3.254.988.000,00	100,00	3.103.708.250,00	151.279.750,00
Dinas Sosial	1.885.300.000,00	1.884.895.000,00	99,98	1.715.063.050,00	169.831.950,00
Sekretariat Daerah	5.095.189.000,00	4.688.000.000,00	92,01	665.000.000,00	4.023.000.000,00
Kecamatan Seruyan Hilir	32.167.500,00	32.167.500,00	100,00	0,00	32.167.500,00
Jumlah	10.435.431.500,00	9.986.539.800,00	95,70	19.478.374.200,00	(9.491.834.400,00)

5.1.2.g. Belanja Modal	<u>31 Desember 2023</u> 235.059.146.858,74	<u>31 Desember 2022</u> 159.703.735.084,20
-------------------------------	---	---

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp235.059.146.858,74 atau 85,65% dari anggaran Rp274.444.563.558,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal T.A. 2022 sebesar Rp159.703.735.084,20, maka realisasi T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp75.355.411.774,54 atau 47,18%. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.37
Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.155.244.890,00	45.974.881.069,00	93,53	48.875.920.215,00	(2.901.039.146,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.400.088.146,00	57.398.957.903,04	86,44	31.520.633.822,00	25.878.324.081,04
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	155.985.636.774,00	130.384.672.314,70	83,59	77.887.865.307,20	52.496.807.007,50
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.464.093.748,00	870.194.072,00	35,31	1.419.315.740,00	(549.121.668,00)
Belanja Modal Aset Lainnya	439.500.000,00	430.441.500,00	97,94	0,00	430.441.500,00
Jumlah	274.444.563.558,00	235.059.146.858,74	85,65	159.703.735.084,20	75.355.411.774,54



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.38
Rincian Belanja Modal

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.2	BELANJA MODAL	274.444.563.558,00	235.059.146.858,74	85,65
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.155.244.890,00	45.974.881.069,00	93,53
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Besar	4.097.930.652,00	2.207.831.992,00	53,88
5.2.2.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.563.983.652,00	1.682.646.992,00	47,21
5.2.2.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	3.563.983.652,00	1.682.646.992,00	47,21
5.2.2.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	533.947.000,00	525.185.000,00	98,36
5.2.2.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	259.997.000,00	259.500.000,00	99,81
5.2.2.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	35.000.000,00	34.980.000,00	99,94
5.2.2.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	6.750.000,00	6.750.000,00	100
5.2.2.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	82.500.000,00	81.100.000,00	98,30
5.2.2.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	149.700.000,00	142.855.000,00	95,43
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	14.867.164.000,00	14.103.713.869,00	94,86
5.2.2.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	14.655.799.000,00	13.912.265.869,00	94,93
5.2.2.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	510.000.000,00	479.300.000,00	93,98
5.2.2.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.528.077.000,00	3.421.737.000,00	96,99
5.2.2.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.166.832.000,00	4.806.100.000,00	93,02
5.2.2.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.974.966.000,00	1.747.080.814,00	88,46
5.2.2.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	52.750.000,00	52.614.555,00	99,74
5.2.2.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.322.800.000,00	3.305.700.000,00	99,49
5.2.2.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	100.374.000,00	99.733.500,00	99,36
5.2.2.02.05	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	211.365.000,00	191.448.000,00	90,58
5.2.2.02.05.0001	Belanja Modal Kapal Terbang	211.365.000,00	191.448.000,00	90,58
5.2.2.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.066.845.000,00	1.057.612.230,00	99,13
5.2.2.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	166.000.000,00	166.000.000,00	100,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.2.2.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	166.000.000,00	166.000.000,00	100,00
5.2.2.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	186.970.000,00	186.962.230,00	100,00
5.2.2.03.02.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	85.470.000,00	85.462.230,00	99,99
5.2.2.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	101.500.000,00	101.500.000,00	100,00
5.2.2.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	713.875.000,00	704.650.000,00	98,71
5.2.2.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
5.2.2.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	8.125.000,00	8.000.000,00	98,46
5.2.2.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	346.000.000,00	344.950.000,00	99,70
5.2.2.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	355.750.000,00	347.700.000,00	97,74
5.2.2.04	Belanja Modal Alat Pertanian	95.080.000,00	94.544.000,00	99,44
5.2.2.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	95.080.000,00	94.544.000,00	99,44
5.2.2.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	95.080.000,00	94.544.000,00	99,44
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.308.480.975,00	9.958.424.016,00	96,60
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.351.967.975,00	1.245.933.440,00	92,16
5.2.2.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	75.000.000,00	74.592.000,00	99,46
5.2.2.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	305.569.975,00	288.003.750,00	94,25
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	971.398.000,00	883.337.690,00	90,93
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.888.010.000,00	7.700.202.051,00	97,62
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.392.684.400,00	2.365.383.434,00	98,86
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	164.241.000,00	127.685.100,00	77,74
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.351.363.000,00	1.339.837.580,00	99,15
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	46.320.000,00	43.108.200,00	93,07
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.996.996.600,00	2.924.524.737,00	97,58
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	936.405.000,00	899.663.000,00	96,08



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.2.2.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.068.503.000,00	1.012.288.525,00	94,74
5.2.2.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	203.209.000,00	177.493.806,00	87,35
5.2.2.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	29.425.000,00	29.400.000,00	99,92
5.2.2.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	443.343.000,00	435.285.778,00	98,18
5.2.2.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	104.744.000,00	104.351.200,00	99,62
5.2.2.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	32.598.000,00	19.400.000,00	59,51
5.2.2.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	134.545.000,00	133.466.421,00	99,20
5.2.2.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	120.639.000,00	112.891.320,00	93,58
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	409.048.000,00	340.643.100,00	83,28
5.2.2.06.01	Belanja Modal Alat Studio	166.000.000,00	164.875.000,00	99,32
5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.2.2.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	147.500.000,00	146.405.000,00	99,26
5.2.2.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
5.2.2.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.500.000,00	2.470.000,00	98,80
5.2.2.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	231.048.000,00	163.768.100,00	70,88
5.2.2.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	156.198.000,00	152.677.100,00	97,75
5.2.2.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	71.200.000,00	7.500.000,00	10,53
5.2.2.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	3.650.000,00	3.591.000,00	98,38
5.2.2.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
5.2.2.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
5.2.2.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.314.306.419,00	7.418.300.038,00	101,42
5.2.2.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.657.518.699,00	4.802.897.688,00	103,12
5.2.2.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.705.123.251,00	2.021.300.929,00	118,54
5.2.2.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	477.715.455,00	463.542.000,00	97,03



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.2.2.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.387.229.993,00	2.210.220.345,00	92,59
5.2.2.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	87.450.000,00	86.676.814,00	99,12
5.2.2.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	21.157.600,00	0,00
5.2.2.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.656.787.720,00	2.615.402.350,00	98,44
5.2.2.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.656.787.720,00	2.615.402.350,00	98,44
5.2.2.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	79.000.000,00	78.925.000,00	99,91
5.2.2.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
5.2.2.08.01.0063	Belanja Modal Alat Pengukur Gelombang	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
5.2.2.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	75.000.000,00	74.925.000,00	99,90
5.2.2.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	75.000.000,00	74.925.000,00	99,90
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	10.864.719.844,00	10.662.236.824,00	98,14
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	8.384.973.644,00	8.267.971.898,00	98,60
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	7.746.669.644,00	7.675.985.898,00	99,09
5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	638.304.000,00	591.986.000,00	92,74
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.479.746.200,00	2.394.264.926,00	96,55
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.310.741.200,00	1.259.980.830,00	96,13
5.2.2.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	32.500.000,00	32.190.000,00	99,05
5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.136.505.000,00	1.102.094.096,00	96,97
5.2.2.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00
5.2.2.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00
5.2.2.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
5.2.02.17.01.0019	Belanja Modal Transport and Storage Equipment for Liquid	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	750.000,00	730.000,00	97,33
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	750.000,00	730.000,00	97,33
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	750.000,00	730.000,00	97,33
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.400.088.146,00	57.398.957.903,04	86,44
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	63.892.490.799,00	54.987.519.303,04	86,06
5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	61.475.289.799,00	52.598.908.599,04	85,56
5.2.3.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	16.717.876.000,00	8.806.949.997,04	52,68
5.2.3.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	400.000.000,00	398.723.500,00	99,68
5.2.3.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.639.800.000,00	5.571.214.319,00	98,78
5.2.3.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.913.760.000,00	1.868.027.000,00	97,61
5.2.3.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	30.114.561.858,00	29.380.173.833,00	97,56
5.2.3.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.925.299.500,00	3.920.523.950,00	99,88
5.2.3.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.618.800.000,00	1.576.257.000,00	97,37
5.2.3.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	264.388.096,00	244.132.000,00	92,34
5.2.3.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	594.304.345,00	546.973.500,00	92,04
5.2.3.01.01.0028	Belanja Modal Bangunan Industri	286.500.000,00	285.933.500,00	99,80
5.2.3.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.417.201.000,00	2.388.610.704,00	98,82
5.2.3.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	1.199.050.000,00	1.197.630.000,00	99,88
5.2.3.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.218.151.000,00	1.190.980.704,00	97,77
5.2.3.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.507.597.347,00	2.411.438.600,00	96,17
5.2.3.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.507.597.347,00	2.411.438.600,00	96,17



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.2.3.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.507.597.347,00	2.411.438.600,00	96,17
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	155.985.636.774,00	130.384.672.314,70	83,59
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	141.039.150.184,00	117.303.964.310,70	83,17
5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	129.071.809.304,00	105.872.877.710,68	82,03
5.2.4.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	95.796.806.000,00	72.711.394.941,68	75,90
5.2.4.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	21.788.450.900,00	21.722.933.819,00	99,70
5.2.4.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	11.486.552.404,00	11.438.548.950,00	99,58
5.2.4.01.02	Belanja Modal Jembatan	11.967.340.880,00	11.431.086.600,02	95,52
5.2.4.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	7.364.897.000,00	7.243.749.000,00	98,36
5.2.4.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	4.602.443.880,00	4.187.337.600,02	90,98
5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	11.994.704.590,00	10.132.053.320,00	84,47
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	825.377.608,00	816.502.000,00	98,92
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	825.377.608,00	816.502.000,00	98,92
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	7.061.361.247,00	5.416.396.875,00	76,70
5.2.04.02.02.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	6.864.391.552,00	5.219.546.875,00	76,04
5.2.04.02.02.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut	196.969.695,00	196.850.000,00	99,94
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	109.875.735,00	109.775.000,00	99,91
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	109.875.735,00	109.775.000,00	99,91
5.2.4.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	200.000.000,00	199.139.000,00	99,57
5.2.4.02.05.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	200.000.000,00	199.139.000,00	99,57
5.2.4.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.798.090.000,00	3.590.240.445,00	94,53
5.2.4.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	3.698.090.000,00	3.490.790.445,00	94,39
5.2.4.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	100.000.000,00	99.450.000,00	99,45
5.2.4.03	Belanja Modal Instalasi	2.534.732.000,00	2.532.906.204,00	99,93



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.2.4.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	196.437.000,00	196.000.000,00	99,78
5.2.4.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	196.437.000,00	196.000.000,00	99,78
5.2.4.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	455.995.000,00	455.995.000,00	100,00
5.2.4.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	455.995.000,00	455.995.000,00	100,00
5.2.4.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	75.000.000,00	73.611.204,00	98,15
5.2.4.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	75.000.000,00	73.611.204,00	98,15
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	1.807.300.000,00	1.807.300.000,00	100,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	1.807.300.000,00	1.807.300.000,00	100,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	417.050.000,00	415.748.480,00	99,69
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	417.050.000,00	415.748.480,00	99,69
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	417.050.000,00	415.748.480,00	99,69
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.464.093.748,00	870.194.072,00	35,31
5.2.5.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.178.493.748,00	670.342.672,00	30,77
5.2.5.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.178.493.748,00	670.342.672,00	30,77
5.2.5.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	2.070.643.748,00	607.962.072,00	29,36
5.2.5.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	6.400.000,00	6.306.000,00	98,53
5.2.5.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	62.850.000,00	19.400.000,00	30,87
5.2.5.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	23.600.000,00	21.693.400,00	91,92
5.2.5.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	6.000.000,00	5.996.000,00	99,93
5.2.5.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga	9.000.000,00	8.985.200,00	99,84
5.2.5.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
5.2.5.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
5.2.5.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
5.2.5.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	249.600.000,00	163.851.400,00	65,65
5.2.5.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	249.600.000,00	163.851.400,00	65,65
5.2.5.08.01.0005	Belanja Modal Software	249.600.000,00	163.851.400,00	65,65



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	439.500.000,00	430.441.500,00	97,94
5.2.6.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	439.500.000,00	430.441.500,00	97,94
5.2.6.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	439.500.000,00	430.441.500,00	97,94
5.2.6.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	3.500.000,00	0,00	0,00
5.2.6.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	316.000.000,00	310.950.000,00	98,40
5.2.6.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	120.000.000,00	119.491.500,00	99,58
Jumlah		274.444.563.558,00	235.059.146.858,74	85,65

Rincian Realisasi Belanja Modal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.39
Belanja Modal pada SKPD

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dinas Pendidikan	47.007.444.605,00	42.609.486.515,00	90,64	26.974.704.121,00	15.634.782.394,00
Dinas Kesehatan	11.843.389.919,00	11.531.698.594,00	97,37	20.231.215.597,00	(8.699.517.003,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang	5.858.620.000,00	5.655.688.133,00	96,54	9.385.146.280,00	(3.729.458.147,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	0,00	374.687.600,00	0,00	5.367.458.996,00	(4.992.771.396,00)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	163.548.446.774,00	137.679.923.982,70	84,18	68.229.747.104,20	69.450.176.878,50
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	1.249.982.000,00	1.144.464.000,00	91,56	1.088.798.900,00	55.665.100,00
Satuan Polisi Pamong Praja	209907000	208062100	99,12	0,00	208.062.100,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	345.305.000,00	341.119.800,00	98,79	101.124.920,00	239.994.880,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.982.987.000,00	9.362.488.110,00	55,13	14.852.485.278,00	(5.489.997.168,00)
Dinas Sosial	79.114.000,00	77.614.000,00	98,10	73.080.000,00	4.534.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.026.850.000,00	1.020.842.842,00	99,41	87.926.500,00	932.916.342,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	567.199.000,00	557.484.551,74	98,29	885.753.800,00	(328.269.248,26)
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	2.402.974.000,00	2.053.101.255,00	85,44	1.497.349.496,00	555.751.759,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	292.970.000,00	291.148.000,00	99,38	443.989.000,00	(152.841.000,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	536.552.000,00	524.318.000,00	97,72	34.700.000,00	489.618.000,00
Dinas Perhubungan	781.871.096,00	758.165.500,00	96,97	64.180.000,00	693.985.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	504.019.500,00	468.057.400,00	92,86	474.413.000,00	(6.355.600,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	1.275.782.500,00	1.275.216.000,00	99,96	415.771.400,00	859.444.600,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	167.585.000,00	163.590.000,00	97,62	129.025.000,00	34.565.000,00
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	474.747.000,00	453.221.000,00	95,47	74.216.000,00	379.005.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	253.346.000,00	243.001.900,00	95,92	658.129.583,00	(415.127.683,00)
Dinas Perikanan	160.492.000,00	160.482.000,00	99,99	1.807.000,00	158.675.000,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	952.792.000,00	892.787.850,00	93,70	23.725.000,00	869.062.850,00
Sekretariat Daerah	4.150.778.550,00	4.069.008.170,00	98,03	769.402.950,00	3.299.605.220,00
Inspektorat Daerah	425.100.000,00	402.471.650,30	94,68	244.507.407,00	157.964.243,30
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	643.341.850,00	586.730.000,00	91,20	335.313.990,00	251.416.010,00
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	4.456.355.225,00	4.303.162.250,00	96,56	3.064.432.200,00	1.238.730.050,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	1.792.628.053,00	1.751.660.950,00	97,71	675.453.340,00	1.076.207.610,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	95.765.000,00	94.017.000,00	98,17	0,00	94.017.000,00
Sekretariat DPRD	4.623.668.692,00	4.288.019.907,00	92,74	2.424.539.222,00	1.863.480.685,00
Kecamatan Seruyan Hilir	410.967.346,00	406.842.298,00	99,00	200.720.000,00	206.122.298,00
Kecamatan Seruyan Hilir Timur	217.200.000,00	216.728.000,00	99,78	7.020.000,00	209.708.000,00
Kecamatan Danau Sembuluh	91.796.000,00	91.796.000,00	100,00	16.050.000,00	75.746.000,00
Kecamatan Seruyan Raya	96.741.000	95.241.000	98,45	0,00	95.241.000,00
Kecamatan Danau Seluluk	81.209.000,00	79.244.000,00	97,58	24.725.250,00	54.518.750,00
Kecamatan Hanau	23.998.000	23.976.000	99,91	0,00	23.976.000,00
Kecamatan Batu Ampar	93.308.000,00	93.095.000,00	99,77	112.624.000,00	(19.529.000,00)
Kecamatan Seruyan Tengah	330.289.000,00	323.566.000,00	97,96	501.854.000,00	(178.288.000,00)
Kecamatan Seruyan Hulu	41.727.048,00	41.680.500,00	99,89	69.125.250,00	(27.444.750,00)
Kecamatan Suling Tambun	195.779.400,00	195.224.000,00	99,72	102.231.000,00	92.993.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	151.535.000,00	150.035.000,00	99,01	60.989.500,00	89.045.500,00
Jumlah	274.444.563.558,00	235.059.146.858,74	85,65	159.703.735.084,20	75.355.411.774,54

5.1.2.h. Belanja Tidak Terduga

31 Desember 2023
732.657.783,00

31 Desember 2022
1.357.580.146,00

Realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp732.657.783,00 atau 33,14 % dari anggaran Rp2.210.551.210,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga T.A. 2022 sebesar Rp1.357.580.146,00 maka realisasi T.A. 2023 mengalami penurunan sebesar Rp624.922.363,00 atau 46,03%. Anggaran dan perbandingan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:



Tabel 5.40
Belanja Tak Terduga

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Tak Terduga	2.210.551.210,00	732.657.783,00	33,14	1.357.580.146,00	(624.922.363,00)
Jumlah	2.210.551.210,00	732.657.783,00	33,14	1.357.580.146,00	(624.922.363,00)

Rincian realisasi Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.41
Rincian Belanja Tak Terduga

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Uang Santunan Korban Kebakaran	94.000.000,00
2	Bantuan Uang Santunan Duka Cita	487.500.000,00
3	Bantuan Berobat Masyarakat Tidak Mampu	151.157.783,00
Jumlah		732.657.783,00

5.1.2.i. Belanja Transfer

31 Desember 2023
178.023.650.478,00

31 Desember 2022
163.496.476.192,00

Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp178.023.650.478,00 atau 96,33% dari anggaran sebesar Rp184.803.968.888,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer T.A. 2022 sebesar Rp163.496.476.192,00, maka realisasi T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp14.527.174.286,00 atau 8,89%, Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Seruyan T.A. 2023 dan T.A. 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.42
Belanja Transfer

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Bagi Hasil	6.394.084.188,00	1.727.173.530,00	27,01	1.479.323.792,00	247.849.738,00
Belanja Bantuan Keuangan	178.409.884.700,00	176.296.476.948,00	98,82	162.017.152.400,00	14.279.324.548,00
Jumlah	184.803.968.888,00	178.023.650.478,00	96,33	163.496.476.192,00	14.527.174.286,00



- Belanja Bagi Hasil**

Realisasi belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.727.173.530,00 atau sebesar 27,01% dari anggaran sebesar Rp6.394.084.188,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Bagi Hasil T.A. 2022 sebesar Rp1.479.323.792,00 maka realisasi T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp247.849.738,00 atau 16,75%. Untuk rincian alokasi penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.43
Belanja Bagi Hasil

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.832.726.033,00	1.383.326.952,00	23,72
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	561.358.155,00	343.846.578,00	61,25
Jumlah	6.394.084.188,00	1.727.173.530,00	27,01

Sedangkan rincian alokasi penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 untuk per desa di setiap kecamatan disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.44
Rincian Alokasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NOMOR REKENING	TOTAL (Rp)
1	SERUYAN HILIR	SUNGAI PERLU	301.0202.00605-1	10.205.273,00
		PEMATANG LIMAU	301.0202.00297-7	21.572.154,00
		TANJUNG RANGAS	301.0202.00297-4	11.260.097,00
		MUARA DUA	301.0202.00300-1	9.948.687,00
		JAHTAN	301.0202.01529-4	18.043.638,00
		BAUNG	301.0202.01123-0	16.803.825,00
		PERSIL RAYA	301.0202.00464-8	11.144.048,00
		SUNGAI UNDANG	301.0202.00465-5	11.443.258,00
2	SERUYAN HILIR TIMUR	MEKAR INDAH	301.0202.00296-5	10.423.320,00
		HALIMAUNG JAYA	301.0202.00298-0	18.546.101,00
		BANGUN HARJA	301.0202.00296-9	11.374.432,00
		KARTIKA BHAKTI	301.0202.00296-4	16.330.252,00
		SUNGAI BAKAU	301.0202.00298-7	16.010.949,00
		PEMATANG PANJANG	301.0202.00295-7	12.941.525,00



NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NOMOR REKENING	TOTAL (Rp)
3	SERUYAN RAYA	TERAWAN	301.0202.00301-4	16.997.558,00
		SELUNUK	301.0202.00460-0	11.840.182,00
		LANPASA	301.0202.00913-0	15.675.282,00
		BANGKAL	301.0202.00301-6	12.595.360,00
		TABIKU	301.0202.00460-5	36.750.637,00
4	DANAU SEMBULUH	TELAGA PULANG	301.0202.00301-1	10.935.557,00
		CEMPAKA BARU	301.0202.00302-0	9.694.713,00
		PALINGKAU	301.0202.00303-5	9.694.713,00
		ULAK BATU	301.0202.00303-1	9.985.400,00
		PAREN	301.0202.00302-8	9.694.713,00
		BANUA USANG	301.0202.00303-8	9.694.713,00
		SEMBULUH I	301.0202.00302-5	36.065.452,00
		SEMBULUH II	301.0202.00300-8	56.052.801,00
5	HANAU	TANJUNG HANAU	402.0202.00481-2	9.856.449,00
		PARANG BATANG	402.0202.00746-5	9.877.304,00
		BAHAUR	402.0202.00580-4	10.028.131,00
		PEMBUANG HULU I	402.0202.00477-8	50.898.672,00
		PEMBUANG HULU II	402.0202.00478-0	12.625.931,00
		DERANGGA	402.0202.00666-1	10.085.634,00
		PARING RAYA	402.0202.00480-7	9.694.713,00
6	DANAU SELULUK	ASAM BARU	402.0202.00478-8	13.315.394,00
		TANJUNG HARA	402.0202.00479-0	13.151.100,00
		TANJUNG PARING	402.0202.00479-5	10.024.926,00
		TANJUNG RANGAS II	402.0202.00481-4	9.827.722,00
		RUNGAU RAYA	402.0202.00479-3	27.082.619,00
		PANIMBA RAYA	402.0202.00479-8	9.770.991,00
7	BATU AMPAR	SEBABI	402.0202.00481-7	9.694.713,00
		SANDUL	402.0202.00482-0	11.059.201,00
		KALANG	402.0202.00482-2	10.552.521,00
		DERAWA	402.0202.00570-1	10.235.909,00
		WANA TIRTA	402.0202.00488-3	22.930.661,00
		SUKA MULYA	402.0202.00699-7	21.364.778,00
		DURIAN KAIT	402.0202.00482-7	11.703.150,00
		SAHABU	402.0202.00483-0	9.828.836,00
		BATU MENANGIS	402.0202.00483-1	10.491.758,00



NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NOMOR REKENING	TOTAL (Rp)
8	SULING TAMBUN	TUMBANG MAGIN	402.0202.00881-0	9.885.408,00
		TUMBANG SETOLI	402.0202.00489-7	9.694.713,00
		TUMBANG HENTAS	402.0202.00490-0	9.694.713,00
		TUMBANG LANGKAI	402.0202.00490-5	9.694.713,00
		TUMBANG SALAU	402.0202.00491-3	9.694.713,00
		TUMBANG GUGUP	402.0202.00491-5	9.694.713,00
		RANGKANG MUNDUK	402.0202.00491-0	9.694.713,00
		TANJUNG TUKAL	402.0202.00490-7	9.769.943,00
		RANTAU BETUNG	402.0202.00497-7	9.694.713,00
9	SERUYAN TENGAH	GANTUNG PENGAYUH	402.0202.00601-3	9.694.713,00
		TELUK BAYUR	402.0202.00483-9	13.247.485,00
		SUKA MANDANG	402.0202.00484-1	16.990.979,00
		AYAWAN	402.0202.00484-4	16.220.071,00
		MUGI PANYUHU	402.0202.00484-6	9.942.616,00
		BUKIT BULUH	402.0202.00489-2	9.694.713,00
		TUMBANG BAI	402.0202.00484-9	10.259.542,00
		DURIAN TUNGGAL	402.0202.00519-9	10.014.628,00
		PANYUMPA	402.0202.00485-6	9.694.713,00
		PANGKE	402-0202-00916-7	9.947.383,00
		SUKOREJO	402.0202.00486-8	50.952.493,00
		BATU AGUNG	402.0202.00487-8	12.774.685,00
		PANCA JAYA	402.0202.00824-7	9.694.713,00
		SUKAJAYA	402.0202.00676-8	12.275.261,00
		BUMI JAYA	402.0202.00487-1	40.068.823,00
		TANGGA BATU	402.0202.00488-8	15.774.946,00
		RINGIN AGUNG	402.0202.00486-5	11.731.144,00
		SUKA MAJU	402.0202.00485-9	37.125.807,00
		SUKA MAKMUR	402.0202.00486-3	38.175.338,00
10	SERUYAN HULU	MARANDANG	402.0202.00495-7	9.830.686,00
		TUMBANG SUEI	402.0202.00496-2	9.694.713,00
		TUMBANG MANJUL	402.0202.00496-4	9.701.844,00
		MOJANG BARU	402-0202-00801-6	9.694.713,00
		RANTAU PANJANG	402.0202.00497-0	10.082.118,00
		MONGAH JUAI	402.0202.00497-2	9.694.713,00
		TUSUK BELAWAN	402.0202.00495-4	9.752.398,00
		TUMBANG KALAM	402.0202.00495-2	9.694.713,00



NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NOMOR REKENING	TOTAL (Rp)
		TUMBANG BAHAN	402.0202.00675-2	9.694.713,00
		TUMBANG KUBANG	402.0202.00492.2	9.888.750,00
		SEPUNDU HANTU	402.0202.00812-0	9.975.927,00
		TUMBANG LAKU	402.0202.00519-1	9.853.592,00
		BUNTUT SAPAU	402.0202.00492.9	9.967.738,00
		TUMBANG DARAP	402.0202.00494-9	9.845.147,00
		TUMBANG KASAI	402.0202.00494-7	9.857.474,00
		TUMBANG SETAWAI	402.0202.00494-2	9.694.713,00
		TUMBANG SEPAN	402.0202.00493-9	9.694.713,00
		RIAM BATANG	402.0202.00493-7	9.694.713,00
		TUMBANG TABERAU	402.0202.00493-4	9.694.713,00
		TANJUNG PAKU	402.0202.00678-0	9.694.713,00
TOTAL				1.383.326.952

Untuk rincian alokasi penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 untuk per desa di setiap kecamatan disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.45
Rincian Alokasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NOMOR REKENING	TOTAL (Rp)
1	SERUYAN HILIR	SUNGAI PERLU	301.0202.00605-1	2.365.847,00
		PEMATANG LIMAU	301.0202.00297-7	5.821.734,00
		TANJUNG RANGAS	301.0202.00297-4	2.686.546,00
		MUARA DUA	301.0202.00300-1	2.287.837,00
		JAHTAN	301.0202.01529-4	4.748.955,00
		BAUNG	301.0202.01123-0	4.372.013,00
		PERSIL RAYA	301.0202.00464-8	2.651.264,00
		SUNGAI UNDANG	301.0202.00465-5	2.742.233,00
2	SERUYAN HILIR TIMUR	MEKAR INDAH	301.0202.00296-5	2.432.140,00
		HALIMAUNG JAYA	301.0202.00298-0	4.901.719,00
		BANGUN HARJA	301.0202.00296-9	2.721.308,00
		KARTIKA BHAKTI	301.0202.00296-4	4.228.032,00
		SUNGAI BAKAU	301.0202.00298-7	4.130.954,00
		PEMATANG PANJANG	301.0202.00295-7	3.197.753,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NOMOR REKENING	TOTAL (Rp)
3	SERUYAN RAYA	TERAWAN	301.0202.00301-4	4.430.914,00
		SELUNUK	301.0202.00460-0	2.862.910,00
		LANPASA	301.0202.00913-0	4.028.901,00
		BANGKAL	301.0202.00301-6	3.092.508,00
		TABIKU	301.0202.00460-5	10.436.467,00
4	DANAU SEMBULUH	TELAGA PULANG	301.0202.00301-1	2.587.876,00
		CEMPAKA BARU	301.0202.00302-0	2.210.621,00
		PALINGKAU	301.0202.00303-5	2.210.621,00
		ULAK BATU	301.0202.00303-1	2.298.998,00
		PAREN	301.0202.00302-8	2.210.621,00
		BANUA USANG	301.0202.00303-8	2.210.621,00
		SEMBULUH I	301.0202.00302-5	10.228.149,00
		SEMBULUH II	301.0202.00300-8	16.304.928,00
5	HANAU	TANJUNG HANAU	402.0202.00481-2	2.259.794,00
		PARANG BATANG	402.0202.00746-5	2.266.134,00
		BAHAUR	402.0202.00580-4	2.311.990,00
		PEMBUANG HULU I	402.0202.00477-8	14.734.911,00
		PEMBUANG HULU II	402.0202.00478-0	3.101.802,00
		DERANGGA	402.0202.00666-1	2.329.473,00
		PARING RAYA	402.0202.00480-7	2.210.621,00
6	DANAU SELULUK	ASAM BARU	402.0202.00478-8	3.311.421,00
		TANJUNG HARA	402.0202.00479-0	2.621.887,00
		TANJUNG PARING	402.0202.00479-5	2.311.016,00
		TANJUNG RANGAS II	402.0202.00481-4	2.251.060,00
		RUNGAU RAYA	402.0202.00479-3	7.497.087,00
		PANIMBA RAYA	402.0202.00479-8	2.233.811,00
7	BATU AMPAR	SEBABI	402.0202.00481.7	2.210.621,00
		SANDUL	402.0202.00482-0	2.625.468,00
		KALANG	402.0202.00482.2	2.471.421,00
		DERAWA	402.0202.00570-1	2.375.161,00
		WANA TIRTA	402.0202.00488-3	3.785.531,00
		SUKA MULYA	402.0202.00699-7	3.599.211,00
		DURIAN KAIT	402.0202.00482-7	2.821.248,00
		SAHABU	402.0202.00483-0	2.251.398,00
		BATU MENANGIS	402.0202.00483-1	2.452.947,00
8	SULING TAMBUN	TUMBANG MAGIN	402.0202.00881-0	2.268.598,00



NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NOMOR REKENING	TOTAL (Rp)
		TUMBANG SETOLI	402.0202.00489-7	2.210.621,00
		TUMBANG HENTAS	402.0202.00490-0	2.210.621,00
		TUMBANG LANGKAI	402.0202.00490-5	2.210.621,00
		TUMBANG SALAU	402.0202.00491-3	2.210.621,00
		TUMBANG GUGUP	402.0202.00491-5	2.210.621,00
		RANGKANG MUNDUK	402.0202.00491-0	2.210.621,00
		TANJUNG TUKAL	402.0202.00490-7	2.233.493,00
		RANTAU BETUNG	402.0202.00497-7	2.210.621,00
9	SERUYAN TENGAH	GANTUNG PENGAYUH	402.0202.00601-3	2.210.621,00
		TELUK BAYUR	402.0202.00483-9	3.290.774,00
		SUKA MANDANG	402.0202.00484-1	4.428.914,00
		AYAWAN	402.0202.00484-4	4.194.533,00
		MUGI PANYUHU	402.0202.00484-6	2.285.991,00
		BUKIT BULUH	402.0202.00489-2	2.210.621,00
		TUMBANG BAI	402.0202.00484-9	2.382.346,00
		DURIAN TUNGGAL	402.0202.00519-9	2.307.885,00
		PANYUMPA	402.0202.00485-6	2.210.621,00
		PANGKE	402-0202-00916-7	2.287.440,00
		SUKOREJO	402.0202.00486-8	14.754.275,00
		BATU AGUNG	402.0202.00487-8	3.147.028,00
		PANCA JAYA	402.0202.00824-7	2.210.621,00
		SUKAJAYA	402.0202.00676-8	2.995.188,00
		BUMI JAYA	402.0202.00487-1	11.445.299,00
		TANGGA BATU	402.0202.00488-8	4.059.201,00
		RINGIN AGUNG	402.0202.00486-5	2.829.759,00
		SUKA MAJU	402.0202.00485-9	10.550.531,00
		SUKA MAKMUR	402.0202.00486-3	10.869.621,00
10	SERUYAN HULU	MARANDANG	402.0202.00495-7	2.251.961,00
		TUMBANG SUEI	402.0202.00496-2	2.210.621,00
		TUMBANG MANJUL	402.0202.00496-4	2.212.789,00
		MOJANG BARU	402-0202-00801-6	2.210.621,00
		RANTAU PANJANG	402.0202.00497-0	2.328.404,00
		MONGAH JUAI	402.0202.00497-2	2.210.621,00
		TUSUK BELAWAN	402.0202.00495-4	2.228.159,00
		TUMBANG KALAM	402.0202.00495-2	2.210.621,00



NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NOMOR REKENING	TOTAL (Rp)
		TUMBANG BAHAN	402.0202.00675-2	2.210.621,00
		TUMBANG KUBANG	402.0202.00492.2	2.269.614,00
		SEPUNDU HANTU	402.0202.00812-0	2.296.118,00
		TUMBANG LAKU	402.0202.00519-1	2.258.925,00
		BUNTUT SAPAU	402.0202.00492.9	2.293.629,00
		TUMBANG DARAP	402.0202.00494-9	2.256.357,00
		TUMBANG KASAI	402.0202.00494-7	2.260.105,00
		TUMBANG SETAWAI	402.0202.00494-2	2.210.621,00
		TUMBANG SEPAN	402.0202.00493-9	2.210.621,00
		RIAM BATANG	402.0202.00493-7	2.210.621,00
		TUMBANG TABERAU	402.0202.00493-4	2.210.738,00
		TANJUNG PAKU	402.0202.00678-0	2.210.621,00
TOTAL				343.846.578,00

- Belanja Bantuan Keuangan**

Realisasi Transfer Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp176.296.476.948,00 atau 98,82% dari anggaran sebesar Rp178.409.884.700,00 yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi, Pendanaan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam rangka Sewa Trasponder Satelit T.A. 2023 sesuai Keputusan Bupati Seruyan No. 100.3.3.2/230/2023 dengan Pagu Anggaran Rp450.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp245.000.000,00 atau 54,44% serta Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dengan Pagu Anggaran Rp177.959.884.700,00 dan realisasi sebesar Rp176.051.476.948,00 atau 98,93%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.46
Belanja Bantuan Keuangan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	450.000.000,00	245.000.000,00	54,44
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	177.959.884.700,00	176.051.476.948,00	98,93
Jumlah	178.409.884.700,00	176.296.476.948,00	98,82



Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.47
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi, Pendanaan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam rangka Sewa Trasponder Satelit	450.000.000,00	245.000.000,00	54,44
Jumlah	450.000.000,00	245.000.000,00	54,44

- Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa**

Realisasi Transfer Bantuan Kepada Pemerintah Desa pada Tahun 2023 sebesar Rp176.051.476.948,00 atau 98,93% dari anggaran sebesar Rp177.959.884.700,00 yang terdiri dari Transfer Alokasi Dana Desa dengan Pagu Anggaran Rp176.051.476.948,00 dan realisasi sebesar Rp176.051.476.948,00 atau 100%. Rincian anggaran dan realisasi belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 5.48
Rincian Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.908.407.752,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	176.051.476.948,00	176.051.476.948,00	100,00
Jumlah	177.959.884.700,00	176.051.476.948,00	98,93

Anggaran dan realisasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.49
Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Alokasi Dana Desa	176.051.476.948,00	176.051.476.948,00	100,00
Jumlah	176.051.476.948,00	176.051.476.948,00	100,00

**5.1.3. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp181.903.486.780,35 dan Rp154.189.478.543,31, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.50
Pembiayaan Netto

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Penerimaan Pembiayaan					
Penggunaan SiLPA	177.748.614.815,00	181.903.486.780,35	102,34	154.189.478.543,31	27.714.008.237,04
Pengeluaran Pembiayaan					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.962.500.000,00	12.962.500.000,00	100,00	12.962.500.000,00	0,00
Pembiayaan Netto	164.786.114.815,00	168.940.986.780,35	102,52	141.226.978.543,31	27.714.008.237,04

5.1.3.a. Penerimaan Pembiayaan

31 Desember 2023
181.903.486.780,35

31 Desember 2022
154.189.478.543,31

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp181.903.486.780,35 dari pagu anggaran sebesar Rp177.748.614.815,00. Jika dibandingkan dengan penerimaan T.A. 2022 sebesar Rp154.189.478.543,31, maka penerimaan pembiayaan T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp27.714.008.237,04 atau 17,97%. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari SiLPA Tahun 2022 yang digunakan untuk pelaksanaan anggaran dan menutupi defisit T.A. 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.51
Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Penerimaan Pembiayaan					
Penggunaan SiLPA	177.748.614.815,00	181.903.486.780,35	102,34	154.189.478.543,31	27.714.008.237,04
Jumlah	177.748.614.815,00	181.903.486.780,35	102,34	154.189.478.543,31	27.714.008.237,04



Anggaran penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023 tidak sebesar SiLPA T.A. 2022 sebesar Rp181.903.486.780,35 tetapi dianggarkan sebesar Rp177.748.614.815,00 ini dikarenakan sebagian dana SiLPA merupakan dana yang dibatasi penggunaannya, sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.154.871.965,35. Rincian dana yang dibatasi penggunaannya pada SiLPA T.A. 2022 dapat diungkapkan pada tabel berikut:

Tabel 5.52
Rincian Penerimaan Pembiayaan yang dibatasi penggunaannya

Kas / Dana SiLPA Yang Di Batasi Penggunaannya	Anggaran (Rp)
DAK NON FISIK	
Bantuan Operasional Kesehatan	1.322.664.043,00
BOKT	1.428.505,00
Bantuan Operasional KB	676.233.840,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	538.573,00
Dana Pelayanan Kepariwisata	9.140.000,00
Fasilitasi Penanaman Modal	26.295.268,00
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.818.200,00
Bantuan Operasional Pendidikan PAUD	135.900.000,00
Bantuan Operasional Pendidikan KESETARAAN	114.650.000,00
Bantuan Operasional SD SMP	338.448.675,66
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	489.964.249,72
BLUD	1.021.790.610,89
Jumlah	4.154.871.965,27

5.1.3.b.	Pengeluaran Pembiayaan	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		12.962.500.000,00	12.962.500.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.962.500.000,00 atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp12.962.500.000,00. Jika dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan T.A. 2022 sebesar Rp12.962.500.000,00, maka pengeluaran pembiayaan T.A. 2023 tidak ada kenaikan dan penurunan atau 0%.

Anggaran dan realiasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sebagai berikut:



Tabel 5.53
Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pengeluaran Pembiayaan					
Penyertaan Modal Daerah	12.962.500.000,00	12.962.500.000,00	100,00	12.962.500.000,00	0,00
Jumlah	12.962.500.000,00	12.962.500.000,00	100,00	12.962.500.000,00	0,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2023 sebesar Rp12.962.500.000,00 merupakan penyertaan modal pada Bank Kalteng. Rincian Pengeluaran Pembiayaan berdasarkan nomor SP2D sebagai berikut:

Tabel 5.54
Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	No SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)
PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	00653/SP2D/LS/5.02.01/DAU/02/2023	20 Februari 2023	12.962.500.000,00
Jumlah			12.962.500.000,00

5.1.4. Pembiayaan Netto	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	168.940.986.780,35	141.226.978.543,31

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp168.940.986.780,35 atau 102,52% dari pagu anggaran sebesar Rp164.786.114.815,00. Jika dibandingkan dengan pembiayaan netto T.A. 2022 sebesar Rp141.226.978.543,31, maka Pembiayaan Netto T.A. 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp27.714.008.237,04 atau 19,62%.

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	118.344.811.989,87	181.903.486.780,35

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp118.344.811.989,87 dan Rp181.903.486.780,35. Rincian SiLPA dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5.55
Sisa Lebih Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Seruyan TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan dan Belanja:				
Realisasi Pendapatan	1.195.613.198.853,29	1.112.241.971.242,55	7,50	83.371.227.610,74
Realisasi Belanja	1.246.264.293.643,77	1.071.565.463.005,51	16,30	174.698.830.638,26
Surplus (Defisit) Anggaran	(50.651.094.790,48)	40.676.508.237,04	(224,52)	(91.327.603.027,52)
Pembiayaan:				
Penerimaan Pembiayaan	181.903.486.780,35	154.189.478.543,31	17,97	27.714.008.237,04
Pengeluaran Pembiayaan	12.962.500.000,00	12.962.500.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	168.940.986.780,35	141.226.978.543,31	19,62	27.714.008.237,04
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	118.289.891.989,87	181.903.486.780,35	(34,97)	(63.613.594.790,48)

Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Lalu Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.56
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Pemerintah Kabupaten Seruyan T.A. 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	107.188.632.573,19	170.205.279.326,08
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	7.170.935.805,11	10.869.794.528,89
Kas Dana BOS	189.367.300,57	338.448.675,66
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	489.964.249,72
Kas Dana BOK Puskesmas	3.795.876.311,00	0,00
Jumlah	118.344.811.989,87	181.903.486.780,35

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2023 yang dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan terbagi menjadi Kas yang berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), rekening kas di Badan Layanan Umum Daerah, rekening Kas di Bendahara BOS, rekening Kas Dana BOK Puskesmas, dan Kas pada Kas Daerah juga merupakan bagian dari dana-dana khusus yang dibatasi penggunaannya antara lain: Dana Alokasi Umum *Spesific Grant* (DAU SG), Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR), Dana Bagi Hasil Sawit, Dana Insentif Daerah (DID), dan pengembalian SiLPA JKN



2022. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2023 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.57
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

No	Perhitungan Akhir Kas	Per 31 Desember 2023 (Rp)	
1	Kas di Kas Daerah		107.133.712.573,19
	DAU BG	8.935.736.169,91	
	DBH	1.424.152.343,94	
	PAD	1.071.696.444,28	
	Transfer Provinsi	1.999.123.290,38	
	Silpa Dana Hibah	34.216.500,00	
	DAU SG	11.000.769.586,99	
	Dana Alokasi Umum Kelurahan	3.136.000,00	
	Dana Alokasi Umum Bid PU (D A U PU)	262.414.188,74	
	Dana Alokasi Umum Kesehatan	3.562.090.500,25	
	Dana Alokasi Umum Pendidikan	4.415.560.186,00	
	Dana Alokasi Umum PPPK	2.757.568.712,00	
	DAK FISIK	4.502.861.433,97	
	SiLPA DAK Fisik s.d. 2022	4.502.861.433,97	
	DAK NON FISIK	3.209.156.524,00	
	Silpa Dak Non Fisik Tahun sd 2022	261.657.078,00	
	DKPP	78.472.000,00	
	FPM	33.671.686,00	
	BOP KB (DP3A2PKB)	549.346.679,00	
	BOK Dinas (Dinkes)	562.870.125,00	
	Tambahan Penghasilan	236.199.500,00	
	Tunjangan Khusus Guru	693.301.249,00	
	Tunjangan Profesi Guru	793.638.207,00	
	DBHDR	49.184.614.311	
	BDH Sawit	25.064.163.000,00	
	DID	217.258.719,00	
	Pengembalian silpa JKN 2022	489.964.249,72	
2	Kas di Badan Layanan Umum Daerah		7.170.935.805,11
3	Kas di Bendahara BOS		189.367.300,57
4	Kas Dana BOK Puskesmas		3.795.876.311,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2023			118.289.891.989,87



5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal SILPA/SIKPA, Koreksi dan SAL Akhir. Berikut adalah rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Tabel Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.58
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikam/ Penurunan (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	181.903.486.780,35	154.189.478.543,31	27.714.008.237,04
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	181.903.486.780,35	154.189.478.543,31	27.714.008.237,04
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	118.289.891.989,87	181.903.486.780,35	-63.613.594.790,48
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	118.289.891.989,87	181.903.486.780,35	(63.613.594.790,48)

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp118.289.891.989,87 dan Rp181.903.486.780,35.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Jumlah penggunaan SAL untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp181.903.486.780,35 dan Rp154.189.478.543,31.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp118.289.891.989,87 dan Rp181.903.486.780,35.

**5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir**

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 Saldo Anggaran Lebih adalah sebesar Rp118.289.891.989,87 dan Rp181.903.486.780,35.

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca T.A. 2023 Pemerintah Kabupaten Seruyan terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi Aset sebesar Rp3.385.603.095.486,51, Kewajiban sebesar Rp3.715.758.098,80 dan Ekuitas sebesar Rp3.381.887.337.387,71 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59
Neraca

Aset	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Aset	3.385.603.095.486,51	3.149.918.226.452,09	235.684.869.034,42	7,48
Kewajiban	3.715.758.098,80	5.774.095.442,60	(2.058.337.343,80)	(35,65)
Ekuitas	3.381.887.337.387,71	3.144.144.131.009,49	237.743.206.378,22	7,56

5.3.1**ASET**

31 Desember 2023
3.385.603.095.486,51

31 Desember 2022
3.149.918.226.452,09

Total saldo Aset Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.385.603.095.486,51 dan Rp3.149.918.226.452,09. Perbandingan aset tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut sebagai berikut:

**Tabel 5.60**
Aset

Aset	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Aset Lancar	231.478.051.220,28	286.947.066.987,98	(55.469.015.767,70)	(19,33)
Investasi Jangka Panjang	92.793.071.037,00	80.443.980.424,00	12.349.090.613,00	15,35
Aset Tetap	2.791.763.533.446,07	2.664.992.574.990,09	126.770.958.455,98	4,76
Aset Lainnya	269.568.439.783,16	117.534.604.050,02	152.033.835.733,14	129,35
Jumlah	3.385.603.095.486,51	3.149.918.226.452,09	235.684.869.034,42	7,48

Berdasarkan rincian pada tabel di atas terlihat bahwa aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp235.684.869.034,42 atau 7,48%. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Aset Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

5.3.1.a. Aset Lancar **31 Desember 2023**
231.478.051.220,28 **31 Desember 2022**
286.947.066.987,98

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp231.478.051.220,28 dan Rp286.947.066.987,98. Rincian aset lancar disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.61
Rincian Aset Lancar

Aset	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	107.133.712.573,19	170.205.279.326,08	(63.071.566.752,89)	(37,06)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	7.170.935.805,11	10.869.794.528,89	(3.698.858.723,78)	(34,03)
Kas di Bendahara BOS	189.367.300,57	338.448.675,66	(149.081.375,09)	(44,05)
Kas di Bendahara FKTP	0,00	489.964.249,72	(489.964.249,72)	(100,00)
Kas Dana BOK Puskesmas	3.795.876.311,00	0,00	3.795.876.311,00	100,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Aset	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Piutang Pajak Daerah	6.550.671.864,08	6.323.708.469,58	226.963.394,50	3,59
Piutang Retribusi Daerah	171.469.031,70	159.041.400,00	12.427.631,70	7,81
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	833.963.371,98	1.197.053.698,02	(363.090.326,04)	(30,33)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	9.301.461.105,00	12.649.584.665,88	(3.348.123.560,88)	(26,47)
Penyisihan Piutang	(3.586.781.709,77)	(2.905.935.607,91)	680.846.101,86	23,43
Beban Dibayar Dimuka	51.296.345,00	267.838.607,52	(216.542.262,52)	(80,85)
Piutang Lainnya	0,00	44.910.000,00	(44.910.000,00)	(100,00)
Persediaan	99.866.079.222,42	87.307.378.974,54	12.558.700.247,88	14,38
Jumlah	231.478.051.220,28	286.947.066.987,98	(55.469.015.767,70)	(19,33)

Saldo Aset lancar pada Tahun 2023 sebesar Rp231.478.051.220,28 mengalami penurunan sebesar Rp55.469.015.767,70 atau 19,33% dari tahun 2022 yang bernilai sebesar Rp286.947.066.987,98. Penurunan itu terjadi pada rekening Kas di Kas Daerah, Kas di Badan Layanan Umum Daerah, Kas di Bendahara BOS, Kas di Bendahara FKTP, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Dibayar di Muka dan Piutang Lainnya. Penjelasan atas masing-masing rekening Aset Lancar sebagai berikut:

Kas dan Setara Kas

31 Desember 2023

118.289.891.989,87

31 Desember 2022

181.903.486.780,35

Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp118.289.892.112,87 dan Rp181.903.486.780,35 terdiri dari:

Tabel 5.62
Kas dan Setara Kas

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	107.133.712.573,19	170.205.279.326,08	(63.071.566.752,89)	(37,06)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	7.170.935.805,11	10.869.794.528,89	(3.698.858.723,78)	(34,03)
Kas di Bendahara BOS	189.367.300,57	338.448.675,66	(149.081.375,09)	(44,05)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kas di Bendahara FKTP	0,00	489.964.249,72	(489.964.249,72)	(100,00)
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	3.795.876.311,00	0,00	3.795.876.311,00	100,00
Jumlah	118.289.891.989,87	181.903.486.780,35	(63.613.594.790,48)	(34,97)

Penjelasan lebih rinci terkait akun Kas dan Setara Kas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

5.3.1.a.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2023
107.133.712.573,19

31 Desember 2022
170.205.279.326,08

Pada Tahun Anggaran 2023 saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp107.133.712.573,19 yang berada di rekening giro pada Bank Kalteng dan Bank BNI per 31 Desember 2023. Rincian Kas di Kas Daerah yang berada di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.63
Kas di Kas Daerah

No	Nama Bank	Jenis Rek	Nomor Rek	Saldo 31 Des 2023	Saldo 31 Des 2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Bank Kalteng	Giro	301-010-100.005.1	107.472.411.566,19	170.204.279.326,08	(62.731.867.759,89)	(36,86)
2	Bank Mandiri	Giro	159-00-0300002-2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bank BNI	Giro	007-9928266	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4	Bank BRI	Giro	0163-01-001165-30-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Giro				107.473.411.566,19	170.205.279.326,08	(62.731.867.759,89)	(36,86)
Total Saldo Bank (1)				107.473.411.566,19	170.205.279.326,08	(62.731.867.759,89)	(36,86)
Saldo Buku Kas di Kas Daerah (2)				107.133.712.573,19	170.205.279.326,08	(63.071.566.752,89)	(37,06)
Selisih/Perbedaan Saldo Bank dan Buku (3 = 1-2)				339.698.993,00	0,00	339.698.993,00	100,00

Selisih/perbedaan kurang saldo Kas Daerah Tahun 2023 di Bank dengan Saldo Buku sebesar Rp339.698.993,00 yang merupakan selisih perbedaan pencatatan antara bank dengan buku sebesar Rp339.698.993,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

1. SP2D No. 14649/SP2D/LS/1.05.03/DBH-DR/12/2023 tanggal 22/12/2023, Koreksi Bank salah posting; (349.468.000,00)
 2. SP2D No.02784/SP2D/LS/4.02.01/DBH/05/2023 tanggal 11/05/2023 ada selisih nilai 13.802.957,00
 3. SP2D No. 16549/SP2D/LS/2.16.01/DAU/12/2023 tanggal 22/12/2023 belum dibukukan bank (bank posting tanggal 05/01/2024) (24.075.000,00)
 4. SP2D No. 16787/SP2D/LS/4.02.01/DBH/12/2023 tanggal 29/12/2023 tidak ada realisasi belanja 20.041.050,00
- Jumlah** 339.698.993,00

Selain saldo efektif kas yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah secara fleksibel, saldo Kas di Kas Daerah Tahun Anggaran 2023 juga merupakan bagian dari SiLPA dari dana-dana khusus yang dibatasi penggunaannya sebesar **Rp93.613.867.824,68** yang merupakan dana-dana khusus antara lain; Dana Alokasi Umum *Spesific Grant* (DAU SG), Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR), Dana Bagi Hasil Sawit, Dana Insentif Daerah (DID), dan pengembalian SiLPA JKN 2022, rincian dana khusus sebagaimana dimaksud dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.64
Rincian Kas di Kas Daerah Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya

No	Rincian Saldo Kas yang dibatasi penggunaannya	Per 31 Desember 2023	
	Kas yang dibatasi Penggunaannya :		93.613.867.824,68
	DAU SG	11.000.769.586,99	
	Dana Alokasi Umum Kelurahan	3.136.000,00	
	Dana Alokasi Umum Bid PU (D A U PU)	262.414.188,74	
	Dana Alokasi Umum Kesehatan	3.562.090.500,25	
	Dana Alokasi Umum Pendidikan	4.415.560.186,00	
	Dana Alokasi Umum PPPK	2.757.568.712,00	
	DAK FISIK	4.502.861.433,97	
	SiLPA DAK Fisik s.d. 2022	4.502.861.433,97	
	DAK NON FISIK	3.209.156.524,00	
	Silpa Dak Non Fisik Tahun sd 2022	261.657.078,00	
	DKPP	78.472.000,00	
	FPM	33.671.686,00	
	BOP KB (DP3A2PKB)	549.346.679,00	
	BOK Dinas (Dinkes)	562.870.125,00	
	Tambahan Penghasilan	236.199.500,00	



No	Rincian Saldo Kas yang dibatasi penggunaannya	Per 31 Desember 2023	
	Tunjangan Khusus Gsuru	693.301.249,00	
	Tunjangan Profesi Guru	793.638.207,00	
	DBHDR	49.129.694.311	
	BDH Sawit	25.064.163.000,00	
	DID	217.258.719,00	
	Pengembalian silpa JKN 2022	489.964.249,72	
Kas di Kas Daerah yang dibatasi penggunaannya			93.613.867.824,68

5.3.1.a.2	Kas di Bendahara Penerimaan	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.a.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.a.4	Kas di Bendahara BLUD	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		7.170.935.805,11	10.869.794.528,89

Saldo Kas di Bendahara BLUD Tahun 2023 sebesar Rp7.170.935.805,11 dan kas pada bendahara BLUD Tahun 2022 sebesar Rp10.869.794.528,89, kas ini merupakan saldo kas Bendahara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang dan 12 (dua belas) Puskesmas di Kabupaten Seruyan yang merupakan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan. Perhitungan saldo kas tersebut berdasarkan data saldo kas yang disampaikan oleh direktur RSUD Kuala Pembuang dan Dinas Kesehatan kepada BKAD dalam rangka permohonan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B). Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.65
Kas di BLUD

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Kas di BLUD RSUD Kuala Pembuang	5.904.888.343,00	8.130.928.915,00	(2.226.040.572,00)	(27,38)
Kas di BLUD RSUD Hanau	0,00	2.738.865.613,89	(2.738.865.613,89)	(100)
Puskesmas Kuala Pembuang I	195.868.656,00	0,00	195.868.656,00	100



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Puskesmas Kuala Pembuang II	1.865.621,00	0,00	1.865.621,00	100
Puskesmas Danau Sembuluh	197.125.801,00	0,00	197.125.801,00	100
Puskesmas Telaga Pulang	200.622.950,00	0,00	200.622.950,00	100
Puskesmas Terawan	10.024.912,00	0,00	10.024.912,00	100
Puskesmas Pembuang Hulu	70.672.740,00	0,00	70.672.740,00	100
Puskesmas Asam Baru	97.881.647,00	0,00	97.881.647,00	100
Puskesmas Sandul	83.619.420,00	0,00	83.619.420,00	100
Puskesmas Rantau Pulut I	93.511.250,00	0,00	93.511.250,00	100
Puskesmas Rantau Pulut II	109.690.391,00	0,00	109.690.391,00	100
Puskesmas Tumbang Manjul	175.579.224,11	0,00	175.579.224,11	100
Puskesmas Tumbang Langkai	29.584.850,00	0,00	29.584.850,00	100
Jumlah	7.170.935.805,11	10.869.794.528,89	(3.698.858.723,78)	(34,03)

Pada tahun 2023 Kas di Bendahara BLUD mengalami penurunan sebesar Rp3.698.858.723,78 atau 34,03% jika dibandingkan dengan Kas di Bendahara BLUD tahun 2022 sebesar Rp10.869.794.528,89, hal ini disebabkan sisa Kas di RSUD Hanau yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sampai dengan per tanggal 31 Maret 2023 dihibahkan ke Pemerintah Provinsi sebesar Rp446.718.632,50 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Piutang, Penyisihan Piutang dan Kewajiban Per 31 Maret 2023 pada Pemerintah Kabupaten Seruyan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 900/292.a/BKAD-III/BAST/III/2023 dan Nomor : 900/240.c/BKAD/2023 tanggal 31 Maret 2023.

5.3.1.a.5	Kas Dana BOS	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		189.367.300,57	338.448.675,66

Saldo Kas Dana BOS Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp189.367.300,57 dan Rp338.448.675,66, merupakan saldo kas per 31 Desember 2023 yang dikelola secara langsung oleh Bendahara BOS pada SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Perhitungan saldo kas tersebut berdasarkan data belanja yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada BKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam bentuk



permohonan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) dan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) yang dikeluarkan oleh BKAD selaku BUD. Kenaikan/Penurunan realisasi Saldo Kas Dana BOS Tahun 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.66
Kas Dana BOS

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Kas di Bendahara BOS	189.367.300,57	338.448.675,66	(149.081.375,09)	(44,05)
Jumlah	189.367.300,57	338.448.675,66	(149.081.375,09)	(44,05)

Saldo Kas Dana BOS Tahun 2023 sebesar Rp189.367.300,57 mengalami penurunan sebesar Rp149.081.375,09 atau 44,05% jika dibandingkan dengan saldo Kas Dana BOS Tahun 2022. Berikut rincian saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 pada masing-masing sekolah:

Tabel 5.67
Rincian Kas Dana BOS SD dan SMP di Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023

KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	Per 31 Desember 2023 (Rp)
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 1 KUALA PEMBUANG I	1.016.648,74
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 1 PERSIL RAYA	90.768,74
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 2 KUALA PEMBUANG I	18.690,00
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 2 PERSIL RAYA	0,00
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 3 KUALA PEMBUANG I	32.177,35
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 1 KUALA PEMBUANG II	0,00
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 2 KUALA PEMBUANG II	0,00
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 3 KUALA PEMBUANG II	0,00
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 4 KUALA PEMBUANG II	0,00
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 1 SUNGAI UNDANG	0,00
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 1 PEMATANG LIMAU	0,00
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 1 SUNGAI PERLU	0,00
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 2 PEMATANG LIMAU	0,00
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 1 TANJUNG RANGAS 1	0,96
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 2 MUARA DUA	90.024,00
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 1 MUARA DUA	0,00
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 1 JAHITAN	3.739.975,00
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 2 JAHITAN	19.440,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	Per 31 Desember 2023 (Rp)
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 1 BAUNG	0,00
SERUYAN HILIR	SD NEGERI 2 BAUNG	0,00
SERUYAN HILIR	SMP NEGERI 1 KUALA PEMBUANG	66.594,00
SERUYAN HILIR	SMP NEGERI 2 KUALA PEMBUANG	170.000,00
SERUYAN HILIR	SMP NEGERI 3 KUALA PEMBUANG	0,00
SERUYAN HILIR	SMP NEGERI SATU ATAP 1 KUALA PEMBUANG	0,00
SERUYAN HILIR	SMP NEGERI SATU ATAP 2 KUALA PEMBUANG	4.041.500,00
SERUYAN HILIR TIMUR	SD NEGERI 1 KARTIKA BHAKTI	0,00
SERUYAN HILIR TIMUR	SD NEGERI 2 KARTIKA BHAKTI	0,77
SERUYAN HILIR TIMUR	SD NEGERI 1 BANGUN HARJA	0,00
SERUYAN HILIR TIMUR	SD NEGERI 1 HALIMAUNG JAYA	0,87
SERUYAN HILIR TIMUR	SD NEGERI 1 MEKAR INDAH	0,00
SERUYAN HILIR TIMUR	SD NEGERI 2 MEKAR INDAH	0,00
SERUYAN HILIR TIMUR	SD NEGERI 1 PEMATANG PANJANG	135.000,00
SERUYAN HILIR TIMUR	SD NEGERI 2 PEMATANG PANJANG	60.000,00
SERUYAN HILIR TIMUR	SD NEGERI 3 PEMATANG PANJANG	4.000,00
SERUYAN HILIR TIMUR	SD NEGERI 1 SUNGAI BAKAU	79.946,27
SERUYAN HILIR TIMUR	SMP NEGERI 1 SERUYAN HILIR TIMUR	0,00
SERUYAN HILIR TIMUR	SMP NEGERI 2 SERUYAN HILIR TIMUR	0,00
SERUYAN HILIR TIMUR	SMP NEGERI 3 SERUYAN HILIR TIMUR	12.600,00
SERUYAN HILIR TIMUR	SMP NEGERI SATU ATAP 1 SERUYAN HILIR TIMUR	0,00
SERUYAN HILIR TIMUR	SMP NEGERI SATU ATAP 2 SERUYAN HILIR TIMUR	0,00
DANAU SEMBULUH	SD NEGERI 1 CEMPAKA BARU	0,00
DANAU SEMBULUH	SD NEGERI 1 PALINGKAU	90.009,58
DANAU SEMBULUH	SD NEGERI 1 PAREN	0,00
DANAU SEMBULUH	SD NEGERI 1 BANUA USANG	530.400,00
DANAU SEMBULUH	SD NEGERI 1 SEMBULUH I	60.000,00
DANAU SEMBULUH	SD NEGERI 2 SEMBULUH I	0,00
DANAU SEMBULUH	SD NEGERI 1 SEMBULUH II	0,00
DANAU SEMBULUH	SD NEGERI 1 TELAGA PULANG	0,00
DANAU SEMBULUH	SD NEGERI 2 TELAGA PULANG	0,00
DANAU SEMBULUH	SD NEGERI 1 ULAK BATU	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	Per 31 Desember 2023 (Rp)
DANAU SEMBULUH	SMP NEGERI 1 DANAU SEMBULUH	0,00
DANAU SEMBULUH	SMP NEGERI 2 DANAU SEMBULUH	0,00
DANAU SEMBULUH	SMP NEGERI SATU ATAP 1 DANAU SEMBULUH	0,00
DANAU SEMBULUH	SMP NEGERI SATU ATAP 2 DANAU SEMBULUH	610,00
DANAU SEMBULUH	SMP NEGERI SATU ATAP 3 DANAU SEMBULUH	0,00
SERUYAN RAYA	SD NEGERI 1 TABIKU	1,00
SERUYAN RAYA	SD NEGERI 1 LANPASA	0,00
SERUYAN RAYA	SD NEGERI 2 LANPASA	0,00
SERUYAN RAYA	SD NEGERI 1 BANGKAL	0,00
SERUYAN RAYA	SD NEGERI 2 BANGKAL	0,00
SERUYAN RAYA	SD NEGERI 3 BANGKAL	120.000,00
SERUYAN RAYA	SD NEGERI 1 TERAWAN	0,00
SERUYAN RAYA	SD NEGERI 1 SELUNUK	0,00
SERUYAN RAYA	SMP NEGERI 1 SERUYAN RAYA	0,00
SERUYAN RAYA	SMP NEGERI 2 SERUYAN RAYA	0,00
SERUYAN RAYA	SMP NEGERI 3 SERUYAN RAYA	0,00
SERUYAN RAYA	SMP NEGERI SATU ATAP 1 SERUYAN RAYA	0,00
SERUYAN RAYA	SMP NEGERI SATU ATAP 2 SERUYAN RAYA	0,00
SERUYAN RAYA	SMP NEGERI SATU ATAP 3 SERUYAN RAYA	9.480,00
HANAU	SD NEGERI 1 PEMBUANG HULU I	95.930,00
HANAU	SD NEGERI 2 PEMBUANG HULU I	0,00
HANAU	SD NEGERI 1 PEMBUANG HULU II	0,00
HANAU	SD NEGERI 2 PEMBUANG HULU II	0,00
HANAU	SD NEGERI 3 PEMBUANG HULU II	0,00
HANAU	SD NEGERI 1 DERANGGA	0,00
HANAU	SD NEGERI 2 DERANGGA	0,00
HANAU	SD NEGERI 1 PARANG BATANG	0,00
HANAU	SD NEGERI 2 PARANG BATANG	1.572.539,00
HANAU	SD NEGERI 1 BAHOUR	0,00
HANAU	SD NEGERI 2 BAHOUR	0,00
HANAU	SD NEGERI 3 BAHOUR	0,00
HANAU	SD NEGERI 1 PARING RAYA	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	Per 31 Desember 2023 (Rp)
HANAU	SD NEGERI 1 TANJUNG HANAU	0,00
HANAU	SMP NEGERI 1 HANAU	31.800,00
HANAU	SMP NEGERI SATU ATAP 1 HANAU	0,00
HANAU	SMP NEGERI SATU ATAP 2 HANAU	0,00
HANAU	SMP NEGERI SATU ATAP 3 HANAU	0,00
HANAU	SMP NEGERI SATU ATAP 4 HANAU	0,00
HANAU	SMP NEGERI SATU ATAP 5 HANAU	0,00
DANAU SELULUK	SD NEGERI 1 ASAM BARU	0,00
DANAU SELULUK	SD NEGERI 2 ASAM BARU	0,00
DANAU SELULUK	SD NEGERI 1 TANJUNG HARA	0,00
DANAU SELULUK	SD NEGERI 1 PANIMBA RAYA	7.000,00
DANAU SELULUK	SD NEGERI 1 TANJUNG RANGAS II	0,00
DANAU SELULUK	SD NEGERI 1 TANJUNG PARING	0,00
DANAU SELULUK	SD NEGERI 1 RUNGAU RAYA	1.000,00
DANAU SELULUK	SMP NEGERI 1 DANAU SELULUK	0,00
DANAU SELULUK	SMP NEGERI 2 DANAU SELULUK	0,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 DURIAN TUNGAL	0,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 TELUK BAYUR	1.175.000,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 TUMBANG BAI	0,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 BUKIT BULUH	0,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 GANTUNG PENGAYUH	0,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 MUGI PANYUHU	0,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 PANGKE	0,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 PANYUMPA	2.000,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 TANGGA BATU	0,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 SUKA MAJU	0,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 SUKA MAKMUR	0,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 BATU AGUNG	0,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 SUKAJAYA	27.798,29
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 PANCA JAYA	0,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 RINGIN AGUNG	0,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 SUKOREJO	160.000,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 BUMI JAYA	19.983,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 AYAWAN	0,00



KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	Per 31 Desember 2023 (Rp)
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 2 AYAWAN	0,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 RANTAU PULUT	0,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 2 RANTAU PULUT	0,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 3 RANTAU PULUT	0,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 1 SUKAMANDANG	41.360.000,00
SERUYAN TENGAH	SD NEGERI 2 SUKAMANDANG	0,00
SERUYAN TENGAH	SMP NEGERI 1 SERUYAN TENGAH	0,00
SERUYAN TENGAH	SMP NEGERI 2 SERUYAN TENGAH	0,00
SERUYAN TENGAH	SMP NEGERI 3 SERUYAN TENGAH	0,00
SERUYAN TENGAH	SMP NEGERI 4 SERUYAN TENGAH	0,00
SERUYAN TENGAH	SMP NEGERI 5 SERUYAN TENGAH	0,00
SERUYAN TENGAH	SMP NEGERI SATU ATAP 1 SERUYAN TENGAH	0,00
SERUYAN TENGAH	SMP NEGERI SATU ATAP 2 SERUYAN TENGAH	77.000,00
SERUYAN TENGAH	SMP NEGERI SATU ATAP 3 SERUYAN TENGAH	0,00
SERUYAN TENGAH	SMP NEGERI SATU ATAP 4 SERUYAN TENGAH	0,00
BATU AMPAR	SD NEGERI 1 DURIAN KAIT	0,00
BATU AMPAR	SD NEGERI 1 DERAWA	0,00
BATU AMPAR	SD NEGERI 1 SUKAMULYA	253,00
BATU AMPAR	SD NEGERI 1 WANATIRTA	2.309.250,00
BATU AMPAR	SD NEGERI 1 KALANG	594.339,00
BATU AMPAR	SD NEGERI 1 SANDUL	0,00
BATU AMPAR	SD NEGERI 1 SEBABI	0,00
BATU AMPAR	SD NEGERI 1 BATU MENANGIS	0,00
BATU AMPAR	SD NEGERI 1 SAHABU	0,00
BATU AMPAR	SMP NEGERI 1 BATU AMPAR	0,00
BATU AMPAR	SMP NEGERI 2 BATU AMPAR	0,00
BATU AMPAR	SMP NEGERI 3 BATU AMPAR	100.001,00
BATU AMPAR	SMP NEGERI SATU ATAP 1 BATU AMPAR	0,00
BATU AMPAR	SMP NEGERI SATU ATAP 2 BATU AMPAR	0,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 TUMBANG MANJUL	0,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 2 TUMBANG MANJUL	1.000,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 MONGOH JUOI	0,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 RANTAU PANJANG	0,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 SAPUNDU HANTU	2.000.600,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 TANJUNG PAKU	680.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	Per 31 Desember 2023 (Rp)
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 TUMBANG DARAP	110.000,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 TUMBANG KALAM	0,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 TUMBANG KUBANG	0,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 TUMBANG SETAWAI	1.510.000,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 TUMBANG SUEI	3.130.000,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 TUSUK BELAWAN	75.826.940,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 BUNTUT SAPAU	0,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 MOJANG BARU	1.580.000,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 2 BUNTUT SAPAU	0,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 RIAM BATANG	0,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 TUMBANG BAHAN	1.530.000,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 TUMBANG KASAI	41.275.000,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 TUMBANG LAKU	0,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 MARANDANG	0,00
SERUYAN HULU	SD NEGERI 1 TUMBANG TABERAU	0,00
SERUYAN HULU	SMP NEGERI 1 SERUYAN HULU	76.000,00
SERUYAN HULU	SMP NEGERI 2 SERUYAN HULU	135.000,00
SERUYAN HULU	SMP NEGERI SATU ATAP 1 SERUYAN HULU	0,00
SERUYAN HULU	SMP NEGERI SATU ATAP 2 SERUYAN HULU	91.000,00
SERUYAN HULU	SMP NEGERI SATU ATAP 3 SERUYAN HULU	0,00
SULING TAMBUN	SD NEGERI 1 RANGKANG MUNDUK	0,00
SULING TAMBUN	SD NEGERI 1 RANTAU BETUNG	0,00
SULING TAMBUN	SD NEGERI 1 TANJUNG TUKAL	2.500.000,00
SULING TAMBUN	SD NEGERI 1 TUMBANG GUGUP	0,00
SULING TAMBUN	SD NEGERI 1 TUMBANG LANGKAI	0,00
SULING TAMBUN	SD NEGERI 1 TUMBANG SALAU	0,00
SULING TAMBUN	SD NEGERI 1 TUMBANG SETOLI	0,00
SULING TAMBUN	SD NEGERI 1 TUMBANG MAGIN	0,00
SULING TAMBUN	SMP NEGERI 1 SULING TAMBUN	0,00
SULING TAMBUN	SMP NEGERI 2 SULING TAMBUN	1.000.000,00
SULING TAMBUN	SMP NEGERI SATU ATAP 1 SULING TAMBUN	0,00
Jumlah		189.367.300,57



Setelah dilakukan pemeriksaan terinci terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat temuan pada 2 Sekolah antara lain; SD Negeri 1 Sukamandang Kecamatan Seruyan Tengah dan SD Negeri 1 Tusuk Belawan Kecamatan Seruyan Hulu, kedua sekolah tersebut di anggap lalai dan melakukan kesalahan dalam pengelolaan Dana BOS, dimana:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 1 Sukamandang, sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, tidak dapat mempertanggungjawabkan realisasi belanja yang disampaikan sebesar **Rp75.927.000.000,00** (*tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*), rincian sebagai berikut:

Tahap	Rincian	Tanggal	Nilai (Rp)
a.	Silpa 2022	Januari 2023	27.918.000,00
b.	Penerimaan BOS 2023 TW II	18/04/2023	13.355.000,00
c.	Penerimaan BOS 2023 TW IV	16/11/2023	41.360.000,00
d.	Total Pertanggungjawaban Tahun 2023 sesuai SPJ		6.706.000,00
Penggunaan dana BOS tahun 2023 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (a+b+c+d)			75.927.000,00

Atas temuan tersebut diatas, Sekolah Dasar Negeri 1 Sukamandang telah melakukan pengembalian ke Kas Daerah selanjutnya permasalahan atas pencatatan sisa kas sekolah tersebut akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Inspektorat, Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, Bendahara Umum Daerah (BUD), Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotawaringin Timur, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

- 2) Sekolah Dasar Negeri 1 Tusuk Belawan, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan SILPA sebesar **Rp80.605.000,00**. Sisa kas dan BOS tahun 2023 SD Negeri 1 Tusuk Belawan yang tercatat dalam Neraca adalah sebesar Rp75.826.940,00 dimana sisa kas tersebut merupakan sisa kas atas SiLPA dana BOS 2022 dan 2023 tetapi atas pemeriksaan Inspektorat bahwa sisa dana BOS Tahun 2023 adalah sebesar Rp85.385.000,00 dan telah digunakan sebesar Rp4.780.000,00 sehingga sisa saldo BOS sebesar Rp80.605.000,00 dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atas temuan tersebut, SD Negeri 1 Tusuk Belawan telah melakukan pengembalian ke Kas Daerah dan selanjutnya pencatatan atas sisa kas pada sekolah tersebut akan dilakukan koordinasi dengan Inspektorat, Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, Bendahara Umum Daerah (BUD), Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan



Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotawaringin Timur, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

5.3.1.a.6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	<u>31 Desember 2023</u> 0,00	<u>31 Desember 2022</u> 489.964.249,72
------------------	------------------------------------	---	---

Saldo Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp489.964.249,72. Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2022 sudah disetorkan semua oleh 12 (dua belas) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke Rekening Kas Umum Daerah pada bulan Januari tahun 2023 sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di lingkungan Kabupaten Seruyan sebanyak 12 (dua belas) pada tahun 2023 sudah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/410/2022 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.

5.3.1.a.7	Kas Lainnya	<u>31 Desember 2023</u> 0,00	<u>31 Desember 2022</u> 0,00
------------------	--------------------	---	---

5.3.1.a.8	Kas Dana BOK Puskesmas	<u>31 Desember 2023</u> 3.795.876.311,00	<u>31 Desember 2022</u> 0,00
------------------	-------------------------------	---	---

Saldo Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp3.795.876.311,00 dan Rp489.964.249,72. Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan saldo kas per 31 Desember 2023 yang berasal dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang dikelola secara langsung oleh Bendahara pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas diseluruh Kabupaten Seruyan yang berjumlah 12 (dua belas) Puskesmas serta merupakan bagian dari Kas Daerah. Sedangkan untuk tahun 2022 Kas Dana Kapitasi pada FKTP berasal dari Dana Jaminan Kesehatan Nasional, dimana untuk Sisa Kas dari Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2023 masuk menjadi Kas di Bendahara BLUD hal ini sesuai dengan pembentukan BLUD Puskesmas sesuai dengan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/410/2022 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan. Perhitungan saldo kas tersebut berdasarkan lampiran data-data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada BKAD dalam bentuk permohonan Surat Permintaan Pengesahan Belanja



(SP2B) Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) yang dikeluarkan oleh BKAD selaku BUD. Rincian Kas dana Kapitasi pada FKTP disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.68
Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Puskesmas	Per Desember 2023 (Rp)
1	BNI	1590083452	Puskesmas Kuala Pembuang I	527.822.867,00
2	BNI	1590083430	Puskesmas Kuala Pembuang II	482.634.269,00
3	BNI	1590083349	Puskesmas Telaga Pulang	184.754.413,00
4	BNI	1590083361	Puskesmas Danau Sembuluh	119.631.671,00
5	BNI	1590083407	Puskesmas Pembuang Hulu	422.067.648,00
6	BNI	1590083429	Puskesmas Asam Baru	408.792.458,00
7	BNI	1590083383	Puskesmas Terawan	186.221.680,00
8	BNI	1590083372	Puskesmas Sandul	345.826.379,00
9	BNI	1590083394	Puskesmas Rantau Pulut I	286.702.110,00
10	BNI	1590083418	Puskesmas Rantau Pulut II	308.648.258,00
11	BNI	1590083441	Puskesmas Tumbang Manjul	318.559.121,00
12	BNI	1590083350	Puskesmas Tumbang Langkai	204.215.437,00
Total Kas Dana Kapitasi pada FKTP				3.795.876.311,00

Piutang Pendapatan Daerah

31 Desember 2023
16.857.565.372,76

31 Desember 2022
20.374.298.233,48

Saldo Piutang Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.857.565.372,76. Ada penurunan sebesar Rp3.516.732.860,42 atau 17,26% dari tahun 2022 yang sebesar Rp20.374.298.233,48 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.69
Piutang Pendapatan Daerah

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Piutang Pajak Daerah	6.550.671.864,08	6.323.708.469,58	226.963.394,50	3,59
Piutang Retribusi Daerah	171.469.031,70	159.041.400,00	12.427.631,70	7,81
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	833.963.371,98	1.197.053.698,02	(363.090.326,04)	(30,33)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	9.301.461.105,00	12.649.584.665,88	(3.348.123.560,88)	(26,47)
Piutang Lainnya	0,00	44.910.000,00	(44.910.000,00)	(100,00)
Jumlah Piutang Pendapatan	16.857.565.372,76	20.374.298.233,48	(3.516.732.860,72)	(17,26)

5.3.1.a.9	Piutang Pajak Daerah	<u>31 Desember 2023</u> 6.550.671.864,08	<u>31 Desember 2022</u> 6.323.708.469,58
------------------	-----------------------------	---	---

Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.550.671.864,08. Ada kenaikan sebesar Rp210.991.485,00 atau 3,34% dari tahun 2022 sebesar Rp6.323.708.469,58 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70
Piutang Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Piutang Pajak Reklame	38.177.560,46	26.054.860,96	12.122.699,50	46,53
Piutang Pajak Penerangan Jalan	372.978.535,47	372.978.535,47	0,00	0,00
Piutang Pajak Air Tanah	413.752.405,15	412.542.668,15	1.209.737,00	0,29
Piutang PBB P2	5.712.163.363,00	5.498.532.405,00	213.630.958,00	3,89
Piutang BPHTB	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	-
Jumlah Piutang Pajak Daerah	6.550.671.864,08	6.323.708.469,58	226.963.394,50	3,59

5.3.1.a.9.1	Piutang Pajak Reklame	<u>31 Desember 2023</u> 38.177.560,46	<u>31 Desember 2022</u> 26.054.860,96
--------------------	------------------------------	--	--

Piutang Pajak Reklame merupakan Piutang Pajak Reklame melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan yang merupakan Pajak Reklame yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp38.177.560,46 dengan perbandingan tahun 2022 sebesar Rp26.054.860,96 dengan rincian piutang pajak reklame disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.71
Piutang Pajak Reklame

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Pajak Reklame	38.177.560,46	26.054.860,96	12.122.699,50	46,53

Piutang Pajak Reklame mengalami kenaikan sebesar Rp12.122.699,50 atau 46,53% yang disebabkan karena adanya penambahan Piutang Pajak Reklame dari Wajib Pajak di tahun 2023 senilai Rp17.820.559,50 dan koreksi kurang Piutang Pajak Reklame senilai Rp1.848.650,00 dan pembayaran pada tahun 2023 senilai Rp3.849.210,00.

Rincian Piutang Pajak Reklame disajikan per tahun sebagai berikut:

Tabel 5.72
Rincian Piutang Pajak Reklame

No	Uraian	2022 (Rp)	Koreksi tambah/ Kurang (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2023	-	-	17.820.559,50	-	17.820.559,50
2	2022	3.142.860,00	-	-	3.142.860,00	-
3	2020	2.555.000,00	(2.555.000,00)	-	-	-
4	2019	21.006,96	-	-	-	21.006,96
5	2017-2018	20.335.994,00	706.350,00	-	706.350,00	20.335.994,00
	Saldo	26.054.860,96	(1.848.650,00)	17.820.559,50	3.849.210,00	38.177.560,46

Mutasi Piutang Pajak Reklame disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.73
Mutasi Piutang Pajak Reklame

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	26.054.860,96	39.506.940,96
2	Penambahan	17.820.559,50	3.142.860,00
3	Pengurangan (Pembayaran)	(3.849.210,00)	(16.594.940,00)
4	Koreksi tambah/kurang nilai saldo awal piutang	(1.848.650,00)	-
	Saldo Akhir	38.177.560,46	26.054.860,96

5.3.1.a.9.2 Piutang Pajak Penerangan Jalan

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
372.978.535,47 **372.978.535,47**

Piutang Pajak Penerangan Jalan merupakan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan yang belum



diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp372.978.535,47 dari tahun 2017-2018 dengan rincian piutang Pajak Penerangan Jalan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.74
Piutang Pajak Penerangan Jalan

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Pajak Penerangan Jalan	372.978.535,47	372.978.535,47	0,00	0,00

Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan disajikan per tahun sebagai berikut:

Tabel 5.75
Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan

No.	Uraian	2023 (Rp)	Koreksi tambah/ Kurang (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2017-2018	372.978.535,47	0,00	0,00	0,00	372.978.535,47
	Saldo	372.978.535,47	0,00	0,00	0,00	372.978.535,47

Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.76
Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	372.978.535,47	372.978.535,47
2	Penambahan	0,00	0,00
3	Pengurangan (Pembayaran)	0,00	0,00
	Saldo Akhir	372.978.535,47	372.978.535,47

5.3.1.a.9.3 Piutang Pajak Air Tanah

31 Desember 2023
413.752.405,15

31 Desember 2022
412.542.668,15

Piutang Pajak Air Tanah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan yang merupakan Pajak Air Tanah yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp413.752.405,15 dengan perbandingan tahun 2022 sebesar Rp412.542.668,15 sehingga pada tahun 2023 Piutang Pajak Air Tanah mengalami kenaikan sebesar Rp1.209.737,00 atau 0,29%. Rincian Piutang Pajak Air Tanah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.77
Piutang Pajak Air Tanah

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Piutang Pajak Air Tanah	413.752.405,15	412.542.668,15	1.209.737,00	0,29



Rincian Piutang Pajak Air Tanah disajikan per tahun sebagai berikut:

Tabel 5.78
Rincian Piutang Pajak Air Tanah

No.	Uraian	2023 (Rp)	Koreksi tambah/kurang (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2023	0,00	0,00	10.168.210,00	0,00	10.168.210,00
2	2022	8.958.545,00	0,00	0,00	(8.958.473,00)	72,00
3	2021	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00
4	2019	11,15	0,00	0,00	0,00	11,15
5	2017-2018	403.583.799,00	0,00	0,00	0,00	403.583.799,00
	Saldo	412.542.668,15	0,00	10.168.210,00	(8.958.473,00)	413.752.405,15

Mutasi Piutang Pajak Air Tanah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.79
Mutasi Piutang Pajak Air Tanah

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	412.542.668,15	404.081.827,15
2	Penambahan	10.168.210,00	8.958.545,00
3	Pengurangan (Pembayaran)	(8.958.473,00)	(497.704,00)
	Saldo Akhir	413.752.405,15	412.542.668,15

5.3.1.a.9.4 Piutang PBB-P2

31 Desember 2023

5.712.163.363,00

31 Desember 2022

5.498.532.405,00

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan merupakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.712.163.363,00 dengan perbandingan tahun 2022 Rp5.498.532.405,00 sehingga pada tahun 2023 Piutang PBB-P2 mengalami kenaikan sebesar 3,89% yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.80
Piutang PBB-P2

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Piutang PBB P2	5.712.163.363,00	5.498.532.405,00	213.630.958,00	3,89



Rincian Piutang Pajak Air Tanah disajikan per tahun sebagai berikut:

Tabel 5.81
Rincian Piutang Pajak PBBP2

No	Uraian	Saldo Awal 2023 (Rp)	Koreksi tambah/kurang (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2014	421.561.212,00	0,00	0,00	(90.228,00)	421.470.984,00
2	2015	187.732.701,00	0,00	0,00	(95.808,00)	187.636.893,00
3	2016	43.872.647,00	0,00	0,00	(92.718,00)	43.779.929,00
4	2017	571.999.956,00	0,00	0,00	(229.890,00)	571.770.066,00
5	2018	674.949.639,00	0,00	0,00	(1.845.754,00)	673.103.885,00
6	2019	887.283.099,00	0,00	0,00	(42.274.988,00)	845.008.111,00
7	2020	1.124.055.222,00	0,00	0,00	(44.056.257,00)	1.079.998.965,00
8	2021	1.006.927.906,00	0,00	0,00	(46.381.721,00)	960.546.185,00
9	2022	580.150.023,00	0,00	0,00	(199.205.922,00)	380.944.101,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		5.498.532.405,00	0,00	547.904.244,00	(334.273.286,00)	5.712.163.363,00

Mutasi Piutang PBB P2 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.82
Mutasi Piutang PBB-P2

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	5.498.532.405,00	6.484.951.306,00
2	Penambahan Piutang PBB P2	547.904.244,00	3.180.183.844,00
3	Pengurangan (Pembayaran)	(334.273.286,00)	(4.166.602.745,00)
4	Penghapusan Piutang	0,00	0,00
5	Koreksi	0,00	0,00
	Saldo Akhir	5.712.163.363,00	5.498.532.405,00

5.3.1.a.9.5 Piutang BPHTB

31 Desember 2023
13.600.000,00

31 Desember 2022
13.600.000,00

Piutang BPHTB melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan merupakan pajak BPHTB yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp13.600.000,00 dengan perbandingan tahun 2022 sebesar Rp13.600.000,00 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.83
Piutang BPHTB

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang BPHTB	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00

Mutasi Piutang BPHTB disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.84
Mutasi Piutang BPHTB

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	13.600.000,00	13.600.000,00
2	Penambahan	0,00	0,00
3	Pengurangan (Pembayaran)	0,00	0,00
	Saldo Akhir	13.600.000,00	13.600.000,00

5.3.1.a.10. Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2023

171.469.031,70

31 Desember 2022

159.041.400,00

Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Seruyan Per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp171.469.031,70 dan Rp159.041.400,00. Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.85
Piutang Retribusi Daerah

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	26.080.000,00	66.895.250,00	(40.815.250,00)	(61,01)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	82.290.000,00	22.760.000,00	59.530.000,00	261,56
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	63.099.031,70	69.386.150,00	(6.287.118,30)	(9,06)
Jumlah Piutang Retribusi	171.469.031,70	159.041.400,00	12.427.631,70	7,81

5.3.1.a.10.1 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

31 Desember 2023

26.080.000,00

31 Desember 2022

66.895.250,00

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp26.080.000,00 dengan perbandingan tahun 2022 sebesar Rp66.895.250,00 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.86
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	26.080.000,00	66.895.250,00	(40.815.250,00)	(61,01)

Mutasi Piutang Retribusi Kesehatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.87
Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	66.895.250,00	237.494.460,00
2	Penambahan	26.080.000,00	66.895.250,00
3	Pengurangan (Pembayaran)	(3.400.000,00)	(237.494.460,00)
4	Koreksi Saldo Awal	(63.495.250,00)	0,00
	Saldo Akhir	26.080.000,00	66.895.250,00

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2023 yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan mempunyai koreksi (kurang) senilai Rp63.495.250,00 yang merupakan koreksi saldo awal Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang pindah/beralih ke Pendapatan BLUD Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/410/2022 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.

5.3.1.a.10.2 Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 31 Desember 2023 31 Desember 2022
82.290.000,00 22.760.000,00

Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp82.290.000,00 dengan perbandingan tahun 2022 sebesar Rp22.760.000,00 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.88
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	82.290.000,00	22.760.000,00	59.530.000,00	261,56



Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.89
Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	22.760.000,00	300.000,00
2	Penambahan	82.290.000,00	22.760.000,00
3	Pengurangan (Pembayaran)	(22.760.000,00)	(300.000,00)
	Saldo Akhir	82.290.000,00	22.760.000,00

5.3.1.a.10.3 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah **31 Desember 2023**
63.099.031,70 **31 Desember 2022**
69.386.150,00

Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah melalui Dinas Pendidikan serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan merupakan Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp63.099.031,70 dengan perbandingan tahun 2022 sebesar Rp69.386.150,00 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.90
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Bertambah/ Kurang (Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	63.099.031,70	69.386.150,00	(6.287.118,30)	(9,06)

Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.91
Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	69.386.150,00	44.702.800,00
2	Penambahan	2.912.881,70	31.025.517,70
3	Pengurangan (Pembayaran)	(9.200.000,00)	(6.342.167,70)
	Saldo Akhir	63.099.031,70	69.386.150,00

Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2023 per Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.92
Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023 per SKPD

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	5.468.400,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan	57.630.631,70
JUMLAH		63.099.031,70

5.3.1.a.11	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	<u>31 Desember 2023</u> 833.963.371,98	<u>31 Desember 2022</u> 1.197.053.698,02
-------------------	---------------------------------------	---	---

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, RSUD Kuala Pembuang (BLUD), RSUD Hanau (BLUD), Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan yang berasal dari Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp833.963.371,98 dengan perbandingan tahun 2022 sebesar Rp1.197.053.698,02 dengan rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.93
Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Piutang Hasil Sewa BMD	14.912.000,00	0,00	14.912.000,00	100,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	422.412.467,92	424.412.467,92	(2.000.000,00)	(0,47)
Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain	96.043.336,00	0,00	96.043.336,00	100,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.171.568,06	1.252.513,00	(80.944,94)	(6,46)
Piutang Pendapatan BLUD	0,00	667.896.104,00	(667.896.104,00)	(100,00)
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	299.424.000,00	0,00	299.424.000,00	100,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	87.514,00	(87.514,00)	(100,00)
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	95.955.822,00	(95.955.822,00)	(100,00)



Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	7.449.277,10	(7.449.277,10)	(100,00)
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	833.963.371,98	1.197.053.698,02	(363.090.326,04)	(30,33)

5.3.1.a.11.1 Piutang Hasil Sewa BMD**31 Desember 2023****14.912.000,00****31 Desember 2022****0,00**

Pada tahun 2023 Kabupaten Seruyan mempunyai Piutang Hasil Sewa BMD yang berada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berasal dari penyewaan alat dan mesin pertanian sesuai dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah Selain Tanah dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Seruyan. Kenaikan/penurunan Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.94
Piutang Hasil Sewa BMD

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Hasil Sewa BMD	14.912.000,00	0,00	14.912.000,00	100

Mutasi Piutang Hasil Sewa BMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.95
Mutasi Piutang Hasil Sewa BMD

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	0,00	0,00
2	Penambahan	0,00	0,00
3	Pengurangan (Pembayaran)	14.912.000,00	0,00
	Saldo Akhir	14.912.000,00	0,00

5.3.1.a.11.2 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
31 Desember 2023**422.412.467,92****31 Desember 2022****424.412.467,92**

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Kabupaten Seruyan merupakan Bagian Lancar yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp422.412.467,92 dengan perbandingan tahun 2022 sebesar Rp424.412.467,92 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.96
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	422.412.467,92	424.412.467,92	(2.000.000,00)	(0,47)

Mutasi Piutang Bagian Lancar TGR disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.97
Mutasi Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	424.412.467,92	493.682.467,92
2	Penambahan	25.122.140,04	0,00
3	Pengurangan (Pembayaran)	(27.122.140,04)	(69.270.000,00)
	Saldo Akhir	422.412.467,92	424.412.467,92

5.3.1.a.11.3 Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain

31 Desember 2023
96.043.336,00

31 Desember 2022
00,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain berasal dari Dinas Perhubungan yang merupakan Bagi Hasil Penerbangan dari PT. Avia Star dari tahun 2015, dimana pada tahun-tahun sebelumnya dicatat di rekening Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya dan pada tahun 2023 ada perubahan rekening menjadi Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain. Berikut ini tabel rincian Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain:

Tabel 5.98
Rincian Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain	96.043.336,00	0,00	96.043.336,00	100,00



Mutasi Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.99
Mutasi Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	0,00	0,00
2	Penambahan	0,00	0,00
3	Pengurangan (Pembayaran)	0,00	0,00
4	Koreksi Saldo Awal Piutang	96.043.336,00	0,00
	Saldo Akhir	96.043.336,00	0,00

5.3.1.a.11.4	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<u>31 Desember 2023</u> 1.171.568,06	<u>31 Desember 2022</u> 1.252.513,00
---------------------	---	---	---

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan merupakan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.171.568,06 dengan perbandingan tahun 2022 sebesar Rp1.252.513,00 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.100
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.171.568,06	1.252.513,00	(80.944,94)	(6,46)

Mutasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.101
Mutasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	1.252.513,00	699.828,00
2	Penambahan	4.446,88	1.252.513,00
3	Pengurangan (Pembayaran)	(85.391,82)	(699.828,00)
	Saldo Akhir	1.171.568,06	1.252.513,00

**5.3.1.a.11.5 Piutang Pendapatan BLUD****31 Desember 2023****0,00****31 Desember 2022****667.896.104,00**

Piutang Pendapatan BLUD melalui RSUD Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan merupakan Pendapatan BLUD yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan perbandingan tahun 2022 sebesar Rp667.896.104,00 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.102
Piutang Pendapatan BLUD

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	667.896.104,00	(667.896.104,00)	(100,00)

Per 31 Desember 2023 saldo Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan sebesar Rp0,00 hal ini berdasarkan surat dari BPJS Kesehatan tanggal 25 Maret 2024 Nomor: 436/VIII-07/0324 perihal Konfirmasi Piutang BPJS Kesehatan bahwa sisa Piutang Pendapatan BLUD senilai Rp121.006.500,00 bukan merupakan piutang BPJS Kesehatan akan tetapi merupakan hasil selisih dari perbaikan kode INA-CBG dari awal pengajuan klaim. Sehingga sisa Piutang Pendapatan BLUD pada tahun 2023 senilai Rp121.006.500,00 tidak bisa dibayarkan.

Mutasi Piutang Pendapatan BLUD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.103
Mutasi Piutang Pendapatan BLUD

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	667.896.104,00	17.099.374.805,00
2	Penambahan	0,00	661.993.747,00
3	Pengurangan (Pembayaran)	(546.889.604,00)	(17.093.472.448,00)
4	Koreksi tambah/kurang saldo awal piutang	(121.006.500,00)	0,00
	Saldo Akhir	0,00	667.896.104,00



5.3.1.a.11.6 Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	299.424.000,00	0,00

Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang sudah berbentuk BLUD yang baru terbentuk pada tahun 2022.

Tabel 5.104
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	299.424.000,00	0,00	299.424.000,00	100,00

Mutasi Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.105
Mutasi Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	0,00	0,00
2	Penambahan	299.424.000,00	0,00
3	Pengurangan (Pembayaran)	(63.495.250,00)	0,00
4	Koreksi saldo awal piutang	63.495.250,00	0,00
	Saldo Akhir	299.424.000,00	0,00

Di dalam tabel Mutasi Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan mempunyai koreksi tambah saldo awal piutang yang berasal dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2022 karena mengikuti pembentukan 12 (dua belas) Puskesmas yang menjadi BLUD yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan sesuai dengan Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/410/2022 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan. Berikut ini rincian Piutang pendapatan BLUD dari Jasa Layanan:



Tabel 5.106
Rincian Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

No	Puskesmas	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Kuala Pembuang I	5.705.000,00
2	Kuala Pembuang II	11.635.000,00
3	Telaga Pulang	38.440.000,00
4	Danau Sembuluh	48.480.000,00
5	Terawan	18.770.000,00
6	Asam Baru	6.160.000,00
7	Pembuang Hulu	4.030.000,00
8	Sandul	31.175.000,00
9	Rantau Pulut I	45.969.500,00
10	Rantau Pulut II	30.140.000,00
11	Tumbang Manjul	52.952.500,00
12	Tumbang Langkai	5.967.000,00
Jumlah		299.424.000,00

5.3.1.a.11.7 Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	<u>31 Desember 2023</u> 0,00	<u>31 Desember 2022</u> 87.514,00
--	---	--

Saldo Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar pada tahun 2023 sebesar Rp0,00 yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.107
Daftar Rincian Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	87.514,00	(87.514,00)	(100,00)

Mutasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.108
Mutasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	87.514,00	87.514,00
2	Penambahan	0,00	0,00
3	Pengurangan (Pembayaran)	(87.514,00)	0,00
	Saldo Akhir	0,00	87.514,00

**5.3.1.a.11.8 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya**

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp95.955.822,00. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya berasal dari Dinas Perhubungan dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya dari Dinas Perhubungan pada tahun 2023 ada perubahan rekening yaitu menjadi rekening Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain. Berikut ini tabel rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya:

Tabel 5.109
Daftar Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	95.955.822,00	(95.955.822,00)	(100,00)

Mutasi Piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.110
Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	95.955.822,00	96.043.336,00
2	Penambahan	0,00	0,00
3	Pengurangan (Pembayaran)	0,00	0,00
4	Koreksi saldo awal piutang	(95.955.822,00)	(87.514,00)
	Saldo Akhir	0,00	95.955.822,00

5.3.1.a.11.9 Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

31 Desember 2023
0,00

31 Desember 2022
7.449.277,10

Saldo Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.449.277,10. Sesuai dengan Nota Dinas dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Tanggal 12 Januari 2024 perihal Penyampaian Saldo Rekening TDF, Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun



Anggaran 2022 Dalam Bentuk Non Tunai serta telah dilaksanakannya penyaluran DBH Non Tunai ke Rekening TDF untuk Pemerintah Daerah, di mana total dana TDF pemerintah Kabupaten Seruyan hanya disalurkan sebesar nilai pokok Rp182.898.235.000.00.

Tabel 5.111
Daftar Rincian Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	7.449.277,10	(7.449.277,10)	(100,00)

Mutasi Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.112
Mutasi Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) Transfer

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	7.449.277,10	0,00
2	Penambahan	0,00	7.449.277,10
3	Pengurangan (Pembayaran)	(7.449.277,10)	0,00
	Saldo Akhir	0,00	7.449.277,10

5.3.1.a.12.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	<u>31 Desember 2023</u> 9.301.461.105,00	<u>31 Desember 2022</u> 12.649.584.665,88
--------------------	---	---	--

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 senilai Rp9.301.461.105,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.649.584.665,88. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berasal dari Bagi Hasil Kendaraan Bermotor (PKB), Bagi hasil dari Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan pada Pemerintah Kabupaten Seruyan yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak daerah dari Provinsi Kalimantan Tengah. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 5.113
Daftar Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.037.634.119,00	1.864.434.207,43	(826.800.088,43)	(44,35)
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.093.575.853,00	2.228.847.122,57	(1.135.271.269,57)	(50,94)
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.135.762.243,00	8.459.242.453,88	(1.323.480.210,88)	(15,65)
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	34.488.890,00	97.060.882,00	(62.571.992,00)	(64,47)
Piutang Transfer		9.301.461.105,00	12.649.584.665,88	(3.348.123.560,88)	(26,47)

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap V kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2024 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/123/2024 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap V Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2024.

Mutasi Piutang Transfer disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.114
Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Awal	12.649.584.665,88	15.229.248.721,86
2	Penambahan	9.301.461.105,00	12.649.584.665,88
3	Pembayaran (Pengurangan)	(12.649.584.665,88)	(15.229.248.721,86)
4	Koreksi	0,00	0,00
	Saldo Akhir	9.301.461.105,00	12.649.584.665,88

5.3.1.a.13. Piutang Lainnya

31 Desember 2023

0,00

31 Desember 2022

44.910.000,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp44.910.000,00 yang berasal dari Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang pada tahun 2023 sudah dilakukan pembayaran.

**5.3.1.a.14. Penyisihan Piutang****31 Desember 2023**
(3.586.781.709,77)**31 Desember 2022**
(2.905.935.607,91)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp3.586.781.709,77) dan (Rp2.905.935.607,91) merupakan penyisihan atas piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2023.

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seruyan yang menyatakan bahwa: “Penilaian Kualitas Piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya”.

Rincian penyisihan piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.115
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(3.469.788.383,57)	(2.782.976.457,03)	(686.811.926,54)	24,68
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(15.641.897,23)	(11.728.489,98)	(3.913.407,25)	33,37
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah	(96.489.492,18)	(98.234.900,83)	1.745.408,65	(1,78)
4	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(4.650.730,56)	(5.838.181,87)	1.187.451,31	(20,34)
5	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	(7.135.123,20)	7.135.123,20	(100,00)
6	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(211.206,23)	0,00	(211.206,23)	100,00
7	Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka	0,00	(22.455,00)	22.455,00	(100,00)
	Jumlah Penyisihan	(3.586.781.709,77)	(2.905.935.607,91)	(680.846.101,86)	23,43

Rincian Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2023 dan 2022 Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 5.116
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada SKPD

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	(3.469.788.383,57)	(2.798.014.638,91)
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(3.469.788.383,57)	(2.788.814.638,91)
	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	(9.200.000,00)
2	Dinas Pendidikan	(2.734.200,00)	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.734.200,00)	0,00
3	Dinas Kesehatan	(162.752,00)	(33.450,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi	(13.040,00)	(33.450,00)
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(149.712,00)	0,00
4	Dinas Perhubungan	(96.084.481,00)	(96.054.716,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi	(41.145,00)	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(96.043.336,00)	(96.054.716,00)
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	(13.142.500,41)	(5.856.630,37)
	Penyisihan Piutang Retribusi	(12.853.512,23)	(5.710.811,38)
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(288.988,18)	(145.818,99)
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(7.456,00)	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(7.456,00)	0,00
7	RSUD Kuala Pembuang (BLUD)	0,00	(327.883,65)
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	(327.883,65)
8	RSUD HANAU (BLUD)	0,00	(5.838.040,21)
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	1.509.289,20
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	(7.347.329,41)
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	(22.455,00)
	Penyisihan Piutang Lainnya – Uang Muka	0,00	(22.455,00)
10	Badan Keuangan Dan Aset Daerah (PPKD)	(4.861.936,79)	212.206,23
	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(4.650.730,56)	0,00
	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(211.206,23)	212.206,23
	Jumlah Penyisihan	(3.586.781.709,77)	(2.905.935.607,91)

**5.3.1.a.15. Beban Dibayar Dimuka****31 Desember 2023**
51.296.345,00**31 Desember 2022**
267.838.607,52

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp51.296.345,00 dan Rp267.838.607,52 merupakan Beban Dibayar Dimuka atas pembayaran asuransi kendaraan operasional milik daerah yang merupakan barang pengelola.

5.3.1.a.16. Persediaan**31 Desember 2023**
99.866.079.222,42**31 Desember 2022**
87.307.378.974,54

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp99.866.079.222,42 dan Rp87.307.378.974,54 merupakan nilai saldo persediaan yang dimiliki oleh SKPD, Kecamatan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang dan BLUD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Rincian jenis Persediaan tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.117
Persediaan

No.	Nama Barang	Persediaan per 31 Des 2023	Persediaan per 31 Des 2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	Barang Pakai Habis				
1	Bahan	454.059.450,99	760.517.705,20	(306.458.254,21)	(40,30)
2	Suku Cadang	12.844.906,00	6.970.900,00	5.874.006,00	84,26
3	Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.761.985.874,92	2.263.822.565,74	1.498.163.309,18	66,18
4	Obat Obatan	8.162.372.521,94	9.081.409.984,60	-919.037.462,66	(10,12)
5	Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan	87.357.357.168,57	75.194.657.819,00	12.162.699.349,57	16,17
6	Natura dan Pakan	117.459.300,00	0,00	117.459.300,00	100,00
Total		99.866.079.222,42	87.307.378.974,54	12.558.700.247,88	14,38

Rincian persediaan Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.118
Persediaan pada SKPD

No	SKPD	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	1.475.051.000,00	14.585.000,00	1.460.466.000,00	10.013,48
2	Dinas Kesehatan	5.420.269.514,88	5.705.309.879,31	(285.040.364,43)	(5,00)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang	2.816.580.069,05	1.588.624.378,22	1.227.955.690,83	77,30
4	Rumah Sakit Umum Daerah Hanau	0,00	1.997.883.811,77	(1.997.883.811,77)	(100,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.136.841.976,57	74.616.428.084,00	10.520.413.892,57	14,10
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.047.000,00	2.469.000,00	(422.000,00)	(17,09)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2.060.000,00	2.022.663,00	37.337,00	1,85
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.412.000,00	355.000,00	3.057.000,00	861,13
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.229.123.625,00	269.943.675,00	1.959.179.950,00	725,77
10	Dinas Sosial	16.419.000,00	6.218.000,00	10.201.000,00	164,06
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.910.000,00	2.063.000,00	(153.000,00)	(7,42)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	823.517.914,00	865.782.082,50	(42.264.168,50)	(4,88)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	849.600,00	849.600,00	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	2.100.210,00	1.631.000,00	469.210,00	28,77
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.241.000,00	1.116.000,00	1.125.000,00	100,81
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	4.018.000,00	2.130.000,00	1.888.000,00	88,64
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	407.250,00	2.543.000,00	(2.135.750,00)	(83,99)
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.829.500,00	710.000,00	2.119.500,00	298,52
19	Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan	6.392.000,00	7.385.000,00	(993.000,00)	(13,45)
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.121.000,00	1.694.500,00	1.426.500,00	84,18
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82.504.990,00	183.982.915,00	(101.477.925,00)	(55,16)
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.739.500,00	4.641.000,00	98.500,00	2,12
23	Dinas Perikanan	2.840.000,00	3.645.000,00	(805.000,00)	(22,09)
24	Sekretariat Daerah	1.201.907.275,00	1.219.171.419,00	(17.264.144,00)	(1,42)
25	Sekretariat DPRD	86.138.650,24	62.516.981,24	23.621.669,00	37,78



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.514.000,00	1.667.000,00	1.847.000,00	110,80
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	145.567.166,68	380.728.400,00	(235.161.233,32)	(61,77)
28	Badan Pendapatan Daerah	338.411.758,00	308.072.035,50	30.339.722,50	9,85
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.037.600,00	1.196.000,00	8.841.600,00	739,26
30	Inspektorat Kabupaten	25.383.500,00	29.506.750,00	(4.123.250,00)	(13,97)
31	Kecamatan Seruyan Hilir	2.321.000,00	12.450.000,00	(10.129.000,00)	(81,36)
32	Kecamatan Suling Tambun	488.000,00	444.000,00	44.000,00	9,91
33	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	1.610.000,00	1.165.000,00	445.000,00	38,20
34	Kecamatan Danau Sembuluh	243.000,00	497.000,00	(254.000,00)	(51,11)
35	Kecamatan Seruyan Raya	836.000,00	408.000,00	428.000,00	104,90
36	Kecamatan Danau Seluluk	2.094.000,00	1.425.000,00	669.000,00	46,95
37	Kecamatan Hanau	548.000,00	711.000,00	(163.000,00)	(22,93)
38	Kecamatan Batu Ampar	1.462.000,00	634.000,00	828.000,00	130,60
39	Kecamatan Seruyan Tengah	830.000,00	707.000,00	123.000,00	17,40
40	Kecamatan Seruyan Hulu	915.000,00	846.000,00	69.000,00	8,16
41	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas	4.497.123,00	3.220.800,00	1.276.323,00	39,63
JUMLAH		99.866.079.222,42	87.307.378.974,54	12.558.700.247,88	14,38

5.3.1.b. Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2023
92.793.071.037,00

31 Desember 2022
80.443.980.424,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp92.793.071.037,00 terdiri dari investasi non permanen sebesar Rp0,00 dan investasi Permanen sebesar Rp92.793.071.037,00. Apabila dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp80.443.980.424,00 terdapat peningkatan sebesar Rp92.793.071.037,00 atau 15,35%. Kenaikan atau penurunan realisasi Investasi Jangka Panjang tahun 2022 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 5.119
Investasi Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Investasi Jangka Panjang Permanen	92.793.071.037,00	80.443.980.424,00	12.349.090.613,00	15,35
Jumlah	92.793.071.037,00	80.443.980.424,00	12.349.090.613,00	15,35

5.3.1.b.1 Investasi Jangka Panjang Permanen

31 Desember 2023
92.793.071.037,00

31 Desember 2022
80.443.980.424,00

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp92.793.071.037,00 dan Rp80.443.980.424,00. Jika dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp80.443.980.424,00, maka Investasi Jangka Panjang Permanen mengalami kenaikan sebesar Rp12.349.090.613,00 atau 15,35%. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 merupakan investasi dalam saham pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, penyertaan saham pada PT JAMKRIDA dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.120
Investasi Jangka Panjang Permanen

Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah	77.887.500.000,00	64.925.000.000,00	12.962.500.000,00	19,97
PT. JAMKRIDA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	11.905.571.037,00	12.518.980.424,00	(613.409.387,00)	(4,90)
Jumlah	92.793.071.037,00	80.443.980.424,00	12.349.090.613,00	15,35

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan penyertaan modal pemerintah daerah:

- Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah
Pemerintah Kabupaten Seruyan telah melakukan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp77.887.500.000,00.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp51.962.500.000,00 dengan alokasi penyertaan sebagai berikut:

Alokasi penyertaan sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp22.000.000.000,00;

- 1) Alokasi penyertaan tahun 2015 sebesar Rp3.500.000.000,00;
- 2) Alokasi penyertaan tahun 2016 sebesar Rp4.500.000.000,00;
- 3) Alokasi penyertaan tahun 2017 sebesar Rp5.500.000.000,00;
- 4) Alokasi penyertaan tahun 2018 sebesar Rp3.500.000.000,00;
- 5) Alokasi penyertaan tahun 2021 sebesar Rp 12.962.500.000,00;
- 6) Alokasi penyertaan tahun 2022 sebesar Rp 12.962.500.000,00; dan
- 7) Alokasi penyertaan tahun 2023 sebesar Rp 12.962.500.000,00.

b. Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Penyertaan Modal pada PDAM Seruyan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan. Ekuitas PDAM Tahun Anggaran 2023 disajikan berdasarkan data Laporan Keuangan PDAM Audited. Pemerintah Kabupaten Seruyan menyajikan nilai inventasi Tahun Anggaran 2023 pada PDAM dengan menggunakan metode ekuitas sebesar Rp11.905.571.037,00.

c. Penyertaan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Seruyan mempunyai kewajiban penyertaan modal kepada PT JAMKRIDA KALTENG sebesar Rp3.000.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Seruyan telah menyelesaikan kewajiban penyertaan modal kepada PT. Jamkrida sebesar Rp3.000.000.000,00.

5.3.1.c.	Aset Tetap	<u>31 Desember 2023</u> 2.791.763.533.446,07	<u>31 Desember 2022</u> 2.664.992.574.990,09
----------	------------	---	---

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp2.791.763.533.446,07 dan Rp2.664.992.574.990,09 merupakan saldo aset tetap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.121
Rincian Aset Tetap

No	JENIS ASET	Saldo		Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)		
1	Tanah	223.764.846.076,26	201.272.227.716,26	22.492.618.360,00	11,18
2	Peralatan dan Mesin	542.510.733.426,91	507.663.213.180,63	34.847.520.246,28	6,86
3	Gedung dan Bangunan	1.013.131.619.242,40	957.633.320.268,76	55.498.298.973,64	5,80
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.176.719.117.740,25	3.117.629.265.576,59	59.089.852.163,66	1,90
5	Aset Tetap Lainnya	119.955.527.396,49	42.001.641.793,00	77.953.885.603,49	185,60
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	127.499.305.847,68	122.011.558.945,68	5.487.746.902,00	4,50
7	Akumulasi Penyusutan	(2.411.817.616.283,92)	(2.283.218.652.490,83)	(128.598.963.793,09)	5,63
Jumlah		2.791.763.533.446,07	2.664.992.574.990,09	126.770.958.455,98	4,76

Berdasarkan rincian pada tabel di atas terlihat bahwa aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp126.770.958.455,98 atau 4,76%. Kenaikan tersebut terjadi pada semua Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan. Nilai buku aset tetap Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.693.514.923.682,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.122
Nilai Buku Aset Tetap

No	Jenis Aset	Saldo	Penyusutan	Nilai Buku (Rp)
		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	
1	Tanah	223.764.846.076,26	0,00	223.764.846.076,26
2	Peralatan dan Mesin	542.510.733.426,91	(380.413.211.017,86)	162.097.522.409,05
3	Gedung dan Bangunan	1.013.131.619.242,40	(205.819.342.083,00)	807.312.277.159,40
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.176.719.117.740,25	(1.767.744.417.345,06)	1.408.974.700.395,19
5	Aset Tetap Lainnya	119.955.527.396,49	(57.840.645.838,00)	62.114.881.558,49
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	127.499.305.847,68	0,00	127.499.305.847,68
Jumlah		5.203.581.149.729,99	(2.411.817.616.283,92)	2.791.763.533.446,07



5.3.1.c.1. Tanah

31 Desember 2023
223.764.846.076,26

31 Desember 2022
201.272.227.716,26

Saldo Tanah Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp223.764.846.076,26 dan Rp201.272.227.716,26 mengalami kenaikan sebesar Rp22.492.618.360,00 atau 11,18%. Rincian penambahan dan pengurangan saldo aset tanah sebagai berikut:

Tabel 5.123
Rincian Mutasi Tanah

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		201.272.227.716,26
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2023	0,00	
	Hibah	0,00	
	Utang	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	0,00	
	Reklas / Pindah SKPD	9.450.000,00	
	Aset Yang Belum Tercatat	152.124.000,00	
	Pencatatan Aset Baru	22.344.240.360,00	
	Jumlah Pertambahan		22.505.814.360,00
3	Pengurangan		
	Penghapusan	0,00	
	Koreksi Pembayaran Utang	0,00	



No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	3.746.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	0,00	
	Reklas / Pindah SKPD	9.450.000,00	
	Koreksi Aset	0,00	
	Penghapusan	0,00	
	Hibah	0,00	
	Jual	0,00	
	Musnah	0,00	
	Sebab Lainnya	0,00	
	Penyertaan Modal	0,00	
	Jumlah Pengurangan		13.196.000,00
4	Saldo Akhir		223.764.846.076,26

Saldo aset Tanah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 sebesar Rp223.764.846.076,26 yang berasal dari Penambahan Aset Tanah berupa Reklas / Pindah SKPD sebesar Rp9.450.000,00, Aset yang Belum Tercatat sebesar Rp152.124.000,00 dan Penambahan Aset Baru sebesar Rp22.344.240.360,00. Untuk penambahan Aset Tanah sebesar Rp22.344.240.360,00 adalah pencatatan aset baru dari pencatatan dan penilaian aset tanah dibawah jalan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/524/2023 dan tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Nilai dan Pencatatan Aset Tetap Tanah dan Gedung Bangunan pada Daftar Barang Pengelola Barang Kabupaten Seruyan, serta Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/538/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan pada Pemerintah Kabupaten Seruyan. Sedangkan pengurangan yang berasal dari Reklas / Pindah Ruang Aset ARB sebesar Rp3.746.000,00 dan Reklas / Pindah SKPD sebesar Rp9.450.000,00.



5.3.1.c.2. Peralatan Dan Mesin

31 Desember 2023

542.510.733.426,91

31 Desember 2022

507.663.213.180,63

Saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp542.510.733.426,91 dan Rp507.663.213.180,63 mengalami penurunan sebesar Rp34.847.520.246,28 atau 6,86% dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.124
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		507.663.213.180,67
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2023	45.974.881.069,00	
	Hibah	1.885.310.110,00	
	Utang	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	634.727.557,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	196.000.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	60.297.400,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	44.900.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	924.008.536,04	
	Reklas / Pindah SKPD	7.316.533.800,00	
	Aset Yang Belum Tercatat	0,00	
	Koreksi Temuan Tindak Lanjut	0,00	
	Jumlah Pertambahan		57.036.658.472,04
3	Pengurangan		
	Penghapusan	0,00	
	Koreksi Pembayaran Utang	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	0,00	



No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	54.180.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	6.589.900,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	12.296.904.543,30	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	2.153.266.987,50	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	361.662.995,00	
	Reklas / Pindah SKPD	7.316.533.800,00	
	Koreksi Aset	0,00	
	Penghapusan	0,00	
	Hibah	0,00	
	Jual	0,00	
	Musnah	0,00	
	Sebab Lainnya	0,00	
	Penyertaan Modal	0,00	
	Jumlah Pengurangan		22.189.138.225,80
4	Saldo Akhir		542.510.733.426,91

Terdapat penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp57.036.658.472,04 terdiri dari realisasi belanja modal sebesar Rp45.974.881.069,00; Hibah sebesar Rp1.885.310.110,00; Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C sebesar Rp634.727.557,00; Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D sebesar Rp196.000.000,00; Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E sebesar Rp60.297.400,00; Reklas / Pindah Ruang Aset ATB Rp44.900.000,00; Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa sebesar Rp924.008.536,04; serta Reklas / Pindah SKPD sebesar Rp7.316.533.800,00.

Sedangkan pengurangan aset peralatan dan mesin sebesar Rp22.189.138.225,80 terdiri dari Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C sebesar Rp54.180.000,00; Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E sebesar Rp6.589.900,00; Reklas / Pindah Ruang Aset ARB sebesar Rp12.296.904.543,30; Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra sebesar Rp2.153.266.987,50; Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa sebesar Rp361.662.995,00; dan Reklas / Pindah SKPD sebesar Rp7.316.533.800,00.



5.3.1.c.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023
1.013.131.619.242,40

31 Desember 2022
957.633.320.268,76

Saldo Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.013.131.619.242,40 dan Rp957.633.320.268,76 mengalami kenaikan sebesar Rp55.498.298.973,64 atau 5,80%, dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.125
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		957.633.320.268,76
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2023	57.398.957.903,04	
	Hibah	0,00	
	Utang	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	54.180.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	752.053.930,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	759.009.799,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	13.330.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	7.036.702.021,00	
	Reklas / Pindah SKPD	82.314.000,00	
	Aset Yang Belum Tercatat	258.181.400,00	
	Koreksi Temuan Tindak Lanjut	0,00	
	Jumlah Pertambahan		66.354.729.053,04
3	Pengurangan		
	Penghapusan	0,00	
	Koreksi Pembayaran Utang	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	634.727.557,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	0,00	



No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	1.234.456.500,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	5.458.140.950,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	626.797.400,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	840.671.674,40	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	1.979.321.998,00	
	Reklas / Pindah SKPD	82.314.000,00	
	Koreksi Aset	0,00	
	Penghapusan	0,00	
	Hibah	0,00	
	Jual	0,00	
	Musnah	0,00	
	Sebab Lainnya	0,00	
	Penyertaan Modal	0,00	
	Jumlah Pengurangan		10.856.430.079,40
4	Saldo Akhir		1.013.131.619.242,40

Saldo Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.013.131.619.242,40 dikarenakan terdapat penambahan sebesar Rp66.354.729.053,04 terdiri dari realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp 57.398.957.903,04; Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B sebesar Rp 54.180.000,00; Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D sebesar Rp 752.053.930,00; Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F sebesar Rp759.009.799,00; Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra sebesar Rp 13.330.000,00; Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa sebesar Rp 7.036.702.021,00; Reklas / Pindah SKPD sebesar Rp 82.314.000,00; serta Aset Yang Belum Tercatat sebesar Rp 258.181.400,00

Terdapat juga pengurangan sebesar Rp 10.856.430.079,40 yang terdiri dari Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B sebesar Rp 634.727.557,00; Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D sebesar Rp 1.234.456.500,00; Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F sebesar Rp 5.458.140.950,00; Reklas / Pindah Ruang Aset ARB sebesar Rp 626.797.400,00; Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra sebesar Rp 840.671.674,40; Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa sebesar Rp 1.979.321.998,00; serta Reklas / Pindah SKPD sebesar Rp 82.314.000,00.



5.3.1.c.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2023
3.176.719.117.740,25

31 Desember 2022
3.117.629.265.576,59

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.176.719.117.740,25 dan Rp 3.117.629.265.576,59 mengalami kenaikan sebesar Rp59.089.852.163,66 atau 1,90% dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.126
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		3.117.629.265.576,59
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2023	130.384.672.314,70	
	Hibah	0,00	
	Utang	693.390.164,95	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	1.234.456.500,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	908.074.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	4.575.333.185,00	
	Reklas / Pindah SKPD	0,00	
	Aset Yang Belum Tercatat	0,00	
	Koreksi Temuan Tindak Lanjut	0,00	
	Jumlah Pertambahan		137.795.926.164,65
3	Pengurangan		
	Penghapusan	0,00	
	Koreksi Pembayaran Utang	0,00	
	Kelebihan Bayar	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	196.000.000,00	



No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	752.053.930,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	76.240.363.110,99	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	1.517.656.960,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	0,00	
	Reklas / Pindah SKPD	0,00	
	Koreksi Aset	0,00	
	Penghapusan	0,00	
	Hibah	0,00	
	Jual	0,00	
	Musnah	0,00	
	Sebab Lainnya	0,00	
	Penyertaan Modal	0,00	
	Jumlah Pengurangan		78.706.074.000,99
4	Saldo Akhir		3.176.719.117.740,25

Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp137.795.926.164,65 terdiri dari penambahan belanja modal sebesar Rp130.384.672.314,70; utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp693.390.164,95; pindah Ruang Aset dari KIB C sebesar Rp1.234.456.500,00, Pindah Ruang Aset dari KIB F sebesar Rp908.074.000,00; dan pindah Ruang dari Barang Jasa sebesar Rp4.575.333.185,00.

Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp78.706.074.000,99 terdiri dari Pindah Ruang Aset ke KIB B sebesar Rp196.000.000,00, Pindah Ruang Aset ke KIB C sebesar Rp752.053.930,00, Pindah Ruang Aset ke KIB E sebesar Rp76.240.363.110,99 dan Reklas / Pindah Ruang Aset ARB sebesar Rp1.517.656.960,00.

5.3.1.c.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023
119.955.527.396,49

31 Desember 2022
42.001.641.793,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp119.955.527.396,49 dan Rp42.001.641.793,00 mengalami kenaikan sebesar Rp77.953.885.603,49 atau 185,60% dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:



Tabel 5.127
Rincian Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		42.001.641.793,00
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2023	870.194.072,00	
	Hibah	0,00	
	Utang	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	6.589.900,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	76.240.363.110,99	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	1.812.623.402,50	
	Reklas / Pindah SKPD	0,00	
	Aset Yang Belum Tercatat	0,00	
	Koreksi Temuan Tindak Lanjut	0,00	
	Jumlah Pertambahan		78.929.770.485,49
3	Pengurangan		
	Penghapusan	0,00	
	Koreksi Pembayaran Utang	0,00	
	Kelebihan Bayar	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	60.297.400,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	163.851.400,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	698.279.082,00	



No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	35.607.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	17.850.000,00	
	Reklas / Pindah SKPD	0,00	
	Koreksi Aset	0,00	
	Penghapusan	0,00	
	Hibah	0,00	
	Jual	0,00	
	Musnah	0,00	
	Sebab Lainnya	0,00	
	Penyertaan Modal	0,00	
	Jumlah Pengurangan		975.884.882,00
4	Saldo Akhir		119.955.527.396,49

Terdapat penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp78.929.770.485,49 terdiri dari penambahan belanja modal sebesar Rp870.194.072,00; Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B sebesar Rp6.589.900,00; Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D sebesar Rp76.240.363.110,99 dan Pindah Ruang dari Barang Jasa sebesar Rp1.812.623.402,50.

Terdapat pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp975.884.882,00 terdiri dari Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B sebesar Rp60.297.400,00; Reklas / Pindah Ruang Aset ATB sebesar Rp163.851.400,00; Reklas / Pindah Ruang Aset ARB sebesar Rp698.279.082,00; Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra sebesar Rp35.607.000,00 dan Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa sebesar Rp17.850.000,00.

5.3.1.c.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2023
127.499.305.847,68

31 Desember 2022
122.011.558.945,68

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp127.499.305.847,68 dan Rp122.011.558.945,68 mengalami kenaikan sebesar Rp5.487.746.902,00 atau 4,50% dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:



Tabel 5.128
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		122.011.558.945,68
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2023	0,00	
	Hibah	0,00	
	Utang	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	5.458.140.950,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	2.145.289.751,00	
	Reklas / Pindah SKPD		
	Aset Yang Belum Tercatat	0,00	
	Koreksi Temuan Tindak Lanjut	0,00	
	Jumlah Pertambahan		7.603.430.701,00
3	Pengurangan		
	Penghapusan	0,00	
	Koreksi Pembayaran Utang	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	759.009.799,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	908.074.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	448.600.000,00	



No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	0,00	
	Reklas / Pindah SKPD	0,00	
	Koreksi Aset	0,00	
	Penghapusan	0,00	
	Hibah	0,00	
	Jual	0,00	
	Musnah	0,00	
	Sebab Lainnya	0,00	
	Penyertaan Modal	0,00	
	Jumlah Pengurangan		2.115.683.799,00
4	Saldo Akhir		127.499.305.847,68

Terdapat Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp7.603.430.701,00 yang terdiri dari Pindah Ruang dari KIB C sebesar Rp5.458.140.950,00; serta Pindah Ruang dari Barang Jasa sebesar Rp2.145.289.751,00.

Terdapat Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.115.683.799,00 terdiri dari Pindah Ruang Aset ke KIB C sebesar Rp759.009.799,00; Pindah Ruang ke KIB D sebesar Rp908.074.000,00; dan Reklas / Pindah Ruang Aset ARB sebesar Rp448.600.000,00. Rincian jumlah Kontruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan tahun pengadaan sebagai berikut:

Tabel 5.129
Rincian Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Tahun Pengadaan

TAHUN KDP	JUMLAH (Rp)
2012	13.009.507.850,00
2013	50.481.299.000,00
2014	1.214.111.000,00
2015	998.088.000,00
2016	6.460.255.700,00
2017	9.289.795.500,00
2018	8.727.325.431,00
2019	4.232.430.975,68
2020	2.008.611.800,00
2021	19.593.001.925,00
2022	5.997.131.764,00
2023	5.487.746.902,00
JUMLAH	127.499.305.847,68

**5.3.1.c.7. Akumulasi Penyusutan**

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
(2.411.817.616.283,92) **(2.283.218.652.490,83)**

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp2.411.817.616.283,92) dan (Rp2.283.218.652.490,83). Kabupaten Seruyan melakukan perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus disusutkan perbulan. Rincian penyusutan aset tetap sebagai berikut:

Tabel 5.130
Rincian Akumulasi Penyusutan

No.	Jenis Aset	Akumulasi Penyusutan 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(380.413.211.017,86)	(339.750.324.681,45)	(40.662.886.336,42)	11,97
3	Gedung dan Bangunan	(205.819.342.083,00)	(185.106.902.877,00)	(20.712.439.206,00)	11,19
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.767.744.417.345,06)	(1.758.361.424.932,39)	(9.382.992.412,67)	0,53
5	Aset Tetap Lainnya	(57.840.645.838,00)	0,00	(57.840.645.838,00)	100,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		(2.411.817.616.283,92)	(2.283.218.652.490,83)	(128.598.963.793,09)	5,63

5.3.1.d. Aset Lainnya

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
269.568.439.783,16 **117.534.604.050,02**

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp269.568.439.783,16 dan Rp117.534.604.050,02 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.131
Rincian Aset Lainnya

No.	URAIAN	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Tagihan Jangka Panjang	51.515.664.699,16	51.606.097.170,02	(90.432.470,86)	(0,18)
2	Aset Tidak Berwujud Lainnya	11.777.418.990,00	11.228.026.090,00	549.392.900,00	4,89
3	Aset Lain-Lain	76.983.218.334,30	70.115.571.016,00	6.867.647.318,30	9,79
4	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(5.739.845.906,00)	(4.981.747.797,00)	(758.098.109,00)	15,22
5	Akumulasi Aset Lain Lain	(47.866.251.334,30)	(41.148.159.037,00)	(6.718.092.297,30)	16,33



No.	URAIAN	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	182.898.235.000,00	30.714.816.608,00	152.183.418.392,00	495,47
Jumlah		269.568.439.783,16	117.534.604.050,02	152.033.835.733,14	129,35

5.3.1.d.1. Tagihan Jangka Panjang	<u>31 Desember 2023</u> 51.515.664.699,16	<u>31 Desember 2022</u> 51.606.097.170,02
--	--	--

Tagihan Jangka Panjang tahun 2023 merupakan tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti rugi sebagaimana rincian berikut ini:

Tabel 5.132
Rincian Tagihan Jangka Panjang

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	1.701.618.475,00	1.701.618.475,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Rugi terhadap bendahara	68.582.773,01	98.949.193,13	(30.366.420,12)	(30,69)
3	Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara	49.745.463.451,15	49.805.529.501,89	(60.066.050,74)	(0,12)
Jumlah		51.515.664.699,16	51.606.097.170,02	(90.432.470,86)	(0,18)

5.3.1.d.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.701.618.475,00 dan Rp1.701.618.475,00. Rincian Tagihan Penjualan Angsuran sebagai berikut:

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Saldo tagihan penjualan angsuran Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Dinas Pertanian dan Perternakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.645.188.475,00 Saldo tagihan penjualan angsuran Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari:

- a. Saldo tagihan penjualan angsuran ternak sebesar Rp1.035.612.655,00 merupakan pengadaan ternak yang disalurkan kepada masyarakat dan masyarakat membayar dengan cara mencicil kepada Dinas Pertanian dan Peternakan untuk disetorkan ke kas daerah. Aset tagihan penjualan angsuran masih mencatat ternak yang telah dinyatakan mati sesuai Berita Acara Kematian sebesar Rp69.207.300,00 untuk permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Ketahanan



Pangan dan Penyuluhan akan menindaklanjuti dengan melakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Saldo tagihan penjualan angsuran ALSINTAN sebesar Rp609.575.820,00 merupakan pengadaan alat pertanian yang disalurkan kepada masyarakat dan masyarakat membayar dengan cara mencicil kepada Dinas Pertanian dan Peternakan untuk disetorkan ke kas daerah.

2. Dinas Perikanan

Saldo tagihan penjualan angsuran Pemerintah Kabupaten Seruyan pada Dinas Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.430.000,00.

5.3.1.d.1.2 Tuntutan Ganti Rugi terhadap Bendahara

Saldo Tuntutan Ganti Rugi terhadap Bendahara pada Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 68.582.773,01 dan Rp98.949.193,13. Saldo Tuntutan Ganti Rugi terhadap Bendahara pada tahun 2023 atas nama Rony Fahdianor dengan SK Pembebanan Nomor 188.45/415/2018 dan Muriansyah dengan SK Pembebanan Nomor 188.45/453/2018.

5.3.1.d.1.3 Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Saldo Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara pada Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 49.745.463.451,15 dan Rp49.805.529.501,89.

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
5.3.1.d.2. Aset Tidak Berwujud	11.777.418.990,00	11.228.026.090,00

Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp11.777.418.990,00 dan Rp11.228.026.090,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 549.392.900,00 atau 4,89% dengan rincian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.133
Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		11.228.026.090,00
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2023	430.441.500,00	
	Hibah	0,00	



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Utang	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	163.851.400,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	0,00	
	Reklas / Pindah SKPD	0,00	
	Aset Yang Belum Tercatat	0,00	
	Koreksi Temuan Tindak Lanjut	0,00	
	Jumlah Pertambahan		594.292.900,00
3	Pengurangan		
	Penghapusan	0,00	
	Koreksi Pembayaran Utang	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	44.900.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	0,00	
	Reklas / Pindah SKPD	0,00	
	Koreksi Aset	0,00	
	Penghapusan	0,00	
	Hibah	0,00	
	Jual	0,00	
	Musnah	0,00	
	Sebab Lainnya	0,00	



Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.777.418.990, yang berasal dari penambahan sebesar Rp594.292.900,00 yang terdiri dari Realisasi Belanja Modal 2023 sebesar Rp430.441.500,00; serta Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E sebesar Rp163.851.400,00. Terdapat pengurangan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp44.900.000,00 yang berasal dari Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B sebesar Rp659.259.799,00.

Tabel 5.134
Rincian Aset Tidak Berwujud pada SKPD

5.3.1.d.3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2023 (5.739.845.906,00)	31 Desember 2022 (4.981.747.797,00)
-----------	--	--	--

221 | Pemerintah Kabupaten Seruyan



Tabel 5.135
Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada SKPD

No	SKPD	Jumlah Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Rp)
	Software	(2.784.141.331,10)
1	Dinas Kesehatan	(74.901.690,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(643.988.557,68)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(648.020.313,00)
4	Dinas Perhubungan	195.998.144,61
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(32.771.875,00)
6	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	(9.408.160,00)
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(397.100.000,03)
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(583.010.000,00)
9	Badan Pendapatan Daerah	(207.384.000,00)
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(352.978.000,00)
11	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	(30.576.880,00)
	Kajian	(2.861.400.444,90)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.399.865.648,32)
2	Dinas Perhubungan	(585.233.801,73)
3	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	(125.434.574,00)
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(125.000.450,00)
5	Dinas Perikanan	(230.331.295,88)
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(243.480.062,97)
7	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	(152.054.612,00)
	Aset Berwujud Lainnya	(94.304.130,00)
1	Dinas Perhubungan	(60.214.589,88)
2	Dinas Perikanan	(34.089.540,12)
Jumlah		95.739.845.906,00)

5.3.1.d.4. Aset Lain-Lain

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
76.983.218.334,30 **70.115.571.016,00**

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp76.983.218.334,30 dan Rp70.115.571.016,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.867.647.318,30 atau 9,79%. Penambahan dan pengurangan aset lain-lain sebagai berikut:



Tabel 5.136
Rincian Aset Lain-lain

No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal		70.115.571.016,00
2	Pertambahan		
	Realisasi Belanja Modal 2023	0,00	
	Hibah	0,00	
	Utang	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	3.746.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	12.296.904.543,30	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	626.797.400,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	1.517.656.960,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	698.279.082,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	448.600.000,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	0,00	
	Reklas / Pindah SKPD	0,00	
	Aset Yang Belum Tercatat	0,00	
	Koreksi Temuan Tindak Lanjut	0,00	
	Jumlah Pertambahan		15.591.983.985,30
3	Pengurangan		
	Penghapusan	0,00	
	Koreksi Pembayaran Utang	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ATB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Aset ARB	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Ekstra	0,00	
	Reklas / Pindah Ruang Barang Jasa	0,00	
	Reklas / Pindah SKPD	0,00	



No	Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
	Koreksi Aset	0,00	
	Penghapusan	8.724.336.667,00	
	Hibah	0,00	
	Jual	0,00	
	Musnah	0,00	
	Sebab Lainnya	0,00	
	Penyertaan Modal	0,00	
	Jumlah Pengurangan		8.724.336.667,00
4	Saldo Akhir		76.983.218.334,30

Aset lain-lain adalah Aset tidak dipergunakan lagi secara aktif untuk menunjang operasional Pemerintah Daerah yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Berikut rincian Aset Lain-lain pada SKPD:

Tabel 5.137
Rincian Aset Lain-lain pada SKPD

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	2.172.506.624,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
2	Dinas Kesehatan	3.492.431.588,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
3	Rsud Kuala Pembuang	3.116.533.345,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	29.508.665.673,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	1.431.793.500,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
6	Satuan Polisi Pamong Praja	65.655.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
7	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	33.700.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	58.663.150,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
9	Dinas Sosial	135.664.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	136.769.600,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	297.605.400,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
12	Dinas Perhubungan	10.009.380.027,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	180.506.250,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian	728.969.083,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	103.582.200,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata Dan Kebudayaan	462.247.290,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	196.373.150,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
18	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.073.037.605,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	231.385.800,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	5.569.786.450,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
21	Dinas Perikanan	2.614.377.485,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
22	Sekretariat Daerah	3.870.272.966,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
23	Sekretariat DPRD	863.075.583,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan	135.576.500,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
25	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	5.598.559.174,30	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
26	Badan Pendapatan Daerah	298.883.750,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	177.253.400,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
28	Inspektorat	281.988.770,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
29	Kecamatan Seruyan Hilir	419.135.011,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
30	Kecamatan Suling Tambun	738.857.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	61.170.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
32	Kecamatan Danau Sembuluh	1.393.666.700,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
33	Kecamatan Seruyan Raya	75.580.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
34	Kecamatan Danau Seluluk	4.000.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
35	Kecamatan Hanau	563.696.200,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
36	Kecamatan Batu Ampar	9.300.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
37	Kecamatan Seruyan Hulu	49.800.000,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
38	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	822.770.060,00	Aset Rusak Berat / Dalam Penelusuran / Sebab Lainnya
JUMLAH		76.983.218.334,30	

5.3.1.d.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2023 31 Desember 2022
(47.866.251.334,30) (41,148,159,037.00)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp(47.866.251.334,30) dan Rp(41,148,159,037.00). Rincian akumulasi penyusutan Tuntutan ganti pada SKPD dapat kami sajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.138
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada SKPD

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(2.142.405.046,00)
2	Dinas Kesehatan	(3.492.152.588,00)
3	Rsud Kuala Pembuang	(1.704.201.767,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(12.723.640.841,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	(1.374.151.517,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(65.655.000,00)
7	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	(33.700.000,00)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(56.704.824,00)
9	Dinas Sosial	(134.696.166,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	(111.236.138,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(297.605.400,00)
12	Dinas Perhubungan	(4.096.498.484,00)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	(180.506.250,00)
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian	(697.363.357,00)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(103.386.200,00)
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata Dan Kebudayaan	(414.723.843,00)
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	(196.249.000,00)
18	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	(941.031.215,00)
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	(229.875.384,00)
20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	(3.049.150.300,00)
21	Dinas Perikanan	(2.299.656.229,00)
22	Sekretariat Daerah	(3.687.933.833,00)
23	Sekretariat DPRD	(861.912.667,00)
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan	(135.576.500,00)
25	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	(4.932.163.894,30)
26	Badan Pendapatan Daerah	(298.735.112,00)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(177.253.400,00)
28	Inspektorat	(268.892.138,00)
29	Kecamatan Seruyan Hilir	(419.054.177,00)
30	Kecamatan Suling Tambun	(693.651.333,00)
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	(45.235.000,00)
32	Kecamatan Danau Sembuluh	(800.828.529,00)
33	Kecamatan Seruyan Raya	(75.580.000,00)
34	Kecamatan Hanau	(298.179.142,00)
35	Kecamatan Seruyan Hulu	(49.800.000,00)
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(776.866.060,00)
	JUMLAH	(47.866.251.334,30)



5.3.1.d.6.	Dana <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		182.898.235.000,00	30.714.816.608,00

Berdasarkan Nota Dinas dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Tanggal 12 Januari 2024 perihal Penyampaian Saldo Rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.05/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Dalam Bentuk Non Tunai serta telah dilaksanakannya penyaluran DBH Non Tunai ke Rekening TDF untuk Pemerintah Daerah, di mana dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Kementerian Keuangan Per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp182.898.235.000,00 dan Rp30.714.816.608,00. *Treasury Deposit Facility* (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

5.3.2.	KEWAJIBAN	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		3.715.758.098,80	5.774.095.442,60

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.715.758.098,80 mengalami penurunan sebesar Rp2.058.337.343,80 atau 35,65% dari saldo kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.774.095.442,60. Rincian Kewajiban Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.139
Rincian Kewajiban

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Kewajiban Jangka Pendek	3.715.758.098,80	5.774.095.442,60	(2.058.337.343,80)	(35,65)
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.715.758.098,80	5.774.095.442,60	(2.058.337.343,80)	(35,65)

5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		3.715.758.098,80	5.774.095.442,60

Saldo kewajiban jangka pendek tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp3.715.758.098,80 dan Rp5.774.095.442,60 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.140
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Diterima Dimuka	14.539.727,00	53.099.087,97	(38.559.360,97)	(72,62)
2	Utang Belanja	3.007.828.206,85	5.681.385.631,63	(2.673.557.424,78)	(47,06)
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	693.390.164,95	39.610.723,00	653.779.441,95	1.650,51
	Jumlah	3.715.758.098,80	5.774.095.442,60	(2.058.337.343,80)	(35,65)

5.3.2.1.a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
0,00 **0,00**

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.2.1.b. Pendapatan Diterima Dimuka **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
14.539.727,00 **53.099.087,97**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 14.539.727,00 dan Rp53.099.087,97. Rincian pendapatan diterima di muka sebagai berikut:

Tabel 5.141
Rincian Pendapatan Diterima di Muka

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	0,00	17.149.653,30	(17.149.653,30)	(100,00)
2	Pajak Reklame Kain	0,00	18.491.671,00	(18.491.671,00)	(100,00)
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	0,00	14.539.727,00	(14.539.727,00)	(100,00)
4	Retribusi Pemakaian Alat	0,00	501.370,00	(501.370,00)	(100,00)
6	Pendapatan BLUD	0,00	2.416.666,67	(2.416.666,67)	(100,00)
7	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	14.539.727,00	0,00	14.539.727,00	100,00
	Jumlah	14.539.727,00	53.099.087,97	(38.559.360,97)	(72,62)



Pendapatan Diterima di Muka-Sewa Tanah berasal dari Dinas Kesehatan yang meliputi Puskesmas Rantau Pulut II senilai Rp754.795,00 dan Puskesmas Sandul senilai Rp13.784.932,00.

5.3.2.1.c. Utang Belanja

31 Desember 2023

3.007.828.206,85

31 Desember 2022

5.681.385.631,63

Saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.007.828.206,85 dan Rp5.681.385.631,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.142
Rincian Utang Belanja

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	57.216.532,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.618.985,00
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.218.734.538,45
4	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	22.341.761,56
5	Utang Belanja Barang	99.024.932,00
6	Utang Belanja Jasa	451.041.457,84
7	Utang Belanja Perjalanan Dinas	157.850.000,00
TOTAL		3.007.828.206,85

Rincian utang belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.143
Rincian Utang Belanja pada SKPD

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	1.393.570,00
2	Dinas Kesehatan	1.084.039.618,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang (BLUD)	1.594.663.934,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.013.956,00
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	396.545,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	35.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	367.300,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74.521,00
9	Dinas Sosial	134.170,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.823.541,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Jumlah
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	918.795,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.359.585,00
13	Dinas Perhubungan	8.485.915,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	118.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan	1.655.945,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.959.941,00
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	131.670,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.418.527,00
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	732.277,00
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.032.500,00
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	63.898.790,00
22	Dinas Perikanan	690.405,00
23	Sekretariat Daerah	9.751.430,00
24	Sekretariat DPRD	1.301.120,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	425.530,00
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.283.145,00
27	Badan Pendapatan Daerah	215.454.164,85
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	205.135,00
29	Inspektorat	226.125,00
30	Kecamatan Seruyan Hilir	1.027.588,00
31	Kecamatan Hanau	625.319,00
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	184.145,00
JUMLAH		3.007.828.206,85

5.3.2.1.d. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2023
693.390.164,95

31 Desember 2022
39.610.723,00

Masing masing saldo saldo utang jangka pendek lainnya tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp693.390.164,95 dan Rp39.610.723,00. Utang Janagka Pendek Lainnya yang ada pada Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023 merupakan utang dari pengadaan aset tetap jalan poros Halimaung Jaya di Transmigrasi Unit 3 Kecamatan Seruya Hilir Timur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD yang Sah pada RSUD Kuala Pembuang. Berikut rincian Utang Jangka Pendek Lainnya:



Tabel 5.144
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah	000	39.610.723,00	(39.610.723,00)	(100,00)
2	Utang Pengadaan Aset Tetap	693.390.164,95	0,00	693.390.164,95	100,00
	Jumlah	693.390.164,95	39.610.723,00	653.779.441,95	1650,51

5.3.3

EKUITAS**31 Desember 2022****3.381.887.337.387,71****31 Desember 2022****3.144.144.131.009,49**

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Seruyan. Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.381.887.337.387,71, sedangkan saldo ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.144.144.131.009,49. Terjadi kenaikan sebesar Rp130.946.589.866,42 yang berasal surplus LO sebesar Rp129.497.186.258,48 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dari koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp1.449.403.607,94. Rincian Ekuitas Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.145
Ekuitas

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Ekuitas Awal	3.144.144.131.009,49	3.326.674.125.691,42
Surplus/(Defisit) LO	132.990.156.188,71	2.445.705.724,50
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	104.753.050.189,51	(184.975.700.406,43)
Koreksi Ekuitas Piutang Transfer	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	104.753.050.189,51	(184.975.700.406,43)
Ekuitas Akhir	3.381.887.337.387,71	3.144.144.131.009,49



5.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/ Defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

LO digunakan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, LO menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

LO disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5.4.1	Pendapatan-LO	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		1.253.608.819.872,50	1.039.155.860.530,50

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Seruyan dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.253.608.819.872,50 dan Rp1.039.155.860.530,50 terdiri dari:

Tabel 5.146
Pendapatan – LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah	71.950.576.288,56	64.704.868.576,72	7.245.707.711,84	11,20
Pendapatan Transfer	1.177.982.557.874,12	958.934.320.315,78	219.048.237.558,34	22,84
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	3.675.685.709,82	15.516.671.638,00	(11.840.985.928,18)	(76,31)
Jumlah	1.253.608.819.872,50	1.039.155.860.530,50	214.452.959.342,00	20,64

**5.4.1.a. Pendapatan Asli Daerah - LO****31 Desember 2023****71.950.576.288,56****31 Desember 2022****64.704.868.576,72**

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp71.950.576.288,56 dan Rp64.704.868.576,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.147
Pendapatan Asli Daerah- LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah	16.898.975.464,99	13.406.996.712,97	3.491.978.752,02	26,05
Pendapatan Retribusi Daerah	3.737.384.913,56	3.221.541.931,01	515.842.982,55	16,01
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	81.147.428,96	10.802.806.489,00	(10.721.659.060,04)	(99,25)
Lain-lain PAD Yang Sah	51.233.068.481,05	37.273.523.443,74	13.959.545.037,31	37,45
Jumlah	71.950.576.288,56	64.704.868.576,72	7.245.707.711,84	11,20

5.4.1.a.1. Pendapatan Pajak Daerah -LO**31 Desember 2023****16.898.975.464,99****31 Desember 2022****13.406.996.712,97**

Pendapatan Pajak Daerah adalah Pendapatan-LO yang diperoleh dari Penerimaan pajak daerah yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Seruyan. Sampai dengan 31 Desember 2023, saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp16.898.975.464,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.148
Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pajak Hotel – LO	54.867.400,00	54.443.600,00	423.800,00	0,78
Pajak Restoran – LO	1.334.304.031,00	894.860.094,00	439.443.937,00	49,11
Pajak Hiburan – LO	0,00	10.587.800,00	(10.587.800,00)	(100,00)
Pajak Reklame – LO	159.860.310,80	200.504.316,30	(40.644.005,50)	(20,27)
Pajak Penerangan Jalan – LO	9.709.246.205,19	8.837.667.691,32	871.578.513,87	9,86
Pajak Air Tanah – LO	127.099.457,00	191.653.426,84	(64.553.969,84)	(33,68)
Pajak Sarang Burung Walet – LO	0,00	10.806.250,00	(10.806.250,00)	(100,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	964.066.862,00	952.291.732,51	11.775.129,49	1,24



Pendapatan Pajak Daerah – LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	3.623.278.807,00	1.788.599.394,00	1.834.679.413,00	102,58
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	926.252.392,00	465.582.408,00	460.669.984,00	98,94
JUMLAH	16.898.975.464,99	13.406.996.712,97	3.491.978.752,02	26,05

5.4.1.a.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO**31 Desember 2023****31 Desember 2022****3.737.384.913,56****3.221.541.931,01**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah Pendapatan-LO yang diperoleh dari Penerimaan Retribusi Daerah yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Seruyan sampai dengan 31 Desember 2023, saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp3.737.384.913,56 dan Rp3.221.541.931,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.149
Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	531.743.000,00	1.049.459.550,00	(517.716.550,00)	(49,33)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	17.805.000,00	10.455.000,00	7.350.000,00	70,30
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	313.020.000,00	307.547.000,00	5.473.000,00	1,78
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	98.220.250,00	95.898.250,00	2.322.000,00	2,42
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	125.310.000,00	172.660.000,00	(47.350.000,00)	(27,42)
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang- LO	69.755.000,00	79.995.000,00	(10.240.000,00)	(12,80)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi- LO	549.226.316,00	192.774.793,00	356.451.523,00	184,91
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	545.638.751,70	574.582.354,03	(28.943.602,33)	(5,04)
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	0,00	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan- LO	35.390.500,00	47.802.000,00	(12.411.500,00)	(25,96)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	179.440.000,00	192.035.000,00	(12.595.000,00)	(6,56)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan- LO	1.260.836.095,86	494.989.623,98	765.846.471,88	154,72
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO	0,00	2.843.360,00	(2.843.360,00)	(100,00)
Jumlah	3.737.384.913,56	3.221.541.931,01	515.842.982,55	16,01



5.4.1.a.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
81.147.428,96 **10.802.806.489,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sampai 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp81.147.428,96 dan Rp10.802.806.489,00 merupakan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Seruyan pada JAMKRIDA. Rincian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.150
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN – JAMKRIDA	81.147.428,96	0,00	81.147.428,96	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – Bank Kalteng	0,00	10.802.806.489,00	(10.802.806.489,00)	(100,00)
Jumlah	81.147.428,96	10.802.806.489,00	(10.721.659.060,04)	(99,25)

Salah satu faktor penghambat menurunnya kinerja pendapatan daerah adalah dikarenakan Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 hanya bersumber dari deviden Jamkrida. Penurunan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023, dikarenakan tidak disalurkannya deviden Bank Kalteng kepada Pemda disebabkan karena adanya Peraturan OJK Nomor 12/PJOK.03/2022 tentang Konsolidasi Bank Umum, terkait modal inti minimum (MIM) Rp3.000.000.000.000,00 dimana ada 37 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan Bank Milik Pemerintah Daerah yang memiliki modal inti kurang dari Rp3.000.000.000,00, sejumlah Bank telah melakukan tambahan setoran modal pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB), penggabungan, pengambilalihan, maupun mengundang mitra strategis.

Dari hasil rapat RUPS pemegang saham Bank Kalteng diambil keputusan untuk melakukan beberapa hal antara lain, mempercepat realisasi komitmen modal dasar sebesar Rp3,5 Triliun sesuai dengan RUPS dan modal disetor sesuai dengan masing-masing peraturan daerah serta meningkatkan porsi cadangan modal atau mengurangi porsi deviden atas laba Bank Kalteng guna mendukung pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp3 Triliun sebelum 31 Desember 2024.

**5.4.1.a.4. Lain-lain PAD yang Sah - LO****31 Desember 2023****51.233.068.481,05****31 Desember 2022****37.273.523.443,74**

Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp51.233.068.481,05 dan Rp37.273.523.443,74 terdiri dari:

Tabel 5.151
Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD Yang Sah – LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	1.659.728.815,00	(1.659.728.815,00)	(100,00)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	568.830.388,59	473.320.274,57	95.510.114,02	20,18
Jasa Giro-LO	4.905.014.263,00	4.129.153.576,36	775.860.686,64	18,79
Pendapatan Bunga-LO	0,00	7.449.277,10	(7.449.277,10)	(100,00)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	(2.290.330,82)	0,00	(2.290.330,82)	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	129.330.399,49	81.481.046,41	47.849.353,08	58,72
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	1.065.441,06	1.407.991,66	(342.550,60)	(24,33)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	3.317.030.138,01	2.584.690.192,19	732.339.945,82	28,33
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	167.529.929,15	253.504.193,45	(85.974.264,30)	(33,91)
Pendapatan dari Pengembalian-LO	839.625.186,67	716.856.932,00	122.768.254,67	17,13
Pendapatan BLUD – LO	41.314.382.343,00	27.366.630.973,00	13.947.751.370,00	50,97
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	0,00	(699.828,00)	699.828,00	(100,00)
Remunerasi-LO	(7.449.277,10)	0,00	(7.449.277,10)	0,00
JUMLAH	51.233.068.481,05	37.273.523.443,74	13.959.545.037,31	37,45

5.4.1.b Pendapatan Transfer LO**31 Desember 2023****1.177.982.557.874,12****31 Desember 2022****958.934.320.315,78**

Pendapatan Transfer-LO adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer-LO untuk periode Tahun 2023



sebesar Rp1.177.982.557.874,12 dan untuk periode tahun 2022 terealisasi sebesar Rp958.934.320.315,78 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.152
Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.113.256.655.601,00	900.018.331.487,00	213.238.324.114,00	23,69
Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil-LO	64.725.902.273,12	0,00	64.725.902.273,12	0,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	0,00	9.687.181.000,00	(9.687.181.000,00)	(100,00)
Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	49.228.807.828,78	(49.228.807.828,78)	(100,00)
Jumlah	1.177.982.557.874,12	958.934.320.315,78	219.048.237.558,34	22,84

5.4.1.b.1 Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan-LO

31 Desember 2023 31 Desember 2022
1.113.256.655.601,00 900.018.331.487,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-LO Kabupaten Seruyan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp1.113.256.655.601,00 dan untuk periode Tahun 2022 sebesar Rp900.018.331.487,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.153
Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	55.546.371.251,00	69.566.378.292,00	(14.020.007.041,00)	(20,15)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	83.910.770.923,00	66.732.157.617,00	17.178.613.306,00	25,74
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	580.006.640.427,00	559.137.113.257,00	20.869.527.170,00	3,73
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	393.792.873.000,00	204.582.682.321,00	189.210.190.679,00	92,49
Jumlah	1.113.256.655.601,00	900.018.331.487,00	213.238.324.114,00	23,69



5.4.1.b.1.1 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

31 Desember 2023
55.546.371.251,00

31 Desember 2022
69.566.378.292,00

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp55.546.371.251,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp69.566.378.292,00 terdiri dari:

Tabel 5.154
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	733.664.510,00	1.309.653.600,00	(575.989.090,00)	(43,98)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD- LO	9.797.862.400,00	10.020.634.800,00	(222.772.400,00)	(2,22)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP- LO	16.754.942.046,00	6.638.925.800,00	10.116.016.246,00	152,37
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	0,00	361.565.333,00	(361.565.333,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	2.106.259.092,00	(2.106.259.092,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	0,00	798.372.450,00	(798.372.450,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	18.268.780.000,00	12.384.280.000,00	5.884.500.000,00	47,52
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan- LO	0,00	5.734.034.500,00	(5.734.034.500,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan- LO	0,00	4.600.821.000,00	(4.600.821.000,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	0,00	12.587.696.845,00	(12.587.696.845,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	7.780.901.950,00	0,00	7.780.901.950,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	2.083.901.100,00	11.243.090.200,00	(9.159.189.100,00)	(81,47)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan	126.319.245,00	733.244.672,00	(606.925.427,00)	(82,77)



Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO				
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya- LO	0,00	1.047.800.000,00	(1.047.800.000,00)	(100,00)
Jumlah	55.546.371.251,00	69.566.378.292,00	(14.020.007.041,00)	(20,15)

5.4.1.b.1.2 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LO

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
83.910.770.923,00 **66.732.157.617,00**

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp83.910.770.923,00 dan Rp66.732.157.617,00 terdiri dari:

Tabel 5.155
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	27.974.951.775,00	26.336.140.507,00	1.638.811.268,00	6,22
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.592.500.000,00	60.000.000,00	1.532.500.000,00	2554,17
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	29.451.060.000,00	26.477.428.555,00	2.973.631.445,00	11,23
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.455.937.000,00	1.087.287.500,00	368.649.500,00	33,91
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	3.162.332.449,00	5.663.974.445,00	(2.501.641.996,00)	(44,17)
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	3.246.045.000,00	3.058.467.000,00	187.578.000,00	6,13
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan-LO	890.631.350,00	607.800.000,00	282.831.350,00	46,53
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	12.988.133.657,00	2.633.627.000,00	10.354.506.657,00	393,17
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	2.402.718.160,00	0,00	2.402.718.160,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal – LO	453.704.732,00	391.242.610,00	62.462.122,00	15,97



Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian – LO	247.756.800,00	416.190.000,00	(168.433.200,00)	(40,47)
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
Jumlah	83.910.770.923,00	66.732.157.617,00	17.178.613.306,00	25,74

5.4.1.b.1.3 Dana Alokasi Umum

31 Desember 2023
580.006.640.427,00

31 Desember 2022
559.137.113.257,00

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Pemerintah Kabupaten Seruyan merupakan pendapatan Transfer-LO berupa Dana Alokasi Umum-LO dari Pemerintah Pusat yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Seruyan. DAU-LO pada tahun 2023 sebesar Rp580.006.640.427,00 dan 2022 sebesar Rp559.137.113.257,00. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.156
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	580.006.640.427,00	559.137.113.257,00	20.869.527.170,00	3,73
Jumlah	580.006.640.427,00	559.137.113.257,00	20.869.527.170,00	3,73

5.4.1.b.1.4 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) –LO

31 Desember 2023
393.792.873.000,00

31 Desember 2022
204.582.682.321,00

Pendapatan dari Bagi Hasil Pemerintah Pusat-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp393.792.873.000,00 dan Rp204.582.682.321,00 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.157
Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH) – LO

Dana Bagi Hasil – LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bagi Hasil pajak	67.731.615.000,00	103.255.248.492,00	(35.523.633.492,00)	(34,40)
Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	326.061.258.000,00	101.327.433.829,00	224.733.824.171,00	221,79
Jumlah	393.792.873.000,00	204.582.682.321,00	189.210.190.679,00	92,49

**5.4.1.b.1.4.a Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak -LO****31 Desember 2023****67.731.615.000,00****31 Desember 2022****103.255.248.492,00**

Pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp67.731.615.000,00 dan Rp103.255.248.492,00 terdiri dari:

Tabel 5.158
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak – LO

Bagi Hasil Pajak – LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
DBH PBB-LO	60.987.723.000,00	67.925.886.884,00	(6.938.163.884,00)	(10,21)
DBH PPh Pasal 21-LO	6.714.307.000,00	35.271.513.608,00	(28.557.206.608,00)	(80,96)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	29.585.000,00	57.848.000,00	(28.263.000,00)	(48,86)
Jumlah	67.731.615.000,00	103.255.248.492,00	(35.523.633.492,00)	(34,40)

5.4.1.b.1.4.b Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO**31 Desember 2023****326.061.258.000,00****31 Desember 2022****101.327.433.829,00**

Pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Pusat-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp326.061.258.000,00 dan Rp101.327.433.829,00 terdiri dari:

Tabel 5.159
Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
DBH SDA Minyak Bumi-LO	27.193.000,00	19.496.000,00	7.697.000,00	39,48
DBH SDA Gas Bumi-LO	0,00	184.534.000,00	(184.534.000,00)	(100,00)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	39.229.000,00	301.701.000,00	(262.472.000,00)	(87,00)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty -LO	278.168.534.000,00	82.973.581.829,00	195.194.952.171,00	235,25
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	45.467.978.000,00	15.889.810.000,00	29.578.168.000,00	186,15
DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	231.485.000,00	0,00	231.485.000,00	0,00
DBH SDA Perikanan-LO	2.126.839.000,00	1.958.311.000,00	168.528.000,00	8,61
Jumlah	326.061.258.000,00	101.327.433.829,00	224.733.824.171,00	221,79



5.4.1.b.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		0,00	9.687.181.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Kabupaten Seruyan untuk periode tahun 2023 terealisasi sebesar Rp0,00 dan untuk periode tahun 2022 terealisasi sebesar Rp9.687.181.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.160
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Dana Insentif Daerah	0,00	9.687.181.000,00	(9.687.181.000,00)	(100,00)
Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	9.687.181.000,00	(9.687.181.000,00)	(100,00)

5.4.1.b.2.1	Dana Insentif Daerah (DID) – LO	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		0,00	9.687.181.000,00

Pendapatan Transfer Dana Insentif Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Seruyan periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp. 9.687.181.000,00.

5.4.1.b.2.2	Dana Desa - LO	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		0,00	0,00

Pendapatan Penyesuaian Dana Desa - LO Pemerintah Kabupaten Seruyan periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.1.b.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		64.725.902.273,12	49.228.807.828,78

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Pendapatan Bagi Hasil untuk periode tahun 2023 terealisasi sebesar Rp64.725.902.273,12 dan untuk periode tahun 2022 terealisasi sebesar Rp49.228.807.828,78.

5.4.1.b.3.1	Pendapatan Bagi Hasil - LO	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		64.725.902.273,12	49.228.807.828,78

Pendapatan Bagi Hasil-LO Pemerintah Kabupaten Seruyan periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp64.725.902.273,12 dan Rp49.228.807.828,78 yang merupakan pendapatan Transfer-LO berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.161
Pendapatan Bagi Hasil – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Pendapatan Bagi Hasil - LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	8.692.125.644,16	6.194.091.347,80	2.498.034.296,36	40,33
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	10.131.581.317,67	7.209.345.677,57	2.922.235.640,10	40,53
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	29.763.018.356,23	26.735.567.397,98	3.027.450.958,25	11,32
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	7.531.780.232,06	144.409.218,43	7.387.371.013,63	5115,58
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	8.607.396.723,00	8.945.394.187,00	(337.997.464,00)	(3,78)
Jumlah	64.725.902.273,12	49.228.807.828,78	15.497.094.444,34	31,48

5.4.1.b.3.2 Bantuan Keuangan-LO

31 Desember 2023

31 Desember 2022

0,00

0,00

Pendapatan Bantuan Keuangan-LO Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.1.c Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

31 Desember 2023

31 Desember 2022

3.675.685.709,82

15.516.671.638,00

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.675.685.709,82 dan Rp15.516.671.638,00 merupakan Pendapatan dari pendapatan hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.162
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah – LO	3.675.685.709,82	10.621.259.263,00	(6.945.573.553,18)	(65,39)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO	0,00	4.895.412.375,00	(4.895.412.375,00)	(100,00)
Jumlah	3.675.685.709,82	15.516.671.638,00	(11.840.985.928,18)	(76,31)

**5.4.1.c.1. Pendapatan Hibah-LO****31 Desember 2023****3.675.685.709,82****31 Desember 2022****10.621.259.263,00**

Pendapatan Hibah Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp3.675.685.709,82 dan Rp10.621.259.263,00 dimana rincian pendapatan hibah tersebut sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.163
Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah-LO	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.885.810.110,00	7.032.584.500,00	(5.146.774.390,00)	(73,18)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	1.789.875.599,82	2.609.758.013,00	(819.882.413,18)	(31,42)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri	0,00	978.916.750,00	(978.916.750,00)	(100,00)
Jumlah	3.675.685.709,82	10.621.259.263,00	(6.945.573.553,18)	(65,39)

5.4.1.c.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO**31 Desember 2023****0,00****31 Desember 2022****4.895.412.375,00**

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp4.895.412.375,00 merupakan pendapatan hibah dana BOS dan FKTP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.164
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah Dana JKN	0,00	4.895.412.375,00	(4.895.412.375,00)	(100)
Jumlah	0,00	4.895.412.375,00	(4.895.412.375,00)	(100)

5.4.2 Beban**31 Desember 2023****1.118.259.586.403,79****31 Desember 2022****1.033.960.754.457,00**

Beban-LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan di Daerah Kabupaten Seruyan. Beban terdiri dari Beban Operasional, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Tak Terduga. Realisasi dalam



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

tahun 2023 sebesar Rp1.118.259.586.403,79 dan tahun 2022 sebesar Rp1.033.960.754.457,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.165
Beban

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Pegawai	363.531.609.007,87	359.371.179.349,68	4.160.429.658,19	1,16
Beban Persediaan	51.543.248.627,13	55.268.733.963,75	(3.725.485.336,62)	(6,74)
Beban Jasa	191.639.234.597,33	139.845.549.437,17	51.793.685.160,16	37,04
Beban Pemeliharaan	14.282.326.427,67	11.170.231.934,00	3.112.094.493,67	27,86
Beban Perjalanan Dinas	84.794.436.356,70	62.942.748.932,87	21.851.687.423,83	34,72
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	9.822.401.560,00	(9.822.401.560,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	15.305.036.556,19	(15.305.036.556,19)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	17.523.288.715,11	(17.523.288.715,11)	(100,00)
Beban Subsidi	1.999.999.670,00	1.999.996.003,00	3.667,00	0,00
Beban Hibah	93.819.002.582,19	38.218.507.606,00	55.600.494.976,19	145,48
Beban Bantuan Sosial	9.986.539.800,00	18.173.910.800,00	(8.187.371.000,00)	(45,05)
Beban Penyisihan Piutang	698.784.792,08	-602.488.405,60	1.301.273.197,68	(215,98)
Beban Lain-lain	2.989.603.045,86	3.401.826.528,89	(412.223.483,03)	(12,12)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	219.438.807.018,96	226.541.010.683,94	(7.102.203.664,98)	(3,14)
Beban Transfer	83.535.994.478,00	74.978.820.792,00	8.557.173.686,00	11,41
Jumlah Beban	1.118.259.586.403,79	1.033.960.754.457,00	84.298.831.946,79	8,15

5.4.2.a. Beban Pegawai

31 Desember 2023

363.531.609.007,87

31 Desember 2022

359.371.179.349,68

Beban Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 tercatat sebesar Rp363.531.609.007,87 dan Rp359.371.179.349,68 dimana beban pegawai tersebut terdiri dari:



Tabel 5.166
Beban Pegawai

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	200.982.493.941,00	197.811.921.491,00	3.170.572.450,00	1,60
Beban Tambahan Penghasilan ASN	120.479.983.784,98	124.543.129.241,00	(4.063.145.456,02)	(3,26)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.525.708.607,00	4.995.749.263,33	6.529.959.343,67	130,71
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.228.551.058,00	12.273.808.158,00	(45.257.100,00)	(0,37)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	241.043.879,00	266.391.028,35	(25.347.149,35)	(9,52)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.505.092,00	601.600.000,00	(94.908,00)	(0,02)
Beban Pegawai BLUD	17.472.322.645,89	18.878.580.168,00	(1.406.257.522,11)	(7,45)
Jumlah Beban Pegawai	363.531.609.007,87	359.371.179.349,68	4.160.429.658,19	1,16

5.4.2.b.

Beban Persediaan**31 Desember 2023****51.543.248.627,13****31 Desember 2022****55.268.733.963,75**

Beban persediaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dan tercatat sebesar Rp51.543.248.627,13 dan Rp55.268.733.963,75.

Rincian jenis Beban Persediaan tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 5.167
Beban Persediaan

No	Nama Persediaan	Persediaan per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	342.466.065,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.046.472.778,21
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.903.462.186,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	179.792.500,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	812.763.500,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	66.818.349,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	66.655.000,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	4.500.000,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	850.119.015,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Nama Persediaan	Persediaan per 31 Desember 2023 (Rp)
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	341.029.560,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	205.113.000,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	125.991.304,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.200.000,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	300.000,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.577.937.241,50
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.903.890.951,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.007.659.071,12
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	684.988.800,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	8.150.000,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	761.217.977,32
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.525.992.431,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.295.959.016,40
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	(1.820.136.298,00)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	568.614.811,50
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.107.890.302,00
26	Beban Obat-Obatan-Obat	2.450.032.034,18
27	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	(455.707.081,03)
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	(7.506.230.139,57)
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.204.080.814,00
30	Beban Natura dan Pakan-Natura	4.434.839.886,50
31	Beban Natura dan Pakan-Pakan	75.783.000,00
32	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	(117.459.300,00)
33	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.766.951.347,00
34	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.804.662.540,00
35	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.750.627.000,00
36	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.595.026.505,00
37	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	74.703.000,00
38	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	128.149.500,00
39	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	43.956.000,00
40	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.128.881.345,00



No	Nama Persediaan	Persediaan per 31 Desember 2023 (Rp)
41	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	790.029.033,00
42	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	15.722.000,00
43	Beban Pakaian Penyelamatan	2.205.328.125,00
44	Beban Pakaian Teknik	46.549.972,00
45	Beban Pakaian Kerja Bengkel	120.546.000,00
46	Beban Pakaian KORPRI	287.024.027,00
47	Beban Pakaian Adat Daerah	198.153.725,00
48	Beban Pakaian Batik Tradisional	1.224.670.614,00
49	Beban Pakaian Olahraga	3.465.305.607,00
50	Beban Pakaian Paskibraka	240.775.512,00
Total		51.543.248.627,13

5.4.2.c.	Beban Jasa	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		191.639.234.597,33	139.845.549.437,17

Beban Jasa merupakan beban Jasa untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp191.639.234.597,33 dan Rp139.845.549.437,17.

Rincian jenis Beban Jasa tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 5.168
Beban Jasa

No	Nama Beban Jasa	Beban Jasa per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.058.175.000,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.951.910.000,00
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	6.000.000,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.062.290.000,00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	1.402.700.000,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	68.260.000,00
7	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	240.500.000,00
8	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	15.335.950.000,00
9	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	18.674.271.199,00
10	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	186.863.300,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Nama Beban Jasa	Beban Jasa per 31 Desember 2023 (Rp)
11	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	585.645.000,00
12	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	891.100.000,00
13	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.190.375.000,00
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.552.875.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	183.000.000,00
16	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	541.393.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Administrasi	23.741.300.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	248.784.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Ahli	860.650.000,00
20	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	9.671.617.500,00
21	Beban Jasa Tenaga Keamanan	8.699.387.500,00
22	Beban Jasa Tenaga Supir	3.377.612.500,00
23	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	349.300.000,00
24	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	477.200.000,00
25	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	135.900.000,00
26	Beban Jasa Tata Rias	115.994.000,00
27	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	154.000.000,00
28	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	29.900.000,00
29	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	360.000,00
30	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	80.000.000,00
31	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	136.190.050,00
32	Beban Jasa Kalibrasi	246.218.110,00
33	Beban Jasa Pengolahan Sampah	11.400.000,00
34	Beban Jasa Pengukuran Tanah	22.362.220,00
35	Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	24.850.000,00
36	Beban Tagihan Telepon	(3.145.492,00)
37	Beban Tagihan Air	424.069.774,00
38	Beban Tagihan Listrik	4.240.171.285,00
39	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.789.652.156,00
40	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.670.915.755,00
41	Beban Paket/Pengiriman	38.704.100,00
42	Beban Registrasi/Keanggotaan	10.000.000,00
43	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	757.901.023,85



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Nama Beban Jasa	Beban Jasa per 31 Desember 2023 (Rp)
44	Beban Lembur	1.088.834.000,00
45	Beban Medical Check Up	207.900.000,00
46	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.033.950.688,00
47	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	15.022.665.000,00
48	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.283.800.000,00
49	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	294.409.459,00
50	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	391.786.550,00
51	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	40.454.595,33
52	Beban Sewa Excavator	494.617.500,00
53	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	615.677.000,00
54	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.200.000,00
55	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	366.000.000,00
56	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	64.650.000,00
57	Beban Sewa Mebel	2.193.000,00
58	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	151.753.750,00
59	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00
60	Beban Sewa Peralatan Cetak	60.023.250,00
61	Beban Sewa Peralatan Jaringan	90.909.611,00
62	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	74.259.000,00
63	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.000.000,00
64	Beban Sewa Bangunan Gudang	25.000.000,00
65	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	153.308.600,00
66	Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	18.000.000,00
67	Beban Sewa Bangunan Terbuka	69.100.000,00
68	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	123.900.000,00
69	Beban Sewa Hotel	644.658.000,00
70	Beban Sewa Flat/Rumah Susun	44.720.000,00
71	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	42.500.000,00
72	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	264.400.000,00
73	Beban Sewa Jaringan Listrik Lainnya	3.500.000,00
74	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	39.582.000,00
75	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	(159.727.190,00)



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Nama Beban Jasa	Beban Jasa per 31 Desember 2023 (Rp)
76	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	(5.966.250,00)
77	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	90.917.455,00
78	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00
79	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	485.660.777,00
80	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	733.344.000,00
81	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	459.245.310,00
82	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	20.542.770,00
83	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.027.803.390,00
84	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	13.237.860,00
85	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	231.164.744,00
86	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	214.008.000,00
87	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	9.444.000,00
88	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	395.826.000,00
89	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.095.514.500,00
90	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	99.345.000,00
91	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	305.899.200,00
92	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.199.466.780,00
93	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	68.430.000,00
94	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.232.913.346,00
95	Beban Bimbingan Teknis	2.424.734.300,00
96	Beban Diklat Kepemimpinan	809.745.000,00
97	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	432.150.000,00
98	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.155.970.894,00
99	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	224.500.000,00
100	Beban Barang dan Jasa BOS	16.339.251.411,00
101	Beban Barang dan Jasa BLUD	19.772.459.316,15
Total		191.639.234.597,33

5.4.2.d. **Beban Pemeliharaan****31 Desember 2023**
14.282.326.427,67**31 Desember 2022**
11.170.231.934,00

Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp14.282.326.427,67 dan Rp11.170.231.934,00.

Rincian jenis Beban Pemeliharaan tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 5.169
Beban Pemeliharaan

No	Nama Beban Pemeliharaan	Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	63.042.600,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	39.795.000,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.672.030.110,67
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.344.739.439,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	53.900.584,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	865.344.420,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	95.770.000,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	11.135.000,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	70.140.000,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	54.845.000,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	80.961.750,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	83.395.700,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	13.200.000,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	15.054.000,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	509.576.627,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	67.945.000,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	24.999.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Nama Beban Pemeliharaan	Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 (Rp)
18	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	4.980.000,00
19	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	521.811.273,00
20	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	23.930.000,00
21	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	279.856.965,00
22	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	86.450.000,00
23	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.761.452.514,00
24	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	38.736.000,00
25	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	10.500.000,00
26	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00
27	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0,00
28	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	107.900.000,00
29	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	469.750.000,00
30	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	59.800.000,00
31	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	65.400.000,00
32	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	13.062.000,00
33	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	197.750.000,00
34	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	199.400.000,00
35	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	175.400.000,00
36	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	2.192.745.998,00
37	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.007.527.447,00
Total		14.282.326.427,67

5.4.2.e.

Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2023

84.794.436.356,70

31 Desember 2022

62.942.748.932,87

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban Perjalanan Dinas untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di



lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp84.794.436.356,70 dan Rp62.942.748.932,87. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 pada SKPD di Kabupaten Seruyan disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.170
Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Beban (Rp)
01	Dinas Pendidikan	6.069.487.259,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.603.604.333,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.088.536.926,00
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	377.346.000,00
02	Dinas Kesehatan	7.631.543.849,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.517.360.338,00
	Beban Perjalanan Dinas Tetap	2.945.744.304,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.168.439.207,00
03	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.119.657.553,50
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.832.816.753,50
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.286.840.800,00
04	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	1.719.156.542,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.145.356.042,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	573.800.500,00
05	Satuan Polisi Pamong Praja	536.278.002,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	282.900.447,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	253.377.555,00
06	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	732.783.534,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	404.140.181,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	328.643.353,00
07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.679.340.561,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	769.524.561,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	689.816.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	220.000.000,00
08	Dinas Sosial	2.003.410.553,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	779.037.753,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.224.372.800,00
09	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.711.750.108,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.366.577.408,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	345.172.700,00



No	Uraian	Beban (Rp)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.005.829.241,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	752.387.341,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	229.216.900,00
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24.225.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.195.868.017,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.603.013.931,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	592.854.086,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	834.204.230,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	464.845.450,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	369.358.780,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.426.915.848,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.426.338.643,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.577.205,00
14	Dinas Perhubungan	707.062.138,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	649.172.138,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.890.000,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	971.044.874,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	921.520.114,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.524.760,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	4.123.482.257,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.603.990.063,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	519.492.194,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	984.710.896,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	788.238.736,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	196.472.160,00
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan	1.310.408.900,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.165.616.200,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	144.792.700,00
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	597.119.454,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	390.843.684,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	206.275.770,00
20	Dinas Perikanan	873.050.720,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	480.858.220,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	392.192.500,00
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.680.845.859,00



No	Uraian	Beban (Rp)
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.103.668.443,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	577.177.416,00
22	Sekretariat Daerah	8.069.524.533,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.199.172.770,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	870.351.763,00
23	Inspektorat Daerah	2.862.209.418,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.090.403.518,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.771.805.900,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.567.064.849,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.463.858.749,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	103.206.100,00
25	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	3.222.757.690,20
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.024.705.990,20
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	198.051.700,00
26	Badan Pendapatan Daerah	2.469.143.076,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.799.076.634,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	506.671.442,00
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	163.395.000,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.844.809.650,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.692.724.750,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	152.084.900,00
28	Sekretariat DPRD	9.099.832.842,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.948.904.241,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.150.928.601,00
29	Kecamatan Seruyan Hilir	713.744.503,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	214.905.853,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	498.838.650,00
30	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	304.981.255,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	170.991.255,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	133.990.000,00
31	Kecamatan Danau Sembuluh	477.321.124,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	179.324.624,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	297.996.500,00
32	Kecamatan Seruyan Raya	470.316.212,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	237.414.012,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Beban (Rp)
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	232.902.200,00
33	Kecamatan Danau Seluluk	425.778.230,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	119.833.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	305.945.230,00
34	Kecamatan Hanau	356.173.544,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	96.663.044,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	259.510.500,00
35	Kecamatan Batu Ampar	430.683.999,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	185.713.099,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	244.970.900,00
36	Kecamatan Seruyan Tengah	667.793.475,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	217.999.623,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	449.793.852,00
37	Kecamatan Seruyan Hulu	525.485.723,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	115.494.923,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	409.990.800,00
38	Kecamatan Suling Tambun	288.515.791,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	27.946.791,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	260.569.000,00
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.084.350.047,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	625.725.547,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	458.624.500,00
Jumlah		84.794.436.356,70

5.4.2.f. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
0,00 **9.822.401.560,00**

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp9.822.401.560,00.

5.4.2.g. Beban Barang dan Jasa BOS **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
0,00 **15.305.036.556,19**

Beban Barang dan Jasa BOS untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp15.305.036.556,19.



5.4.2.h.	Beban Barang dan Jasa BLUD	<u>31 Desember 2023</u> 0,00	<u>31 Desember 2022</u> 17.523.288.715,11
-----------------	---------------------------------------	---	--

Beban Barang dan Jasa BLUD untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp17.523.288.715,11.

5.4.2.i.	Beban Bunga	<u>31 Desember 2023</u> 0,00	<u>31 Desember 2022</u> 0,00
-----------------	--------------------	---	---

Beban Bunga merupakan beban Bunga untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.2.j.	Beban Subsidi	<u>31 Desember 2023</u> 1.999.999.670,00	<u>31 Desember 2022</u> 1.999.996.003,00
-----------------	----------------------	---	---

Beban Subsidi merupakan beban subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.999.999.670,00 dan Rp1.999.996.003,00.

5.4.2.k.	Beban Hibah	<u>31 Desember 2023</u> 93.819.002.582,19	<u>31 Desember 2022</u> 38.218.507.606,00
-----------------	--------------------	--	--

Beban Hibah merupakan beban Hibah untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp93.819.002.582,19 dan Rp38.218.507.606,00. Beban Hibah merupakan Beban Bantuan hibah barang untuk diserahkan ke masyarakat atau pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.171
Beban Hibah

No	SKPD	Beban Hibah uang kepada Pemerintah Pusat	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.709.295.180,00	83.028.000,00	0,00	0,00	0,00	708.696.928,00	0,00	630.217.000,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	14.198.229.234,57	0,00	0,00	17.672.683.906,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Perhubungan	0,00	186.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	446.718.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RSUD Hanau	0,00	0,00	0,00	7.743.050.717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.842.278,00	0,00	11.037.885.512,00	0,00	45.000.000,00
7	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	216.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.017.028,00	0,00	0,00	0,00	2.564.900.000,00
12	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	720.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.635.165,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.207.000,00
15	Kecamatan Seruyan Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.725.000,00
JUMLAH		17.709.295.180,00	14.467.637.234,57	446.718.632,50	7.743.050.717,43	33.859.034.212,69	4.291.332.093,00	11.037.885.512,00	630.217.000,00	3.633.832.000,00
Total Hibah			93.819.002.582,19							

**5.4.2.l. Beban Bantuan Sosial****31 Desember 2023**
9.986.539.800,00**31 Desember 2022**
18.173.910.800,00

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Bantuan Sosial untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp9.986.539.800,00 dan Rp18.173.910.800,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 pada SKPD di Kabupaten Seruyan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.172
Beban Bantuan Sosial

No	SKPD	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (Rp)	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu (Rp)	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga (Rp)
1	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	739.988.000,00	0,00	2.515.000.000,00
2	Dinas Sosial	1.800.000.000,00	84.895.000,00	0,00
3	Sekretariat Daerah	4.688.000.000,00	0,00	0,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	126.489.300,00	0,00
5	Kecamatan Seruyan Hilir	0,00	32.167.500,00	0,00
J U M L A H		7.227.988.000,00	243.551.800,00	2.515.000.000,00

5.4.2.m. Beban Penyisihan Piutang**31 Desember 2023**
698.784.792,08**31 Desember 2022**
(602.488.405,60)

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban Penyisihan Piutang untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp698.784.792,08 dan Rp(602.488.405,60). Beban Penyisihan Piutang merupakan pencatatan atas estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian beban Penyisihan piutang sebagai berikut:

Tabel 5.173
Beban Penyisihan Piutang

Uraian Beban Penyisihan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	686.811.926,54	(547.786.045,96)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	887.644,01	(48.614.406,42)
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah	11.871.715,38	(6.110.408,22)



Uraian Beban Penyisihan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(1.187.451,31)	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	400.957,46	22.455,00
Jumlah	698.784.792,08	(602.488.405,60)

Berdasarkan PMK No. 270/PMK.05/2014 pada Beban Penyisihan Piutang dimungkinkan bersaldo negatif. Hal ini dikarenakan adanya penurunan saldo Penyisihan Piutang yang mempengaruhi nilai Beban Penyisihan.

5.4.2.n.	Beban Lain Lain	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		2.989.603.045,86	3.401.826.528,89

Beban Lain-lain per 31 Desember 2023 Rp 2.989.603.045,86 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.174
Beban Lain-lain

No	SKPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.852.114.036,86
2	Dinas Kesehatan	158.589.159,00
3	RSUD Kuala Pembuang	500.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	14.998.200,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	36.628.200,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	18.991.400,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	65.831.450,00
8	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	3.680.000,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	128.190.000,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	6.000.000,00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	2.250.000,00
12	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12.942.600,00
13	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	106.175.000,00
14	Sekretariat Daerah	261.520.500,00
15	Sekretariat DPRD	31.635.000,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.500.000,00
17	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	87.853.500,00
18	Badan Pendapatan Daerah	5.760.000,00
19	Kecamatan Seruyan Hilir	57.178.000,00
20	Kecamatan Suling Tambun	68.066.000,00



No	SKPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)
21	Kecamatan Batu Ampar	6.993.000,00
22	Kecamatan Seruyan Tengah	62.207.000,00
Jumlah		2.989.603.045,86

5.4.2.o.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	<u>31 Desember 2023</u> 219.438.807.018,96	<u>31 Desember 2022</u> 226.541.010.683,94
----------	---------------------------------	---	---

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp219.438.807.018,96 dan Rp226.541.010.683,94.

Rincian Beban Penyusutan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.175
Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian Beban Penyusutan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	48.184.811.711,72	51.312.625.161,94	(3.127.813.450,22)	(6,10)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.914.160.219,00	18.342.557.784,00	2.571.602.435,00	14,02
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	144.576.339.315,24	156.134.063.480,00	(11.557.724.164,76)	(7,40)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.005.397.664,00	0,00	5.005.397.664,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	758.098.109,00	751.764.258,00	6.333.851,00	0,84
Jumlah	219.438.807.018,96	226.541.010.683,94	(7.102.203.664,98)	(3,14)

5.4.2.p.	Beban Transfer	<u>31 Desember 2023</u> 83.535.994.478,00	<u>31 Desember 2022</u> 74.978.820.792,00
----------	----------------	--	--

Jumlah Beban Transfer pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp83.535.994.478,00 dan Rp74.978.820.792,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.176
Beban Transfer

Beban Transfer	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.383.326.952,00	1.479.323.792,00	(95.996.840,00)	(6,49)
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	343.846.578,00	485.000.000,00	(141.153.422,00)	(29,10)



Beban Transfer	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	245.000.000,00	0,00	245.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	81.563.820.948,00	73.014.497.000,00	8.549.323.948,00	11,71
Jumlah	83.535.994.478,00	74.978.820.792,00	8.557.173.686,00	11,41

5.4.3 Kegiatan Non Operasional **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
(613.409.387,00) **(1.391.820.203,00)**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp613.409.387,00) dan (Rp1.391.820.203,00).

5.4.3.a Surplus Non Operasional **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
0,00 **0,00**

Surplus Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan surplus dari penyertaan modal pada PDAM.

5.4.3.b Defisit Non Operasional **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
613.409.387,00 **1.391.820.203,00**

Defisit Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp613.409.387,00 dan Rp1.391.820.203,00. Defisit Non Operasional tahun 2023 merupakan kerugian atas penyertaan modal di PDAM

5.4.4. Pos Tak Terduga **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
(732.657.783,00) **(1.357.580.146,00)**

Pos Tak Terduga terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Tak Terduga untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (732.657.783,00) dan (Rp1.357.580.146,00).



5.4.4.a	Pendapatan Tak Terduga	<u>31 Desember 2023</u> 0,00	<u>31 Desember 2022</u> 0,00
----------------	-------------------------------	---	---

Pendapatan Tak Terduga untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.4.4.b	Beban Tak Terduga	<u>31 Desember 2023</u> 732.657.783,00	<u>31 Desember 2022</u> 1.357.580.146,00
----------------	--------------------------	---	---

Beban Tak Terduga untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp732.657.783,00 dan Rp1.357.580.146,00. Rincian Beban Tak Terduga sebagai berikut:

Tabel 5.177
Rincian Beban Tak Terduga

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Uang Santunan Duka Cita	487.500.000,00
2	Bantuan Uang Santunan Korban Kebakaran	94.000.000,00
3	Bantuan Berobat Masyarakat Tidak Mampu	151.157.783,00
Jumlah		732.657.783,00

5.4.4.c	Surplus Defisit dari Pos Luar Biasa	<u>31 Desember 2023</u> (732.657.783,00)	<u>31 Desember 2022</u> (1.357.580.146,00)
----------------	--	---	---

Surplus Defisit dari Pos Luar Biasa 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp732.657.783,00) dan (Rp1.357.580.146,00).

5.4.5.	Surplus / Defisit LO	<u>31 Desember 2023</u> 134.003.166.298,71	<u>31 Desember 2022</u> 2.445.705.724,50
---------------	-----------------------------	---	---

Surplus / Defisit LO 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp134.003.166.298,71 dan Rp2.445.705.724,50.

5.5 PENJELASAN AKUN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeliran kas selama tahun 2023 dan tahun 2022 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:



5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
184.408.052.068,26 **200.380.243.321,24**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp184.408.052.068,26 merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan per 31 Desember 2023.

Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.178
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Arus Kas Masuk	1.195.613.198.853,29	1.112.241.971.242,55	83.371.227.610,74
Arus Kas Keluar	1.011.205.146.785,03	911.861.727.921,31	99.343.418.863,72
Selisih	184.408.052.068,26	200.380.243.321,24	(15.972.191.252,98)

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.179
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Pendapatan Asli Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pajak Daerah	16.639.747.885,19	14.379.211.257,19	2.260.536.628,00
Retribusi Daerah	3.660.960.661,86	3.126.459.134,68	534.501.527,18
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	81.147.428,96	10.802.806.489,00	(10.721.659.060,04)
Lain-lain PAD yang sah	51.576.423.834,28	54.124.554.822,92	(2.548.130.988,64)
Transfer Pemerintah Pusat	1.055.560.893.209,00	967.508.351.279,00	88.052.541.930,00
Transfer Antar Daerah	68.074.025.834,00	51.808.471.884,76	16.265.553.949,24
Hibah	20.000.000,00	5.596.704.000,00	(5.576.704.000,00)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	4.895.412.375,00	(4.895.412.375,00)
Jumlah	1.195.613.198.853,29	1.112.241.971.242,55	83.371.227.610,74

Perbandingan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:



Tabel 5.180
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Pengeluaran Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pembayaran Pegawai	365.545.404.005,97	366.213.212.937,00	(667.808.931,03)
Pembayaran Barang dan Jasa	368.195.904.183,30	329.372.640.412,31	38.823.263.770,99
Pembayaran Subsidi	1.999.999.670,00	1.999.996.003,00	3.667,00
Pembayaran Hibah	86.720.990.864,76	29.943.448.031,00	56.777.542.833,76
Pembayaran Bantuan Sosial	9.986.539.800,00	19.478.374.200,00	(9.491.834.400,00)
Pembayaran Tidak Terduga	732.657.783,00	1.357.580.146,00	(624.922.363,00)
Pembayaran Bagi Hasil	1.727.173.530,00	1.479.323.792,00	247.849.738,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	176.296.476.948,00	162.017.152.400,00	14.279.324.548,00
Jumlah	1.011.205.146.785,03	911.861.727.921,31	99.343.418.863,72

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 31 Desember 2023 31 Desember 2022
(248.021.646.858,74) (172.666.235.084,20)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp248.021.646.858,74) merupakan selisih Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023. Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.181
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Arus Kas Masuk	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	248.021.646.858,74	172.666.235.084,20	75.355.411.774,54
Selisih	(248.021.646.858,74)	(172.666.235.084,20)	(75.355.411.774,54)

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp172.666.235.084,20) digunakan untuk membiayai belanja yang terkait dengan investasi aset non keuangan, tercermin dalam Belanja Modal yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ada di SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan, sebagai berikut:



Tabel 5.182
Arus Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	(Rp)	(Rp)	
Belanja Peralatan dan Mesin	45.974.881.069,00	48.875.920.215,00	(2.901.039.146,00)
Belanja Gedung dan Bangunan	57.398.957.903,04	31.520.633.822,00	25.878.324.081,04
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	130.384.672.314,70	77.887.865.307,20	52.496.807.007,50
Belanja Aset Tetap Lainnya	870.194.072,00	1.419.315.740,00	(549.121.668,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	430.441.500,00	0,00	430.441.500,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.962.500.000,00	12.962.500.000,00	0,00
JUMLAH	248.021.646.858,74	172.666.235.084,20	75.355.411.774,54

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
0,00 **0,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00.

5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
0,00 **0,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00.

Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.183
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	(Rp)	(Rp)	
Arus Masuk Kas	70.645.282.805,00	60.687.507.078,00	9.957.775.727,00
Arus Keluar Kas	70.645.282.805,00	60.687.507.078,00	9.957.775.727,00
Selisih	0,00	0,00	0,00



5.5.5. Perhitungan Akhir Kas Per 31 Desember 2023

Tabel 5.184
Perhitungan Akhir Kas Per 31 Desember 2023

No	Perhitungan Akhir Kas	Per 31 Desember 2023	
1	Kas di Kas Daerah		107.133.712.573,19
	DAU BG	8.990.656.169,91	
	DBH	1.424.152.343,94	
	PAD	1.071.696.444,28	
	Transfer Provinsi	1.999.123.290,38	
	Silpa Dana Hibah	34.216.500,00	
	DAU SG	11.000.769.586,99	
	Dana Alokasi Umum Kelurahan	3.136.000,00	
	Dana Alokasi Umum Bid PU (D A U PU)	262.414.188,74	
	Dana Alokasi Umum Kesehatan	3.562.090.500,25	
	Dana Alokasi Umum Pendidikan	4.415.560.186,00	
	Dana Alokasi Umum PPPK	2.757.568.712,00	
	DAK FISIK	4.502.861.433,97	
	SilPA DAK Fisik s.d. 2022	4.502.861.433,97	
	DAK NON FISIK	3.209.156.524,00	
	Silpa Dak Non Fisik Tahun sd 2022	261.657.078,00	
	DKPP	78.472.000,00	
	FPM	33.671.686,00	
	BOP KB (DP3A2PKB)	549.346.679,00	
	BOK Dinas (Dinkes)	562.870.125,00	
	Tambahan Penghasilan	236.199.500,00	
	Tunjangan Khusus Gsuru	693.301.249,00	
	Tunjangan Profesi Guru	793.638.207,00	
	DBHDR	49.129.694.311	
	BDH Sawit	25.064.163.000,00	
	DID	217.258.719,00	
	Pengembalian silpa JKN 2022	489.964.249,72	
2	Kas di Badan Layanan Umum Daerah		7.170.935.805,11
3	Kas di Bendahara BOS		189.367.300,57
4	Kas di Bendahara FKTP		3.795.876.311,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2023			118.289.891.989,87

**5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

5.6.1	Ekuitas Awal	<u>31 Desember 2023</u> 3.144.144.131.009,49	<u>31 Desember 2022</u> 3.326.674.125.691,42
--------------	---------------------	---	---

Nilai ekuitas awal tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp3.144.144.131.009,49 dan Rp3.326.674.125.691,42.

5.6.2	Surplus / (Defisit) LO	<u>31 Desember 2023</u> 134.003.166.298,71	<u>31 Desember 2022</u> 2.445.705.724,50
--------------	-------------------------------	---	---

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp132.990.156.188,71 dan Rp2.445.705.724,50. Surplus/(Defisit)-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	<u>31 Desember 2023</u> 103.740.040.079,51	<u>31 Desember 2022</u> (184.975.700.406,43)
--------------	--	---	---

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan mendasar merupakan akibat dari penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp103.740.040.079,51 dan (Rp184.975.700.406,43).

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan mendasar merupakan akibat dari penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 103.740.040.079,51.

Penjelasan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2023 sebesar Rp 103.740.040.079,51 disebabkan oleh beberapa koreksi ekuitas lainnya. Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya sebagai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.185
Koreksi Ekuitas Lainnya

NO	URAIAN	SALDO (Rp)
1	Koreksi Ekuitas - Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	(44.910.000,00)
2	Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD - Aset (Masuk)	14.100.890.599,00
3	Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD -Penyusutan (Masuk)	5.239.024.096,00
4	Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD - Aset (Keluar)	(14.100.890.599,00)
5	Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD -Penyusutan (Keluar)	5.239.024.096,00
6	Koreksi Ekuitas - Penghapusan aset	(1.784.601.698,00)



NO	URAIAN	SALDO (Rp)
7	Koreksi Ekuitas - Utang Belanja Jasa	9.716.000,00
8	Koreksi Ekuitas - Piutang BLUD	(10.628.804,00)
9	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	5.838.040,22
10	Koreksi Ekuitas - Utang Jasa Pelayanan	914.926.552,68
11	Koreksi Ekuitas - Hibah	67.749.614,00
12	Koreksi Ekuitas - Koreksi Penyusutan	71.454.885.133,57
13	Koreksi Ekuitas - Pencatatan Baru (Hasil Inventarisasi)	22.754.545.760,00
14	Koreksi Ekuitas - Koreksi Nilai/Kuantitas	0,04
15	Koreksi Ekuitas - Koreksi - Penyisihan Piutang	12.100.650,00
16	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pendapatan LO	5.225.789,00
17	Koreksi Ekuitas - Koreksi Piutang	(122.855.150,00)
Jumlah		103.740.040.079,51

Untuk Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar berdasarkan Koreksi Ekuitas per Rekening Objek disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.186
Koreksi Ekuitas per Rekening Objek

NO	URAIAN	SALDO
1	Koreksi Ekuitas - 1.1.03.09 Piutang Pajak Reklame	(1.848.650,00)
2	Koreksi Ekuitas - 1.1.06.16 Piutang Pendapatan BLUD	(131.635.304,00)
3	Koreksi Ekuitas - 1.1.09.05 Uang Muka	(44.910.000,00)
4	Koreksi Ekuitas - 1.1.10.01 Penyisihan Piutang Pendapatan	17.938.690,22
5	Koreksi Ekuitas - 1.3.01.01 Tanah	22.496.364.360,00
6	Koreksi Ekuitas - 1.3.02.02 Alat Angkutan	1.549.473.800,00
7	Koreksi Ekuitas - 1.3.02.05 Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,00
8	Koreksi Ekuitas - 1.3.02.10 Komputer	(0,96)
9	Koreksi Ekuitas - 1.3.03.01 Bangunan Gedung	357.931.400,00
10	Koreksi Ekuitas - 1.3.04.01 Jalan dan Jembatan	(76.645.933.110,99)
11	Koreksi Ekuitas - 1.3.04.02 Bangunan Air	405.570.000,00
12	Koreksi Ekuitas - 1.3.05.07 Aset Tetap Dalam Renovasi	76.240.363.110,99
13	Koreksi Ekuitas - 1.3.06.04 Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	(99.750.000,00)
14	Koreksi Ekuitas - 1.3.07.01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.941.076.867,00)
15	Koreksi Ekuitas - 1.3.07.02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	52.385.893,00
16	Koreksi Ekuitas - 1.3.07.03 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.339.900.113,57
17	Koreksi Ekuitas - 1.5.04.01 Aset Lain-lain	(3.057.396.282,00)
18	Koreksi Ekuitas - 1.5.06.01 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	1.272.794.584,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	SALDO
19	Koreksi Ekuitas - 2.1.06.01 Utang Belanja Pegawai	914.926.552,68
20	Koreksi Ekuitas - 2.1.06.02 Utang Belanja Barang dan Jasa	9.716.000,00
21	Koreksi Ekuitas - 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(2.289.000,00)
22	Koreksi Ekuitas - 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.289.000,00
23	Koreksi Ekuitas - 7.1.01.09 Pajak Reklame-LO	5.080.290,00
24	Koreksi Ekuitas - 7.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	(2.289.000,00)
25	Koreksi Ekuitas - 7.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	145.499,00
26	Koreksi Ekuitas - 7.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	2.289.000,00
Jumlah		103.740.040.079,51

5.6.4 Ekuitas Akhir

31 Desember 2023
3.381.887.337.387,71

31 Desember 2022
3.144.144.131.009,49

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.381.887.337.387,71 dan Rp3.144.144.131.009,49.



BAB VI

PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (*SUBSEQUENT EVENT*)

Pada saat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 ada beberapa peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, beberapa peristiwa tersebut diungkapkan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana bagi hasil dan/ atau dana alokasi umum, Kementerian Keuangan melakukan penyempurnaan terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, dimana perubahan regulasi ini mempengaruhi catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah khususnya Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF).

Berdasarkan Nota Dinas dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Tanggal 12 Januari 2024 perihal Penyampaian Saldo Rekening TDF, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.05/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Dalam Bentuk Non Tunai serta telah dilaksanakannya penyaluran DBH Non Tunai ke Rekening TDF untuk Pemda, di mana total saldo TDF pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp182.898.235.000,00. Sesuai dengan kebijakan akuntansi maka Saldo dana TDF sebagaimana dimaksud, dicatat sebagai Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada Aset Lainnya pada Neraca Tahun 2023;

2. Tahun 2023 telah dilakukan peralihan kedudukan RSUD Hanau dari Pemerintah Kabupaten Seruyan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai Berita Acara Nomor 900/292.a/BKAD-III/BAST/III/2023 dan Nomor 900/240.c/BKAD/2023 telah diserahkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) per 31 Maret 2023 senilai Rp446.718.632,50 berupa Kas di BLUD dari Pemerintah Kabupaten Seruyan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Terdapat SP2D yang melewati tahun anggaran dengan SP2D Nomor 16549/SP2D/LS/12/2023 Tanggal 22 Desember 2023 Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Televisi LED Smart TV 60" Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Diskominfo Statistik dan Persandian Kab. Seruyan TA.2023 sesuai dengan SP Nomor : 00.3.2/51/DKISP/XII/2023 11/12/2023 sebesar Rp24.075.000,00 yang belum dibukukan pada tahun 2023, pada belanja dan SP2D tersebut di bukukan Kembali pada tanggal 05 Januari 2024, peristiwa ini terjadi karena kurang cermatnya Kuasa Bendahara Umum Daerah dan pihak Bank dalam melakukan koreksi dokumen dalam proses penatausahaan;



4. Terdapat SP2D yang dikoreksi dengan Nomor 14649/SP2D/LS/1.05.03/DBH-DR/12/2023 tanggal 21 desember 2023, kegiatan Pembayaran 100% atas Pekerjaan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Seruyan Sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 31.03/PPK-BPBD/IX/2023 Tanggal 18 September 2023 Senilai Rp. 395.826.000,00 dan dilakukan koreksi karena reversal ke Kasda sebesar Rp349.468.000.00, Dimana angka tersebut telah otomatis dikurangi dengan Pajak Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa sebesar Rp7.132.000,00 dan Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD sebesar Rp39.226.000,00 dengan total potongan pajak sebesar Rp46.358.000,00. Hal ini terjadi karena nama pada SP2d berbeda dengan nama pada rekening pihak ke 3, dana tersebut telah disalurkan kembali kepada pihak ke 3 pada tanggal 5 januari 2024;
5. Terdapat Pengembalian kelebihan belanja 16787/SP2D/LS/4.02.01/DBH/12/2023 tanggal 29 desember 2023 sebesar Rp20.041.050,00 kegiatan belanja modal alat dapur pada Sekretariat DPRD, disebabkan terjadi dobel pembayaran pekerjaan yang sama, ini terjadi karena kurang cermatnya Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam proses penatausahaan keuangan daerah;
6. Terdapat kesalahan SP2D 02784/SP2D/LS/4.02.01/DBH/05/2023 kegiatan Pembayaran Belanja Langsung Kontribusi mengikuti Workshop/Bimtek anggota DPRD fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang di laksanakan pada tanggal 17-19 Februari 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya-Jakarta yang nilainya sebesar Rp7.500.000,00 tetapi dikeluarkan SP2D sebesar Rp21.302.957,00;
7. Selama proses penyusunan laporan keuangan *audited* TA 2023, terdapat perubahan SiLPA sumber dana DBHDR dimana Pemerintah Kabupaten Seruyan melakukan Rekonsiliasi Realisasi DBH DR dan/atau Sisa DBH DR Tahun Anggaran 2023 dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan undangan Nomor: UND-43/PK.2/2024 Tanggal 28 Maret 2024 perihal Rekonsiliasi Realisasi DBH DR dan/atau Sisa DBH DR Tahun Anggaran 2023, bahwa hasil rekonsiliasi bahwa ada beberapa catatan dari Kementerian Keuangan atas realisasi Belanja DBH DR pada 2 SKPD, Dimana realisasi belanja pada kedua SKPD tersebut tidak diakui sebagai realisasi belanja sumber dana DBH DR, dikarenakan terdapat kelebihan belanja pendukung atau lebih dari 10% atau sebesar Rp. 1.037.954.500,00 (*Satu Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*). Hal ini terjadi karena pada saat pelaksanaan kedua SKPD tersebut merealisasikan belanja pendukung lebih banyak dibandingkan dengan belanja inti atas tujuan penggunaan dana DBH DR tersebut.



BAB VII PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan, serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Catatan atas Laporan Keuangan ini kami sajikan untuk memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; dan
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan ini, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 *Audited* disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
SISA LEBIH PERHITUUNGAN ANGGARAN, PIUTANG,
PENYISIHAN PIUTANG DAN KEWAJIBAN PER 31 MARET 2023
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 900/292.a /BKAD-III/BAST/III/2023

NOMOR : 900/240.c /BKO/2023

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh satu, bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. H. DJAINUDDIN NOOR, M.A.P.**
NIP : 19650821 199103 1 013
Pangkat/ Gol. : Pembina Utama Madya / (IV/d)
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan
Alamat : Jl. A. Yani No. 1 Kuala Pembuang
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **H. NURYAKIN, M.Si.**
NIP : 19650610 199103 1 025
Pangkat/ Gol. : Pembina Utama Madya / (IV/d)
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan. RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PASAL 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** menerima hak dari Pemerintah Kabupaten Seruyan berupa:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) per 31 Maret 2023 senilai **Rp446.718.632,50**
2. Piutang per 31 Maret 2023 senilai **Rp1.907.413.787,00**
3. Penyisihan Piutang per 31 Maret 2023 senilai **Rp7.256.714,19**
4. Kewajiban per 31 Maret 2023 senilai **Rp1.473.531.875,68**

PASAL 2

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini, maka tanggung jawab materialitas fisik dan administrasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, beralih dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

**SEKRETARIS DAERAH
KALIMANTAN TENGAH,**



Drs. M. NURYAKIN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650610 199103 1 025

PIHAK PERTAMA

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



Drs. H. DJAINUDDIN NOOR, M.A.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650821 199103 1 013

The background features abstract geometric shapes in various shades of blue and orange. In the top-left corner, there is a large blue square with a smaller blue square inside it, and an orange line forming a rectangle around the inner square. In the top-right corner, there are several blue and orange shapes, including a blue rectangle and an orange line. In the bottom-left corner, there are blue and orange shapes, including a blue rectangle and an orange line. In the bottom-right corner, there are blue and orange shapes, including a blue rectangle and an orange line.

RINCIAN MANDATORY SPENDING

Tahun Anggaran 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Akhmad Yani Nomor 1 Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah
Telepon (0538) 2022211, 2022212, 2022222, Faks. (0538) 2022211, 2022212
Website : [www. Seruyankab. Go.id](http://www.Seruyankab.Go.id)

LAPORAN REALISASI DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA UNTUK DAU BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAHRUN ABBAS

Jabatan : Pj. SEKRETARIS DAERAH

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Pendidikan Tahap AKHIR Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara:

Tahap I	Rp	22.671.157.000
Tahap II	Rp	34.006.735.000
Tahap III	Rp	18.892.632.000
Total	Rp	75.570.524.000

Realisasi Penggunaan DAU Bidang Pendidikan melalui SP2D Daerah:

Tahap ini Rp 42.027.254.368,00

Kumulatif s.d. Tahap ini Rp 71.154.963.814,00

Sisa Dana Alokasi Umum di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah 4.415.560.186,00

Persentase Penyerapan Dana Alokasi Umum 94,16%

No.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN			SISA PAGU	KELUARAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		URAIAN	JUMLAH	SATUAN
	TOTAL		75.570.524.000,00	14.589.410.407,00	14.538.299.039,00	42.027.254.368,00	4.415.560.186,00			
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		23.773.898.427,00	2.302.431.743,00	9.944.082.783,00	10.235.568.714,00	1.291.815.187,00			
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	537.555.220,00	31.140.300,00	-	498.304.520,00	8.110.400,00	Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25	Ruang
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	295.335.660,00	114.547.800,00	-	175.862.144,00	4.925.716,00	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6	Ruang
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	236.682.720,00	50.613.820,00	-	184.469.900,00	1.599.000,00	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	Ruang

No.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN			SISA PAGU	KELUARAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		URAIAN	JUMLAH	SATUAN
5	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	100.527.000,00	66.079.250,00	-	33.613.797,00	833.953,00	Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5	Ruang
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.173.798.085,00	512.364.920,00	-	3.581.733.659,00	79.699.506,00	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	Unit
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	621.703.429,00	20.266.000,00	-	596.069.660,00	5.367.769,00	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4	Unit
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.217.000.000,00	73.928.500,00	1.118.000,00	1.132.230.754,00	9.722.746,00	Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	37	Ruang
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	678.533.429,00	12.516.500,00	-	604.630.370,00	61.386.559,00	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0	Unit
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah	406.295.000,00	205.515.000,00	-	4.325.000,00	196.455.000,00	Kursi sekolah - jenjang SD, Meja sekolah - jenjang SD	12	Paket
11	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.230.998.000,00	625.000.000,00	-	1.559.117.450,00	46.880.550,00	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2	Paket
12	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	383.740.584,00	-	19.565.000,00	13.586.400,00	350.589.184,00	Terpeliharanya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	Unit
13	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	155.012.000,00	7.330.500,00	40.853.183,00	76.685.353,00	30.142.964,00	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	150	Satuan Pendidikan
14	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	200.000.000,00	6.395.000,00	-	90.827.000,00	102.778.000,00	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	171	Satuan Pendidikan
15	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.041.475.000,00	469.689.904,00	177.499.400,00	393.703.739,00	581.957,00	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150	Peserta Didik
16	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.430.200.000,00	-	9.349.300.000,00	80.900.000,00	-	-	463	Orang
17	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	545.000.000,00	27.365.269,00	269.577.800,00	127.115.300,00	120.941.631,00	Kegiatan Lomba Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI), dan Kegiatan Seleksi Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi	2	Orang
18	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	142.455.300,00	-	7.440.000,00	40.942.500,00	94.072.800,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1	Satuan Pendidikan
19	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.377.587.000,00	79.678.980,00	78.729.400,00	1.041.451.168,00	177.727.452,00	Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0	Satuan Pendidikan

No.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN			SISA PAGU	KELUARAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		URAIAN	JUMLAH	SATUAN
20	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		16.726.010.388,00	5.743.731.920,00	1.014.869.628,00	8.695.537.434,00	1.271.871.406,00			
21	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.347.760.100,00	298.729.750,00	1.086.000,00	1.039.204.483,00	8.739.867,00	Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4	Ruang
22	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	838.667.630,00	278.030.178,00	4.593.400,00	551.351.354,00	4.692.698,00	Pembangunan Ruang Tata Usaha (TU) Beserta Perabotnya - jenjang SMP	2	Ruang
23	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	632.679.500,00	150.214.000,00	1.338.000,00	425.582.945,00	55.544.555,00	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	Ruang
24	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	142.176.260,00	71.427.600,00	-	70.375.515,00	373.145,00	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya - Jenjang SMP	1	Ruang
25	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium	1.148.853.084,00	452.023.500,00	1.047.000,00	612.281.790,00	83.500.794,00	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer (TIK) - Jenjang SMP	4	Ruang
26	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	530.606.640,00	25.170.000,00	-	504.829.272,00	607.368,00	Lanjutan Rehap Pagar Sekolah, dan Pembangunan Pagar Sekolah	0	Unit
27	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	223.418.500,00	65.373.000,00	-	147.638.880,00	10.406.620,00	Rehab Ringan Ruang Kelas - Jenjang SMP	0	Ruang
28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	222.000.000,00	-	-	212.065.700,00	9.934.300,00	Rehab Rumah Dinas Guru (RDG) / Rusak Berat - Jenjang SMP	1	Unit
29	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	733.200.040,00	42.346.500,00	-	687.773.600,00	3.079.940,00		0	Unit
30	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Mebel Sekolah	319.785.000,00	-	-	193.417.500,00	126.367.500,00	-	0	Paket
31	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	10.372.000,00	-	-	-	10.372.000,00		0	Paket
32	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.931.504.634,00	74.081.400,00	752.135.182,00	2.470.668.729,00	634.619.323,00	-	0	Paket

No.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN			SISA PAGU	KELUARAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		URAIAN	JUMLAH	SATUAN
33	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	96.450.000,00	77.293.700,00	11.873.846,00	6.575.899,00	706.555,00	-	0	Peserta Didik
34	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	217.536.000,00	50.656.000,00	-	149.310.742,00	17.569.258,00		0	Satuan Pendidikan
35	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	798.078.000,00	163.602.800,00	84.250.000,00	457.300.105,00	92.925.095,00	-	0	Peserta Didik
36	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.210.200.000,00	3.791.709.880,00	10.341.000,00	408.149.120,00	-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	Orang
37	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	431.109.000,00	60.869.224,00	66.208.000,00	241.764.900,00	62.266.876,00	Kegiatan Festival Bahasa, dan Kegiatan seleksi Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi	0	Orang
38	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	165.479.000,00	54.710.188,00	67.679.600,00	29.989.000,00	13.100.212,00	-	0	Satuan Pendidikan
39	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	726.135.000,00	87.494.200,00	14.317.600,00	487.257.900,00	137.065.300,00	-	0	Satuan Pendidikan
40	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		7.974.736.449,00	304.455.229,00	2.310.935.100,00	5.300.065.509,00	59.280.611,00			
41	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.034.838.100,00	85.275.750,00	-	944.544.498,00	5.017.852,00	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	6	Unit
42	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	233.100.000,00	23.054.700,00	-	207.637.820,00	2.407.480,00	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4	Unit
43	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	328.000.000,00	13.986.000,00	-	294.514.420,00	19.499.580,00	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Unit
44	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	80.789.000,00	24.400.200,00	13.300.000,00	41.603.600,00	1.485.200,00	Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0	Peserta Didik
45	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	117.560.000,00	4.773.600,00	6.107.200,00	105.039.660,00	1.639.540,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	0	Satuan Pendidikan
46	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	5.465.056.759,00	126.503.979,00	1.912.700.000,00	3.422.700.880,00	3.151.900,00	-	0	Orang
47	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	595.392.590,00	26.461.000,00	378.827.900,00	164.024.631,00	26.079.059,00	-	0	Satuan Pendidikan

No.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN			SISA PAGU	KELUARAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		URAIAN	JUMLAH	SATUAN
48	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00	-	PAUD yang Mengelola Dana BOP	196	Satuan Pendidikan
49	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		572.497.000,00	63.307.922,00	39.401.938,00	371.323.472,00	98.463.668,00			
50	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	37.834.000,00	9.241.600,00	17.570.038,00	9.577.800,00	1.444.562,00	Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	10	Satuan Pendidikan
51	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	187.699.000,00	20.786.760,00	10.352.400,00	83.312.200,00	73.247.640,00	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40	Orang
52	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	56.615.000,00	12.768.200,00	5.343.500,00	31.022.300,00	7.481.000,00	Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10	Satuan Pendidikan
53	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	290.349.000,00	20.511.362,00	6.136.000,00	247.411.172,00	16.290.466,00	Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10	Satuan Pendidikan
54	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		449.590.000,00	15.525.000,00	-	196.621.540,00	237.443.460,00			
55	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	228.750.000,00	5.175.000,00	-	92.131.140,00	131.443.860,00	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1	Dokumen
56	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	150.000.000,00	5.175.000,00	-	88.853.400,00	55.971.600,00	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1	Dokumen
57	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	70.840.000,00	5.175.000,00	-	15.637.000,00	50.028.000,00	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	40	Orang
58	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		79.903.000,00	-	-	76.270.240,00	3.632.760,00			
59	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	79.903.000,00	-	-	76.270.240,00	3.632.760,00	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1	Dokumen

No.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN			SISA PAGU	KELUARAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		URAIAN	JUMLAH	SATUAN
60	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		113.452.000,00	34.956.000,00	7.000.000,00	57.921.000,00	13.575.000,00			
61	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	113.452.000,00	34.956.000,00	7.000.000,00	57.921.000,00	13.575.000,00	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25	Dokumen
62	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		84.770.000,00	34.773.000,00	-	36.623.200,00	13.373.800,00			
63	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	34.773.000,00	34.773.000,00	-	-	-	Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang
64	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	49.997.000,00	-	-	36.623.200,00	13.373.800,00	Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Orang
65	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		25.000.000,00	-	-	21.279.300,00	3.720.700,00			

No.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN			SISA PAGU	KELUARAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		URAIAN	JUMLAH	SATUAN
66	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	25.000.000,00	-	-	21.279.300,00	3.720.700,00	Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang
67	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		191.849.000,00	-	-	187.010.300,00	4.838.700,00			
68	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	100.449.000,00	-	-	100.366.000,00	83.000,00	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	0	Orang
69	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	91.400.000,00	-	-	73.442.900,00	17.957.100,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1	Unit
70	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		900.000.000,00	225.000.000,00	300.000.000,00	360.680.000,00	14.320.000,00			
71	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	900.000.000,00	225.000.000,00	300.000.000,00	360.680.000,00	14.320.000,00	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Organisasi
72	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		25.000.000,00	-	-	20.431.500,00	4.568.500,00			

No.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN			SISA PAGU	KELUARAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		URAIAN	JUMLAH	SATUAN
73	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	-	-	20.431.500,00	4.568.500,00	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	Lembaga
74	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		5.000.000,00	4.750.000,00	-	-	250.000,00			
75	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.750.000,00	-	-	250.000,00	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Perangkat Daerah
76	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		20.000.000,00	12.889.200,00	-	-	7.110.800,00			
77	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	12.889.200,00	-	-	7.110.800,00	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7	Organisasi
78	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		435.000.000,00	42.746.900,00	121.063.248,00	218.861.650,00	52.328.202,00			

No.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN			SISA PAGU	KELUARAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		URAIAN	JUMLAH	SATUAN
79	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	435.000.000,00	42.746.900,00	121.063.248,00	218.861.650,00	52.328.202,00	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Perangkat Daerah
80	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		1.134.608.990,00	453.773.300,00	518.346.800,00	-	162.488.890,00			
81	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	137.186.716,00	-	-	-	137.186.716,00	Jumlah peserta upacara hari kesaktian pancasila dan Jumlah Peserta Upacara Hari Sumpah Pemuda	0	Orang
82	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	997.422.274,00	453.773.300,00	518.346.800,00	-	25.302.174,00	Jumlah Peserta Paskibraka yang di bina	71	Orang
83	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.034.524.000,00	1.000.000.000,00	-	-	34.524.000,00			

No.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN			SISA PAGU	KELUARAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		URAIAN	JUMLAH	SATUAN
84	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.034.524.000,00	1.000.000.000,00	-	-	34.524.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2	Dokumen
85	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		54.623.500,00	1.246.452,00	29.756.500,00	-	23.620.548,00			
86	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	54.623.500,00	1.246.452,00	29.756.500,00	-	23.620.548,00	Sarana dan Prasarana olahraga yang memadai	1	Unit
87	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		85.406.149,00	-	85.406.149,00	-	-			
88	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	85.406.149,00	-	85.406.149,00	-	-	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen
89	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		3.543.442.000,00	3.500.000.000,00	-	-	43.442.000,00			
90	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	3.543.442.000,00	3.500.000.000,00	-	-	43.442.000,00	Jumlah Atlet yang dibina	23	Orang
91	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		569.958.000,00	500.000.000,00	40.274.000,00	-	29.684.000,00			
92	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	569.958.000,00	500.000.000,00	40.274.000,00	-	29.684.000,00	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	Organisasi

No.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN			SISA PAGU	KELUARAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		URAIAN	JUMLAH	SATUAN
93	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		478.480.500,00	277.342.100,00	-	-	201.138.400,00			
94	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	478.480.500,00	277.342.100,00	-	-	201.138.400,00	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	2	Laporan
95	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		35.830.000,00	-	-	33.810.300,00	2.019.700,00			
96	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	35.830.000,00	-	-	33.810.300,00	2.019.700,00	Jumlah Cagar Budaya dan atau yang diduga benda cagar budaya yang dipelihara	57	Objek
97	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		185.817.000,00	-	42.980.600,00	96.894.284,00	45.942.116,00			
98	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	16.500.000,00	-	-	9.740.934,00	6.759.066,00	umlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1	Layanan
99	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.257.000,00	-	-	44.769.700,00	1.487.300,00	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10	Perpustakaan
100	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.060.000,00	-	-	16.433.650,00	16.626.350,00	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85	Orang
101	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Bahan Pustaka	45.000.000,00	-	42.980.600,00	-	2.019.400,00	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	2000	Eksemplar

No.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN			SISA PAGU	KELUARAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		URAIAN	JUMLAH	SATUAN
102	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	45.000.000,00	-	-	25.950.000,00	19.050.000,00	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1700	Eksemplar
103	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		181.944.500,00	-	46.241.300,00	58.308.990,00	77.394.210,00			
104	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	54.003.000,00	-	8.655.300,00	35.764.740,00	9.582.960,00	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	60	Lokus
105	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	103.419.500,00	-	36.086.000,00	5.760.850,00	61.572.650,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	19	Orang
106	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	24.522.000,00	-	1.500.000,00	16.783.400,00	6.238.600,00	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2	Perpustakaan
107	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		3.123.827.581,00	56.099.768,00	24.524.800,00	2.487.504.549,00	555.698.464,00			
108	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	3.003.827.581,00	14.400.000,00	18.000.000,00	2.449.690.549,00	521.737.032,00	Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	7	Laporan
109	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	120.000.000,00	41.699.768,00	6.524.800,00	37.814.000,00	33.961.432,00	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	Laporan
110	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		150.000.000,00	-	-	25.237.644,00	124.762.356,00			

No.	URAIAN KEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN			SISA PAGU	KELUARAN		
				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III		URAIAN	JUMLAH	SATUAN
111	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	150.000.000,00	-	-	25.237.644,00	124.762.356,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	Dokumen
112	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		60.000.000,00	16.381.873,00	13.416.193,00	5.336.000,00	24.865.934,00			
113	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	60.000.000,00	16.381.873,00	13.416.193,00	5.336.000,00	24.865.934,00	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	Dokumen
114	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.555.355.516,00	-	-	13.555.170.142,00	185.374,00			
115	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.555.355.516,00	-	-	13.555.170.142,00	185.374,00	Terbayarnya gaji dan tunjangan tenaga pendidik	0	Orang/ Bulan

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Alokasi Umum yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Kemudian, laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya

Pembuang, 02 Februari 2024
dr. B. HRUN ABBAS, M.P.H.
SEKRETARIS DAERAH,



LAPORAN REALISASI DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA UNTUK DAU BIDANG KESEHATAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : SERUYAN

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Kesehatan Tahap AKHIR Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara:

Tahap I	: Rp.	12.816.955.000
Tahap II	: Rp.	19.225.433.000
Tahap III	: Rp.	10.680.798.000
Total	: Rp.	42.723.186.000

Realisasi Penggunaan DAU Bidang Kesehatan melalui SP2D Daerah: Tahap ini : Rp.
16.196.391.254

Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp. 39.161.095.499

Sisa Dana Alokasi Umum di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah : Rp. 3.562.090.501 Persentase
Penyerapan Dana Alokasi Umum : 91.66 %

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan			Sisa Pagu	Keluaran		
			Tahap I	Tahap II	Tahap III		Uraian	Jumlah	Satuan
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000.000	0	2.072.642.885	1.380.149.769	47.207.346			
2	Pengembangan Puskesmas	800.000.000	0	69.802.265	725.618.332	4.579.403	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1	Unit
3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000	0	1.473.806.870	0	26.193.130	Tersedia anyal Alal Kesehatan dan alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan		Unit
4	Pengadaan Obat, Vaksin	1.200.000.000	0	529.033.750	654.531.437	16.434.813	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0	Paket
5	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.293.713.921	7.781.362.610	2.746.861.162	1.517.660.507	1.247.829.642			
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	126.625.000	0	0	70.460.000	56.165.000	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	Orang

7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.081.000	0	3.306.200	25.871.000	903.800	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	Orang
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	30.001.000	1.733.100	6.037.000	4.959.300	17.271.600	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	Orang
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.769.000	0	0	19.007.900	2.761.100	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	Dokumen
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	45.309.000	5.962.900	0	13.104.600	26.241.500	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	Orang
11	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	564.894.000	0	0	453.674.288	111.219.712	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	0	Dokumen
12	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10.680.796.500	7.508.308.650	2.717.583.362	453.674.288	1.230.200	Premi Jamkesda	0	Dokumen
13	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.008.737.166	0	0	70.192.000	938.545.166	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	0	Unit

14	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	517.546.255	265.357.960	0	252.150.417	37.878	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0	Dokumen
15	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	249.865.000	0	17.899.200	144.185.114	87.780.686	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota	0	Unit
16	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	18.090.000	0	2.035.400	10.381.600	5.673.000	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia an, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0	Unit
17	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	48.692.000	10.424.780	9.723.200	22.957.200	5.586.820			
18	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	48.692.000	10.424.780	9.723.200	22.957.200	5.586.820	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	0	Dokumen
19	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	30.000.000	19.136.400	3.976.800	3.326.200	3.560.600			
20	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	30.000.000	19.136.400	3.976.800	3.326.200	3.560.600	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	0	Dokumen
21	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	131.507.000	14.370.328	1.750.000	113.100.736	2.285.936			
22	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	131.507.000	14.370.328	1.750.000	113.100.736	2.285.936	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	Dokumen
23	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80.000.000	18.136.500	5.461.600	36.827.800	19.574.100			

24	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80.000.000	18.136.500	5.461.600	36.827.800	19.574.100	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	Dokumen
							kro Obat Tradisional (UMOT)		
25	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	49.940.000	18.136.500	0	24.011.600	7.791.900			
26	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	49.940.000	18.136.500	0	24.011.600	7.791.900	Jumlah Produk dan Sarana Produksi i Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	0	Unit
27	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.638.000	1.733.100	2.288.000	37.588.000	28.900			
28	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	41.638.000	1.733.100	2.288.000	37.588.000	28.900	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0	Dokumen
29	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	5.208.432.100	312.194.762	114.275.188	3.747.670.022	1.034.292.128			
30	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	350.000.000	0	0	0	350.000.000	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi SPAM		Dokumen

31	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.200.000.000	65.406.512	114.275.188	1.545.550.412	474.767.888	Jumlah sambun	0	SR
							gan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/ SPAM Berbasis Masyarakat		
32	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	1.450.000.000	0	0	1.240.755.700	209.244.300	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	4	Unit
33	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	1.208.432.100	246.788.250	0	961.363.910	279.940	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	0	Unit
34	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.725.000.000	149.575.600	0	3.570.913.800	4.510.600			
35	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.725.000.000	149.575.600	0	3.570.913.800	4.510.600	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	0	Rumah Tangga
36	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	169.691.225	27.146.586	19.381.900	72.823.690	50.339.049			
37	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	122.931.000	27.146.586	19.381.900	72.823.690	3.578.824	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0	Dokumen
38	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	46.760.225	0	0	0	46.760.225	Jumlah Pengambilan Contoh		Dokumen
							Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		
39	Pengelolaan Sampah	2.144.224.150	470.589.751	0	1.666.898.159	6.736.240			

40	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	10.910.000	0	0	9.855.300	1.054.700	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota yang Disusun dan Ditetapkan	0	Dokumen
41	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota	1.324.292.150	371.731.075	0	952.446.540	114.535	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	0	Ton
42	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	49.772.000	46.244.121	0	2.646.000	881.879	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota.	0	Dokumen
							ten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstra da		

43	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	759.250.000	52.614.555	0	701.950.319	4.685.126	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0	Unit
44	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5.750.221.000	3.353.604.700	773.730.903	1.621.917.639	967.758			
45	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5.750.221.000	3.353.604.700	773.730.903	1.621.917.639	967.758	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0	Dokumen
46	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.300.126.604	0	4.830.300.990	2.380.546.132	1.089.279.482			
47	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.300.126.604	0	4.830.300.990	2.380.546.132	1.089.279.482	Gaji dan Tunjangan ASN Nakes	0	Orang/Bulan
48	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	250.000.000	207.900.000	0	0	42.100.000			
49	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	250.000.000	207.900.000	0	0	42.100.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Orang
	TOTAL	42.723.186.000	12.384.311.617	10.580.392.628	16.196.391.254	3.562.090.501			

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Alokasi Umum yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Kemudian, laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kuala Pembuang, 15 Januari 2024

Di, Sekretaris Daerah,



dr. Bahrun Abbas, M.P.H
NIP. 19670908 199509 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Akhmad Yani Nomor 1 Kuala Pembuang (74212)
Telepon (0538) 202211, 20212, 202222. Faks: (0538) 2022211, 2022212
Website: www.seruyankab.go.id

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
DAU DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN TAHAP AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2023
KABUPATEN SERUYAN


NO	URAIAN	BAGIAN DAU DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN					KET
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		
					OUTPUT	SATUAN	
1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	248.000.000	246.060.000	1.940.000			
2	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	-	-	-			
3	Sarana prasarana transportasi lainnya	-	-	-	0	Unit	0
4	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	-	-	-			
5	Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal	-	-	-		Unit	
6	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	48.000.000	47.952.000	48.000			
7	Sumur resapan	-	-	-		Unit	
8	Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman	-	-	-		Unit	
9	Alat pemadam api ringan	-	-	-		Unit	
10	Pompa kebakaran portabel	-	-	-		Unit	
11	Penerangan lingkungan pemukiman	-	-	-		Unit	
12	Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya	-	-	-	0	Unit	0
13	Drainase dan selokan	-	-	-		Unit	
14	Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah	48.000.000	47.952.000	48.000	120	Unit	0
15	Jaringan air minum	-	-	-		Unit	
16	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	-	-	-			
17	Jalan poros Kelurahan	-	-	-		Unit	
18	Jalan pemukiman	-	-	-		Unit	
19	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	125.000.000	123.183.000	1.817.000			
20	Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu	125.000.000	123.183.000	1.817.000	1	Unit	-
21	Sarana prasarana kesehatan lainnya	-	-	-	0	Unit	0
22	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	75.000.000	74.925.000	75.000			
23	Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini	75.000.000	74.925.000	75.000	3	Unit	0
24	Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya	-	-	-	0	Unit	0
25	Bangunan pendidikan anak usia dini	-	-	-		Unit	
26	Taman bacaan masyarakat	-	-	-		Unit	
27	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	352.000.000	350.804.000	1.196.000			
28	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	133.685.000	132.962.000	723.000			
29	Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat	-	-	-		Pokmas/Ormas	
30	Keluarga berencana	-	-	-		Pokmas/Ormas	
31	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya	133.685.000	132.962.000	723.000	4	Pokmas/Ormas	0
32	Pelatihan kader kesehatan masyarakat	-	-	-		Pokmas/Ormas	
33	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	85.130.000	85.130.000	-			
34	Penyelenggaraan pelatihan kerja	-	-	-	0	Pokmas/Ormas	0
35	Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya	85.130.000	85.130.000	-	1	Pokmas/Ormas	0

NO	URAIAN	BAGIAN DAU DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN					KET
		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME		
					OUTPUT	SATUAN	
36	Penyelenggaraan kursus seni budaya	-	-	-		Pokmas/Ormas	
37	Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah	-	-	-			
38	Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya	-	-	-		Pokmas/Ormas	
39	Penyelenggaraan pelatihan usaha	-	-	-		Pokmas/Ormas	
40	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan	133.185.000	132.712.000	473.000			
41	Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	-	-	-		Pokmas/Ormas	
42	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya	133.185.000	132.712.000	473.000	4	Pokmas/Ormas	
43	Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	-	-	-			
44	Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan	-	-	-		Pokmas/Ormas	
45	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban Kelurahan	-	-	-		Pokmas/Ormas	
46	Kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya	-	-	-	0	Pokmas/Ormas	0
47	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	-	-	-			
48	Penyediaan layanan informasi tentang bencana	-	-	-		Pokmas/Ormas	
49	Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	-	-	-		Pokmas/Ormas	
50	Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana	-	-	-		Pokmas/Ormas	
51	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya	-	-	-		Pokmas/Ormas	
52	Edukasi manajemen proteksi kebakaran	-	-	-		Pokmas/Ormas	
TOTAL		600.000.000	596.864.000	3.136.000			

Bagian DAU Dukungan Pendanaan Kelurahan yang diterima RKUD pada Tahap AKHIR	600.000.000
Persentase Penyerapan Anggaran	99.48%

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah menganggarkan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan anggaran DAU dukungan pendanaan kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023. Kemudian, laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Kuala Pembuang, 19 Januari 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH
BAHRUN ABBAS

**LAPORAN REALISASI DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA UNTUK DAU
BIDANG PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. BAHRUN ABBAS, M.P.H

Jabatan : PJ. SEKRETARIS DAERAH SERUYAN

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Pekerjaan Umum Tahap AKHIR Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara:

Tahap I	: Rp.	17.272.555.000
Tahap II	: Rp.	25.908.832.000
Tahap III	: Rp.	<u>14.393.797.000</u>
Total	: Rp.	57.575.184.000

Realisasi Penggunaan DAU Bidang Pekerjaan Umum melalui SP2D Daerah:

Tahap ini	: Rp.	24.917.329.097
Kumulatif s.d. Tahap ini	: Rp.	57.312.769.809

Sisa Dana Alokasi Umum di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah	:	Rp. 262.414.191
Persentase Penyerapan Dana Alokasi Umum	:	99.54 %

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan			Sisa Pagu	Keluaran		
			Tahap I	Tahap II	Tahap III		Uraian	Jumlah	Satuan
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	939.300.038	188.532.500	684.135.200	4.995.000	61.637.338			
2	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	129.875.735	129.477.500	0	0	398.235	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0	KM
3	Pembangunan Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	552.454.608	0	546.340.200	4.995.000	1.119.408	Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1	Unit
4	Rehabilitasi Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	256.969.695	59.055.000	137.795.000	0	60.119.695	Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1	Unit

5	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	19.685.754.562	4.801.212.286	7.517.934.508	7.222.667.375	143.940.393			
6	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.357.677.908	498.814.020	199.236.120	658.279.950	1.347.818	Dokumen Perencanaan Teknis	4	Dokumen
7	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	199.899.900	59.899.800	0	0	140.000.100	-	0	KM
8	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	10.591.172.800	1.133.487.800	4.477.938.500	4.979.136.675	609.825	Peningkatan Jalan Inspeksi	14.5	KM
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	5.799.316.552	2.490.321.666	1.782.663.888	1.525.425.750	905.248	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	6	KM
10	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1.737.687.402	618.689.000	1.058.096.000	59.825.000	1.077.402	Pemeliharaan Saluran	50	KM
11	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	299.650.000	0	89.790.000	209.510.000	350.000			
12	Peningkatan TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS	299.650.000	0	89.790.000	209.510.000	350.000	Fasilitas tempat penampungan sampah yang dibangun dalam kondisi baik	5	Rumah Tangga
13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.700.000	0	44.880.000	104.720.000	100.000			
14	Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	149.700.000	0	44.880.000	104.720.000	100.000	Peningkatan IPLT	55	M3/ Hari
15	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	149.900.000	49.650.300	44.850.000	0	55.399.700			
16	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	149.900.000	49.650.300	44.850.000	0	55.399.700	-	1	Unit
17	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	22.199.350.000	5.110.827.400	6.355.086.681	10.732.868.569	567.350			
18	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	22.199.350.000	5.110.827.400	6.355.086.681	10.732.868.569	567.350	Dokumen Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunan	2	Dokumen
19	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	14.151.529.000	1.570.473.600	5.938.068.237	6.642.568.153	419.010			

20	Penataan Bangunan dan Lingkungan	14.151.529.000	1.570.473.600	5.938.068.237	6.642.568.153	419.010	Pembangunan Fasilitas Umum	5	Kawasan
	TOTAL	57.575.183.600	11.720.696.086	20.674.744.626	24.917.329.097	262.413.791			

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Alokasi Umum yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Kemudian, laporan ini sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

KUALA PEMBUANG, 04 Februari 2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH SERUYAN

DR. BAHRUN ABBAS, M.P.H

-

The background features abstract geometric shapes in various shades of blue and orange. In the top-left corner, there is a large blue square with a smaller blue square inside it, and an orange outline of a square. In the top-right corner, there are blue and orange shapes, including a dashed line. In the bottom-left corner, there are blue and orange shapes, including a dashed line. In the bottom-right corner, there are blue and orange shapes, including a dashed line.

LAMPIRAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARIANGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	TOTAL ASET
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DINAS PENDIDIKAN	13.004.317.370,00	57.332.394.300,72	381.800.434.514,53	2.290.552.100,00	13.751.994.102,00	2.556.846.936,00	470.736.539.323,25
2	DINAS KESEHATAN	1.795.999.180,00	72.163.218.930,65	98.701.454.726,11	13.683.285.200,00	7.434.000,00	103.800.000,00	186.455.192.036,76
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA PEMBUANG	1.289.592.000,00	58.867.398.967,55	22.685.357.846,60	974.413.205,00	-	-	83.816.762.019,15
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU	-	-	-	-	-	-	-
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	121.886.389.350,00	31.662.203.758,00	47.718.806.967,00	2.716.319.454.689,45	96.623.486.134,49	119.031.512.125,68	3.133.241.853.024,62
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	112.267.500,00	3.790.120.732,00	5.621.681.174,00	37.749.647.800,00	3.658.897.450,00	1.372.985.916,00	52.305.600.572,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	2.491.247.284,24	2.253.884.100,00	171.866.000,00	-	-	4.916.997.384,24
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	2.430.513.970,00	3.849.997.800,00	317.778.500,00	-	-	6.598.290.270,00
9	DINAS SOSIAL	287.994.500,00	2.817.777.580,00	5.710.789.250,00	3.173.368.100,00	-	-	11.989.929.430,00
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	522.080.000,00	2.206.299.603,00	3.161.587.502,00	742.827.000,00	308.467.000,00	800.934.500,00	7.742.195.605,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	59.910.000,00	4.779.475.938,00	6.750.504.306,74	875.000,00	17.722.950,00	-	11.608.488.194,74
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	5.436.722.100,00	12.429.166.297,00	26.651.335.974,00	54.542.253.813,00	137.734.000,00	68.397.000,00	99.265.609.184,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.007.019.000,00	8.696.975.507,00	10.170.249.570,00	23.273.526.804,28	98.450.000,00	127.672.170,00	43.373.893.051,28
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.153.000,00	5.664.302.608,30	5.544.932.910,00	1.069.120.458,00	13.175.000,00	993.640.800,00	13.294.324.776,30
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	98.411.000,00	3.115.606.962,00	6.030.457.516,00	1.036.959.680,00	-	-	10.281.435.158,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	2.402.527.930,00	11.764.669.986,00	21.450.557.365,00	245.506.741.539,00	884.500.000,00	169.890.000,00	282.178.886.820,00
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	4.514.000,00	3.561.453.234,00	982.964.900,00	441.995.000,00	1.500.000,00	442.100.000,00	5.434.527.134,00
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	6.121.764.089,26	12.286.662.739,99	74.842.108.986,29	8.020.498.505,52	1.500.000,00	179.450.000,00	101.451.984.321,06
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	106.626.000,00	2.336.081.712,00	2.849.271.407,00	-	-	-	5.291.979.119,00
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	823.954.200,00	5.341.582.111,00	25.315.973.438,00	638.261.086,00	144.490.500,00	26.724.500,00	32.290.985.835,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN, DAN KEARSIPAN	-	2.368.798.208,00	4.575.463.500,00	47.818.000,00	1.513.420.160,00	-	8.505.499.868,00
22	DINAS PERIKANAN	1.062.257.750,00	19.219.141.605,00	8.982.755.775,00	7.721.352.050,00	578.020.000,00	-	37.563.527.180,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	4.946.616.169,00	18.006.031.745,00	2.368.050.810,00	892.884.000,00	-	26.213.582.724,00
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	25.763.971.725,70	17.377.266.542,20	493.725.491,00	45.000.000,00	-	43.679.963.758,90
25	BARANG PENGELOLA	61.633.592.625,00	5.330.824.983,00	3.916.995.250,00	110.900.000,00	-	-	70.992.312.858,00
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	5.636.203.060,00	5.828.801.236,00	1.213.563.000,00	13.381.000,00	617.661.000,00	13.309.609.296,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	4.733.978.623,00	9.631.928.750,00	809.308.000,00	-	-	15.175.215.373,00
28	SEKRETARIAT DPRD	80.408.000,00	14.228.243.823,00	43.705.686.291,42	3.207.322.381,00	15.135.000,00	684.950.900,00	61.921.746.395,42
29	SEKRETARIAT DAERAH	3.253.400.000,00	38.979.270.069,00	98.515.340.962,21	41.130.752.124,00	502.051.900,00	-	182.380.815.055,21
30	INSPEKTORAT DAERAH	-	3.377.244.462,00	4.537.073.900,30	521.466.500,00	7.892.200,00	-	8.443.677.062,30
31	KECAMATAN SERUYAN TENGAH	458.075.000,00	2.996.167.117,00	4.741.735.700,00	249.900.000,00	149.150.000,00	-	8.595.027.817,00
32	KECAMATAN DANAU SEMBULUH	122.506.000,00	1.106.246.567,00	3.215.852.150,00	231.950.000,00	8.200.000,00	-	4.684.754.717,00

NO	NAMA SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARIANGAN	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	TOTAL ASET
1	3	4	5	6	7	8	9	10
33	KECAMATAN HANAU	600.300.000,00	1.586.619.977,00	7.062.888.400,00	8.000.000,00	-	-	9.257.808.377,00
34	KECAMATAN SERUYAN HILIR	471.187.682,00	3.398.798.626,00	4.141.031.550,00	306.678.000,00	-	-	8.317.695.858,00
35	KECAMATAN SERUYAN HULU	96.430.000,00	1.942.787.373,00	4.995.729.550,00	16.200.000,00	35.000.000,00	-	7.086.146.923,00
36	KECAMATAN BATU AMPAR	2.791.800,00	1.483.312.010,00	2.154.555.000,00	-	1.500.000,00	-	3.642.158.810,00
37	KECAMATAN SERUYAN RAYA	-	718.016.300,00	1.253.593.800,00	-	-	-	1.971.610.100,00
38	KECAMATAN DANAU SELULUK	78.750.000,00	1.146.244.936,00	3.580.714.300,00	-	1.100.000,00	-	4.806.809.236,00
39	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	671.380.000,00	1.126.924.683,00	1.375.466.250,00	14.125.000,00	71.817.000,00	-	3.259.712.933,00
40	KECAMATAN SULING TAMBUN	45.000,00	1.547.293.507,00	2.333.040.200,00	331.655.000,00	-	-	4.212.033.707,00
41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	208.766.000,00	81.293.027.671,00	9.522.176.835,00	5.936.690.700,00	471.625.000,00	298.595.000,00	97.730.881.206,00
42	BLUD (RSUD KUALA PEMBUANG)	-	6.378.156.792,00	1.253.615.302,00	2.046.236.204,00	-	24.145.000,00	9.702.153.298,00
43	BLUD (RSUD HANAU)	-	-	-	-	-	-	-
44	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	55.715.000,00	9.465.692.918,76	331.526.000,00	-	-	-	9.852.933.918,76
JUMLAH TOTAL		223.764.846.076,26	542.510.733.426,91	1.013.131.619.242,40	3.176.719.117.740,25	119.955.527.396,49	127.499.305.847,68	5.203.581.149.729,99

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	BEBAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BUKU
1	3	4	5	6	7	8
1	DINAS PENDIDIKAN	441.423.380.915,25	103.657.046.641,26	16.643.144.395,53	112.752.900.698,26	328.670.480.216,99
2	DINAS KESEHATAN	184.547.958.856,76	67.525.960.339,50	7.550.864.158,00	75.306.645.927,50	109.241.312.929,26
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA PEMBUANG	82.527.170.019,15	43.368.886.626,21	6.712.811.099,44	48.890.760.810,65	33.636.409.208,50
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU	-	1.481.724.186,00	-	-	-
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.871.940.828.525,44	1.571.299.057.514,82	135.740.391.829,24	1.706.539.784.930,06	1.165.401.043.595,38
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	47.161.449.706,00	21.455.823.883,00	3.741.943.997,00	23.705.018.113,00	23.456.431.593,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4.916.997.384,24	2.636.088.022,24	155.586.717,00	3.061.674.739,24	1.855.322.645,00
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.598.290.270,00	2.738.857.446,00	200.507.839,00	3.168.180.285,00	3.430.109.985,00
9	DINAS SOSIAL	11.701.934.930,00	5.847.689.843,00	287.127.270,00	6.661.876.780,00	5.040.058.150,00
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.110.714.105,00	3.170.685.812,00	229.444.220,00	2.745.667.293,00	3.365.046.812,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.530.855.244,74	3.989.851.851,00	552.621.862,00	4.567.167.913,00	6.963.687.331,74
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	93.622.756.084,00	48.920.710.612,00	4.157.453.844,00	53.266.004.456,00	40.356.751.628,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	42.140.751.881,28	17.910.195.808,00	2.431.380.000,00	20.341.575.808,00	21.799.176.073,28
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.278.355.976,30	6.798.557.979,00	477.833.317,00	7.276.391.296,00	5.001.964.680,30
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.183.024.158,00	4.503.895.599,00	322.540.458,00	4.582.146.057,00	5.600.878.101,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	278.721.968.890,00	49.480.389.206,00	5.854.106.143,00	55.334.495.349,00	223.387.473.541,00
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	4.986.413.134,00	2.881.982.625,00	454.602.134,00	3.163.378.509,00	1.823.034.625,00
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	95.149.270.231,80	19.175.073.611,00	3.793.527.189,75	22.395.464.036,75	72.753.806.195,05
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.185.353.119,00	2.162.604.931,00	236.344.188,00	2.291.572.919,00	2.893.780.200,00
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	31.295.816.635,00	9.460.206.823,00	722.005.996,00	10.182.212.819,00	21.113.603.816,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN, DAN KEARSIPAN	6.992.079.708,00	2.398.776.784,00	312.888.573,00	2.673.225.357,00	4.318.854.351,00
22	DINAS PERIKANAN	35.923.249.430,00	24.560.168.578,00	781.500.149,00	25.048.328.260,00	10.874.921.170,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	25.320.698.724,00	9.278.269.427,00	716.417.216,00	9.994.686.643,00	15.326.012.081,00
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	43.634.963.758,90	21.689.213.853,00	1.900.733.422,00	23.097.235.576,70	20.537.728.182,20
25	BARANG PENGELOLA	9.358.720.233,00	5.124.370.336,00	164.648.895,00	6.461.418.177,00	2.897.302.056,00

NO	NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	BEBAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BUKU
1	3	4	5	6	7	8
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	12.678.567.296,00	6.703.613.522,00	803.571.501,00	7.217.490.951,00	5.461.076.345,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	15.175.215.373,00	6.013.872.529,00	303.173.221,00	6.317.045.750,00	8.858.169.623,00
28	SEKRETARIAT DPRD	61.141.252.495,42	19.628.980.037,00	2.190.677.771,00	21.496.591.332,00	39.644.661.163,42
29	SEKRETARIAT DAERAH	178.625.363.155,21	64.728.546.501,00	5.216.917.626,00	68.572.228.432,00	110.053.134.723,21
30	INSPEKTORAT DAERAH	8.435.784.862,30	3.665.475.894,00	374.891.845,00	4.058.923.101,00	4.376.861.761,30
31	KECAMATAN SERUYAN TENGAH	7.987.802.817,00	2.929.334.851,00	439.225.350,00	3.368.560.201,00	4.619.242.616,00
32	KECAMATAN DANAU SEMBULUH	4.554.048.717,00	1.947.670.884,00	156.432.474,00	1.780.900.977,00	2.773.147.740,00
33	KECAMATAN HANAU	8.657.508.377,00	2.915.136.559,00	282.936.070,00	3.198.072.629,00	5.459.435.748,00
34	KECAMATAN SERUYAN HILIR	7.846.508.176,00	3.767.502.404,00	460.686.849,00	3.787.436.109,00	4.059.072.067,00
35	KECAMATAN SERUYAN HULU	6.954.716.923,00	2.294.463.752,00	214.844.088,00	2.514.373.316,00	4.440.343.607,00
36	KECAMATAN BATU AMPAR	3.637.867.010,00	1.702.191.089,00	168.411.359,00	1.870.602.448,00	1.767.264.562,00
37	KECAMATAN SERUYAN RAYA	1.971.610.100,00	848.626.181,00	67.369.212,00	915.995.393,00	1.055.614.707,00
38	KECAMATAN DANAU SELULUK	4.726.959.236,00	1.709.513.379,00	133.065.917,00	1.842.579.296,00	2.884.379.940,00
39	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	2.516.515.933,00	1.153.845.410,00	68.332.432,00	1.222.177.842,00	1.294.338.091,00
40	KECAMATAN SULING TAMBUN	4.211.988.707,00	2.147.870.825,00	197.459.831,00	1.656.744.799,00	2.555.243.908,00
41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	96.751.895.206,00	26.421.128.578,00	11.828.368.354,00	37.402.673.002,00	59.349.222.204,00
42	BLUD (RSUD KUALA PEMBUANG)	9.678.008.298,00	805.343.786,00	1.126.328.825,00	1.931.672.611,00	7.746.335.687,00
43	BLUD (RSUD HANAU)	-	157.924.910,00	338.873.281,00	-	-
44	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	9.797.218.918,76	8.654.777.402,76	500.957.939,00	9.155.735.341,76	641.483.577,00
JUMLAH TOTAL		4.808.601.833.520,55	2.209.711.906.830,79	219.012.948.856,96	2.411.817.616.283,92	2.396.784.217.236,63

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	BEBAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BUKU
1	3	4	5	6	7	8
1	DINAS PENDIDIKAN	57.332.394.300,72	39.171.354.820,26	7.551.555.938,53	39.171.354.820,26	18.161.039.480,46
2	DINAS KESEHATAN	72.163.218.930,65	47.082.245.267,50	5.234.853.790,00	52.546.920.487,50	19.616.298.443,15
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA PEMBUANG	58.867.398.967,55	38.633.392.027,21	6.228.826.084,44	43.671.281.196,65	15.196.117.770,90
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU	0,00	1.481.724.186,00	-	-	-
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	31.662.203.758,00	19.470.737.059,00	2.156.259.058,00	21.945.486.117,00	9.716.717.641,00
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	3.790.120.732,00	3.452.401.969,00	279.874.301,00	2.239.526.503,00	1.550.594.229,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.491.247.284,24	1.877.530.641,24	111.682.543,00	2.259.213.184,24	232.034.100,00
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.430.513.970,00	1.744.772.300,00	121.498.975,00	2.095.086.275,00	335.427.695,00
9	DINAS SOSIAL	2.817.777.580,00	1.697.479.566,00	172.972.834,00	2.397.512.067,00	420.265.513,00
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.206.299.603,00	2.009.789.143,00	138.447.698,00	1.493.774.102,00	712.525.501,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.779.475.938,00	2.819.104.419,00	424.250.691,00	3.243.355.110,00	1.536.120.828,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	12.429.166.297,00	7.688.209.507,00	569.793.851,00	8.445.843.358,00	3.983.322.939,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.696.975.507,00	4.473.379.659,00	552.855.482,00	5.026.235.141,00	3.670.740.366,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.664.302.608,30	4.712.823.679,00	333.767.530,00	5.046.591.209,00	617.711.399,30
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.115.606.962,00	2.698.450.324,00	153.211.011,00	2.607.371.335,00	508.235.627,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	11.764.669.986,00	9.847.475.068,00	490.370.083,00	10.337.845.151,00	1.426.824.835,00
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	3.561.453.234,00	2.460.289.014,00	390.743.336,00	2.677.826.100,00	883.627.134,00
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	12.286.662.739,99	6.194.274.864,00	1.568.187.487,75	7.189.325.587,75	5.097.337.152,24
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.336.081.712,00	1.861.422.571,00	183.408.120,00	1.937.454.491,00	398.627.221,00
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	5.341.582.111,00	4.399.317.640,00	204.756.299,00	4.604.073.939,00	737.508.172,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN, DAN KEARSIPAN	2.368.798.208,00	1.480.037.834,00	232.556.609,00	1.674.154.443,00	694.643.765,00
22	DINAS PERIKANAN	19.219.141.605,00	18.031.924.065,00	405.086.951,00	18.143.670.549,00	1.075.471.056,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.946.616.169,00	3.624.210.597,00	219.524.412,00	3.843.735.009,00	1.102.881.160,00
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	25.763.971.725,70	17.977.790.496,00	1.559.781.041,00	19.044.859.838,70	6.719.111.887,00

NO	NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	BEBAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BUKU
1	3	4	5	6	7	8
25	BARANG PENGELOLA	5.330.824.983,00	3.968.520.516,00	89.686.057,00	5.269.930.759,00	60.894.224,00
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.636.203.060,00	4.430.306.107,00	242.148.513,00	4.385.260.620,00	1.250.942.440,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.733.978.623,00	4.459.713.745,00	70.432.368,00	4.530.146.113,00	203.832.510,00
28	SEKRETARIAT DPRD	14.228.243.823,00	9.591.369.811,00	1.304.049.938,00	10.572.353.273,00	3.655.890.550,00
29	SEKRETARIAT DAERAH	38.979.270.069,00	28.955.233.989,00	2.515.882.451,00	30.284.194.464,00	8.695.075.605,00
30	INSPEKTORAT DAERAH	3.377.244.462,00	2.488.481.007,00	245.271.634,00	2.752.308.003,00	624.936.459,00
31	KECAMATAN SERUYAN TENGAH	2.996.167.117,00	1.765.044.560,00	345.802.621,00	2.110.847.181,00	885.319.936,00
32	KECAMATAN DANAU SEMBULUH	1.106.246.567,00	1.148.396.441,00	84.822.359,00	910.016.419,00	196.230.148,00
33	KECAMATAN HANAU	1.586.619.977,00	1.279.609.131,00	144.303.933,00	1.423.913.064,00	162.706.913,00
34	KECAMATAN SERUYAN HILIR	3.398.798.626,00	2.692.265.149,00	365.867.723,00	2.617.379.728,00	781.418.898,00
35	KECAMATAN SERUYAN HULU	1.942.787.373,00	1.297.499.880,00	119.920.290,00	1.422.485.646,00	520.301.727,00
36	KECAMATAN BATU AMPAR	1.483.312.010,00	1.101.130.217,00	128.078.445,00	1.229.208.662,00	254.103.348,00
37	KECAMATAN SERUYAN RAYA	718.016.300,00	537.333.732,00	43.496.661,00	580.830.393,00	137.185.907,00
38	KECAMATAN DANAU SELULUK	1.146.244.936,00	946.867.037,00	61.902.536,00	1.008.769.573,00	137.475.363,00
39	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	1.126.924.683,00	1.002.511.304,00	28.858.815,00	1.031.370.119,00	95.554.564,00
40	KECAMATAN SULING TAMBUN	1.547.293.507,00	1.501.469.772,00	124.463.527,00	937.347.442,00	609.946.065,00
41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	81.293.027.671,00	26.219.011.251,00	11.523.929.638,00	36.896.116.959,00	44.396.910.712,00
42	BLUD (RSUD KUALA PEMBUANG)	6.378.156.792,00	791.286.906,00	967.302.658,00	1.758.589.564,00	4.619.567.228,00
43	BLUD (RSUD HANAU)	-	139.726.295,00	293.376.745,00	-	-
44	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	9.465.692.918,76	855319602,76	494.327.419,00	9.049.647.021,76	416.045.897,00
JUMLAH TOTAL		542.510.733.426,91	347.761.233.168,97	48.478.188.456,72	380.413.211.017,86	162.097.522.409,05

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	BEBAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BUKU
1	3	4	5	6	7	8
1	DINAS PENDIDIKAN	381.800.434.514,53	63.776.206.788,00	9.005.645.442,00	72.786.117.830,00	309.014.316.684,53
2	DINAS KESEHATAN	98.701.454.726,11	18.380.828.848,00	1.880.161.123,00	20.260.989.971,00	78.440.464.755,11
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA PEMBUANG	22.685.357.846,60	4.291.538.386,00	455.777.657,00	4.747.316.043,00	17.938.041.803,60
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU	0,00	-	-	-	-
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	47.718.806.967,00	7.924.592.190,00	889.276.774,00	8.826.389.534,00	38.892.417.433,00
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	5.621.681.174,00	798.104.751,00	106.135.500,00	904.240.251,00	4.717.440.923,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.253.884.100,00	586.691.381,00	43.904.174,00	630.595.555,00	1.623.288.545,00
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.849.997.800,00	921.441.297,00	69.604.902,00	991.046.199,00	2.858.951.601,00
9	DINAS SOSIAL	5.710.789.250,00	1.071.097.383,00	106.638.268,00	1.177.735.651,00	4.533.053.599,00
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.161.587.502,00	804.317.921,00	59.885.457,00	864.203.378,00	2.297.384.124,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.750.504.306,74	1.170.514.100,00	128.342.005,00	1.323.550.305,00	5.426.954.001,74
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	26.651.335.974,00	5.306.748.407,00	526.153.288,00	5.832.901.695,00	20.818.434.279,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10.170.249.570,00	2.072.853.351,00	207.274.397,00	2.280.127.748,00	7.890.121.822,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.544.932.910,00	1.168.695.846,00	103.409.200,00	1.272.105.046,00	4.272.827.864,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.030.457.516,00	1.227.821.042,00	116.932.030,00	1.344.753.072,00	4.685.704.444,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	21.450.557.365,00	4.748.282.656,00	398.313.442,00	5.146.596.098,00	16.303.961.267,00
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	982.964.900,00	211.060.611,00	19.659.298,00	230.719.909,00	752.244.991,00
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	74.842.108.986,29	10.833.409.026,00	1.439.510.891,00	12.272.919.917,00	62.569.189.069,29
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.849.271.407,00	301.182.360,00	52.936.068,00	354.118.428,00	2.495.152.979,00
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	25.315.973.438,00	4.949.725.905,00	491.074.935,00	5.440.800.840,00	19.875.172.598,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN, DAN KEARSIPAN	4.575.463.500,00	915.931.207,00	79.136.514,00	995.067.721,00	3.580.395.779,00
22	DINAS PERIKANAN	8.982.755.775,00	1.993.134.367,00	178.112.207,00	2.171.246.574,00	6.811.509.201,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.006.031.745,00	4.128.914.716,00	296.042.480,00	4.424.957.196,00	13.581.074.549,00
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17.377.266.542,20	3.408.674.264,00	322.401.366,00	3.731.075.630,00	13.646.190.912,20
25	BARANG PENGELOLA	3.916.995.250,00	1.044.949.820,00	74.962.838,00	1.080.587.418,00	2.836.407.832,00

NO	NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	BEBAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BUKU
1	3	4	5	6	7	8
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.828.801.236,00	1.502.307.415,00	118.859.988,00	1.618.667.331,00	4.210.133.905,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.631.928.750,00	1.193.663.889,00	185.298.173,00	1.378.962.062,00	8.252.966.688,00
28	SEKRETARIAT DPRD	43.705.686.291,42	8.639.186.627,00	752.004.009,00	9.391.190.636,00	34.314.495.655,42
29	SEKRETARIAT DAERAH	98.515.340.962,21	22.864.255.059,00	1.657.400.773,00	24.335.342.113,00	74.179.998.849,21
30	INSPEKTORAT DAERAH	4.537.073.900,30	911.778.797,00	83.048.995,00	994.827.792,00	3.542.246.108,30
31	KECAMATAN SERUYAN TENGAH	4.741.735.700,00	970.614.041,00	91.855.229,00	1.062.469.270,00	3.679.266.430,00
32	KECAMATAN DANAU SEMBULUH	3.215.852.150,00	743.816.443,00	61.179.615,00	804.996.058,00	2.410.856.092,00
33	KECAMATAN HANAU	7.062.888.400,00	1.634.087.428,00	138.472.137,00	1.772.559.565,00	5.290.328.835,00
34	KECAMATAN SERUYAN HILIR	4.141.031.550,00	955.280.397,00	90.254.676,00	1.045.535.073,00	3.095.496.477,00
35	KECAMATAN SERUYAN HULU	4.995.729.550,00	993.021.122,00	94.551.048,00	1.087.572.170,00	3.908.157.380,00
36	KECAMATAN BATU AMPAR	2.154.555.000,00	601.060.872,00	40.332.914,00	641.393.786,00	1.513.161.214,00
37	KECAMATAN SERUYAN RAYA	1.253.593.800,00	311.292.449,00	23.872.551,00	335.165.000,00	918.428.800,00
38	KECAMATAN DANAU SELULUK	3.580.714.300,00	762.646.342,00	71.163.381,00	833.809.723,00	2.746.904.577,00
39	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	1.375.466.250,00	146.566.919,00	39.120.492,00	185.687.411,00	1.189.778.839,00
40	KECAMATAN SULING TAMBUN	2.333.040.200,00	515.424.928,00	46.660.804,00	562.085.732,00	1.770.954.468,00
41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.522.176.835,00	202.117.327,00	254.966.293,00	457.083.620,00	9.065.093.215,00
42	BLUD (RSUD KUALA PEMBUANG)	1.253.615.302,00	8.546.047,00	107.198.365,00	115.744.412,00	1.137.870.890,00
43	BLUD (RSUD HANAU)	-	-	-	-	-
44	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	331.526.000,00	99457800,00	6.630.520,00	106.088.320,00	225.437.680,00
JUMLAH TOTAL		1.013.131.619.242,40	185.091.840.525,00	20.914.160.219,00	205.819.342.083,00	807.312.277.159,40

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	BEBAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BUKU
1	3	4	5	6	7	8
1	DINAS PENDIDIKAN	2.290.552.100,00	709.485.033,00	85.943.015,00	795.428.048,00	1.495.124.052,00
2	DINAS KESEHATAN	13.683.285.200,00	2.062.886.224,00	435.849.245,00	2.498.735.469,00	11.184.549.731,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA PEMBUANG	974.413.205,00	443.956.213,00	28.207.358,00	472.163.571,00	502.249.634,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU	0,00	-	-	-	-
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.716.319.454.689,45	1.491.068.480.091,82	127.689.458.333,24	1.617.927.263.441,06	1.098.392.191.248,39
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	37.749.647.800,00	17.205.317.163,00	3.355.934.196,00	20.561.251.359,00	17.188.396.441,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	171.866.000,00	171.866.000,00	-	171.866.000,00	-
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	317.778.500,00	72.643.849,00	9.403.962,00	82.047.811,00	235.730.689,00
9	DINAS SOSIAL	3.173.368.100,00	3.079.112.894,00	7.516.168,00	3.086.629.062,00	86.739.038,00
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	742.827.000,00	356.578.748,00	31.111.065,00	387.689.813,00	355.137.187,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	875.000,00	233.332,00	29.166,00	262.498,00	612.502,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	54.542.253.813,00	35.925.752.698,00	3.061.506.705,00	38.987.259.403,00	15.554.994.410,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	23.273.526.804,28	11.363.962.798,00	1.671.250.121,00	13.035.212.919,00	10.238.313.885,28
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.069.120.458,00	917.038.454,00	40.656.587,00	957.695.041,00	111.425.417,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.036.959.680,00	577.624.233,00	52.397.417,00	630.021.650,00	406.938.030,00
16	DINAS PERHUBUNGAN	245.506.741.539,00	34.884.631.482,00	4.965.422.618,00	39.850.054.100,00	205.656.687.439,00
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	441.995.000,00	210.633.000,00	44.199.500,00	254.832.500,00	187.162.500,00
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	8.020.498.505,52	2.147.389.721,00	785.828.811,00	2.933.218.532,00	5.087.279.973,52
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	638.261.086,00	111.163.278,00	26.174.762,00	137.338.040,00	500.923.046,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN, DAN KEARSIPAN	47.818.000,00	2.807.743,00	1.195.450,00	4.003.193,00	43.814.807,00
22	DINAS PERIKANAN	7.721.352.050,00	4.535.110.146,00	198.300.991,00	4.733.411.137,00	2.987.940.913,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.368.050.810,00	1.525.144.114,00	200.850.324,00	1.725.994.438,00	642.056.372,00
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	493.725.491,00	302.749.093,00	18.551.015,00	321.300.108,00	172.425.383,00
25	BARANG PENGELOLA	110.900.000,00	110.900.000,00	-	110.900.000,00	-

NO	NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	BEBAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BUKU
1	3	4	5	6	7	8
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.213.563.000,00	771.000.000,00	442.563.000,00	1.213.563.000,00	-
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	809.308.000,00	360.494.895,00	47.442.680,00	407.937.575,00	401.370.425,00
28	SEKRETARIAT DPRD	3.207.322.381,00	1.398.423.599,00	134.623.824,00	1.533.047.423,00	1.674.274.958,00
29	SEKRETARIAT DAERAH	41.130.752.124,00	12.909.057.453,00	1.043.634.402,00	13.952.691.855,00	27.178.060.269,00
30	INSPEKTORAT DAERAH	521.466.500,00	265.216.090,00	46.571.216,00	311.787.306,00	209.679.194,00
31	KECAMATAN SERUYAN TENGAH	249.900.000,00	193.676.250,00	1.567.500,00	195.243.750,00	54.656.250,00
32	KECAMATAN DANAU SEMBULUH	231.950.000,00	55.458.000,00	10.430.500,00	65.888.500,00	166.061.500,00
33	KECAMATAN HANAU	8.000.000,00	1.440.000,00	160.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00
34	KECAMATAN SERUYAN HILIR	306.678.000,00	119.956.858,00	4.564.450,00	124.521.308,00	182.156.692,00
35	KECAMATAN SERUYAN HULU	16.200.000,00	3.942.750,00	372.750,00	4.315.500,00	11.884.500,00
36	KECAMATAN BATU AMPAR	-	-	-	-	-
37	KECAMATAN SERUYAN RAYA	-	-	-	-	-
38	KECAMATAN DANAU SELULUK	-	-	-	-	-
39	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	14.125.000,00	4.767.187,00	353.125,00	5.120.312,00	9.004.688,00
40	KECAMATAN SULING TAMBUN	331.655.000,00	130.976.125,00	26.335.500,00	157.311.625,00	174.343.375,00
41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.936.690.700,00	-	49.472.423,00	49.472.423,00	5.887.218.277,00
42	BLUD (RSUD KUALA PEMBUANG)	2.046.236.204,00	5.510.833,00	51.827.802,00	57.338.635,00	1.988.897.569,00
43	BLUD (RSUD HANAU)	-	18.198.615,00	45.496.536,00	-	-
44	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	-	0,00	-	-	-
JUMLAH TOTAL		3.176.719.117.740,25	1.624.023.584.962,82	144.615.202.517,24	1.767.744.417.345,06	1.408.974.700.395,19

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	BEBAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BUKU
1	3	4	5	6	7	8
1	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA PEMBUANG	-	-	-	-	-
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU	0,00	-	-	-	-
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	76.240.363.110,99	52.835.248.174,00	5.005.397.664,00	57.840.645.838,00	18.399.717.272,99
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	-	-	-	-	-
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	-	-	-	-
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-
9	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	-	-	-	-
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-
16	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	-	-
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-
21	DINAS PERPUSTAKAAN, DAN KEARSIPAN	-	-	-	-	-
22	DINAS PERIKANAN	-	-	-	-	-
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	-
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-
25	BARANG PENGELOLA	-	-	-	-	-

NO	NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	BEBAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BUKU
1	3	4	5	6	7	8
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-
28	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-
29	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-
30	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-	-
31	KECAMATAN SERUYAN TENGAH	-	-	-	-	-
32	KECAMATAN DANAU SEMBULUH	-	-	-	-	-
33	KECAMATAN HANAU	-	-	-	-	-
34	KECAMATAN SERUYAN HILIR	-	-	-	-	-
35	KECAMATAN SERUYAN HULU	-	-	-	-	-
36	KECAMATAN BATU AMPAR	-	-	-	-	-
37	KECAMATAN SERUYAN RAYA	-	-	-	-	-
38	KECAMATAN DANAU SELULUK	-	-	-	-	-
39	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	-	-	-	-	-
40	KECAMATAN SULING TAMBUN	-	-	-	-	-
41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-
42	BLUD (RSUD KUALA PEMBUANG)	-	-	-	-	-
43	BLUD (RSUD HANAU)	-	-	-	-	-
44	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	-	0,00	-	-	-
JUMLAH TOTAL		76.240.363.110,99	52.835.248.174,00	5.005.397.664,00	57.840.645.838,00	18.399.717.272,99

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TIDAK BERWUJUD
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	BEBAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BUKU
1	3	4	5	6	7	8
1	DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	199.737.840,00	24.967.230,00	49.934.460,00	74.901.690,00	124.836.150,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA PEMBUANG	-	-	-	-	-
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU	0,00	-	-	-	-
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.880.393.900,00	1.860.770.172,00	183.084.034,00	2.043.854.206,00	2.836.539.694,00
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	-	-	-	-	-
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	-	-	-	-
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-
9	DINAS SOSIAL	-	-	-	-	-
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	235.204.000,00	125.434.574,00	9.408.160,00	134.842.734,00	100.361.266,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	395.180.000,00	109.176.833,00	15.823.617,00	125.000.450,00	270.179.550,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-
16	DINAS PERHUBUNGAN	938.289.750,00	382.298.157,00	67.152.090,00	449.450.247,00	488.839.503,00
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	-	-	-
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-	-
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-	-
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-
21	DINAS PERPUSTAKAAN, DAN KEARSIPAN	57.100.000,00	31.150.000,00	1.621.875,00	32.771.875,00	24.328.125,00
22	DINAS PERIKANAN	852.238.500,00	230.331.296,00	34.089.540,00	264.420.836,00	587.817.664,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.397.703.000,00	600.555.943,00	40.024.120,00	640.580.063,00	757.122.937,00
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	583.010.000,00	495.030.625,00	87.979.375,00	583.010.000,00	-
25	BARANG PENGELOLA	-	-	-	-	-

NO	NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	BEBAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BUKU
1	3	4	5	6	7	8
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	480.509.000,00	195.509.000,00	11.875.000,00	207.384.000,00	273.125.000,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	352.978.000,00	336.617.792,00	16.360.208,00	352.978.000,00	-
28	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-
29	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-	-
30	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-	-
31	KECAMATAN SERUYAN TENGAH	-	-	-	-	-
32	KECAMATAN DANAU SEMBULUH	-	-	-	-	-
33	KECAMATAN HANAU	-	-	-	-	-
34	KECAMATAN SERUYAN HILIR	-	-	-	-	-
35	KECAMATAN SERUYAN HULU	-	-	-	-	-
36	KECAMATAN BATU AMPAR	-	-	-	-	-
37	KECAMATAN SERUYAN RAYA	-	-	-	-	-
38	KECAMATAN DANAU SELULUK	-	-	-	-	-
39	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	564.400.000,00	152.054.612,00	30.576.880,00	182.631.492,00	381.768.508,00
40	KECAMATAN SULING TAMBUN	-	-	-	-	-
41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	840.675.000,00	437.851.563,00	210.168.750,00	648.020.313,00	192.654.687,00
42	BLUD (RSUD KUALA PEMBUANG)	-	-	-	-	-
43	BLUD (RSUD HANAU)	-	-	-	-	-
44	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	-	0,00	-	-	-
JUMLAH TOTAL		11.777.418.990,00	4.981.747.797,00	758.098.109,00	5.739.845.906,00	6.037.573.084,00

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	BEBAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BUKU
1	3	4	5	6	7	8
1	DINAS PENDIDIKAN	2.172.506.624,00	2.142.405.046,00	-	2.142.405.046,00	30.101.578,00
2	DINAS KESEHATAN	3.492.431.588,00	3.492.152.588,00	-	3.492.152.588,00	279.000,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA PEMBUANG	3.116.533.345,00	546.149.685,00	-	1.704.201.767,00	1.412.331.578,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU	0,00	-	-	-	-
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	29.508.665.673,00	12.827.618.758,00	-	12.723.640.841,00	16.785.024.832,00
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1.431.793.500,00	138.225.750,00	-	1.374.151.517,00	57.641.983,00
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	65.655.000,00	65.655.000,00	-	65.655.000,00	-
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	822.770.060,00	776.866.060,00	-	776.866.060,00	45.904.000,00
9	DINAS SOSIAL	135.664.000,00	62.445.000,00	-	134.696.166,00	967.834,00
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.073.037.605,00	18.479.000,00	-	941.031.215,00	132.006.390,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	231.385.800,00	298.875.384,00	-	229.875.384,00	1.510.416,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	5.569.786.450,00	2.968.180.300,00	-	3.049.150.300,00	2.520.636.150,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	136.769.600,00	119.023.638,00	-	111.236.138,00	25.533.462,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	297.605.400,00	60.675.400,00	-	297.605.400,00	-
16	DINAS PERHUBUNGAN	10.009.380.027,00	4.096.498.484,00	-	4.096.498.484,00	5.912.881.543,00
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	180.506.250,00	7.300.000,00	-	180.506.250,00	-
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	728.969.083,00	191.107.052,00	-	697.363.357,00	31.605.726,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	103.582.200,00	-	-	103.386.200,00	196.000,00
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	462.247.290,00	455.949.843,00	-	414.723.843,00	47.523.447,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN, DAN KEARSIPAN	196.373.150,00	157.809.000,00	-	196.249.000,00	124.150,00
22	DINAS PERIKANAN	2.614.377.485,00	2.006.315.762,00	-	2.299.656.229,00	314.721.256,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	135.576.500,00	135.576.500,00	-	135.576.500,00	-
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.683.523.904,30	1.498.561.255,00	-	2.160.180.609,30	523.343.295,00
25	BARANG PENGELOLA	2.915.035.270,00	2.782.146.627,00	-	2.771.983.285,00	143.051.985,00

NO	NAMA SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2022	BEBAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BUKU
1	3	4	5	6	7	8
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	298.883.750,00	240.356.112,00	-	298.735.112,00	148.638,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	177.253.400,00	177.253.400,00	-	177.253.400,00	-
28	SEKRETARIAT DPRD	863.075.583,00	1.360.277.667,00	-	861.912.667,00	1.162.916,00
29	SEKRETARIAT DAERAH	3.870.272.966,00	3.434.953.333,00	-	3.687.933.833,00	182.339.133,00
30	INSPEKTORAT DAERAH	281.988.770,00	16.162.500,00	-	268.892.138,00	13.096.632,00
31	KECAMATAN SERUYAN TENGAH	-	-	-	-	-
32	KECAMATAN DANAU SEMBULUH	1.393.666.700,00	477.626.148,00	-	800.828.529,00	592.838.171,00
33	KECAMATAN HANAU	563.696.200,00	298.179.142,00	-	298.179.142,00	265.517.058,00
34	KECAMATAN SERUYAN HILIR	419.135.011,00	-	-	419.054.177,00	80.834,00
35	KECAMATAN SERUYAN HULU	49.800.000,00	49.800.000,00	-	49.800.000,00	-
36	KECAMATAN BATU AMPAR	9.300.000,00	-	-	-	9.300.000,00
37	KECAMATAN SERUYAN RAYA	75.580.000,00	106.375.925,00	-	75.580.000,00	-
38	KECAMATAN DANAU SELULUK	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00
39	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	61.170.000,00	45.235.000,00	-	45.235.000,00	15.935.000,00
40	KECAMATAN SULING TAMBUN	738.857.000,00	-	-	693.651.333,00	45.205.667,00
41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	58.663.150,00	60.223.678,00	-	56.704.824,00	1.958.326,00
42	BLUD (RSUD KUALA PEMBUANG)	-	-	-	-	-
43	BLUD (RSUD HANAU)	-	-	-	-	-
44	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	33.700.000,00	33700000,00	-	33.700.000,00	-
JUMLAH TOTAL		76.983.218.334,30	41.148.159.037,00	-	47.866.251.334,30	29.116.967.000,00